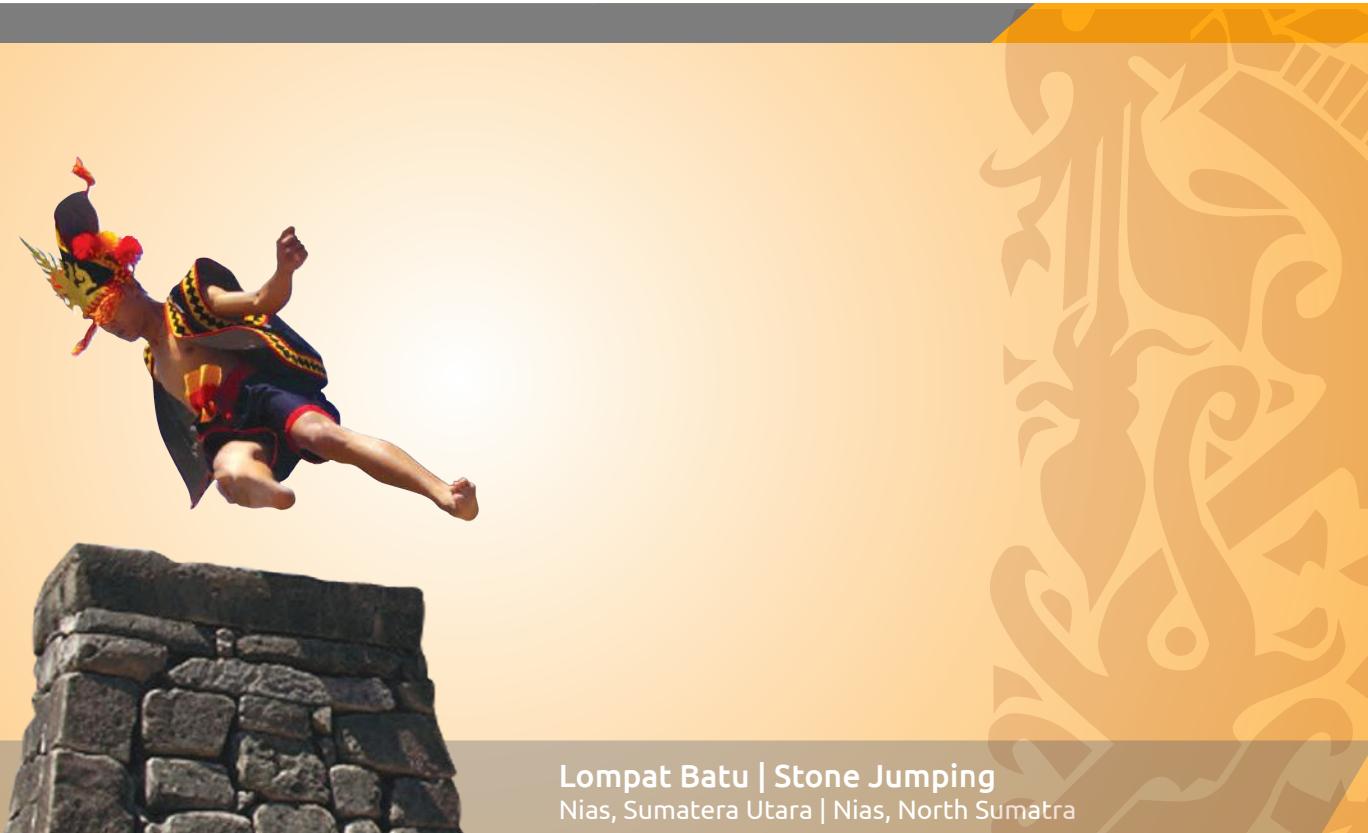




# Advancing With Confidence

Annual Report 2013  
PT Indonesia Infrastructure Finance





**Lompat Batu | Stone Jumping**  
Nias, Sumatera Utara | Nias, North Sumatra

## Kisah Sampul | Cover Story

Tradisi lompat batu di Nias merupakan ujian mental dan fisik bagi pemuda Nias sebelum mereka diizinkan untuk dapat ikut serta dalam peperangan atau melamar seorang gadis. Seorang pemuda yang berhasil lolos dari ritual lompat batu ini dianggap cukup dewasa untuk memasuki tahap kehidupan berikutnya. Saat ini PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) telah bertumbuh menjadi sebuah lembaga keuangan yang kuat. Tahun ini, IIF bergerak maju dengan percaya diri, membuat sebuah lompatan strategis yang memungkinkannya masuk ke dalam industri pembiayaan yang semakin kompetitif di Indonesia.

The stone jumping tradition of Nias is a mental and physical test for Nias youth before they are allowed to take part in a battle or propose to a girl. A young man who has successfully passed the stone jumping ritual is considered mature enough to step into the next stage of life. Currently, PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) has grown into a strong financial institution. This year, IIF is advancing with confidence by making a strategic jump that enables it to take another step in the increasingly competitive financing industry in Indonesia.

# Daftar Isi | Contents

<b>Sekilas IIF   IIF in Brief</b>	<b>6</b>
Visi dan Misi   Vision and Mission	8
Produk dan Layanan   Products and Services	9
Komposisi Pemegang Saham   Shareholding Composition	10
Struktur Organisasi   Organizational Structure	11
Ikhtisar Keuangan   Financial Highlights	12
Peristiwa Penting   Event Highlights	15
<b>Laporan Komisaris   Board of Commissioners Report</b>	<b>18</b>
Profil Komisaris   Commissioner Profiles	22
<b>Laporan Direksi   Board of Directors Report</b>	<b>26</b>
Profil Direksi   Director Profiles	34



<b>Analisis dan Pembahasan Manajemen   Management</b>	<b>39</b>
Discussion and Analysis	
Tinjauan Operasional   Operational Review	39
Analisa Keuangan   Financial Review	50
<b>Tata Kelola Perusahaan   Good Corporate Governance</b>	<b>67</b>
<b>Memperkuat Sumber Daya Manusia   Strengthening Human Resources</b>	<b>108</b>
<b>Menjunjung Prinsip Berkelanjutan   Upholding Sustainability Principles</b>	<b>113</b>
Laporan Keuangan   Financial Report	119



PT Indonesia Infrastructure Finance  
The Energy Building, 15th Floor, Sudirman Central Business District, Lot. 11A  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia  
Phone: 62-21-2991 5060, Fax : 62-21-2991 5061  
Email: [info@iif.co.id](mailto:info@iif.co.id)  
Website: [www.iif.co.id](http://www.iif.co.id)

## Katalisator Pembangunan Infrastruktur | A Catalyst of Infrastructure Development



Dengan dukungan modal yang kuat, IIF memiliki landasan yang kokoh untuk berperan sebagai katalisator pada pembiayaan proyek infrastruktur tahap *greenfield* dan memulai pasar baru untuk pengembangan infrastruktur.

Supported by a strong capital base, IIF is well positioned to act as a catalyst to finance greenfield infrastructure projects and usher in a new market for infrastructure development.

PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) didirikan tanggal 15 Januari 2010 sebagai lembaga keuangan non-bank swasta. IIF didirikan oleh Pemerintah Indonesia dan sejumlah badan multilateral, dengan izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-439/KM.10/2010 tanggal 6 Agustus 2010, dengan bidang

PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) was established on 15 January 2010 as a private non-bank financial institution. IIF was established by the Government of Indonesia and multilateral agencies, whose licence as an infrastructure financing company was provided through the Minister of Finance Decree No. KEP- 439/Km.10/2010 dated 6 August 2010, whereby the business is regulated under

usaha yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 100/2009. Pendirian IIF merupakan inisiatif strategis Pemerintah Indonesia bersama mitra pembangunannya untuk mengatasi hambatan arus investasi swasta di sektor infrastruktur.

IIF menjembatani pembiayaan infrastruktur di Indonesia melalui penyediaan dana pinjaman jangka panjang dalam bentuk pinjaman senior dan *mezzanine*, serta produk non-pinjaman seperti penjaminan dan layanan lainnya untuk proyek infrastruktur. Didukung oleh modal yang kuat dari para pemegang saham dan pinjaman subordinasi dengan jangka waktu 25 tahun dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, IIF memiliki landasan kokoh untuk membiayai proyek infrastruktur tahap *greenfield*, dan menjadi sumber pembiayaan ulang untuk proyek infrastruktur tahap *brownfield*.

Selain itu, IIF memiliki tujuan dan tanggung jawab khusus sebagai agen dan katalisator pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan secara aktif memberikan masukan dan dukungan kepada Pemerintah mengenai kebijakan terkait infrastruktur, dan khususnya memberikan jasa konsultasi kepada sektor publik untuk pengadaan jasa infrastruktur yang menggunakan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Sesuai dengan tujuan ini, IIF bertekad untuk menjadi pusat keahlian dan ketrampilan dalam pengembangan dan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang layak secara komersial, termasuk proyek-proyek yang menggunakan skema KPS.

IIF mengikuti sejumlah praktik terbaik yang berstandar internasional dalam penerapan perlindungan sosial dan lingkungan, prinsip tata kelola perusahaan, dan kode etik yang memberikan jaminan bagi pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan.

the Minister of Finance of the Republic of Indonesia's Regulation (PMK) No. 100/2009. The establishment of IIF is a key strategic initiative by the Government of Indonesia and its development partners to address the constraints of private investment in infrastructure.

IIF fills the key gap for infrastructure financing in Indonesia by providing long-term fund-based products such as senior and mezzanine loans, as well as non-fund-based products such as guarantees and fee-based services for infrastructure projects. Supported by its strong capital base from Shareholders and 25-year subordinated loan-on-lending facilities from the World Bank and the Asian Development Bank, IIF is well positioned to finance greenfield infrastructure projects and provide a sustainable source of refinance for brownfield infrastructure projects.

Furthermore, IIF has a unique development objective and responsibility as an agent and catalyst of sustainable infrastructure development by actively providing advice and support to the government on infrastructure policy issues and specifically providing transaction advisory services to public sector clients for the procurement of infrastructure services under the Public Private Partnership (PPP) model. In line with this objective, IIF is determined to emerge as a national repository of experience and skills related to the development and financing of commercially viable infrastructure projects, including those based on PPP model.

IIF complies with international-standard best practices in social and environmental safeguards, in addition to corporate governance and codes of conduct, which provide assurances for sustainable infrastructure development.

## 08 Visi dan Misi | Vision and Mission

Berbekal pada keahlian dan manajemen yang profesional, serta komitmen dari Pemerintah dan sejumlah lembaga keuangan internasional di bidang pembangunan infrastruktur, IIF memiliki landasan yang kokoh untuk mendukung para sponsor proyek dan bekerja sama dengan lembaga keuangan lainnya dalam memberikan jasa advisory, pembiayaan jangka panjang, dan sejumlah instrumen keuangan lainnya kepada proyek yang tersusun dengan baik dan layak untuk dilaksanakan.

Building on our strong expertise, professional management and the commitment from Government and international financial institutions in infrastructure development, IIF is well placed to support project sponsors as well as collaborate with other financial institutions in providing advisory services, extending long-term financing and a range of other financial instruments for well-conceived and viable infrastructure projects.

### Visi | Vision

Menyediakan modal dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dan menjadi mitra bagi sponsor proyek infrastruktur, pasar keuangan dan Pemerintah Indonesia dalam mempercepat pembangunan proyek infrastruktur yang digagas dengan baik, dan layak secara komersil.

To provide capital for infrastructure development in Indonesia and to work closely with infrastructure sponsors, the financial sector and the Government of Indonesia to accelerate the construction of well-conceived, commercially viable infrastructure projects.

### Misi | Mission

- Menjamin terceminnya kepentingan pelaku investasi di dalam struktur kontrak dan konsesi;
- Mempelopori ketersediaan beragam instrumen pembiayaan yang tepat bagi proyek infrastruktur;
- Menjadi mitra bagi lembaga keuangan dan lembaga investasi nasional lainnya dalam menyalurkan dana masyarakat ke dalam pembangunan infrastruktur jangka panjang di Indonesia.
- To ensure investors' needs are reflected in contractual structures and concessions;
- To lead in offering a mix of financing instruments appropriate for infrastructure;
- To work with Indonesia's financial institutions and other institutional investors to channel the nation's savings into the long-term development of Indonesia's infrastructure.

## Produk Investasi

### 1. Fund-based

- Menyediakan pinjaman dalam bentuk antara lain: utang senior, utang subordinasi/*mezzanine financing*, pembiayaan talangan, *take-out financing* dan/atau pembiayaan ulang;
- Pembiayaan kegiatan lain yang berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur selama diperkenankan oleh peraturan, dan
- Investasi ekuitas.

### 2. Non Fund-based

- Menyediakan jaminan dalam bentuk antara lain: pemenuhan tanggung jawab keuangan, peningkatan kualitas kredit, dan/atau Jaminan Pelaksanaan; dan
- Menyediakan fasilitas siaga.

## Investment Products

### 1. Fund-based

- Providing loans in the form of, among others, senior debt, subordinated debt/*mezzanine financing*, bridge financing, *take-out financing* and/or refinancing;
- Financing other activities related to infrastructure projects as permitted by law; and
- Providing Equity investment.

### 2. Non Fund-based

- Providing guarantees in the form of, among others, fulfillment of financial liabilities, credit enhancement, and/or performance bonds; and
- Providing standby facilities.



## Jasa Advisory

### 1. Jasa Public Sector Advisory

- Memberikan jasa konsultansi kepada sektor publik dalam proses pengadaan proyek-proyek infrastruktur, baik yang menggunakan skema KPS (Kerjasama Pemerintah - Swasta), maupun skema lainnya;
- Memberikan masukan kepada Pemerintah dalam pembentukan kebijakan terkait perkembangan infrastruktur secara umum, atau sektor-sektor khusus; dan
- Memberikan masukan terkait antara lain, analisa risiko dan kelayakan, pembentukan struktur proyek, skema pembiayaan dan/ atau penyiapan proyek.

### 2. Jasa Private Client Advisory

- Menyediakan jasa konsultasi berkaitan dengan antara lain: penilaian risiko, analisa kelayakan, penataan proyek, skema pembiayaan, dan/atau pengembangan proyek; dan
- Menyediakan jasa konsultasi bagi sektor swasta terhadap proyek-proyek khusus dari tahap tender sampai penetapan keuangan.

## Advisory Services

### 1. Public Sector Advisory services

- Advising the public sector on the procurement of specific infrastructure projects, whether under the PPP or other frameworks;
- Advising government on broader policy issues related to general infrastructure development or specific sectors; and
- Providing advisory services related to, among others, risk assessment, feasibility analysis, project structuring, financing schemes, and/or project development.

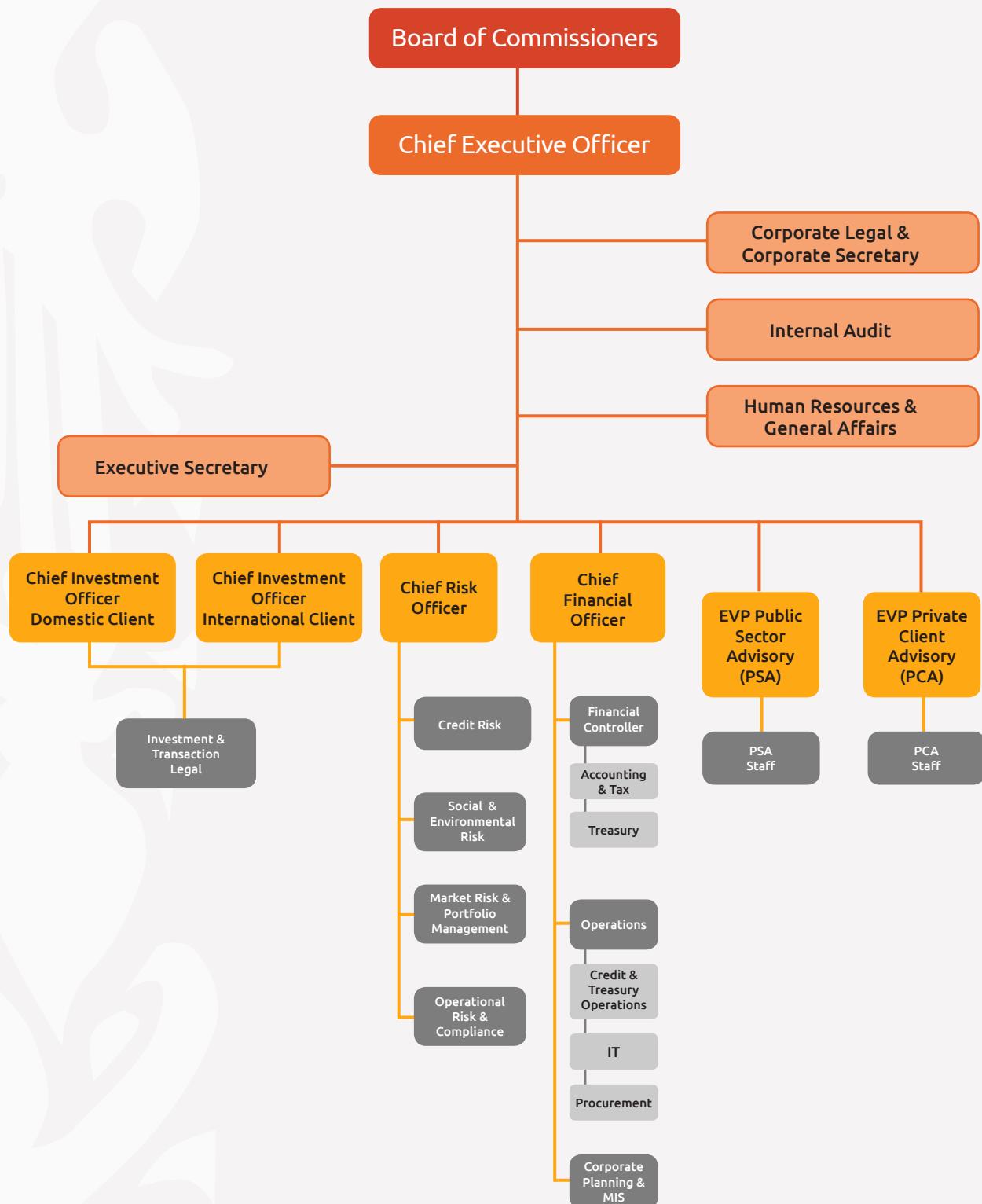
### 2. Private Client Advisory services

- Providing advisory services related to, among others, risk assessment, feasibility analysis, project structuring, financing schemes, and/or project development; and
- Advising the private sector on specific projects from the tendering stage until financial close.

## Komposisi Pemegang Saham | Shareholding Composition <sup>\*)</sup>

Pemegang Saham/Shareholders	Saham/ Shares	Nilai Nominal/ Nominal value (IDR)	Percentase/ Percentage (%)
PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)	600,000	600,000,000,000	33.88%
International Finance Corporation (IFC)	354,044	354,044,000,000	19.99%
Asian Development Bank (ADB)	354,044	354,044,000,000	19.99%
Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG)	199,000	199,000,000,000	11.24%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)	263,780	263,780,000,000	14.90%
<b>Total</b>	<b>1,770,868</b>	<b>1,770,868,000,000</b>	<b>100.00%</b>

<sup>\*)</sup> Setelah peningkatan modal ditempatkan dan disetor, efektif pada tanggal 10 Januari 2014/  
After increase in paid up capital, effective on 10 January 2014



## 12 Ikhtisar Keuangan | Financial Highlights

(Dalam juta Rupiah | In million Rupiah)

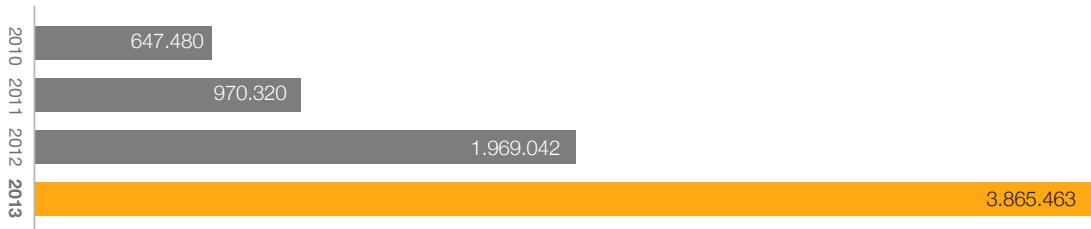
	2013	2012	2011	2010
<b>ASET/ASSETS</b>				
Kas dan Surat Berharga/ <i>Cash and Marketable Securities</i>	2.828.264	1.935.768	948.276	74.879
Pinjaman diberikan - bersih/ <i>Loans - net</i>	990.304	-	-	-
Aset tetap – bersih/ <i>Property and equipment - net</i>	2.910	3.578	3.261	3.998
Deposito berjangka – dibatasi/ <i>Time deposits - restricted</i>	-	-	-	559.698
Aset pajak tangguhan/ <i>Deferred tax assets</i>	30.446	19.435	7.544	-
Beban tangguhan/ <i>Deferred charges</i>	1.825	-	5.549	7.505
Aset lain-lain/ <i>Other assets</i>	11.714	10.261	5.690	1.400
Jumlah Aset/ <i>Total Assets</i>	3.865.463	1.969.042	970.320	647.480
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS/LIABILITIES AND EQUITY</b>				
<b>LIABILITAS/LIABILITIES</b>				
Utang lain-lain/ <i>Other payables</i>	1.734	1.674	280	4.802
Utang pajak/ <i>Taxes payable</i>	635	506	257	267
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lainnya/ <i>Accrued expenses and other liabilities</i>	17.777	10.162	2.947	25
Liabilitas imbalan pasca kerja/ <i>Provision for employee benefits</i>	2.374	1.022	-	-
Pendapatan diterima dimuka/ <i>Unearned revenue</i>	1.410	3.750	-	-
Liabilitas di bawah CSL/ <i>Liability under CSL</i>	-	-	-	557.855
Pinjaman subordinasi/ <i>Subordinated loans</i>	2.031.864	778.350	-	-
Jumlah Liabilitas/ <i>Total Liabilities</i>	2.055.794	795.464	3.484	562.949
<b>EKUITAS/EQUITY</b>				
Modal saham/ <i>Capital stock</i>	1.175.000	1.175.000	1.000.000	100.000
Tambahan modal disetor/ <i>Additional paid-in capital</i>	17.500	17.500	-	-
Uang muka modal saham dipesan/ <i>Advances for capital stock subscription</i>	604.746	-	-	-
Kenaikan nilai wajar surat berharga tersedia untuk dijual - bersih/ <i>Increase in fair value of available for sale securities - net</i>	3.123	-	-	-
Laba ditahan (akumulasi kerugian) / <i>Retained earnings (deficit)</i>	9.300	(18.922)	(33.164)	(15.469)
Jumlah Ekuitas/ <i>Total Equity</i>	1.809.669	1.173.578	966.836	84.531
Jumlah Liabilitas & Ekuitas/ <i>Total Liabilities &amp; Equity</i>	3.865.463	1.969.042	970.320	647.480

(Dalam juta Rupiah | In million Rupiah)

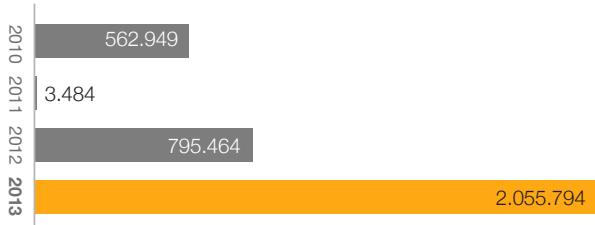
	2013	2012	2011	2010
<b>PENDAPATAN USAHA/REVENUE</b>				
Penghasilan investasi/ <i>Investment income</i>	118.293	65.377	24.620	24.523
Pendapatan Komisi dan Provisi / <i>Provision and commission income</i>	6.518			
Pendapatan jasa advisory/ <i>Advisory fees</i>	96	385	-	-
Pendapatan lainnya/ <i>Other income</i>	9	6	21	-
Jumlah pendapatan usaha/ <i>Total revenues</i>	124.916	65.768	24.641	24.523
<b>BEBAN USAHA/OPERATING EXPENSE</b>				
Umum dan administrasi/ <i>General and administrative</i>	(66.838)	(49.770)	(31.931)	(17.513)
Beban bunga/ <i>Interest expense</i>	(21.633)	(742)	(13.025)	(22.479)
Beban penyisihan penurunan nilai/ <i>Provision for impairment losses</i>	(3.102)	-	-	-
Jumlah beban usaha/ <i>Total operating expense</i>	(91.573)	(50.512)	(44.956)	(39.992)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak/ <i>Income (Loss) Before Tax</i>	33.343	15.256	(20.315)	(15.469)
(Beban) Manfaat Pajak/ <i>Tax (Expense) Benefit</i>	(5.806)	(930)	2.620	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ <i>Income (Loss) For The Year</i>	27.537	14.326	(17.695)	(15.469)
<b>LABA/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN/OTHER COMPREHENSIVE PROFIT/(LOSS)</b>				
Kenaikan nilai wajar surat berharga tersedia untuk dijual - bersih / <i>Increase in fair value of available for sale securities - net</i>	3.123	-	-	-
Keuntungan/(Kerugian) aktuarial - bersih setelah efek pajak/ <i>Actuarial - gain/(loss) - net of tax effect</i>	685	(84)	-	-
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif/ <i>Total Comprehensive Income (Loss)</i>	31.345	14.242	(17.695)	(15.469)



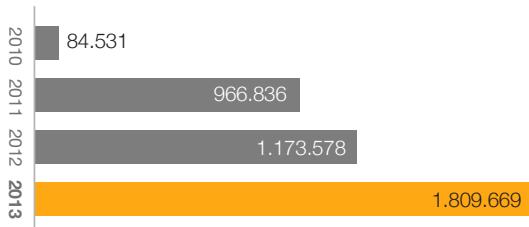
**JUMLAH ASET/TOTAL ASSETS**  
(Dalam juta Rupiah | In million Rupiah)



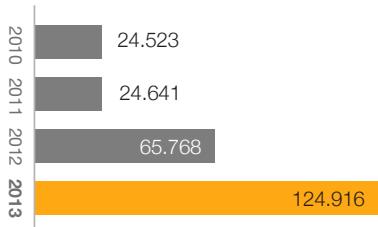
**LIABILITAS/LIABILITIES**  
(Dalam juta Rupiah | In million Rupiah)



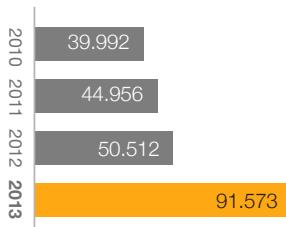
**EKUITAS/EQUITY**  
(Dalam juta Rupiah | In million Rupiah)



**PENDAPATAN USAHA/OPERATING INCOME**  
(Dalam juta Rupiah | In million Rupiah)



**BEBAN USAHA/OPERATING EXPENSE**  
(Dalam juta Rupiah | In million Rupiah)





14-16 January

Training Advanced Project Finance  
oleh Euromoney di Bogor

Training on Advanced Project  
Finance by Euromoney in Bogor

Rapat Umum Pemegang Saham 2013 di  
Jakarta  
The 2013 Annual General Meeting of  
Shareholders in Jakarta



23 April



23 August

Penandatanganan Nota Kesepahaman  
untuk proyek Power Plant Asahan 1 di  
Jakarta

The Signing of Memorandum of  
Understanding for Asahan 1 Power Plant in  
Jakarta

Pertemuan Pemegang Saham dan Pemberi  
Pinjaman di Jakarta  
Shareholders & Lenders Gathering in  
Jakarta



19-20 September



18 October

Upacara Penandatanganan Proyek ELB di  
Jakarta

The Signing Ceremony of ELB Project in  
Jakarta



Team Building, Lombok



7-9 November



11 December

Resepsi Akhir Tahun di Soehana Hall, Gedung The Energy, Jakarta  
Year End Reception at Soehana Hall, The Energy Building, Jakarta.



Penandatanganan MoU antara IIF dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di wilayah kerja panas bumi Gunung Kromong

MoU signing between IIF and West Java Provincial Government on Gunung Kromong geothermal site.



18 December



Hanya pemuda dengan kepercayaan diri yang besar yang berhasil dalam ritual lompat batu. IIF telah melakukan suatu lompatan besar dengan membukukan komitmen pembiayaan sekitar Rp 2,5 triliun dan penyaluran pembiayaan sebesar hampir Rp 1 triliun.

Only a man with supreme confidence can successfully perform the stone jumping ritual. IIF has made broad strides by booking approximately Rp 2.5 trillion in financing commitments and disbursements of almost Rp 1 trillion.



**Sofyan A. Djalil**

Presiden Komisaris/Komisaris Independen |  
President Commissioner/Independent Commissioner

Para Pemegang Saham yang terhormat,

Didirikan sebagai katalisator pembangunan infrastruktur di Indonesia, PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dengan bangga menutup tahun 2013 dengan pencapaian sejumlah tonggak penting dan prestasi yang memuaskan, yang merupakan hasil dari program IIF yang berkesinambungan yang dimulai pada tahun lalu. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, IIF telah melewati tahun 2013 dengan kinerja yang sangat menggembirakan dan telah melakukan pencairan pinjaman yang pertama.

Adalah suatu kebahagiaan bagi Dewan Komisaris untuk melaporkan dan menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Direksi, manajemen dan staf atas usaha mereka untuk terus menghasilkan kinerja usaha yang sangat baik di tahun 2013.

Dewan Komisaris merasa yakin bahwa kinerja yang kuat sebagaimana yang ada saat ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya dasar yang kokoh dan langkah-langkah strategis yang telah diambil oleh Direksi, manajemen dan seluruh karyawan sesuai dengan strategi yang ditetapkan oleh IIF.

Direksi telah membuat terobosan penting dalam mencapai tujuan perusahaan pada tahun 2013 dengan berpartisipasi dalam berbagai proyek infrastruktur di Indonesia, yang merupakan tonggak sejarah bagi IIF. Dengan

Dear Shareholders,

Established as a catalyst for infrastructure development in Indonesia, IIF (the Company) is proud to have closed 2013 accomplishing a series of milestones and outstanding achievements as a result of the continuous program the Company initiated in the previous year. With the grace of God the Almighty, the Company has passed the year 2013 with a very encouraging performance, and having made its first loan disbursement.

The Board of Commissioners has the pleasure to report and express utmost appreciation to the Board of Directors, management and staff for their continuing effort to produce an excellent business performance in 2013.

The Board of Commissioners believes that such strong performance was not possible without the presence of a solid foundation and strategic steps taken by the Board of Directors, management and all employees in line with the strategy set by the Company.

The Board of Directors has made notable breakthroughs in achieving the Company objectives in 2013 by participating in various infrastructure projects in Indonesia, a major milestone for the Company. With a total

**Kinerja yang baik hanya dapat terjadi dengan adanya landasan yang kokoh dan langkah-langkah strategis yang ditetapkan oleh Manajemen dan diikuti oleh segenap jajaran di Perusahaan.**

Strong performance was only possible with a solid foundation and strategic steps set by the Management and followed through by the entire Company.

jumlah komitmen sekitar Rp 2,5 triliun, IIF telah membantu pembangunan proyek-proyek infrastruktur dengan nilai lebih dari enam kali jumlah tersebut. Selama 2013, IIF membukukan laba bersih sebesar Rp 27,5 miliar, meningkat 92% dari tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh pertumbuhan aset menjadi sebesar Rp 3,9 triliun.

Selain kinerja usaha yang kuat, Dewan Komisaris juga melaporkan upayanya untuk terus-menerus memperkuat tata kelola perusahaan yang baik melalui pemberdayaan komite-komite yang dibentuk sebagai penunjang Dewan Komisaris, yaitu Komite Investasi, Komite Audit,

commitment of approximately Rp 2.5 trillion, the Company helped build infrastructure projects worth more than six times that amount. During 2013, the company has booked a net profit of Rp 27.5 billion, an increase of 92% from the previous year. This was supported by growth in assets to Rp 3.9 trillion.

In addition to our strong business performance, the Board of Commissioners reported their continuous effort to strengthen the good corporate governance practice through the empowerment of committees supporting the Board of Commissioners; ie. the Investment



dan yang saat ini masih dalam tahap akhir pembentukan, yaitu Komite Risiko. Komite ini, di bawah pengawasan Dewan Komisaris, terus melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam memenuhi fungsi dan tugas Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris.

Komite Investasi memberikan pengawasan dan bimbingan kepada Direksi dalam menentukan proyek-proyek yang memenuhi syarat dalam rangka pembiayaan. Komite Audit memantau proses audit, baik internal maupun eksternal, dan melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan kemajuan proyek secara berkala. Komite Risiko yang saat ini sedang dalam tahap pembentukan akan membantu Dewan Komisaris dalam melakukan analisis atas risiko yang dihadapi IIF. Dewan juga menyediakan masukan dan memastikan tercapainya tujuan IIF.

Dasar organisasi yang kokoh telah dibentuk untuk memungkinkan IIF terus tampil sebagai katalisator dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dan memberikan hasil yang positif dan lebih baik di masa depan.

Akhirnya, Dewan Komisaris ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasihnya kepada para pemangku kepentingan, pemegang saham, Direksi dan karyawan atas dedikasi mereka, dan untuk semua nasabah atas kepercayaan dan dukungannya.

Dengan komitmen penuh dari seluruh Pemegang Saham, kami berharap untuk mendapatkan kinerja yang lebih memuaskan pada tahun 2014 dan seterusnya.

Committee, the Audit Committee, and currently in the final establishment, the Risk Committee. These committees, under the supervision of the Board of Commissioners, have continued their duties to fulfill their functions and tasks to assist the Board of Commissioners.

The Investment Committee provides oversight and guidance to the Board of Directors in determining projects eligible for financing. The Audit Committee monitors the processes of both internal and external audits and reviews the financial statements and periodic project progress. The Risk Committee which is currently in its foundational stage will assist the Board of Commissioners in the analysis of risks the Company may encounter. The Board also provides input and ensures the achievements of the Company's objectives.

A solid organization platform has been set up to enable the Company to continuously perform as a catalyst in the infrastructure development in Indonesia and deliver positive and better results in the future.

Finally, the Board of Commissioners would like to express its appreciation and gratitude to the stakeholders, Shareholders, Directors and employees for their dedication, and to all clients for their trust and supports.

With the full commitment from all our Shareholders, we look forward to an even more remarkable performance in 2014 and beyond.

Atas nama Dewan Komisaris/  
On behalf of Presiden Komisaris



**Sofyan A. Djalil**  
Presiden Komisaris/Komisaris Independen  
President Commissioner/Independent Commissioner



Sofyan A. Djalil



Marwanto Harjowiriyono

**PRESIDEN KOMISARIS/  
KOMISARIS INDEPENDEN/PRESIDENT  
COMMISSIONER/  
INDEPENDENT COMMISSIONER**

Sofyan Djalil saat ini menjabat sebagai penasehat Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masalah ekonomi khususnya untuk penyelesaian hambatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sebelumnya, beliau adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (2007-2009) dan Menteri Teknologi Informasi dan Komunikasi (2004-2007). Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia, gelar MA dalam Kebijakan Publik, gelar MA dalam Hukum dan Diplomasi dan gelar PhD dari Tufts University. Di IIF, beliau juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit.

Sofyan Djalil currently serves as an adviser to the Vice President of the Republic of Indonesia for economic affairs, particularly for debottlenecking of infrastructure development in Indonesia. Formerly, he was Minister for State-owned Enterprises (2007-2009) and Minister for Information and Communication Technology (2004-2007). He obtained a Law Degree from the University of Indonesia, MA in Public Policy, MA in Law and Diplomacy and PhD from Tufts University. In IIF, he is also the Chairman of the Audit Committee.

**KOMISARIS/ COMMISSIONER**

Saat ini, Marwanto Harjowiriyono menjabat sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktur Eksekutif di Asian Development Bank (ADB) 2009-2011 dan juga menjabat sebagai Ketua Komite Etik dan Anggota Komite Anggaran ADB. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan gelar Master dari Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, Amerika Serikat serta gelar Doktor dari Universitas Gadjah Mada. Marwanto adalah perwakilan dari Pemerintah Indonesia.

Currently, Marwanto serves as Director General of Treasury of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. Previously, he served as Director General of Fiscal Balance after serving as Executive Director of Asian Development Bank (ADB) from 2009 to 2011 and also as Chairman of the Ethics Committee and Member of the Budget Review Committee of ADB. He obtained Bachelor in Economics from Gadjah Mada University, Yogyakarta, and Masters Degree from Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA as well as a Doctoral Degree from Gadjah Mada University. Mr. Marwanto is a representative of the Government of Indonesia.



Arif Baharudin



Robert Olivier Dolk

**KOMISARIS/ COMMISSIONER**

Saat ini Arif Baharudin menjabat sebagai Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (PUSHAKA) di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Aset Negara II. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Waskita Karya. Sebelumnya beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Kaltim Industrial Estate, Bontang. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan, Bapepam- LK, Departemen Keuangan Republik Indonesia dari 2006 hingga 2009. Meraih gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Brawijaya, Malang, dan gelar MBA di bidang Keuangan dari Universitas Denver, Colorado, Amerika Serikat. Beliau juga merupakan anggota Komite Audit di IIF. Arif Baharudin adalah perwakilan dari Pemerintah Indonesia.

Currently Arif Baharudin serves as Head of the Center for Policy Analysis and Harmonization (PUSHAKA) in the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. Previously, he served as Director of State Assets II. He is also a Commissioner of PT Waskita Karya. Previously, he served as a member of the Audit Committee at PT Pupuk Kaltim and Commissioner of PT Kaltim Industrial Estate, Bontang. He used to serve as Head of Accounting Standards and Transparency Bureau, Bapepam-LK, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia from 2006 to 2009. He obtained a Bachelor in Accounting from Brawijaya University, Malang and MBA in Finance from Denver University, Colorado, USA. In IIF, Arif is also a member of the Audit Committee. Mr. Arif is a representative of the Government of Indonesia.

**KOMISARIS/ COMMISSIONER**

Robert Dolk telah memiliki pengalaman yang luas selama lebih dari 30 tahun di bidang jasa keuangan, dengan bekerja di Australia, Eropa dan Asia untuk organisasi seperti BNP Paribas dan Deutsche Bank. Beliau diangkat sebagai Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance pada tanggal 15 Agustus 2012, dan saat ini juga menjabat sebagai Direktur Independen Non-Eksekutif Zurich Financial Services Australia Limited (sejak Desember 2008), LawCover Asuransi Pty Limited (sejak April 2010), dan di Amber Holdings (sejak Maret 2011). Robert Dolk adalah perwakilan dari ADB.

Robert Dolk has an extensive experience for over 30 years in financial services, working in Australia, Europe and Asia for organizations such as BNP Paribas and Deutsche Bank. He was appointed as Commissioner of IIF on 15 August 2012, and has been also serving as Independent Non-Executive Director of Zurich Financial Services Australia Limited (since December 2008), Law Cover Insurance Pty Limited (since April 2010), and Amber Holdings (since March 2011). Mr. Dolk is the representative of ADB.



Jemal-Ud-Din Kassum



Hans-Juergen Hertel

#### KOMISARIS/ COMMISSIONER

Saat ini, Jemal-Ud-Din Al Noor Kassum adalah Direktur Khan Bank di Mongolia. Beliau baru saja ditunjuk sebagai Dewan Randgold Resources. Beliau telah menjabat sebagai Wakil Presiden Regional World Bank untuk wilayah Asia Timur dan Pasifik pada tahun 2000-2005 dengan tanggung jawab menyediakan pinjaman dan bantuan teknis di 22 negara termasuk Indonesia. Sebelum bergabung dengan World Bank, beliau bekerja di International Finance Corporation (IFC) selama 25 tahun dan diangkat sebagai Wakil Presiden Operasional Investasi dari tahun 1992 dan seterusnya. Beliau meraih gelar di bidang Teknik Sains dan Ekonomi dari Universitas Oxford dan MBA dari Harvard Business School. Kassum adalah perwakilan dari IFC.

Currently, Jemal-Ud-Din Kassum is Director of Khan Bank in Mongolia. He has just been appointed to the Board of Randgold Resources. He served as the World Bank's Regional Vice President for East Asia and Pacific region in 2000-2005, where he was responsible for providing loans and technical assistance in 22 countries, including Indonesia. Prior to joining the World Bank, he worked at the International Finance Corporation (IFC) for 25 years and was appointed as Vice President of Investment Operations from 1992 onwards. He earned a degree in Engineering Science and Economics from Oxford University and MBA from Harvard Business School. Mr. Kassum is the representative of IFC.

#### KOMISARIS/ COMMISSIONER

Hans-Juergen Hertel memulai karirnya di DEG (Deutsche Investitions-und mbH) pada tahun 1990 dan sebelumnya menjabat sebagai Direktur Kantor DEG di Jakarta. Beliau lulus dari Universitas Terbuka Berlin, jurusan Ekonomi Politik & Administrasi Bisnis. Hans juga menjabat anggota Komite Audit di IIF. Hertel adalah perwakilan dari DEG.

Mr. Hans-Juergen Hertel began his career in DEG (Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH) in 1990 and has previously served as Director of the DEG Office in Jakarta. He graduated from Free University of Berlin, majoring in Political Economy & Business Administration. In IIF, Hans is also a member of the Audit Committee. Mr. Hertel is the representative of DEG.



#### **KOMISARIS/ COMMISSIONER**

Rajeev adalah General Manager, Project & Export Finance Department (PEFD) dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) di Tokyo. Beliau juga menjabat sebagai General Manager Investment Banking Department, Asia, yang didirikan pada tanggal 2 April 2012 untuk menyediakan produk dan solusi platform bagi klien di kawasan Asia Pasifik. Sebelum pindah ke Tokyo, beliau berkantor di Singapura sebagai General Manager & Head dari Structured Finance Asia Pasifik (SFAP) di SMBC. Rajeev memiliki lebih dari 18 tahun pengalaman di wilayah Asia Pasifik dan Timur Tengah dalam memberi saran kepada klien di berbagai infrastruktur, PPP dan transaksi energi. Beliau meraih gelar manajemen dan teknik dari Birla Institute of Technology and Science (BTS), Pilani. Rajeev adalah perwakilan dari SMBC.

Mr. Rajeev Kannan is a General Manager, Project & Export Finance Department (PEFD) of Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) in Tokyo. Mr. Kannan is also a General Manager of the Investment Banking Department, Asia, which was established on 2 April 2012 to provide a single “product and solutions” platform for clients in the Asia Pacific region.

Prior to moving to Tokyo, he was based in Singapore and was General Manager & Head of Structured Finance Asia Pacific (SFAP). He has over 18 years of experience in the Asia Pacific and Middle East region, advising clients on various infrastructure, PPPs and energy transactions. He earned his management and engineering degrees from Birla Institute of Technology and Science (BTS), Pilani. Mr. Rajeev is the representative of SMBC.



**Sukatmo Padmosukarso**  
Presiden Direktur/CEO |  
President Director/CEO

Para Pemegang Saham yang terhormat,

Dengan gembira saya melaporkan bahwa pada tahun 2013 IIF telah berhasil menempatkan dirinya di dalam pasar pembiayaan infrastruktur, yang ditunjukkan dengan penandatanganan komitmen pembiayaan sebesar empat kali lipat dibandingkan pada tahun 2012, dan dengan membukukan pencairan pembiayaan pertama kalinya sebesar Rp. 995 miliar. Didorong oleh komitmen dan tekad dari tim manajemen dan dukungan yang kuat dari Dewan Komisaris, IIF mampu memenuhi sebagian besar targetnya. Selain menanamkan fondasi yang kuat di pasar pembiayaan infrastruktur, IIF telah dapat memperkuat kapasitas organisasi, meningkatkan kapitalisasi, dan mempersiapkan Perusahaan untuk memasuki tahap perkembangan berikutnya. Dengan fondasi yang kuat, kami percaya bahwa IIF berada pada jalur yang benar untuk mewujudkan visi para Pemegang Saham untuk menjadi salah satu katalis pembangunan infrastruktur di Indonesia.

#### **Perkembangan Ekonomi**

Tahun 2013 dapat dikatakan sebagai tahun mulai dikuranginya pelonggaran kuantitatif (*quantitative easing*) oleh Federal Reserve AS. Bagi Indonesia, kebijakan pengurangan ini bersamaan dengan membengkaknya defisit transaksi berjalan, yang mencapai puncaknya di kuartal kedua sebesar 4,4% dari PDB. Gabungan kedua hal ini melipatgandakan dampak dari melemahnya kepercayaan investor akan perekonomian Indonesia. Ditambah dengan pengurangan subsidi bahan bakar yang menyebabkan meningkatnya inflasi, menjadikan Indonesia dijuluki sebagai salah satu negara yang masuk dalam negara-negara Fragile Five yang perekonomiannya dianggap paling terpukul atas serangkaian peristiwa tersebut.

Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia meluncurkan serangkaian langkah untuk menstabilkan perekonomian pada kuartal ketiga tahun 2013, dengan membatasi sisi permintaan yang dianggap sebagai pendorong utama

Dear Shareholders,

I am pleased to report that in 2013 IIF firmly established itself in the infrastructure financing market, as evidenced by the ability to sign financing commitments that are four times as much as in 2012, and finally book financing assets in our balance sheet for the first time amounting to Rp 995 billion. Driven by the commitment and determination of the management team and strong support from the Board of Commissioners, IIF was able to achieve most of the objectives. Besides planting its foot firmly in the marketplace, IIF was able to further strengthen its organizational capacity, increase its capitalization, and prepare for the next stage of the Company's development. With these strong foundations, we believe that IIF is on the right trajectory to realize the Shareholders' vision to become one of the catalysts of Indonesia's infrastructure development.

#### **Economic Update**

2013 can be aptly called the year of the tapering off of the US Federal Reserve's quantitative easing. For Indonesia, the tapering coincides with a ballooning of the country's current account deficit, which reached a peak of 4.4% of GDP in the second quarter. This convergence multiplied the impact of the weakening confidence of investors in the Indonesian economy. Coupled with the inflationary impact of the reduction in fuel subsidies, this led to Indonesia being dubbed as one of the Fragile Five countries whose economies were considered to be hardest hit by the confluence of events.

The Government of Indonesia and Bank Indonesia launched a series of measures in the third quarter of 2013 to stabilize the economy by reducing the demand side which was deemed to be one of the major drivers

dari defisit transaksi berjalan. Pembatasan sisi permintaan pada akhirnya akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2013, Indonesia mencatat tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8%, di bawah target pemerintah sebesar 6,3%. Namun demikian, tingkat pertumbuhan ini masih merupakan tertinggi kedua di Asia, menyratkan ketahanan perekonomian Indonesia terhadap kondisi makroekonomi global. Pada akhir tahun 2013, kondisi ekonomi semakin stabil yang ditunjukkan oleh perlambatan laju inflasi dan penurunan defisit perdagangan, termasuk adanya surplus transaksi berjalan pada kuartal terakhir tahun 2013.

Kebijakan yang diambil termasuk peningkatan suku bunga acuan BI sebesar 175 basis poin, dari 5,75 % menjadi 7,50 %. Kenaikan ini mendorong persaingan antar bank dalam menarik dana segar dan memperlambat pertumbuhan aset untuk mempertahankan rasio loan-to-deposit pada tingkat yang wajar. Selain terhadap IDR, kondisi ini juga berpengaruh terhadap bisnis dalam mata uang USD. Pengetatan pertumbuhan aset bank adalah kesempatan bagi IIF untuk lebih memperkuat posisi di pasar pembiayaan infrastruktur.

#### **Pembiayaan Infrastruktur dan Advisory**

Walaupun pasar bergejolak, permintaan untuk pembiayaan infrastruktur di tahun 2013 relatif stabil. Pertumbuhan infrastruktur Indonesia telah tertinggal dari pertumbuhan ekonomi secara umum dan terus menjadi hambatan untuk merealisasikan potensi pertumbuhan PDB yang lebih tinggi. Dengan demikian, masih terdapat permintaan di pasar untuk mengkompensasi kekurangan investasi di bidang infrastruktur pada tahun-tahun sebelumnya, terutama karena pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur masih di bawah 5% dari anggaran negara, yang merupakan nilai acuan investasi yang dibutuhkan untuk menumbuhkan ekonomi sesuai dengan potensinya. Kita melihat bahwa kredit infrastruktur di pasar keuangan secara keseluruhan tumbuh sebesar 19% dari tahun

of the current account deficit. Reducing the demand side of the economy ultimately caused a drop in GDP growth. In 2013, Indonesia posted growth of 5.8%, below the 6.3% rate previously targeted by the government. Nevertheless, this growth rate is still the second fastest in Asia, implying the economy's inherent resilience in the face of the global macroeconomic condition. By the end of 2013, the economy had stabilized as evidenced by the slowing inflation rate and smaller trade deficit, including an unexpected current account surplus in the last quarter of 2013.

The aforementioned measures included a 175-basis point increase in the Bank Indonesia reference rate from 5.75% to 7.50%. This increase prompted banks to compete for fresh funds and slow their asset growth to maintain their loan-to-deposit ratios at acceptable levels. This also had a marked effect on not only the IDR side of business, but also the USD side of the business. The tightening of the banks' asset growth is an opportunity for IIF to further strengthen its competitive position in the infrastructure financing market.

#### **Infrastructure Financing and Advisory**

Despite the market volatility, demand for infrastructure financing in 2013 was relatively stable. Indonesia's infrastructure growth has lagged the general growth of the economy and continues to be a bottleneck to realizing higher GDP growth potential. As such, the market still sees demand to compensate for underfunding of the previous years, especially as government spending on infrastructure is also below the 5% thought to be the benchmark rate required for the economy to grow to its potential. We see that infrastructure credit in the overall financial market grew by 19% from 2012 to 2013, signifying the stable demand we see in the sector.

Dikenalnya IIF di pasar pembiayaan dan *advisory* sektor infrastruktur, serta pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh Perusahaan secara terus menerus, akan berkontribusi pada kemajuan IIF sebagai perusahaan baru di bidang pembiayaan dan pengembangan infrastruktur.

IIF's recognition in the infrastructure financing and advisory market, and the continuous capacity building undertaken by the Company, all will contribute to IIF's progress as a young infrastructure financing and development company.

2012 hingga 2013, dan ini memperlihatkan adanya permintaan yang stabil di sektor ini .

Kebanyakan dari proyek-proyek yang memperoleh komitmen pembiayaan atau memulai konstruksi di tahun 2013 adalah bukan proyek yang ada partisipasi sektor publik di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor KPS berjalan lamban, dan menunjukkan dinamika dan potensi nilai pasar dari proyek-proyek KPS apabila masuk ke pasar. Fokus dan upaya pengembangan pasar pada tahun 2013 dipusatkan pada proyek-proyek infrastruktur di luar lingkup KPS.

Sebagaimana disebutkan, IIF mampu membukukan komitmen baru sebesar Rp 2 triliun di tahun 2013, meningkat dari Rp 500 miliar di tahun 2012. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah perusahaan, IIF melakukan membukukan pencairan pinjaman sebesar Rp 995 miliar di tahun 2013. Karena sebagian dari proyek-proyek ini adalah proyek *greenfield*, maka penyaluran pinjaman akan terus berlanjut di tahun 2014 sesuai dengan tahap pengembangan proyek ,dan semua ini akan menghasilkan portofolio bisnis yang stabil dan terus bertumbuh bagi IIF. Tim investasi juga telah mengidentifikasi proyek-proyek yang potensial untuk dikembangkan di tahun 2014, untuk memastikan pertumbuhan akan terus berlanjut.

Pada tahun 2013, IIF juga mulai melihat kemungkinan pemberian pembiayaan infrastruktur dengan peringkat junior, termasuk pinjaman subordinasi, *mezzanine* atau penyertaan modal. Mengingat karakteristik khusus dari tipe pembiayaan ini, diperlukan waktu yang lebih

Most, if not all, of the projects that achieved financial close or construction in 2013 are projects that do not have a public element in their nature or structure. This shows that the PPP sector is progressing slowly, and demonstrates the dynamics and potential size of the market of PPP projects were to go to the market. Our focus and market building efforts in 2013 were thus concentrated on infrastructure projects outside of the PPP scope.

As mentioned, IIF was able to book Rp 2 trillion of new commitments in 2013, compared to Rp 500 billion in 2012. And for the first time in our company's history, IIF was able to book Rp 995 billion of loan assets in 2013 compared to none in 2012. As some of these projects are greenfield in nature, the disbursement of the loans will continue in 2014 commensurate with the progress of the projects, giving IIF a stable and growing portfolio of business to rely on for its growth. The investment team has also established a strong pipeline of deals for 2014 onwards to ensure that our growth will continue.

In 2013 IIF also started to look at the possibility to provide junior-ranked financings to infrastructure projects in Indonesia, including subordinated loans, mezzanine or equity financings. Given the type of financing, these require a longer time to close and the



lama untuk menyelesaikan proses pemberian komitmen, dimana manajemen berharap dapat dilaksanakan di tahun 2014. IIF akan terus memusatkan usahanya pada pemberian pinjaman proyek dalam portofolionya, tetapi mengingat kurangnya pembiayaan modal bagi pemilik proyek yang menghambat pertumbuhan infrastruktur di Indonesia, maka kemampuan IIF untuk memberikan pembiayaan modal atau setara-modal akan lebih memperkuat peran IIF sekaligus memberikan diferensiasi kemampuan IIF di pasar.

Seperti yang telah dinyatakan dalam visi dan misi kami, IIF juga menyediakan layanan *advisory* untuk sektor swasta dan lembaga publik di pasar infrastruktur. Beberapa tonggak pencapaian proyek klien kami telah tercapai, sebagian besar terkait dengan proyek KPS.

management expect to close these deals in 2014. IIF would continue to put an emphasis on project finance loans in our portfolio, but given that lack of equity financing to complete the sponsors' equity requirement is one of the identified problems holding back infrastructure growth in Indonesia, the ability to close equity or equity-like deals will further strengthen IIF's role in the market as well as providing IIF with a differentiation in the marketplace.

As stated in our vision and mission, IIF also provides advisory services to private clients and public sector agencies in the infrastructure market. Several milestones were achieved in the progress of our clients' projects, most of which are related to Public Private Partnership

Mengingat lambatnya kemajuan KPS seperti yang disebutkan sebelumnya, maka adanya kemajuan terus-menerus dari beberapa proyek, membangkitkan harapan akan munculnya proyek-proyek KPS di pasar.

#### Organisasi dan Peningkatan Kapasitas

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2013 adalah membangun kemampuan untuk merealisasikan proyek-proyek potensial, yang diharapkan berlanjut di tahun 2014, demi meningkatkan kemampuan organisasi. Tahun 2013 adalah tahun kedua dari tahap pengembangan pertama IIF, yang merupakan periode menetapkan proses, prosedur, dan kemampuan sumber daya manusia di IIF.

Jumlah karyawan tetap IIF telah bertumbuh mencapai 32 karyawan, di luar anggota Dewan Direksi. Pada akhir tahun 2013, semua posisi kunci telah diisi atau sedang menunggu orang-orang yang telah terpilih untuk bergabung. Manajemen telah berhati-hati dalam menyeimbangkan pertumbuhan karyawan tetap dengan pertumbuhan bisnis, dan setelah posisi kunci terpenuhi, di masa mendatang IIF akan terus membangun kapasitasnya pada posisi-posisi yunior dan posisi-posisi pendukung.

Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan Perusahaan, maka peningkatan kualitas karyawan terus dilakukan dengan membuat program pelatihan. Hal ini merupakan langkah penting untuk mencapai salah satu tujuan kita untuk menjadi pusat pembiayaan proyek infrastruktur, pembiayaan modal untuk infrastruktur dan layanan *advisory* infrastruktur.

Sebagian besar Prosedur Operasi Standar telah dikembangkan dan dilaksanakan pada tahun 2013 untuk memenuhi prinsip-prinsip dan semangat yang ada di dokumen dan manual pendirian. Semua ini mencakup antara lain prosedur dalam keputusan investasi, akuntansi dan perbendaharaan, sumber daya manusia dan general affair, dan manajemen risiko.

Di sisi teknologi informasi, pada tahun 2013 IIF memulai program untuk merancang strategi

projects. Given the slow progress of PPPs as mentioned earlier, the continuous progress of some of our projects creates hope that executable PPPs will soon arrive in the market.

#### Organization and Capacity Building

Building the capability to execute the deals in the pipeline is one of the activities that was undertaken in 2013, which will continue into 2014, to further enhance IIF's organizational capability. 2013 was the second year of IIF's first development stage, which is the period to establish IIF's processes, procedures, and manpower capability.

IIF has grown its FTE employees to 32, excluding the Board members. All key posts have been filled, or are waiting for the selected persons to join IIF, by the end of 2013. Management has been careful to balance IIF's growth in FTE with the growth of its business, and having now filled the key senior positions, will continue to build its capacity in the more junior and supporting staff in the future.

As human capital is one of the key success factors of the Company going forward, care was taken to strengthen our human capital by establishing a training program for the employees. This is an important step to achieve one of our goals to become the national center of excellence for infrastructure project finance, infrastructure equity financing and infrastructure advisory services.

Standard Operating Procedures across most areas of the Company were developed and established in 2013 to adhere with the principles and spirit of the founding documents and manuals. These include procedures in investment decisions, in accounting and treasury, in human resources and general affairs, and in risk management.

On the information technology side, in 2013 IIF embarked on a program to devise an underlying

teknologi informasi yang akan menjadi dasar penentuan strategi teknologi perusahaan di masa mendatang. Kegiatan ini akan terus berlanjut di tahun 2014. Karena teknologi informasi merupakan faktor mitigasi risiko yang penting, kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan IIF.

Seandainya IIF melanjutkan tingkat pencapaian komitmen saat ini, maka modal dan pinjaman subordinasi yang ada akan habis untuk memenuhi komitmen pembiayaan di tahun 2014. Oleh karena itu, kami telah merumuskan rencana dan sejumlah langkah untuk memastikan putaran pertama penggalangan dana dapat terealisasi di semester pertama tahun 2014. Rasio utang terhadap modal (di luar pinjaman subordinasi yang diterima) sebesar 3 berbanding 1 telah disepakati oleh Dewan Komisaris di Desember 2013. Rasio ini serta suntikan modal sebesar Rp 605 miliar akan menjadi dasar pertumbuhan aset IIF sebesar USD 1 miliar pada tahun 2017. Hal ini akan menjadi sinyal bahwa pertumbuhan IIF di masa depan tidak hanya akan mengandalkan dana dari Pemegang Saham, tetapi juga dengan memanfaatkan utang, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat pengembalian modal IIF.

#### Pencapaian Target

Dengan senang hati saya memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa dengan dukungan dari seluruh tim IIF dan Dewan Komisaris, IIF mampu meraih laba bersih sebesar Rp 27,5 miliar, lebih tinggi dari yang telah ditargetkan sebesar Rp 22 miliar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Perusahaan, IIF membukukan laba ditahan dan menghapus rugi ditahan yang terjadi pada tahun 2010-2011.

Atas nama seluruh manajemen dan staf, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kartika Wirjoatmodjo, yang menjabat sebagai Presiden Direktur & Chief Executive Officer IIF sejak September 2011 hingga Januari 2014. Bapak Wirjoatmodjo telah bekerja keras dalam membangun landasan yang kokoh bagi IIF untuk siap memasuki tahap pertumbuhan dan tahap menjadi pemimpin.

IT strategy which will guide the Company's decisions in supporting technology going forward. This work is expected to continue in 2014. As supporting information technology is an important risk mitigation factor, this work will be an important milestone in IIF's development.

If IIF were to continue with the current rate of commitments, the existing equity and subordinated loans funds would be fully committed to infrastructure projects in 2014. Therefore, a plan was formulated and steps taken to ensure that the first round of fund raising happens in the first half of 2014. A capital structure ratio of debt and equity (excluding subordinated loans received) of 3 to 1 was also agreed in December 2013 by the Board of Commissioners. This ratio and the capital injection of Rp 605 billion will set the foundation of IIF's growth to the targeted asset size of US\$ 1 billion in 2017. This would also signal that IIF's growth in the future would not rely solely on further Shareholders' equity, but also on leveraging on Shareholders' equity with debt, in turn improving IIF's return on equity.

#### Achievement of Targets

I am pleased to inform the Shareholders that with the support of the entire IIF team and the Board of Commissioners, IIF was able to achieve a net income of Rp 27.5 billion, higher than the target of Rp 22 billion. For the first time in the Company's history, IIF will now have retained earnings, having erased the cumulative losses it incurred in 2010-2011.

On behalf of the entire management and staff, I would like to take this opportunity to express our gratitude to Mr. Kartika Wirjoatmodjo, IIF's former President Director & Chief Executive Officer, who has served IIF from September 2011 to January 2014. Mr. Wirjoatmodjo has worked hard in building a solid foundation for IIF to be ready to enter into the growth and leading stage of IIF.

### Masa Depan yang Menjanjikan

Kondisi perekonomian dan pasar secara umum, pengakuan akan posisi IIF dalam pasar pembiayaan dan *advisory* di sektor infrastruktur, dan pengembangan kapasitas secara terus-menerus yang dilakukan oleh Perusahaan, semua itu akan berkontribusi terhadap kemajuan IIF sebagai perusahaan pembiayaan dan pengembangan infrastruktur yang masih muda.

IIF akan terus melaksanakan strategi dalam menciptakan ceruk pasar khusus dalam penyediaan pembiayaan ‘seperti-modal’ (*quasi-equity*) kepada pemilik dan pengembang proyek, penyediaan pembiayaan jangka panjang dalam rupiah dan US dolar, menyelesaikan banyak proyek, bertindak sebagai katalisator, dan membangun “toko serba ada” yang mampu menyediakan pembiayaan dan solusi *advisory* di sektor infrastruktur.

Prestasi pada tahun 2013 membuat IIF memiliki *platform* untuk melanjutkan pertumbuhan, dan tahun 2014 akan menjadi tahun terakhir IIF dalam tahap pengembangan pertama “Membangun Fondasi”, dan kami melihat tahun 2015 dan seterusnya sebagai tahun kemajuan bagi IIF yang akan terus melaju menjadi perusahaan infrastruktur terkemuka di Indonesia sesuai dengan harapan dari para Pemegang Saham .

Izinkan saya menutup laporan ini dengan menyatakan kebanggaan saya kepada tim IIF yang membawa kami ke titik ini, dan menyatakan terima kasih saya kepada Anda sekalian, para Pemegang Saham, atas dukungan yang terus-menerus dan tak tergoyahkan kepada IIF.

Atas nama Direksi/  
On behalf of the Board of Directors



**Sukatmo Padmosukarno**  
Presiden Direktur/CEO  
President Director/CEO

### A Promising Future

The general economic and market conditions, IIF's recognition in the infrastructure financing and advisory market, and the continuous capacity building undertaken by the Company, will all contribute to IIF's progress as a young infrastructure financing and development company.

IIF will continue its strategy of creating a niche market of becoming a quasi-equity provider to project sponsors and developers, to providing long-term financing solutions in both IDR and USD, establishing a strong deal flow, acting as a catalyst, and establishing a “One Stop Shop” entity capable of delivering financing and advisory solutions in the infrastructure sector.

The accomplishments in 2013 go a long way to providing IIF with the platform to continue its growth, and 2014 will be the last year in IIF's first development stage of “Establishing the Foundation” while we look at 2015 and beyond as IIF continues its progression to become the leading infrastructure company in Indonesia in line with Shareholders' aspirations.

Let me close by expressing my pride in the IIF team for bringing us to this point, and my gratitude to you, our Shareholders, for your continuous and unwavering support to IIF.



Sukatmo Padmosukarso



**PRESIDEN DIREKTUR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER/PRESIDENT DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER**

Sukatmo Padmosukarso bergabung di IIF sebagai Presiden Direktur sejak Maret 2014. Sebelumnya, beliau adalah Komisaris Independen di Rabobank Internasional Indonesia dan Ketua Komite Audit & Kepatuhan dan Komite Pemantau Risiko; dan saat yang bersamaan juga sebagai penasehat di kantor CEO PT Indosat Tbk. Beliau memiliki pengalaman yang luas sebagai Wakil Presiden Direktur PT Pos Indonesia dan Managing Director/Wakil Presiden Direktur PT Bank International Indonesia. Beliau juga memiliki pengalaman yang luas di PT Bank Mandiri Tbk. sebagai VP Loan Workout, VP Risk Management dan VP Portfolio Risk Management. Beliau mengawali karirnya di Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) tahun 1980.

Bapak Sukatmo adalah *co-founder* dan Advisory Board Member di Bankers Association for Risk Management (BARa). Selain posisinya sebagai Anggota Dewan Eksekutif di Indonesian Banker Association (IBI), beliau juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Pendidikan di Perbanas.

Bapak Sukatmo memperoleh gelar MBA dari Curtin University of Technology, Perth, Western Australia dan gelar sarjana bidang ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta tahun 1986 dan Bachelor of Arts in Jurusan Sastra Inggris di Universitas Sebelas Maret, Surakarta tahun 1979.

Sukatmo Padmosukarso joined IIF as President Director in March 2014. Prior to joining IIF, he was an Independent Commissioner of Rabobank International Indonesia, and Chairman of the Audit & Compliance Committee and Risk Monitoring Committee; and at the same time he was an advisor to the office of the CEO of PT Indosat Tbk. He has an extensive experience as Deputy President Director of PT Pos Indonesia (Indonesia State-Owned Postal Company) and Managing Director/Deputy President Director of PT Bank International Indonesia. He also has an extensive experience in PT Bank Mandiri Tbk. as VP Loan Workout, VP Risk Management and VP Portfolio Risk Management. He started his carrier with the Development Bank of Indonesia (Bapindo) in 1980.

Mr. Sukatmo is a Co-Founder and Advisory Board Member of the Bankers Association for Risk Management (BARa). In addition to his position as Executive Board Member of the Indonesian Banker Association (IBI), he is also Chairman of the Education Foundation of the Indonesian Banks Association (Perbanas).

He obtained an MBA from Curtin University of Technology, Perth, Western Australia, and Bachelor in Economics from the University of Indonesia, Jakarta in 1986 and Bachelor of Arts in English Literature from Sebelas Maret University, Surakarta in 1979.



Ari Soerono



Harold Tjiptadjaja

### DIREKTUR PELAKSANA & CHIEF FINANCIAL OFFICER/MANAGING DIRECTOR & CHIEF FINANCIAL OFFICER

Ari Soerono berpengalaman 18 tahun lebih di bidang *corporate finance*, merger dan akuisisi, pengembangan strategi, dan pengelolaan sehari-hari perusahaan di industri transportasi, logistik dan jasa keuangan. Sebelum bergabung dengan IIF, beliau menjabat sebagai Chief Financial Officer di PT Blue Bird (2012-2013). Sebelumnya, dia adalah Deputy Executive Officer & Chief Operating Officer di PT Cardig Aero Services Tbk. (2009-2012). Sebelumnya, beliau bekerja di Credit Suisse London, Accenture Jakarta dan Seoul, dan Citibank Jakarta. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Pimpinan pada Standing Committee for Infrastructure Development KADIN. Beliau mendapatkan MBA dari London Business School pada 2000, dan Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung pada 1994.

Ari Soerono has more than 18 years of experience in corporate finance, mergers & acquisitions, strategy development, and day-to-day management of companies, with industry experience in transportation, logistics, and financial services. Prior to joining IIF, he served as Chief Financial Officer in PT Blue Bird (2012-2013). Previously, he was Deputy Chief Executive Officer & Chief Operating Officer in PT Cardig Aero Services Tbk. (2009 - 2012). Prior to that he worked in Credit Suisse London, Accenture Jakarta and Seoul, and Citibank Jakarta. He was Deputy Head of the Standing Committee for Infrastructure Development at the Indonesian Chamber of Commerce (KADIN). He obtained an MBA from London Business School in 2000, and Chemical Engineering degree from the Bandung Institute of Technology in 1994.

### DIREKTUR PELAKSANA & CHIEF INVESTMENT OFFICER - DOMESTIC CLIENT/MANAGING DIRECTOR & CHIEF INVESTMENT OFFICER - DOMESTIC CLIENT

Harold Tjiptadjaja diangkat sebagai Direktur Pelaksana and Head of Domestic Client Investment di IIF pada Desember 2011. Sebelum bergabung dengan IIF, beliau adalah Vice President untuk Earth Investment Group (2010-2011) dan Corporate Finance Partner di Indoconsult Prima (2009-2011). Sebelumnya, beliau adalah Vice President di Sinarmas Group di Indonesia dan Belanda sejak 2007 hingga 2008. Beliau memperoleh gelar Master of Science di bidang Ekonomi Keuangan dari Universitas Erasmus, Rotterdam, Belanda pada tahun 1997.

Harold Tjiptadjaja was appointed Managing Director and Chief Investment Officer - Domestic Client in IIF in December 2011. Prior to joining IIF, he was a Vice President of Earth Investment Group (2010-2011) and Corporate Finance Partner at Indoconsult Prima (2009-2011). Previously, he was a Vice President of Sinarmas Group in Indonesia and the Netherlands from 2007 to 2008. He obtained a Master of Science in Financial Economics from Erasmus University, Rotterdam, Netherlands in 1997.



Haruhiko Takamoto



Wito Krisnahadi

**DIREKTUR PELAKSANA & CHIEF INVESTMENT OFFICER - INTERNATIONAL CLIENT/  
MANAGING DIRECTOR & CHIEF INVESTMENT OFFICER - INTERNATIONAL CLIENT**

Haruhiko Takamoto diangkat sebagai Managing Director dan Head of International Client Investment di IIF pada April 2012. Beliau adalah Deputy General Manager di Structured Finance Department, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) di Tokyo dari Juni 2009 sampai April 2012. Sebelumnya, beliau juga seorang Deputi General Manager Structured Finance Asia Pasifik, SMBC di Sydney (Juni 2007 - Juni 2009) dan Senior Vice President of Structured Finance Department, SMBC di Osaka (Januari 2006 - Juni 2007). Beliau memperoleh gelar Master of Business Administration dari School of Business, New York University, Amerika Serikat pada tahun 1995.

Haruhiko Takamoto was appointed Managing Director and Chief Investment Officer - International Client in IIF in April 2012. He was a Deputy General Manager in the Structured Finance Department, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) in Tokyo from June 2009 to April 2012. Previously, he was also a Deputy General Manager of Structured Finance Asia Pacific, SMBC in Sydney from June 2007 to June 2009 and Senior Vice President of Structured Finance Department, SMBC in Osaka from January 2006 to June 2007. He was graduated from Keio University in Tokyo in 1988 and obtained an MBA from Stern School of Business, New York University, USA in 1995.

**DIREKTUR PELAKSANA & CHIEF RISK OFFICER/MANAGING DIRECTOR & CHIEF RISK OFFICER**

Sebelum bergabung dengan IIF sebagai Chief Risk Officer, Wito Krisnahadi menjabat sebagai Head of Credit Risk dan Senior Wholesale Credit Analyst di PT Rabobank International Indonesia dari tahun 2010. Sebelumnya, beliau adalah seorang Senior Credit Manager di PT Bank DBS Indonesia 2008-2010. Beliau adalah profesional keuangan dan risiko kredit yang berdedikasi dengan pengalaman luas baik lokal dan internasional di bidang perbankan, keuangan perusahaan, pembiayaan proyek dan pengelolaan pinjaman. Beliau memperoleh gelar Bachelor of Commerce dari Curtin University of Technology, Perth di tahun 1996, dan Master of Business Administration dari Rotterdam School of Management, Erasmus University, Rotterdam, Belanda pada tahun 2004.

Prior to joining IIF as Managing Director and Chief Risk Officer in May 2012, Wito Krisnahadi served as Head of Credit Risk in PT Rabobank International Indonesia from 2010. Previously, he was a Senior Credit Manager in PT Bank DBS Indonesia from 2008 to 2010 and an Investment Officer at International Finance Corporation from 1998 to 2008. He is a dedicated finance and credit risk professional with extensive local and international experience in banking, corporate finance, project finance and loan workouts. He obtained a Bachelor of Commerce Degree from Curtin University of Technology, Perth in 1996, and MBA from the Rotterdam School of Management, Erasmus University, Rotterdam, the Netherlands in 2004.



Irman Boyle

### EXECUTIVE VICE PRESIDENT - HEAD OF PUBLIC SECTOR ADVISORY

Irman Boyle bergabung di IIF pada April 2012. Beliau memiliki 15 tahun pengalaman kerja di institusi multilateral dan perusahaan konsultan (IFC, ADB, IIE Energy Group dan PA Consulting) di bidang jasa konsultasi dan pendanaan sektor publik untuk proyek energi dan infrastruktur. Pada saat bersama IFC, beliau berada di Departemen PPP Transaction Advisory di kantor Jakarta, memberikan konsultasi kepada pemerintah dalam proyek IPP bertenaga batubara dan proyek pengadaan air. Sampai bulan Agustus 2011, beliau juga merupakan perwakilan Indonesia untuk Private Finance Advisory Network (PFAN) dimana beliau memberikan konsultasi proyek dan keuangan yang mendukung keberhasilan beberapa penyelesaian pendanaan proyek-proyek IPP dengan menggunakan energi yang terbarukan. Irman memiliki gelar MBA dari Cass Business School of City University London UK (1999) dan gelar sarjana muda Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung Indonesia (1993).

Irman Boyle joined IIF in April 2012. He has about 15 years of experience in multilateral institutions and consulting firms (IFC, ADB, IIE/Energy Group, and PA Consulting), working in advisory service and public sector lending for energy and infrastructure projects. With IFC, he worked in the PPPs Transaction Advisory Department in its Jakarta office, advising government clients on a coal-fired IPP project and a water supply project. Until August 2011, he was also Indonesia country representative for the Private Finance Advisory Network (PFAN) where he provided project and financial advice for successful financial closings of several renewable energy IPP projects. Irman holds an MBA from Cass Business School at City University London, UK (1999), and an undergraduate degree in electrical engineering from the Bandung Institute of Technology, Indonesia (1993).



Richard Michael

### EXECUTIVE VICE PRESIDENT - HEAD OF PRIVATE CLIENT ADVISORY

Richard Michael menjabat sebagai Executive Vice President - Head of Private Clients Advisory pada tanggal 1 April 2012. Beliau telah memiliki pengalaman lebih dari 28 tahun dalam institusi keuangan, terutama dalam infrastructure project finance. Sebelum bergabung dengan IIF, Richard merupakan Managing Director, Head of Infrastructure Finance - Asia Pacific di DEPFA Bank. Jabatan beliau yang lain diantaranya adalah sebagai Head of Structured Trade Finance, NE Asia di Standard Chartered, sebagai Executive Director, Global Specialised Finance di WestLB dan berbagai posisi di Barclays. Beliau telah bekerja di regional Asia sejak tahun 1989, dimana sekitar 10 tahun di antaranya di Jakarta, Indonesia. Beliau memperoleh gelar Sarjana Sejarah dan Bahasa Modern (History and Modern Languages) di Magdalen College, Oxford dan gelar MBA di Leicester University.

Richard Michael was appointed Executive Vice President – Head of Private Clients Advisory on 1 April 2012. He has more than 28 years of experience in financial services, mainly in infrastructure project finance. Prior to joining IIF, Richard was Managing Director, Head of Infrastructure Finance – Asia Pacific at DEPFA Bank. He also held positions as Head of Structured Trade Finance, NE Asia at Standard Chartered, Executive Director, Global Specialized Finance at WestLB and various positions with Barclays. He has worked in Asia since 1989, 10 years of which has been spent in Jakarta, Indonesia. He graduated with a BA in History and Modern Languages from Magdalen College, Oxford and has an MBA from Leicester University.



Setelah sukses melakukan lompat batu, seorang pemuda berhak mendapatkan haknya sebagai anggota penuh dari masyarakat. Demikian halnya dengan IIF, setelah melewati tahap pembangunan kesadaran pasar terhadap brand Perusahaan, IIF kini menjadi referensi untuk berbagai hal di dalam pasar infrastruktur, dan menjadi salah satu penyedia pembiayaan yang prospektif.

Successfully completing the stone jumping enables a young man to lay claim to his place as a full-fledged member of the community. Having successfully passed the stage of developing market awareness of its brand, IIF has become a reference for issues arising in the infrastructure market and one of the prospective lenders.



# Maju ke Tahap Selanjutnya dalam Pembiayaan Infrastruktur | Advancing to the Next Stage of Infrastructure Financing

## Tinjauan Operasional

### A. Kondisi Perekonomian dan Sektor Infrastruktur di Indonesia

Indonesia mencatat laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 % di tahun 2013, meskipun terjadi penurunan harga komoditas dunia dan peningkatan impor energi. Laju pertumbuhan ini sedikit lebih rendah daripada rata-rata laju pertumbuhan sebesar lebih dari 6,0 % di tahun-tahun sebelumnya. Namun, dalam perspektif global, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tergolong tinggi. Bahkan, perkembangan ekonomi negara ini menunjukkan tanda-tanda perbaikan pada kuartal terakhir tahun 2013. Hal ini ditunjukkan dalam data perdagangan yang dikeluarkan oleh Statistik Indonesia yang menunjukkan adanya surplus perdagangan sebesar USD1,52 triliun. Data perdagangan ini menegaskan bahwa kebijakan moneter dan fiskal yang baru-baru ini dikeluarkan oleh pemerintah telah dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia.

Sepanjang tahun, Pemerintah telah memusatkan perhatian pada penguatan sektor manufaktur dan infrastruktur. Pemerintah sangat menyadari bahwa fasilitas infrastruktur yang tidak memadai akan menyebabkan penyumbatan pada laju pertumbuhan. Untuk itu, pemerintah telah mendorong investasi asing dan lokal di sektor riil.

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diluncurkan pada tahun 2011 bertujuan untuk menjadi pedoman dalam mempercepat

## Operational Review

### A. Indonesian Economy and Infrastructure Sector

Indonesia posted positive growth of 5.8% in 2013, despite a decline in global commodity prices and an increase in energy imports. This is slightly less than the average growth of more than 6.0% in previous years. However, from a global perspective, Indonesia's growth rate can still be labeled as robust. In fact, the country's economy showed signs of improvement in the last quarter of 2013. This is evidenced by trade data released by Statistics Indonesia that showed a significant trade surplus of US\$1.52 billion. The trade data underlines how the government's recent monetary and fiscal policy has impacted the economy.

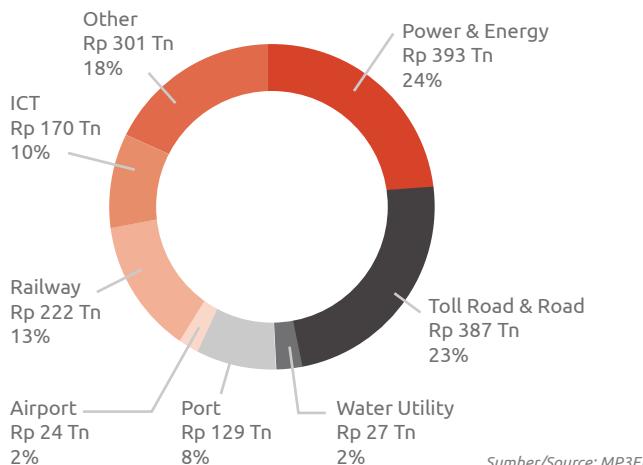
Strengthening the country's manufacturing and infrastructure sectors has been the focus of the government throughout the year. The government is well aware that the lack of infrastructure facilities creates a bottleneck that impedes further growth potential. For this reason, the government has encouraged both foreign and domestic investments in the real sector.

The Masterplan for the Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development (MP3EI), which was launched back in 2011, aims to be a guideline in speeding

pertumbuhan ekonomi negara. Fokus dari MP3EI adalah menciptakan enam koridor ekonomi, dan membangun serta memperkuat koneksi antar koridor. Pembangunan infrastruktur skala besar seperti jalan, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik dan jaringan telekomunikasi diperlukan dalam pencapaian rencana tersebut. Jumlah potensi nilai investasi infrastruktur di dalam rencana MP3EI periode tahun 2011 hingga 2025 mencapai Rp 1,653 triliun.

up the country's economic growth. The focus of MP3EI is to create six economic corridors throughout the country and build up, as well as strengthen, intercorridor connectivity. Large scale infrastructure developments such as roads, ports, airports, power supply and telecommunication networks are required in order to achieve the plan's objectives. The total amount of potential infrastructure investment in the MP3EI work plan that spans from 2011 to 2025 reaches Rp 1.653 trillion.

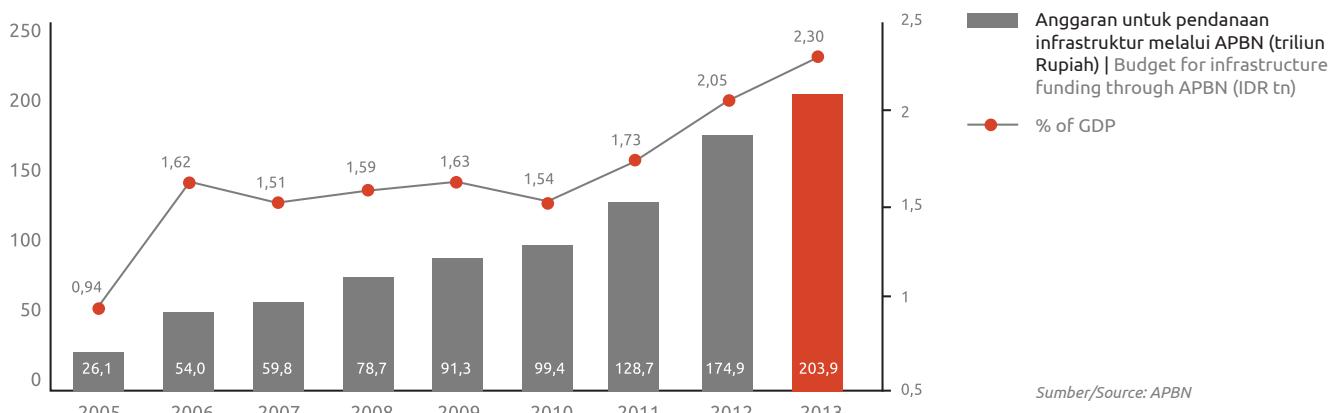
Chart 1: Rencana Investasi Infrastruktur 2011-2015 | Infrastructure Investment Plan in 2011-2025



Investasi yang dibutuhkan di dalam rencana MP3EI tidak dapat dipenuhi semata-mata dari anggaran pemerintah. Walaupun terdapat peningkatan porsi anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, namun secara persentase masih di bawah 5%, yang merupakan tingkat wajar dari porsi anggaran pembangunan infrastruktur di negara berkembang.

The investment required under the MP3EI plan cannot be provided solely by the state budget. Despite a steady increase in percentage terms of the budget, government spending for infrastructure is less than 5%, the level considered to be the benchmark for infrastructure spending in emerging economies.

Chart 2: Alokasi Anggaran Pemerintah untuk Infrastruktur | Government Budget Allocation for Infrastructure



Sebagai tambahan atas investasi melalui Anggaran Negara, pemerintah terus mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) serta *Business-to-Business* (B2B). Dari 79 proyek infrastruktur di dalam MP3EI, 32 diantaranya terdaftar sebagai proyek PPP.

Potensi pasar pembangunan infrastruktur lebih besar daripada yang telah dituliskan di dalam MP3EI, karena MP3EI tidak memasukkan proyek-proyek infrastruktur di luar lingkup MP3EI serta proyek-proyek infrastruktur yang dibutuhkan oleh sektor swasta yaitu proyek-proyek yang tidak terkait dengan MP3EI, atau proyek-proyek yang diusulkan oleh sektor swasta.

To supplement the State Budget, the government continues to encourage the involvement of the private sector in infrastructure development under the Public-Private Partnership (PPP) model as well as Business-to-Business (B2B) model. Out of 79 infrastructure projects in MP3EI, 32 are listed as PPP projects.

The potential market for infrastructure is greater than what is described in MP3EI, as the plan does not account for other infrastructure projects outside of its scope or other projects required by the private sector. This is not including other possible projects unrelated to MP3EI, or unsolicited projects being proposed by the private sector.

## B. Pasar Pembiayaan Infrastruktur

Proyek-proyek infrastruktur membutuhkan pembiayaan jangka panjang yang bisa mencapai 15 tahun. Kebutuhan pembiayaan jangka panjang ini membatasi partisipasi bank-bank lokal dalam menyediakan pembiayaan bagi proyek-proyek infrastruktur, karena terbatasnya porsi pendanaan jangka panjang yang dimiliki bank-bank tersebut. Kenaikan suku bunga Bank Indonesia dari 5,75 % di awal Januari 2013 menjadi 7,50 % pada akhir tahun juga memicu keengganan bank untuk memberikan pembiayaan jangka panjang, yang dibutuhkan dalam pembiayaan proyek infrastruktur.

Sementara bank-bank lokal menaikkan suku bunga pinjaman mereka, sebagian besar bank asing mensyaratkan investor di bidang infrastruktur untuk memberikan jaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh bank-bank asing, melalui skema *Export Credit Agencies* ataupun jaminan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Kedua hal tersebut, keterbatasan dana dan peningkatan suku bunga, meningkatkan tantangan yang dihadapi oleh pemilik proyek infrastruktur untuk mendapatkan pembiayaan bagi proyek-proyek mereka.

## B. Infrastructure Financing Market

The implementation of infrastructure projects requires long-term financing, which can reach up to 15 years. The long financing tenor has limited local banks' participation in providing financing to infrastructure projects, as the long-term portion of the funding base for most of these banks is limited. The increase in Bank Indonesia's rate from 5.75% per annum in early January 2013 to 7.50% per annum by the end of the year has further fuelled the reluctance of the banks to provide long term financing, which is needed for infrastructure finance.

While local banks have increased their interest rates, most foreign banks require infrastructure investors to provide them with a guarantee in the financing scheme, either through Export Credit Agencies or from the Government of Indonesia. This combination of limited funding and increased interest rates has magnified the challenges faced by infrastructure project owners in securing financing for their projects.

Namun demikian, telah mulai terjadi perbedaan pandangan di kalangan bank lokal. Sebagian bank lokal menyatakan adanya kemungkinan perlambatan pencairan kredit kepada proyek infrastruktur. Sebagian bank lokal lainnya telah menyatakan rencana mereka untuk meningkatkan alokasi kredit di sektor infrastruktur dengan didasari atas adanya dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi, termasuk diantaranya peraturan tentang pembebasan lahan. Bank-bank berpendapat adanya peningkatan permintaan atas pengembang infrastruktur serta perbaikan peraturan di dalam skema KPS. Hal ini akan menyebabkan pasar hutang menjadi lebih kompetitif di masa mendatang.

Amid this situation, local banks have sent mixed signals to infrastructure project owners. While some have already informed their infrastructure clients of a possible slowdown in credit disbursement, others have revealed plans to increase credit allocation for the infrastructure sector due to the fact that the government has issued supportive regulations for this sector, including the regulation to facilitate land acquisition. In addition, the banks also feel infrastructure developers stand to benefit from pressing demand for better transportation along with improved regulations on PPPs. This situation will lead to a more competitive debt market.

#### Kinerja IIF yang kuat

- Pencatatan komitmen pembiayaan sebesar Rp 2 triliun selama tahun 2013;
- Jumlah komitmen pembiayaan sebesar Rp 2,5 triliun di akhir tahun 2013;
- Pencairan pembiayaan sebesar Rp 1 triliun.

#### IIF's Strong Results

- Booked Rp 2 trillion in financing commitments in 2013;
- Total financing commitments by year end Rp 2.5 trillion;
- Disbursed Rp 1 trillion.

## C. Menjalankan Peran Sebagai Katalisator

IIF beroperasi tepat di tengah-tengah kondisi politik dan bisnis ini, berperan sebagai katalis untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dan mengembangkan pasar baru dalam pembangunan infrastruktur. Peningkatan pengakuan pasar akan peran IIF, turut mendukung kuatnya kinerja Perusahaan di tahun 2013.

Dengan latar belakang kondisi makroekonomi dan sektor infrastruktur yang telah dijelaskan sebelumnya, IIF dapat tumbuh secara signifikan di tahun 2013 dan memenuhi perannya sebagai katalis untuk mendorong investasi di sektor infrastruktur di Indonesia.

Perusahaan telah membuat terobosan di tahun 2013 dengan keberhasilannya memenuhi target

## C. Carrying Out the Catalyst Role

IIF operates exactly at the center of this political and business environment, serving as a catalyst to finance infrastructure projects and develop a new market for infrastructure development. Coupled with IIF's growing recognition in the market, this favorable environment led way to the Company's excellent performance in 2013.

With the macroeconomic and sector background described earlier, IIF was able to significantly grow in 2013 to perform its catalytical role in spurring infrastructure investment in Indonesia.

The Company made strides in 2013 and successfully oversaw a breakthrough for its

di tahun tersebut sebagaimana disebutkan dalam laporan kinerja per departemen.

IIF berkomitmen untuk meningkatkan kinerjanya dalam mencapai target tahun terakhir dari Tahap Pendirian di tahun 2014, yaitu untuk menyiapkan Perusahaan dalam memasuki fase perkembangan berikutnya yang akan dimulai di tahun 2015, diantaranya dengan meningkatkan pengenalan pasar terhadap IIF.

### 1. Departemen Investasi

Departemen Investasi berhasil membukukan komitmen pembiayaan sekitar Rp 2 triliun pada tahun 2013, sehingga jumlah sekeluruh komitmen pembiayaan naik menjadi sekitar Rp 2,5 triliun pada akhir tahun 2013 berbanding dengan Rp 500 miliar pada tahun 2012. Di sisi pencairan, IIF membukukan total pencairan dana sekitar Rp 995 miliar pada akhir tahun 2013 berbanding dengan nil pencairan pada tahun sebelumnya.

Pencapaian penting lainnya dari Departemen Investasi adalah keberhasilan dalam menyiapkan daftar proyek yang potensial untuk dibiayai, dimana persetujuan pembiayaan diharapkan dapat tercapai pada pertengahan 2014. Daftar proyek tersebut meliputi fasilitas hilir minyak dan gas, pembangkit listrik, air minum, fasilitas pendukung bandara, dan pengembangan pelabuhan laut, dengan estimasi total komitmen pembiayaan sekitar Rp 2,8 triliun.

Dengan prestasi ini, Departemen Investasi telah memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian Perusahaan di tahun 2013, serta menciptakan kesadaran *brand* IIF di pasar pembiayaan infrastruktur. Pasar mulai mempertimbangkan IIF sebagai pihak yang dapat dijadikan acuan dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam industri infrastruktur, dan juga sebagai salah satu penyedia pembiayaan.

business and met its 2013 targets as elaborated in the achievements of each department.

IIF is committed to enhancing its performance to meet the final year's target of the Establishment Stage in 2014, i.e. to prepare the Company to enter into the new phase of development in 2015 onwards by, among others, carrying out the brand recognition campaign.

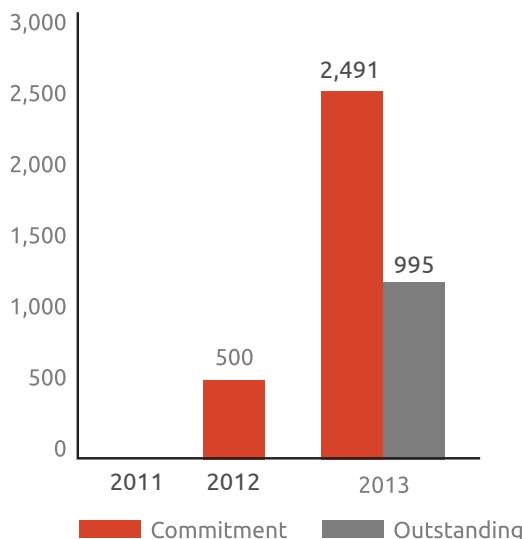
### 1. Investment Department

The Investment Department successfully booked approximately Rp 2 trillion in financing commitments in 2013, which brought IIF's total financing commitments to approximately Rp 2.5 trillion by the end of 2013 compared to Rp 500 billion in 2012. On the disbursement side, IIF was able to book total disbursed funds of approximately Rp 995 billion by end of 2013 compared to practically zero disbursement in the previous year.

Another notable achievement of the Investment Department was its success in building up a strong pipeline of projects that are expected to reach financial close by mid 2014. The pipeline consists of oil and gas downstream facilities, power plants, drinking water, airport support facilities, and seaport developments with an estimated financing commitment of approximately Rp 2.8 trillion.

With these achievements, the Investment Department has contributed positively to IIF's achievement of its 2013 targets, creating awareness of IIF's brand in the infrastructure financing market. The market has started to consider IIF as a reference point for issues arising in the infrastructure industry and one of the potential lenders.

Chart 3: Komitmen Pinjaman vs Pencairan Pinjaman | Loan Commitment vs. Loan Disbursement  
(Dalam miliar Rupiah/In billion Rupiah)



Karena lebih dari 40% komitmen pinjaman IIF disalurkan ke proyek infrastruktur yang masih dalam tahap *greenfield*, pencairan pinjaman dapat berlangsung lebih dari satu tahun. Pencairan pinjaman pada umumnya dikaitkan dengan tahap pencapaian pembangunan proyek, sebagaimana yang telah disetujui di awal komitmen.

Perlu disadari bahwa waktu pelaksanaan uji tuntas dan negosiasi fasilitas pinjaman kepada proyek infrastruktur dapat berlangsung lebih lama daripada pembiayaan perbankan pada umumnya, dimana hal ini menyebabkan lebih dari separuh komitmen pembiayaan terjadi di semester kedua tahun 2013. Dengan demikian, pencairan pinjaman di tahun 2013 hanya sebesar 50% dari komitmen baru.

Pencairan pinjaman terbesar dari IIF adalah pada sektor telekomunikasi dimana merupakan sektor yang paling siap dengan risiko kredit yang relatif rendah, dan pada sektor tenaga pembangkit listrik dimana terdapat permintaan pembiayaan yang tinggi.

As more than 40% of IIF's Loan Commitments are channeled to greenfield infrastructure projects, the loan disbursement is normally longer than one year. The disbursement is commonly tied to the progress of the projects as agreed at the time of commitment.

It is noteworthy that the lead time for preparing due diligence and negotiating a loan facility to an infrastructure project is longer than for a corporate facility, whereby more than half of IIF's new Loan Commitments were booked in the second half of 2013. Consequently, the disbursement in 2013 is slightly less than 50% of new commitments.

IIF disbursed the biggest portion of financing to the telecommunication sector, which is a mature industry with a relatively low credit risk, followed by the power sector which has significant financing needs.

Tabel/Table 1: Rincian portofolio | Portfolio Breakdown (Dalam Rupiah/in Rupiah)

	Komitmen yang sudah dicairkan/Drawn Commitment	Komitmen yang belum dicairkan/ Undrawn Commitment	Jumlah/Total
<b>Rupiah/IDR</b>			
Jalan tol/ Toll road	99,350,512,713	400,649,487,287	500,000,000,000
Telekomunikasi/ Telecommunication	160,000,000,000	240,000,000,000	400,000,000,000
Pengolahan air/Water treatment	-	282,000,000,000	282,000,000,000
<b>Jumlah/Total</b>	<b>259,350,512,713</b>	<b>922,649,487,287</b>	<b>1,182,000,000,000</b>
<b>Dolar Amerika Serikat/USD</b>			
Pemeliharaan pesawat/ Aircraft maintenance	60,945,000,000	-	60,945,000,000
Telekomunikasi/ Telecommunication	449,572,175,929	18,228,813,564	467,800,989,493
Energi/Power	225,547,004,424	554,548,995,576	780,096,000,000
<b>Jumlah/Total</b>	<b>736,064,180,353</b>	<b>572,777,809,140</b>	<b>1,308,841,989,493</b>
<b>Jumlah/Total</b>	<b>995,414,693,066</b>	<b>1,495,427,296,427</b>	<b>2,490,841,989,493</b>

## 2. Grup Private Client Advisory (PCA)

Private Client Advisory melanjutkan tugasnya dalam mendukung salah satu konsorsium peserta tender proyek KPS - Bandar Lampung Water. Proyek ini dijadwalkan untuk dimulai pada tahun 2013, namun kemungkinan baru akan dilaksanakan pada tahun 2014. Proyek ini akan menjadi salah satu proyek pertama yang menggunakan Dana Dukungan Kelayakan yang tersedia melalui Kementerian Keuangan untuk membantu proyek-proyek yang layak secara ekonomi agar menjadi layak secara finansial.

Sektor KPS bergerak lambat, namun tim Private Client Advisory berharap dapat memanfaatkan pengalaman yang dibangun di Lampung untuk mendapatkan sejumlah mandat lainnya untuk mendukung proyek-proyek berikutnya di sektor air, listrik dan jalan raya. Tim Private Client Advisory juga akan menargetkan pekerjaan advisory yang mendukung klien-klien penting IIF dalam mengembangkan proyek yang dilakukan oleh sektor swasta.

## 2. Private Client Advisory Group (PCA)

The Private Client Advisory team continued its work in supporting one of the shortlisted consortia for the Bandar Lampung Water PPP project. This project was due to have closed in the year, but is now likely to close in 2014. It will be one of the first projects to use the Viability Gap Funding (VGF), available through the Ministry of Finance to help projects that are economically feasible become financially viable.

Progress in the PPP sector has been slow, but the team is looking to build on the Lampung experience with other mandates in support of upcoming projects in the water, power, rail and road sectors. The team will also target advisory work in support of IIF's key clients to develop purely private projects.

Sebagaimana biasanya, tim Private Client Advisory bertujuan membantu menciptakan peluang pemberian pembiayaan yang menarik bagi tim investasi IIF.

### 3. Grup Public Sector Advisory

Public Sector Advisory Group (PSA Group) mencatat beberapa pencapaian dalam menjalankan perannya sebagai konsultan transaksi dan kebijakan sektor publik, yaitu:

#### a. Konsultan Transaksi

- PSA Group mencapai beberapa tahapan penting dalam proyek KPS SPAM Semarang Barat. Tahapan dimaksud adalah konsultasi publik tentang tarif yang berlangsung di Semarang di bulan Juni 2013 dan dihadiri oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dari 3 kecamatan dan 30 kelurahan yang akan menjadi area layanan proyek; dan konsultasi pasar/ peluncuran *Expression of Interest*, yang dilaksanakan di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan dihadiri oleh 31 perusahaan dari 12 negara;
- Pencapaian penting lainnya adalah ditandatanganinya MoU antara IIF dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang menunjuk IIF sebagai konsultan transaksi dalam persiapan dan penyampaian aplikasi Fasilitas Dana Geothermal (FDG) dari Gubernur Jawa Barat kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Aplikasi FDG tersebut terkait dengan wilayah kerja panas bumi Gunung Kromong. Kesepakatan kerjasama ini melanjuti kesepakatan yang telah ditandatangani oleh IIF di tahun sebelumnya, yaitu dengan Gubernur Sulawesi Tengah untuk wilayah kerja panas bumi Borapulu. Adapun untuk proyek KPS panas bumi Borapulu, Gubernur Sulawesi Tengah dengan asistensi IIF telah menyerahkan aplikasi formal kepada PIP pada awal tahun ini.

#### b. Konsultasi Kebijakan/Regulasi

Disamping jasa konsultasi yang terkait dengan proyek KPS dan/atau proyek/transaksi yang berkaitan dengan pemerintah, PSA Group juga

As always, the aim of the team is to help create attractive lending opportunities for the investment team at IIF.

### 3. Public Sector Advisory Group

The Public Sector Advisory Group (PSA Group) made several notable achievements in carrying out their Transaction Advisory Role and Public Sector Policy Works as elaborated below:

#### a. Transaction Advisory Role

- PSA Group achieved several notable and important milestones with the PPPs in the West Semarang Drinking Water project. They were the public consultation on tariff, which took place in Semarang in June 2013 and was attended by the Community Empowerment Bodies (LPMK) representing the people from 3 districts and 30 sub-districts within the service area of the project; and the market consultation/ launching of the Expression of Interest, which was held in the hall of the Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM), and attended by 31 companies from 12 countries;
- Another significant achievement was enabling IIF to sign an MoU with the West Java Provincial Government, which appointed IIF to act as the transaction advisor for the preparation and submission of the West Java Governor's application for Geothermal Fund Facility (GFF) to the Indonesia Investment Agency (PIP). The GFF is related to the Gunung Kromong geothermal site. This new cooperation serves as an addition to the existing MoU with the Governor of Central Sulawesi for the Borapulu geothermal site, which was signed in the previous year. As for the development of the Borapulu geothermal PPP project, with the assistance of IIF, a formal application letter from the governor was successfully submitted to PIP this year.

#### b. Policy/Regulation Consultation

In addition to advisory roles directly related to PPPs and/or government-related projects/ transactions, PSA Group has also been



kerap menerima permintaan bantuan dari berbagai unsur Pemerintah untuk memberikan masukan ataupun terlibat dalam penyusunan berbagai kebijakan/regulasi dan/atau kajian atas berbagai isu. Sebagian dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

- Pelaksanaan proyek KPS Panasbumi dan dalam kaitannya, operasionalisasi dari FDGT. Sejak pertengahan 2012 IIF secara kontinyu berperan aktif dalam mempelopori dan mendukung seluruh diskusi dan proses yang melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Upaya ini membawa hasil sebuah rancangan final Nota Kesepahaman (MoU) yang akan segera ditandatangani oleh kedua kementerian tersebut;
- Analisis Modalitas Proyek Tol Trans Sumatera (TTS) Dimulai diawal 2013, IIF diminta oleh Kemenkeu untuk ikut terlibat dalam berbagai diskusi dan rapat terkait proyek TTS. Pada bulan Juni 2013,

requested by numerous government agencies to take part in the drafting of various policies/regulations and/or assessments of different issues. Some of them include:

- The implementation of the Geothermal PPP Project and the associated operationalization of FDGT. Starting in mid-2012, IIF continued to actively lead and support the discussion and process between the Ministry of Finance and Ministry of Energy and Mineral Resources. This tireless effort resulted in a final draft of the MoU to be signed in the very near future by the two ministries;
- Modality Analysis on the Trans-Sumatera Tollroad Project Starting in early 2013, IIF was requested by the Ministry of Finance to be involved in discussions and meetings related to the

IIF dalam kapasitas sebagai konsultan Kemenkeu menyampaikan sebuah analisa opsi, termasuk di dalamnya berbagai opsi terkait struktur proyek, pembiayaan dan skema-skema kontribusi ekuitas Pemerintah dalam proyek sepanjang 3.000 km dengan nilai Rp 352 triliun ini;

- **Dukungan Kelayakan (Viability Gap Fund/VGF)**  
IIF diminta oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan masukan dalam proses penyusunan konsep Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang petunjuk pelaksanaan Dukungan Kelayakan. PMK dimaksud pada akhirnya terbit pada 18 Oktober 2013 melalui PMK No.143/PMK.011/2013;

- **Skema Availability Payment (AP) dalam Proyek KPS**

Pada bulan November 2013, IIF menyampaikan tanggapan kepada Kemenkeu tentang struktur AP dan pelaksanaannya pada proyek-proyek pemerintah daerah sebagai alternatif atas skema pengguna-pembayar (*user charge*). Pada saat itu Kemenkeu sedang dalam tahap pengumpulan input dan mempelajari praktik-praktik terbaik yang berlaku di dunia sebagai referensi dalam penyusunan regulasi tentang AP dalam proyek yang menggunakan skema KPS;

- **Bandar Udara yang Dikelola oleh Unit**

Sejak Maret 2013 IIF memberikan dukungan dan asistensi kepada tim gabungan Kementerian Perhubungan dan Kemenkeu dalam mengkaji opsi dan kemungkinan adanya partisipasi swasta dalam Bandar Udara UPBU. Dalam kaitannya, acara konsultasi pasar digelar pada 5 Desember 2013 dan dipimpin oleh Wakil Menteri dari masing-masing kementerian tersebut dan dihadiri oleh 37 institusi dari 9 negara, disamping juga beberapa lembaga multilateral;

- **Proyek PPP Kilang Minyak**

Sejak dimulainya proses kajian pada November 2013, berdasarkan permintaan dari Kemenkeu IIF terlibat dalam berbagai diskusi dan rapat yang diadakan oleh Kemenkeu terkait kajian yang tengah dilakukan oleh konsultan yang ditunjuk oleh Kemenkeu dan Pertamina mengenai kemungkinan penerapan skema KPS dalam pembangunan kilang minyak.

project. In June 2013, IIF, in the capacity of advisor to the Ministry of Finance, submitted an option analysis paper encompassing options for project structure, financing, and schemes for government equity contribution in the Rp 352 trillion, 3,000 km project;

- **Viability Gap Fund (VGF)**

IIF was requested by the Ministry of Finance to provide input on VGF implementation, in relation to the drafting of the Ministry of Finance's VGF implementation guidelines. The Ministry of Finance regulation was subsequently issued on 18 October 2013 under Regulation of the Minister of Finance (PMK) No. 143/PMK.011/2013;

- **Availability Payment (AP) scheme in PPPs**

In November 2013, IIF gave feedback to the MoF on AP structuring and the implementation of local government projects as an alternative to the user charge scheme. The Ministry of Finance was at the time gathering input and studying best practices as references in preparing an availability payment regulation for infrastructure PPP modality;

- **Small-scale airports under the Minister of Transportation**

Since March 2013, IIF has advised and assisted the joint team of the Ministry of Transportation and the Ministry of Finance on options and possibilities for Private Sector Participation in small scale airports. A market consultation event to obtain market input on the idea was conducted on 5 December 2013, chaired and hosted by the two Deputy Ministers from each ministry and attended by 37 institutions from 9 countries, as well as several multilateral agencies;

- **Oil Refinery PPP Project**

Since the start of the Oil Refinery PPP Project in November 2013, at the request of the Ministry of Finance, IIF has been involved in and provided input during the meetings and discussions held in relation to the ongoing study by a consultant appointed by Pertamina and the Ministry of Finance on the likelihood of applying the PPP model in oil refinery projects.

## 4. Departemen Operasi

Pencapaian kinerja pembiayaan dan *advisory* di tahun 2013 dimungkinkan dengan adanya proses kerja yang cepat dan efisien melalui platform yang telah dibentuk oleh Departemen Operasi. Di tahun 2013, Departemen Operasi merancang dan menerapkan platform yang kuat dan mampu untuk melaksanakan fungsi-fungsi di bidang operasional kredit dan *treasury*, Teknologi Informasi, Pengadaan, dan Procedure Support, yang dirancang khusus untuk posisi IIF yang unik dengan produk khusus untuk sektor infrastruktur.

Pada tahun 2013, terdapat pencapaian penting di bidang operasional kredit dan *treasury* diantaranya penetapan Kebijakan dan Prosedur Operasional Kredit dan Treasury sebagai dasar utama operasional, penyusunan Buku Kerja Internal yang digunakan sebagai sistem sementara untuk Pencatatan Pinjaman dan *Treasury*, dan sistem alur kerja dalam proses pencairan dan pelaporan pinjaman.

Selanjutnya, platform teknologi informasi yang lebih baik diperlukan untuk mendukung peningkatan aktivitas dan bisnis IIF. Dalam hal ini, perubahan mendasar sedang dilakukan sesuai dengan Proyek Rencana Strategis TI, yang dirancang oleh Departemen Operasi.

Departemen Operasi telah membuat beberapa pencapaian penting di dalam area pengadaan, diantaranya adalah pembuatan Daftar Rekanan dengan Syarat & Ketentuan yang berlaku umum serta sistem manajemen supplier, yang memungkinkan proses yang cepat dan terpercaya dalam pemilihan, penetapan, dan pengawasan supplier.

Pencapaian selanjutnya dari Departemen Operasi adalah pembuatan proses bisnis dari awal hingga akhir yang menyeluruh dan Prosedur Operasional Standar untuk seluruh fungsi dan peran di dalam IIF.

## 4. Operations Department

The achievements in both financing and advisory services in 2013 were made possible by the swift and efficient business processes conducted through the platform established by Operations. In 2013 Operations designed and implemented solid and capable platforms to enable functions in the areas of Credit and Treasury Operations, Information Technology, Procurement, and Procedure Support, which were specifically designed for IIF's unique position and slate of offerings in the infrastructure sector.

In 2013, notable accomplishments were made in Credit and Treasury Operations, including the establishment of Credit and Treasury Operations Policy and Procedure as the principle foundation of operations, development of an Internal Workbook as the temporary Loan and Treasury Maintenance system, and a Workflow system catered to loan disbursement processing and reporting.

Moving forward, a properly defined information technology platform is critical to support an increase in the activities and business of IIF. In this area, a fundamental transformation is underway based on the IT Strategic Plan Project, designed and kicked off by Operations.

Operations has made several notable achievements in the area of Procurement, among which was the implementation of a List of Preferred Vendors with Umbrella Terms & Conditions and an enhanced Vendor Management System, the latter of which enabled a quick and reliable process in vendor selection, appointment and monitoring.

Last but not least, Operations has completed a comprehensive end-to-end business process and Standard Operating Procedures for all of the functions and roles within IIF.

## 5. Manajemen Risiko

Sejalan dengan perkembangan bisnis IIF, Manajemen Risiko melanjutkan fungsi pengamanannya untuk membatasi dampak negatif terhadap laba, modal, dan reputasi Perusahaan.

Pada tahun 2013, beberapa pencapaian telah dilakukan dalam membangun serta meningkatkan sistem manajemen risiko perusahaan untuk risiko-risiko kredit, pasar, operasional, dan Sosial & Lingkungan. Hal ini termasuk pengembangan Prosedur Operasional Standar (termasuk proses kredit dari awal sampai akhir), pedoman, sistem pemantauan, dan peningkatan kapasitas karyawan dengan memfasilitasi beberapa pelatihan internal bagi staff IIF terkait.

## Analisa Keuangan

### A. Pertumbuhan yang Kokoh

IIF mampu mencetak pertumbuhan laba komprehensif yang tinggi sebesar 120% menjadi Rp 31,3 miliar di tahun 2013 atau meningkat Rp 17,1 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan laba yang signifikan tersebut didorong oleh meningkatnya pendapatan operasional terutama pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan, penempatan deposito berjangka dan giro serta surat berharga. Selama tahun 2013, IIF berhasil mencapai kesepakatan komitmen kredit yang diberikan sebesar Rp 2,49 triliun, peningkatan yang tinggi dari komitmen sebelumnya sebesar Rp 500 miliar di tahun 2012. Sampai akhir tahun 2013, IIF juga telah membukukan pencairan kredit sebesar Rp 995 miliar yang merupakan pencairan kredit pertama sejak pendiriannya. Hal ini menunjukkan fungsi IIF sebagai institusi pembiayaan infrastruktur telah berjalan dengan baik.

Jumlah aset Perusahaan pada tahun 2013 tumbuh 96% menjadi sebesar Rp 3,86 triliun pada akhir tahun 2013 dibandingkan Rp 1,97 triliun di tahun

## 5. Risk Management

In line with IIF's business development, Risk Management continues its safeguard function to limit the potential adverse variations towards the Company's earnings, capital and reputation.

In 2013, some achievements have been made in terms of establishing as well as enhancing the enterprise risk management system for credit, market, operational, and Social & Environmental risks. This includes development of Standard Operating Procedures (including credit end-to-end process), guidelines, monitoring system, and staff capacity building by providing some in-house training for IIF's related staff.

## Financial Review

### A. Solid Growth

IIF's comprehensive income grew by 120% to Rp 31.3 billion in 2013, marking an increase of Rp 17.1 billion from the previous year. The significant growth was due to operating income, particularly interest income from disbursed loans, time deposits, current accounts and securities. In 2013, the Company was able to reach a financing commitment worth Rp 2.49 trillion, a sharp rise from Rp 500 billion in the previous year. As of the year end 2013, IIF also booked a loan balance of Rp 995 billion, which was the first credit disbursement since its establishment. This disbursement shows that IIF has been functioning well as an infrastructure financing institution.

The Company's assets grew by 96% to Rp 3.86 trillion as of the year end from Rp 1.97 trillion in 2012 due to the drawing of subordinated

2012. Pertumbuhan aset ini terutama didukung oleh penarikan dana pinjaman subordinasi Bank Dunia (WB) dan Asian Development Bank (ADB) serta tambahan modal dari pemegang saham IIF.

Dana pinjaman subordinasi telah meningkat dari Rp 778 miliar di akhir tahun 2012 menjadi Rp 2,03 triliun di akhir tahun 2013. Pencairan pinjaman subordinasi yang dikombinasikan dengan tambahan modal dari pemegang saham sebesar Rp 605 miliar telah memperkuat struktur permodalan Perusahaan. Sehingga Perusahaan dapat meningkatkan aset produktifnya terutama untuk pinjaman yang diberikan.

## B. Aset

Aset IIF meliputi aset produktif dan aset non-produktif. Aset produktif terdiri dari penempatan pada bank, surat-surat berharga dan pinjaman yang diberikan. Total aset produktif pada tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 96% dibandingkan dengan tahun 2012.

Pertumbuhan aset didorong oleh mulai dikucurkannya pinjaman yang diberikan sebesar Rp 995 miliar. Selain itu, jumlah kas dan setara kas naik sebesar 38,0% dari Rp 1,78 triliun di tahun 2012 menjadi Rp 2,46 triliun di tahun 2013 yang sebagian besar ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka. IIF juga meningkatkan penempatan pada surat berharga dari Rp 152 miliar di akhir tahun 2012 menjadi Rp 366 miliar di akhir tahun 2013.

## C. Liabilitas

Liabilitas IIF di tahun 2013 meningkat sebesar 158,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh penarikan dana pinjaman subordinasi dari Asian Development Bank (ADB) dan World Bank (WB) sejumlah USD 85,5 juta yang dilakukan di tahun 2013. Peningkatan liabilitas juga didukung oleh peningkatan biaya akrual dan liabilitas lainnya

loans from the World Bank (WB) and Asian Development Bank (ADB), and a capital injection by IIF's Shareholders.

The subordinated loans increased from Rp 778 billion in 2012 to Rp 2.03 trillion by year end. Combined with Rp 605 billion in capital injection from the Shareholders, this has strengthened the Company's capital structure, which, in turn, has significantly improved IIF's assets. Thus, the Company has been able to increase its productive assets, particularly in loans.

## B. Assets

IIF's assets consist of productive and non-productive assets. The productive assets comprise placements in bank, securities and loans. The productive assets in 2013 grew by 96% from 2012.

The asset growth was due to the loan disbursement totaling Rp 995 billion. In addition, cash and cash equivalents rose by 38.0% from Rp 1.78 trillion in 2012 to Rp 2.46 trillion in 2013, most of which was placed in time deposits. IIF also increased its placements in securities from Rp 152 billion as at the end of 2012 to Rp 366 billion at the year end.

## C. Liabilities

IIF's liabilities in 2013 increased by 158.4% compared with those in the previous year. This increase was mainly due to the drawdown in 2013 of subordinated loans from ADB and WB amounting to US\$ 85.5 million. The increase was also contributed by the increase in accrued expenses and other liabilities from Rp 10.2 billion in 2012 to Rp 17.8 billion in 2013, which

dari Rp 10.2 miliar di tahun 2012 menjadi Rp 17.8 miliar di tahun 2013 yang sebagian besar berasal dari akrual bunga dan bonus.

Pinjaman subordinasi merupakan salah satu sumber pendanaan utama untuk pembiayaan infrastruktur yang Perusahaan lakukan. IIF mendapatkan fasilitas pinjaman subordinasi dari PT Sarana Multi Infrastruktur yang merupakan pinjaman penerusan dari ADB dan WB masing-masing sebesar USD 100 juta dengan masa pinjaman sampai 1 Maret 2034 untuk pinjaman ADB dan sampai 1 November 2033 untuk pinjaman WB.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan memiliki saldo pinjaman subordinasi yang berasal dari ADB dan WB masing-masing sebesar Rp 1,15 triliun (ekuivalen USD 94,6 juta) dan Rp 877 miliar (USD 72 juta). Pada tahun 2012, saldo pinjaman subordinasi yang berasal dari ADB dan WB masing-masing sebesar USD 71,1 juta dan USD 10 juta.

## D. Ekuitas

Total ekuitas IIF meningkat dari Rp 1,17 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp 1,81 triliun pada tahun 2013. Peningkatan signifikan dari ekuitas ini terutama berasal dari modal saham dipesan yang telah disetorkan oleh para pemegang saham Perusahaan pada bulan Desember 2013 sebesar Rp 596 miliar ditambah tambahan modal disetor sebesar Rp 8,88 miliar. Hal ini menunjukkan komitmen dan dukungan penuh dari para pemegang saham untuk memperkuat struktur permodalan IIF. Selain itu, untuk pertama kalinya, IIF telah berhasil membukukan laba ditahan sebesar Rp 9,3 miliar pada tahun 2013 dari sebelumnya akumulasi kerugian sebesar Rp 18,9 miliar di tahun 2012. Pembukuan laba ditahan ini berasal dari laba bersih tahun 2013 yang dicetak Perusahaan sebesar Rp 27,5 miliar.

mainly consist of accrued interest and bonus.

Subordinated loans are one of main sources of funds for the infrastructure financing conducted by the Company. IIF obtained subordinated loan facilities from PT Sarana Multi Infrastruktur, which represents the channeling from ADB and WB amounting to US\$ 100 million each. The tenor of ADB's loan is up to 1 March 2034, while that of WB's loan is up to 1 November 2033.

As of 31 December 2013, the Company had outstanding subordinated loans from ADB and WB amounting to Rp 1.15 trillion (equivalent to US\$ 94.6 million) and Rp 877 billion (equivalent to US\$ 72 million), respectively. In 2012, the outstanding subordinated loans balance from ADB and WB was US\$ 71.1 million and US\$ 10 million, respectively.

## D. Equity

The total equity of IIF increased from Rp 1.17 trillion in 2012 to Rp 1.81 trillion in 2013. The significant increase in equity was mainly from the capital subscription, which was paid up by the Company's Shareholders in December 2013 amounting to Rp 596 billion and an addition paid up capital in the amount of Rp 8.88 billion. This shows the full commitment and support from the Shareholders to strengthen the capital structure of IIF. In addition, for the first time, IIF booked retained earnings of Rp 9.3 billion in 2013 from an accumulated deficit of Rp 18.9 billion in 2012. In 2013, net income amounted to Rp 27.5 billion.

## E. Pendapatan

Dengan terus meningkatnya aset produktif, IIF berhasil meningkatkan pendapatannya sebesar 89,9% dari Rp 65,8 miliar di tahun 2012 menjadi Rp 124,9 miliar di tahun 2013. Pendapatan IIF terutama berasal dari penghasilan investasi sebesar Rp 118,3 miliar di tahun 2013, meningkat sebesar 80,9% dibandingkan penghasilan investasi sebesar Rp 65,4 miliar di tahun 2012.

### 1. Penghasilan Investasi

Pendapatan bunga di tahun 2013 meningkat sebesar Rp 38,4 miliar (60,4%), yaitu dari Rp 63,6 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp 102,0 miliar di tahun 2013. Di tahun 2013, IIF telah berhasil membukukan pendapatan bunga pinjaman diberikan sebesar Rp 17,5 miliar yang berasal dari total penyaluran kredit sebesar Rp 995 miliar sampai akhir tahun 2013. Pendapatan dari penempatan dana di deposito berjangka dan giro juga mengalami peningkatan sebesar Rp 20,9 miliar dari sebelumnya sebesar Rp 63,6 miliar di tahun 2012 menjadi Rp 84,5 miliar di tahun 2013. Selain itu, IIF juga membukukan pendapatan dari penempatan dana pada surat berharga sebesar Rp 16,3 miliar di tahun 2013 dibandingkan dengan hanya Rp 1,8 miliar di tahun 2012.

Tabel/Table 2: Penghasilan Investasi | Investment Income  
(Dalam Jutaan Rupiah/In million Rupiah)

	2013	2012
Pendapatan bunga pinjaman yang diberikan/ <i>Interest income from loans</i>	17,465	-
Pendapatan bunga deposito berjangka/ <i>Interest income from time deposits and bonds</i>	71,267	61,593
Pendapatan bunga giro/ <i>Interest income from current accounts</i>	13,261	2,000
Jumlah pendapatan bunga aset keuangan yang tidak diklasifikasikan dalam FVTPL/ <i>Total interest income on financial assets not designated as Fair Value Through Profit &amp; Loss (FVTPL)</i>	101,993	63,593
Pendapatan dari unit penyertaan reksadana dan obligasi/ <i>Income from investment in mutual funds and bonds</i>	17,138	983
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar surat berharga/ <i>Unrealized (loss) gain on changes in fair value of marketable securities</i>	(838)	801
<b>Jumlah/Total</b>	<b>118,293</b>	<b>65,377</b>

## E. Revenue

As a result of increasing productive assets, IIF successfully increased its revenue by 89.9% from Rp 65.8 billion in 2012 to Rp 124.9 billion in 2013. IIF's revenue was mainly from investment income of Rp 118.3 billion in 2013, which is an increase of 80.9% compared to Rp 65.4 billion in 2012.

### 1. Investment Income

Interest income in 2013 rose by Rp 38.4 billion (60.4%), up from Rp 63.6 billion in 2012 to Rp 102.0 billion in 2013. In 2013, IIF also successfully booked interest income from loans amounting to Rp 17.5 billion, which was generated from loan disbursements of Rp 995 billion by the end of 2013. The income from placements in time deposits and current accounts increased by Rp 20.9 billion (32.9%), from Rp 63.6 billion in 2012 to Rp 84.5 billion in 2013. In addition, IIF booked revenue from placements in marketable securities of Rp 16.3 billion in 2013, compared to only Rp 1.8 billion in 2012.

## 2. Penghasilan Operasional Lain

Selama tahun 2013, IIF berhasil membukukan pertumbuhan penghasilan operasional lain dari Rp 391 juta di tahun 2012 menjadi Rp 6,6 miliar di tahun 2013 yang sebagian besar berasal dari pendapatan provisi dan komisi dari pinjaman yang diberikan.

## 2. Other Operating Income

In 2013, IIF successfully booked an increase in other operating income from Rp 391 million in 2012 to Rp 6.6 billion in 2013, which was mainly contributed by the provisions and commission income from loans.

## F. Beban Operasional

Selama tahun 2013, beban usaha Perusahaan meningkat sebesar 81,4% (Rp 41,1 miliar) dari sebelumnya Rp 50,5 miliar di tahun 2012 menjadi Rp 91,6 miliar di tahun 2013. Peningkatan beban usaha ini terutama berasal dari beban umum dan administrasi serta beban bunga pinjaman.

## F. Operating Expenses

In 2013, the operating expenses of the Company increased 81.4% (Rp 41.1 billion) from Rp 50.5 billion in 2012 to Rp 91.6 billion in 2013. The increase in operating expenses was mainly due to general and administrative expenses and interest expenses.

### 1. Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi meningkat sebesar Rp 17,0 miliar (34,3%) dari Rp 49,8 miliar di tahun 2012 menjadi Rp 66,8 miliar di tahun 2013. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban gaji dan tunjangan sebesar 69,9% dari Rp 30,1 miliar di tahun 2012 menjadi sebesar Rp 51,1 miliar di tahun 2013. Hal ini dikarenakan pertumbuhan jumlah pegawai untuk mendukung pertumbuhan bisnis, selain kenaikan gaji tahunan untuk mengimbangi tingkat inflasi.

### 1. General and Administrative Expenses

General and administrative expenses were up by Rp 17.0 billion (34.3%) from Rp 49.8 billion in 2012 to Rp 66.8 billion in 2013. The rise was mainly caused by the 69.9% increase in salaries and benefits from Rp 30.1 billion in 2012 to Rp 51.1 billion in 2013. This was due to the growing number of employees supporting business growth and the annual salary increase following the rise in the inflation rate.

Namun, Perusahaan juga berhasil mengurangi beban umum dan administrasi di luar gaji dan tunjangan dari Rp 19,7 miliar di tahun 2012 menjadi Rp 15,7 miliar di tahun 2013. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya biaya jasa profesional yang berkaitan dengan korporasi dan transaksi investasi dari sebelumnya Rp 9,3 miliar di tahun 2012 menjadi sebesar Rp 2,5 miliar di tahun 2013. Biaya di 2012 termasuk biaya transaksi berkaitan dengan proses pemilihan investor swasta strategis dan pemesanan saham IIF. Di lain pihak, sejak Perusahaan membukukan pinjaman diberikan di laporan posisi keuangan di tahun 2013, pendapatan dan biaya transaksi yang berkaitan pinjaman diberikan ini dapat diamortisasi

However, the Company was able to successfully reduce its general and administrative expenses – other than salaries and benefits – from Rp 19.7 billion in 2012 to Rp 15.7 billion in 2013. The reduction was mainly due to lower professional expenses incurred in relation to corporate and investment transactions, from Rp 9.3 billion in 2012 to Rp 2.5 billion in 2013. The 2012 figures included a one-time expense relating to the process of selecting the private strategic investor and its subscription to IIF's shares. On the other hand, since the Company booked loans in its balance sheet in 2013, fees and expenses that were incurred in relation to the investment can be amortized over the life of the

selama periode pinjaman diberikan, sehingga mengurangi jumlah beban jasa professional yang dibukukan sebagai biaya di tahun 2013.

loan, reducing the amount of professional fees treated as an expense in 2013.

Tabel/Table 3: Beban Umum dan Administrasi | General and Administrative Expenses  
(Dalam Rupiah/In Rupiah)

	2013	2012
Gaji dan Tunjangan/ <i>Salaries and benefits</i>	51,121,876,365	30,085,071,837
Sewa/ <i>Rent</i>	2,600,309,552	2,062,996,693
Akomodasi dan Transportasi/ <i>Accommodation and transportation</i>	2,413,702,939	1,688,408,767
Imbalan Kerja/ <i>Employee benefits</i>	2,265,540,533	909,537,951
Penyusutan dan Amortisasi/ <i>Depreciation and amortisation</i>	2,194,797,015	1,409,854,797
Jasa Profesional/ <i>Professional fees</i>	2,548,045,183	9,340,100,125
Lain-lain/ <i>Others</i>	3,693,534,243	4,274,528,078
<b>Jumlah/Total</b>	<b>66,837,805,830</b>	<b>49,770,498,248</b>

## 2. Beban Bunga

Peningkatan beban bunga sebesar Rp 20,9 miliar dari sebelumnya sebesar Rp 742 juta di tahun 2012 menjadi Rp 21,6 miliar di tahun 2013 berkaitan dengan beban bunga dari pinjaman subordinasi dari WB dan ADB. Sampai akhir tahun 2013, IIF telah melakukan penarikan pinjaman subordinasi masing-masing sebesar USD 72 juta dan USD 94,6 juta dari WB dan ADB dari total fasilitas sebesar USD 200 juta.

## 2. Interest Expenses

The increase in interest expenses by Rp 20.9 billion from Rp 742 million in 2012 to Rp 21.6 billion in 2013 was related to the interest expenses from subordinated loans from WB and ADB. By the end of 2013, IIF had drawn total subordinated loans of US\$ 72 million and US\$ 94.6 million from WB and ADB respectively from total facilities of US\$ 200 million.

## G. Laba Bersih

Laba bersih IIF mencapai Rp 27,5 miliar di tahun 2013, meningkat 92,2% dibanding kinerja laba bersih sebesar Rp 14,3 miliar di tahun 2012. Peningkatan signifikan ini didorong oleh pertumbuhan pendapatan bunga terutama dari pendapatan bunga pinjaman yang diberikan dan bunga penempatan pada bank dan surat berharga. Selain itu, pendapatan operasional lainnya juga meningkat terutama dari pendapatan provisi dan komisi. Di sisi lain, meski terjadi peningkatan pada beban gaji dan tunjangan namun terdapat efisiensi dalam biaya umum dan administrasi yang lain.

## G. Net Profit

The net income of IIF was Rp 27.5 billion in 2013, up 92.2% compared to Rp 14.3 billion in 2012. The significant increase was caused by an increase in interest income, particularly from loans, placement with banks, and marketable securities. In addition, other operating income also increased, mainly due to provisions and commission income. On the other hand, there was an increase in salaries and benefits, which was partially set off by the savings in other general and administrative expenses.

## H. Solvabilitas

Rasio utang terhadap modal IIF adalah 1,12:1 per 31 Desember 2013 dibandingkan dengan 0,66:1 per 31 Desember 2012. Rasio ini masih di bawah level normal industri dimana rasionalnya dapat melebihi 4:1. IIF berencana untuk meningkatkan rasio utang terhadap modal yang dapat menghasilkan tingkat laba terhadap modal (*return on equity*) yang lebih tinggi.

## H. Solvability

IIF's debt to equity ratio was 1.12:1 as of 31 December 2013 compared to 0.66:1 as of 31 December 2012. This ratio is still below the normal industry level whereby it could reach above 4:1. IIF plans to increase the debt to equity ratio in order to generate a higher return on equity.

## I. Kolektibilitas Piutang

Pada tanggal 31 Desember 2013, IIF berhasil mempertahankan NPL pada tingkat 0%. Hal ini terutama didukung oleh prinsip kehati-hatian dalam proses *review* pinjaman diberikan.

## I. Accounts Receivable Collectibility

As of 31 December 2013, IIF successfully managed zero nonperforming loans. This is mainly due to the prudent credit process.

## J. Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta No. 10 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., Mkn., notaris di Jakarta, para Pemegang Saham Perusahaan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 1.175.000.000.000 menjadi Rp 1.770.868.000.000 dimana masing-masing Pemegang Saham telah melakukan pemesanan dan setoran modal tambahan sebagai berikut:

## J. Capital Structure

Based on Notarial Deed No. 10 dated 20 December 2013 of Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., Mkn., notary in Jakarta, the Shareholders of the Company had agreed to increase the issued and paid up capital from Rp 1,175,000,000,000 to Rp 1,770,868,000,000, in which each Shareholder has subscribed to and paid additional capital as follows:

Tabel/Table 4a: Struktur Permodalan | Capital Structure

Pemegang Saham/ Shareholders	Jumlah Saham/ Number of Shares	Jumlah Saham Dipesan/Capital Subscribed (IDR)	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid up Capital (IDR)	Jumlah/Total (IDR)
PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)	197,000	197,000,000,000	-	197,000,000,000
International Finance Corporation (IFC)	155,044	155,044,000,000	-	155,044,000,000
Asian Development Bank (ADB)	155,044	155,044,000,000	-	155,044,000,000
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)	88,780	88,780,000,000	8,878,000,000	97,658,000,000
<b>Total</b>	<b>595,868</b>	<b>595,868,000,000</b>	<b>8,878,000,000</b>	<b>604,746,000,000</b>

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor di atas telah diterima oleh Menteri Hukum dan

The increase in the issued and paid up capital above has already been approved by the

Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-AH.01 10-01269 pada tanggal 10 Januari 2014. Susunan pemegang saham yang baru adalah sebagai berikut:

Ministry of Law and Human Rights by its decree No. AHU-AH.01 10-01269 dated 10 January 2012. The current Shareholding composition is reflected in the table below:

Tabel/Table 4b: Struktur Permodalan | Capital Structure

Pemegang Saham/Shareholders	Jumlah Saham/ Number of Shares	Jumlah/Total (IDR)	Percentase/ Percentage (%)
PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)	600,000	600,000,000,000	33.88%
International Finance Corporation (IFC)	354,044	354,044,000,000	19.99%
Asian Development Bank (ADB)	354,044	354,044,000,000	19.99%
Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG)	199,000	199,000,000,000	11.24%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)	263,780	263,780,000,000	14.90%
<b>Total</b>	<b>1,770,868</b>	<b>1,770,868,000,000</b>	<b>100.00%</b>

## K. Arus Kas

Selama tahun 2013, saldo kas dan setara kas mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan arus kas bersih IIF secara total yaitu arus kas masuk yang mencapai Rp 679 miliar, terdiri dari arus kas keluar bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp 857 miliar, arus kas keluar bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp 199 miliar dan arus kas masuk bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 1.542 miliar serta perubahan bersih dari selisih kurs pada kas dan setara kas sebesar Rp 193 miliar.

### 1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas keluar bersih dari aktivitas operasi pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 857 miliar. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh pengeluaran kas berkaitan dengan pemberian pinjaman diberikan kepada nasabah sebesar Rp 907 miliar, pembayaran kepada pemasok dan karyawan sebesar Rp 56 miliar, serta pembayaran beban bunga sebesar Rp 15 miliar. Di lain pihak, IIF mendapatkan penerimaan kas yang berasal dari pendapatan bunga sebesar Rp 109 miliar dan pelunasan sebagian kredit diberikan sebesar Rp 21 miliar.

## K. Cash Flow

During 2013, the cash and cash equivalents balance increased compared to the prior year due to the positive net cash flows amounting to Rp 679 billion which consisted of net cash outflows from operating activities of Rp 857 billion, net cash outflows from investing activities of Rp 199 billion and net cash inflows from funding activities of Rp 1,542 billion, and impact of changes in exchange rate on cash and cash equivalents of Rp 193 billion.

### 1. Cash Flows from Operating Activities

Net cash outflows from operating activities in 2013 amounted to Rp 857 billion. This was mainly contributed by the cash outflows relating to the disbursement of loans to customers of Rp 907 billion, payments to vendors and employees of Rp 56 billion and payment of interest expenses of Rp 15 billion. On the other side, IIF received cash from interest income of Rp 109 billion and partial repayment of loans of Rp 21 billion.

## 2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas keluar bersih dari aktivitas investasi pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 199 miliar yang sebagian besar berasal dari pembelian surat berharga sebesar Rp 552 miliar dan penerimaan kas yang berasal dari penjualan surat berharga sebesar Rp 354 miliar.

## 3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Selama tahun 2013, IIF mendapatkan pendanaan tambahan dari pencairan pinjaman subordinasi sebesar Rp 937 miliar serta penerimaan setoran modal dari pemegang saham sebesar Rp 605 miliar.

## L. Investasi Signifikan Barang Modal

Selama tahun 2013, IIF tidak melakukan investasi material barang modal.

## M. Prospek Bisnis

Sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia, Indonesia terus memberi peluang IIF untuk berkembang. Pengenalan pasar atas kehadiran IIF sebagai salah satu perusahaan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur menjadi dasar bagi kemajuan Perusahaan di tahun-tahun mendatang.

### 1. Bisnis Investasi

Kinerja di tahun 2013 diharapkan menjadi dasar IIF terus bertumbuh dengan stabil di masa depan dimana:

- Memiliki struktur organisasi yang memadai;
- Adanya identifikasi dan pemetaan atas kebijakan dan prosedur kunci;
- Portofolio aset yang terus berkembang, yang mana juga akan menjadi sumber utama pendapatan;
- Menciptakan kesadaran pasar akan adanya

## 2. Cash Flows From Investing Activities

Net cash outflows from investing activities in 2013 amounted to Rp 199 billion mainly from the purchase of securities of Rp 552 billion, partially offset by the cash receipt from the sale of securities of Rp 354 billion.

## 3. Cash Flows From Funding Activities

In 2013, IIF obtained additional funding from the drawdown of subordinated loans amounting to Rp 937 billion and paid up capital from Shareholders of Rp 605 billion.

## L. Material Investment for Capital Goods

In 2013, IIF did not make any material investment for capital goods.

## M. Business Prospects

As one of the biggest economies in Asia, Indonesia continues to offer growth opportunities for IIF. The growing market awareness of IIF as one of prospect lenders in infrastructure projects will contribute to the Company's progress in the years to come.

### 1. The Investment Business

The 2013 results are expected to enable IIF to continue growing at a steady rate in the future by:

- Having a reliable organizational structure;
- Identifying and mapping key policies and procedures;
- Steadily growing portfolio for asset building, which will also become the main source of revenue;
- Creating market awareness of IIF as a catalyst

- IIF sebagai katalis untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur;
- Menyalurkan semua dana modal untuk pembiayaan proyek infrastruktur.

#### a. Tantangan

IIF menghadapi tantangan internal dan eksternal dalam memenuhi misinya untuk pengembangan infrastruktur. Pemetaan tantangan juga merupakan bagian dari usaha IIF untuk membangun dasar yang kuat dalam memasuki tahap kedua dari perkembangan Perusahaan.

Tantangan internal yang telah diidentifikasi dan perlu untuk dibenahi dalam mengamankan pertumbuhan IIF adalah:

- Terus meningkatkan tata kelola perusahaan agar sesuai dengan standar internasional serta keinginan dari Pemegang Saham ;
- Kekurangan dana;
- Memperkuat kemampuan dan pengetahuan karyawan akan prinsip-prinsip sosial & lingkungan.

Tantangan eksternal yang dapat menghambat pertumbuhan Perusahaan adalah:

- Terbatasnya proyek-proyek infrastruktur yang layak secara komersial ;
- Persaingan dengan lembaga pembiayaan yang dapat memberikan pembiayaan ke sektor infrastruktur dengan periode pembiayaan jangka panjang dan bunga bersaing. Dengan semakin meningkatnya pemahaman lembaga pembiayaan lokal akan karakteristik pembiayaan infrastruktur, akan lebih banyak lembaga yang menawarkan pembiayaan tersebut. Perkembangan ini baik untuk negara, namun juga berarti bahwa IIF perlu terus mencari pasar dan produk khusus untuk terus menjalankan perannya sebagai katalis pembangunan infrastruktur.
- Volatilitas pasar keuangan dapat terus berlangsung, yang menimbulkan risiko yang lebih besar pada proyek infrastruktur mengingat sifat investasinya yang berjangka panjang. IIF akan mencoba memposisikan diri untuk memastikan bahwa nasabah dan

for financing infrastructure projects;

- Distributing all capital funds for infrastructure project financing.

#### a. Challenges

IIF faces both internal as well as external challenges to pursue its mission in infrastructure development. The mapping of the challenges is also part of IIF's efforts to build a strong foundation to enter into the second stage of the Company's development.

The following identified internal challenges need to be addressed to enable IIF to grow:

- Continuously upgrade IIF's corporate governance to comply with international standards and Shareholders' expectations;
- Secure available funding;
- Strengthen the skills and knowledge of personnel with regards to the social & environmental principles.

The following identified external challenges may limit the Company's growth:

- Limited availability of commercially viable infrastructure projects;
- Competition from financial institutions that can provide long-term infrastructure financing with competitive rates. As financial institutions in the country begin to understand the nuances of infrastructure financing, more of them will be able to provide financing to such projects. Although this is good for the country, it may mean that IIF needs to continuously look at different market and product niches to continue its role as the catalyst of infrastructure development;
- Volatility of the financial markets may continue, which poses greater risks for infrastructure given the long-term nature of the investment. IIF will try to position itself to ensure that the clients and the Company itself will have a good understanding of

Perusahaan memiliki pemahaman yang baik tentang sensitivitas proyek dan mengadopsi strategi lindung nilai sebagai perlindungan terhadap IIF maupun nasabah;

- Pemahaman akan perlindungan sosial dan lingkungan oleh pasar sebagai alat untuk menjamin keberlanjutan proyek, bukan sebagai sekedar penambahan biaya. Salah satu faktor pembeda IIF dengan lembaga pembiayaan yang lain adalah IIF akan terus menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan kepada pasar.

#### **b. Fokus Strategis**

Fokus utama IIF adalah memastikan bisnis investasi untuk melakukan tindakan berikut di tahun 2014:

- Target pembiayaan kepada proyek dengan perbandingan profil risiko terhadap tingkat pengembalian yang menguntungkan;
- Mencapai bauran portfolio yang baik, dimana memiliki distribusi konsentrasi per sektor yang optimal dan eksposur mata uang yang stabil.
- Kerjasama dengan PSA Group untuk manfaatkan kelebihan pengetahuan PSA akan peraturan dan prospek industry.
- Meningkatkan kebijakan *pricing* untuk meningkatkan tingkat pengembalian kepada pemegang saham.

#### **c. Prospek tahun 2014 dan Seterusnya**

Berdasarkan kekurangan pendanaan infrastruktur di Indonesia di masa lalu, prospek bisnis investasi tetap kuat, baik dalam hal pemberian pinjaman atau penyertaan modal kepada pemilik proyek. IIF akan terus memperkuat keberadaannya di pasar dengan mencari peluang pembiayaan kepada pemilik proyek yang telah diidentifikasi dan memperluas basis pasar mencakup sponsor yang kuat namun baru memasuki sektor infrastruktur pertama kali, dimana pemahaman dan ketrampilan IIF akan dapat membantu mereka dalam membangun proyek infrastruktur dengan sukses.

project sensitivities and adopt the necessary hedging strategy in order to protect itself and its clients;

- Social and environmental safeguard requirements need to be understood by the market as a tool to ensure the projects' sustainability as opposed to being just an additional cost. As one of IIF's differentiation factors in the market, IIF will continue to emphasize to the market the importance of the safeguards' implementation.

#### **b. Strategic Focus**

IIF mainly focuses on ensuring that the investment business will carry out the following actions in 2014:

- Target projects with favorable risk-return profile;
- Achieve a good portfolio mix, which means optimal sector concentration distribution and a stable currency exposure;
- Cooperate with the PSA Group to leverage on the PSA Group's knowledge of regulations and sector prospects;
- Upgrade the pricing policy to further improve the return to the Shareholders.

#### **c. Prospects for 2014 Onwards**

Given Indonesia's underfunding for infrastructure in the past, prospects for investment business remain robust, both in terms of extending a loan or in providing equity funding to project sponsors. IIF will continue to strengthen its market presence by seeking more opportunities from the identified project sponsor groups and to expand its clientele to include strong sponsors entering infrastructure projects for the first time, where IIF's knowledge and skills will help them navigate the environment to create successful infrastructure projects.

## 2. Bisnis Advisory – Sektor Publik

### a. Pengembangan Kapasitas

Walaupun masih terdapat berbagai kendala dalam pengembangan skema KPS di Indonesia, PSA Group tetap sangat optimis terhadap prospek bisnis ke depan, mengingat bahwa mereka memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk mengisi celah dalam penyiapan proyek dan/atau dalam area transaksi. Di tahun 2014 PSA Group akan lebih lanjut mengembangkan kapasitasnya untuk mengambil peran lebih besar lagi dalam upaya percepatan realisasi proyek-proyek infrastruktur yang komersial dan dipersiapkan dengan baik, baik proyek yang menggunakan skema KPS maupun non-KPS. Disamping mandat yang telah dimiliki pada saat ini, terdapat prospek mandat baru dari sektor bandar udara, air minum, maupun listrik panas bumi.

### b. Konsultasi Kebijakan/Regulasi

PSA Group akan terus memanfaatkan penerimaan dan pengakuan yang selama ini telah diterima dari berbagai unsur pemerintahan, kementerian dan pengambil kebijakan dengan tetap membuka diri bagi permintaan bantuan untuk masukan maupun analisa untuk berbagai isu yang sedang dihadapi oleh para regulator. Kapasitas PSA Group dan hubungan yang erat dengan para regulator yang telah lama dibina selama ini telah memungkinkan PSA Group menjadi *thought leader* dalam berbagai diskusi maupun perumusan kebijakan. Namun demikian, masih terdapat banyak prakarsa untuk pengembangan infrastruktur yang memerlukan dukungan secara proaktif, terutama dalam kebijakan terkait KPS untuk pelaksanaan dalam berbagai sektor infrastruktur. Hal ini akan menjadi area penting dimana IIF dapat memberikan nilai tambah dan kontribusi yang signifikan.

## 2. Advisory Business - Public Sector

### a. Expanding Capacity

Though hurdles still exist regarding the liftoff of PPP projects in the country, PSA Group is very optimistic about the business prospects, as it has the necessary capacity to fill the gaps in the project preparation and/or transaction areas. Moving forward in 2014, PSA Group will further expand its capacity to play a greater role in accelerating the realization of well-conceived, commercially viable infrastructure projects for both PPP and non-PPP modalities. In addition to the existing mandates, prospective new mandates include projects already identified in the airport, ports, water and geothermal power sectors.

### b. Policy/Regulation Consultation

PSA Group will continue to capitalize on the acknowledgement already obtained from various ministries and policy makers by making themselves available for any request to provide input and/or submit analysis on different issues faced by the regulators. PSA Group's capacity and its close relationships with the regulators have thus far enabled them to be a thought leader in many regulatory/policy drafting and/or discussions. Nevertheless, there are still numerous initiatives for infrastructure development that need to be supported proactively, specifically in the regulatory framework for PPPs and PPP-related policies across various infrastructure sectors. This will be the key area where IIF can provide a major contribution and bring in value-added output.

## N. Aspek Pemasaran

Karena Indonesia masih akan terus menghadapi masalah kekurangan dana di sektor infrastruktur, IIF terus berusaha menembus pasar dengan produk investasi yang menarik:

- Utang Jangka Panjang, tersedia dalam mata uang Rupiah (IDR) dan Dollar Amerika Serikat (USD) dengan tenor pembiayaan sampai dengan 10 tahun (atau lebih, secara kasus per kasus);
- Utang subordinasi dan pembiayaan *mezzanine*, yang meliputi pembiayaan *hybrid* dalam bentuk pembiayaan setengah utang dan setengah ekuitas. IIF dapat menawarkan pembiayaan jenis ini dalam IDR dan USD dengan tenor hingga 5 tahun
- Penyertaan modal, dimana IIF memberikan pembiayaan dalam bentuk modal pada perusahaan infrastruktur. IIF dapat menjadi pemegang saham minoritas dengan harapan divestasi pada tahun ke-5.

Keuntungan bagi pemilik proyek dalam menerima pembiayaan dari IIF meliputi:

- IIF dapat memberikan pembiayaan dalam IDR dan USD dengan jangka waktu hingga 10 tahun dan suku bunga yang kompetitif;
- IIF dapat memberikan pembiayaan dengan peringkat yunior. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan pembayaran dan meningkatkan peluang mendapatkan pembiayaan dari pemberi pinjaman lain;
- IIF bersedia untuk bermitra dengan pemberi pinjaman lain agar pemilik proyek infrastruktur dapat memperoleh bauran pemberi pinjaman yang optimal;
- IIF memiliki tim (PCA) yang dapat membantu pemilik proyek infrastruktur untuk merancang struktur proyek dan mendapatkan bauran pinjaman yang terbaik;
- IIF memiliki akses ke pemerintah serta organisasi multilateral; pemilik proyek dapat menggunakan jaringan luas serta pengetahuan IIF untuk meningkatkan kualitas proyek .

Keuntungan-keuntungan yang diuraikan di atas tidak dimaksudkan untuk menjadi alat bersaing dengan bank-bank lokal dalam penyediaan

## N. Marketing Aspect

As Indonesia will still face the same problem of underfunding in the infrastructure sector, IIF continues to penetrate the market with its attractive investment products :

- Senior Term Loan, available in Rupiah (IDR) and US Dollars (USD) with a financing tenor of up to 10 years (longer tenor is available, on a case-by-case basis);
- Subordinated debt and Mezzanine financing, which include hybrid financing in the form of loan- or equity-like financing. IIF can offer both IDR and USD subordinated debt and/or Mezzanine financing with a tenor of up to 5 years
- Equity placement, whereby IIF provides equity investment in the target infrastructure company. IIF will be a minority shareholder with target divestment by the 5th year.

Advantages of receiving financing from IIF for project owners include:

- IIF can provide both IDR and USD financing with a long-term tenor of up to 10 years at competitive interest rates;
- IIF can structure the financing, whereby IIF takes the subordinated rank. This will improve the infrastructure project's repayment capability and increase the appetite from other lenders;
- IIF is available to partner with other lenders to enable the infrastructure project owner to obtain the optimal mix of lenders;
- IIF has its own private advisory team that can help the infrastructure project owner structure the project and obtain the best funding mix;
- IIF has access to the government as well as multilateral organizations; the project owner can use IIF's extensive network and knowledge to improve the project.

The advantages outlined above are not meant to be tools in competing with local banks in providing financing for infrastructure

pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Misi IIF adalah untuk bekerja sama dengan lembaga pembiayaan di Indonesia dan para investor untuk memfasilitas pembiayaan jangka panjang dalam mengembangkan infrastruktur di Indonesia.

## O. Kebijakan Dividen

Kebijakan IIF terhadap alokasi laba dijelaskan dalam Pasal 23 Anggaran Dasar Perusahaan dimana Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris, mengusulkan alokasi laba tahunan Perusahaan kepada Para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Saat ini tidak ada pedoman umum yang ditetapkan dalam menentukan alokasi laba sebagai dividen.

## P. Informasi Material Mengenai Perubahan Struktur Perusahaan

Di samping penguatan modal, hingga 31 Desember 2013, Perusahaan tidak membuka investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi atau restrukturisasi utang/modal yang material untuk dilaporkan.

## Q. Kejadian Setelah Tanggal Laporan Keuangan yang Signifikan

Beberapa kejadian penting berikut terjadi setelah tanggal laporan keuangan:

- Pada tanggal 26 Desember 2013 Bapak Kartika Wirjoatmodjo telah mengundurkan diri sebagai Presiden Direktur Perusahaan dan berlaku efektif sejak tanggal 3 Januari 2014;
- Pada tanggal 10 Januari 2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerima perubahan Anggaran Dasar

development in Indonesia. IIF's mission remains to work with Indonesia's financial institutions and investors to facilitate financing for long-term infrastructure development in Indonesia.

## O. Dividend Policy

IIF's policy on allocation of profit is described in Article 23 of the Company's Articles of Association where the Board of Directors, with the approval of the Board of Commissioners, proposes the allocation of the Company's annual profit to the Shareholders in a General Meeting of the Shareholders. No general guideline is established at this point on the allocation of profit as dividends.

## P. Material Information on Changes on Corporate Structure

Apart from capital injection, as of 31 December, the Company did not record any investment, expansion, divestment, acquisition or debt/capital restructuring that is material enough to be reported.

## Q. Material Subsequent Events

The following important events took place after the balance sheet date:

- On 26 December 2013, Mr. Kartika Wirjoatmodjo resigned from his position as President Director of the Company, effective on 3 January 2014;
- On 10 January 2014, the Minister of Law and Human Rights accepted the changes in the Articles of Association based on letter

berdasarkan surat No. AH-AHU.01.10-01269 yang memungkinkan Perusahaan mencatat uang muka modal saham dipesan menjadi modal saham;

- Pada tanggal 14 Januari 2014, Bapak Arisudono Soerono telah ditunjuk oleh pemegang saham untuk merangkap sebagai Presiden Direktur sementara hingga pengganti Bapak Kartika Wirjoatmodjo ditentukan. Perubahan ini telah disahkan dalam Akta No. 7 tanggal 20 Januari 2014 yang dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., Mkn., notaris di Jakarta;
- Pada tanggal 25 Pebruari 2014, pemegang saham sepakat untuk mengangkat Bapak Sukatmo Padmosukarso sebagai Presiden Direktur baru Perusahaan yang berlaku efektif sejak tanggal 3 Maret 2014. Pengangkatan ini disetujui melalui Akte No. 5 tanggal 6 Maret 2014 yang dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., Mkn., notaris di Jakarta.

## R. Perubahan Perundang- undangan Yang Berpengaruh Signifikan

Hingga Desember 2013, tidak terdapat perubahan di bidang hukum yang berdampak signifikan pada Perusahaan.

## S. Kebijakan Akuntansi

Seluruh informasi keuangan yang dikeluarkan oleh Perusahaan telah dibuat berdasarkan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di tahun 2013, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi IIF.

No. AHAHU. 01.10-01269 which enables the Company to record advances for capital stock subscription as capital stock;

- On 14 January 2014, Mr. Arisudono Soerono was appointed by the Shareholders to concurrently act as President Director of the Company until a suitable replacement for Mr. Kartika Wirjoatmodjo was identified. This change was stipulated under Deed No. 7 dated 20 January 2014, of Utiek R. Abdurachman, SH., MLI, Mkn., notary in Jakarta;
- On 25 February 2014, the Shareholders agreed to appoint Mr. Sukatmo Padmosukarso as the new President Director of the Company effective as of 3 March 2014. This appointment was stipulated under Deed No.5 dated 6 March 2014 of Utiek Abdurachman, SH., MLI, MKn, notary in Jakarta.

## R. Change of Law with Significant Impact

As of December 2013, there was no change of law that had a significant impact on the Company.

## S. Accounting Policy

All financial information issued by the Company was made in accordance with the principles of Indonesian Financing Accounting Standard and the prevailing laws and regulations in Indonesia. As of 2013, there was no change in IIF's accounting policy.





Seorang petarung harus memiliki perlengkapan yang baik sebelum maju ke medan perang. Beroperasi di pasar yang kompetitif, IIF telah melengkapi diri dengan tata kelola yang kuat, termasuk perbaikan institusi, organisasi dan aset.

A warrior must be properly equipped to take part in battle. Operating in a competitive market, IIF has equipped itself with strong corporate governance, including institutional, organizational and asset improvements.



## Meningkatkan Kepatuhan untuk Mengawal Pertumbuhan | Enhancing Compliance to Safeguard Growth



Tata Kelola (GCG) sangat penting dalam operasional IIF karena memberikan fungsi pemantauan yang komprehensif melalui kerangka kerja, infrastruktur, sistem dan prosedur operasi.

Penerapan GCG di IIF ditunjukkan dengan adanya penilaian yang menyeluruh atas peran dan komposisi komite-komite yang memberikan dukungan tata kelola kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Penilaian ini dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG tentang Transparansi, Pertanggungjawaban, Tanggung

Good Corporate Governance (GCG) is central to IIF operations, as it provides the Company with a comprehensive monitoring function through framework, infrastructure, systems and operating procedures.

The implementation of GCG in IIF is demonstrated through a comprehensive assessment on the roles and composition of committees that provide governance support to the BoC and BoD in carrying out their duties and responsibilities. This assessment is done in accordance with the GCG principles of Transparency, Accountability, Responsibility and Fairness.

Jawab dan Kewajaran. Sebagai bagian dari tekad IIF untuk melaksanakan GCG, Perusahaan telah menyusun Kode Etik yang mendukung kegiatan tata kelola. Penjelasan rinci mengenai Kode Etik diberikan pada bagian ini.

As part of IIF's determination to implement the GCG, the Company has developed a Code of Conduct that supports governance activities. A detailed elaboration of the Code of Conduct is provided in this section.

## A. Organ Utama GCG

Organ utama GCG adalah sebagai berikut:

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- Dewan Komisaris
- Dewan Direksi

## A. GCG Organs

The main organs of GCG are as follows:

- General Meeting of Shareholders (GMoS)
- The Board of Commissioners
- The Board of Directors

## B. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah organ tertinggi GCG perusahaan yang kewenangannya diatur oleh undang-undang dan Anggaran Dasar Perusahaan. Kewenangan RUPS meliputi :

- Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi;
- Mengevaluasi kinerja Dewan Direksi dan Dewan Komisaris ;
- Menyetujui laporan keuangan perusahaan;
- Menentukan remunerasi komisaris dan direksi.

## B. General Meeting of Shareholders

The GMoS is the Company's highest GCG organ whose authority is regulated by law and the Company's Articles of Association. The authority of GMoS includes:

- Appoint and terminate members of the Board of Commissioners (BoC) and the Board of Directors (BoD);
- Evaluate the performance of BoD and BoC;
- Approve the Company's financial statements;
- Decide on the remuneration of the Commissioners and Directors.

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Pada tahun ini , pemegang saham IIF mengadakan RUPS pada tanggal 23 April. Selain itu, sebagai pengganti RUPS, para pemegang saham juga menerbitkan Putusan Sirkuler para Pemegang Saham.

GMoS consists of Annual GMoS and Extraordinary GMoS. This year IIF held a GMoS on 23 April. In addition, in lieu of GMoS, the Shareholders issued the following Circular Resolutions of Shareholders.

Tabel/Table 5: Rapat umum pemegang saham (RUPS) | General Meeting of Shareholders

No.	Date/Date	Keterangan/Description
1	CRoS 001//IIF/SHR-RES/I/2013	Appointment of New Auditor
2	CRoS 002//IIF/SHR-RES/III/2013	Resignation of the Chief Financial Officer
3	CRoS 003//IIF/SHR-RES/IV/2013	Incentive Proposal
4	CRoS 004//IIF/SHR-RES/VII/2013	Authorization to SMI to sign Offer Letter to new Chief Financial Officer
5	CRoS 005//IIF/SHR-RES/VII/2013	Appointment of new Chief Financial Officer
6	CRoS 006//IIF/SHR-RES/IX/2013	Revised Business Plan
7	CRoS 007//IIF/SHR-RES/X/2013	Capital Call

## C. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi kebijakan dan pengurusan Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi, serta memberi nasehat kepada Direksi. Peran ini juga mencakup pengawasan pada pelaksanaana Rencana Kerja dan Anggaran IIF, peraturan di dalam Anggaran Dasar, keputusan RUPS, dan hukum serta regulasi yang berlaku, sesuai dengan kepentingan IIF.

### 1. Susunan Dewan Komisaris

#### Presiden Komisaris/

**Komisaris Independen :** Sofyan A. Djalil  
**Komisaris :** Marwanto Harjowiryono  
**Komisaris :** Arif Baharudin  
**Komisaris :** Robert Olivier Dolk  
**Komisaris :** Hans-Juergen Hertel  
**Komisaris :** Jemal-Ud-Din Kassum  
**Komisaris :** Rajeev Kannan

### 2 . Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas utama Dewan Komisaris di IIF, antara lain meliputi:

- Melaksanakan peran pengawasan dan penasehat dalam mengelola organisasi dan bisnis operasi untuk kepentingan pemegang saham, sesuai dengan visi, misi dan tujuan IIF;
- Mengawasi kebijakan Direksi, termasuk pencapaian atas tujuan IIF dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku;
- Mengevaluasi dan memberikan nasihat secara berkala atas pelaksanaan dari manajemen risiko dan sistem pengendalian internal, serta memberikan pesetujuan atas perubahan yang diperlukan atau tindakan korektif mengenai sistem tersebut;
- Melaksanakan tugas sesuai dengan kepentingan IIF dan bisnis yang terkait dengannya, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan.

## C. The Board of Commissioners

The Board of Commissioners (BoC) is responsible for overseeing the policies and management of the Company that are under the responsibility of the Board of Directors (BoD), as well as giving advice to the BoD. This includes oversight of the execution of the IIF Business Plan and Budget, rules under the Articles of Association, resolutions from the General Meeting(s) of Shareholders, and prevailing laws and regulations, in line with the interests of IIF.

### 1. Board of Commissioners Composition

#### President Commissioner/

**Independent Commisioner :** Sofyan A. Djalil  
**Commissioner :** Marwanto Harjowiryono  
**Commissioner :** Arif Baharudin  
**Commissioner :** Robert Olivier Dolk  
**Commissioner :** Hans-Juergen Hertel  
**Commissioner :** Jemal-Ud-Din Kassum  
**Commissioner :** Rajeev Kannan

### 2. Duties and Responsibilities

The main duties of the Board of Commissioners of IIF include:

- Providing supervisory and advisory roles on managing the organization and business operations for the interests of Shareholders, according to the vision, mission, and objectives of IIF;
- Supervising the policy of BoD, including the achievement of IIF's objectives and compliance with applicable laws and regulations;
- Evaluating and providing advice periodically on the main operations of the internal risk management and control systems, as well as agreeing on the necessary changes or corrective actions regarding such systems;
- Performing duties in accordance with the interests of IIF and the business associated with it, taking into consideration the interests of stakeholders.



### 3 . Independensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan peran dan tanggung jawabnya secara independen, yaitu tanpa adanya konflik kepentingan. Selain itu, Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan satu sama lainnya atau dengan anggota dewan direksi IIF hingga derajat ketiga dari kerabat, baik secara vertikal maupun horizontal atau karena perkawinan.

### 4 . Rapat Dewan Komisaris

Pada tahun 2013, Dewan Komisaris mengadakan pertemuan rutin sebanyak 13 (tiga belas) kali, termasuk rapat internal dan rapat dengan Dewan Direksi atau Direksi terkait, dengan rincian sebagai berikut:

### 3. Independence of Board of Commissioners

The BoC carries out its roles and responsibilities independently, i.e. without any conflicts of interest. In addition, the Commissioners are not related to one another or any of IIF's directors up to the third degree of consanguinity, either vertically or horizontally or by marriage.

### 4. Board of Commissioners Meeting

In 2013, the Board of Commissioners convened a total of 13 (thirteen) regular meetings, including internal meetings and meetings with the Board of Directors, with details as follows:

Tabel/Table 6: Rapat Dewan Komisaris | Board of Commissioners Meeting

No.	Tanggal/Date	Keterangan/Description	No.	Tanggal/Date	Keterangan/Description
1	20 Feb. 2013	Telekonferensi/ Teleconference	8	22 July 2013	Telekonferensi/ Teleconference
2	6 March 2013	Pertemuan langsung/ Physical Meeting	9	28 Aug. 2013	Telekonferensi/ Teleconference
3	21 March 2013	Telekonferensi/ Teleconference	10	18 Sep. 2013	Pertemuan langsung/ Physical Meeting
4	17 April 2013	Telekonferensi/ Teleconference	11	31 Oct. 2013	Telekonferensi/ Teleconference
5	12 June 2013	Pertemuan langsung/ Physical Meeting	12	4 Dec. 2013	Pertemuan langsung/ Physical Meeting
6	13 June 2013	Pertemuan langsung/ Physical Meeting	13	19 Dec. 2013	Telekonferensi/ Teleconference
7	24 June 2013	Telekonferensi/ Teleconference			

Penerapan GCG secara konsisten menjadi landasan kokoh untuk memperkuat posisi kompetitif di pasar pembiayaan infrastruktur.

Consistent implementation of GCG serves as IIF's strong foundation to strengthen its competitive position in the infrastructure financing market.

## D. Dewan Direksi

Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Dewan Direksi bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan dalam mencapai tujuan dan tujuan Perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan dalam segala hal dan dalam hal apapun, dan memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengikat Perusahaan dan untuk melakukan setiap tindakan yang terkait dengan urusan pengelolaan Perusahaan yang baik atau kepemilikan dan pelepasan properti perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi IIF adalah sebagai berikut:

### 1. Umum

Dewan Direksi IIF bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, *monitoring* dan memimpin manajemen IIF, dan juga melaksanakan tugas individu dan tanggung jawab dari masing-masing Direksi sesuai dengan kepentingan IIF, serta memelihara dan mengelola aset IIF.

### 2. Spesifik

1. Tanggung Jawab terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan
  - Para anggota Direksi wajib setia dan bertanggung jawab dalam melakukan tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  - Setiap anggota Direksi secara individual

## D. The Board of Directors

As stipulated in the Articles of Association, the Board of Directors shall be fully responsible for carrying out its duties in the interest of the Company and in the pursuit of the Company's objectives and purposes. In carrying out its duties, the Board of Directors shall represent the Company within and outside the courts in respect of all matters and, in any event, shall have the power and authority to bind the Company and to undertake any act concerning either the management of the affairs of the Company or ownership and disposition of its properties.

IIF's Board of Directors' duties and responsibilities are as follows:

### 1. General

The Board of Directors of IIF shall be responsible for the coordination, monitoring and leading of IIF's management, as well as that of individual duties and responsibilities in accordance with IIF's interests and maintaining and managing the assets of IIF.

### 2. Specific

1. Responsibilities regarding compliance to rules and regulations
  - The members of the Board of Directors shall be loyal and responsible in undertaking duties in accordance with prevailing rules and regulations;
  - Each member of the Board of Directors

- bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri atau kelalaian dalam melaksanakan tugasnya;
- Para anggota Direksi wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan proses kepatuhan dan memastikan bahwa semua kewajiban telah dipenuhi sesuai dengan Anggaran Dasar dan RUPS Tahunan, berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Tanggung Jawab terkait dengan hubungan antara Komisaris dan Pemegang Saham
- Direksi bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan atas keputusan yang dibuat dalam RUPS, Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar;
  - Direksi bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada Komisaris dan Pemegang Saham; mengatur komunikasi dengan Pemegang Saham, Komisaris, dan lainnya pihak yang berkepentingan, termasuk tugas dan tanggung jawab Direksi dan setiap anggota Direksi;
  - Direksi bertanggung jawab kepada Pemegang Saham dan memberikan tanggapan atas saran dari Komisaris dan Pemegang Saham;
  - Direksi bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan berkala dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta laporan lainnya sesuai dengan permintaan Pemegang Saham;
  - Direksi wajib mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan berdasarkan permintaan tertulis dari satu atau lebih Pemegang saham yang memiliki hak suara yang sah dan yang mewakili setidaknya 1/10 (sepuluh) dari jumlah saham yang diterbitkan;
  - Direksi bertanggung jawab untuk menyiapkan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang berisi kepemilikan saham di tangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
- shall be individually responsible for his/her own errors or neglect in the undertaking of his/her duties;
- The members of the Board of Directors shall be responsible for executing the processes of compliance and ensuring that all obligations have been satisfied in accordance with the Articles of Association and the annual general meeting of Shareholders, based on the prevailing rules and regulations.
2. Responsibilities regarding relations with the Commissioners and Shareholders
- The Board of Directors shall be responsible for ensuring the implementation of the decisions made by the annual general meeting of Shareholders, the Board of Commissioners and the Articles of Association;
  - The Board of Directors shall be responsible for providing information to the Commissioners and Shareholders; arranging communication with Shareholders, Commissioners, and other interested parties, including the duties and responsibilities of the Board of Directors and each member of the Board of Directors;
  - The Board of Directors shall be responsible to the Shareholders and respond to the suggestions of Commissioners and Shareholders;
  - The Board of Directors shall be responsible for preparing regular reports on time and in accordance with the prevailing rules and regulations and other reports in accordance with the request of Shareholders;
  - The Board of Directors is obligated to hold an annual general meeting of Shareholders based on the written request of one or more Shareholders who have valid voting rights and who represent at the very least 1/10 (one tenth) of the number of shares issued;
  - The Board of Directors shall be responsible for preparing and maintaining a List of Shareholders and a Special List containing the possession of shares in the hands of the members of the Boards of Commissioners

- dan keluarganya baik dalam IIF maupun di perusahaan lainnya;
- Direksi bertanggung jawab untuk melakukan konsultasi dengan Dewan Komisaris atas pemberian kredit di atas jumlah yang telah ditentukan;
  - Direksi harus menetapkan visi, misi, nilai-nilai dan budaya perusahaan IIF;
  - Direksi bertanggung jawab untuk menjaga kegiatan operasional IIF agar sejalan dengan bisnis dan tujuan perusahaan;
  - Direksi bertanggung jawab untuk membuat rencana kerja, anggaran tahunan, dan rencana lainnya yang terkait dengan bisnis IIF;
  - Direksi bertanggung jawab untuk menentukan remunerasi untuk manajemen senior dan karyawan kunci, dan menjaga konsistensi remunerasi ini agar sesuai dengan budaya, tujuan, strategi, serta tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam peraturan yang berlaku, Anggaran Dasar IIF dan lingkungan usaha;
  - Direksi bertanggung jawab untuk menyeimbangkan kepentingan semua pemilik kepentingan dari IIF.
3. Tanggung jawab terkait Pelaporan Keuangan
- Direksi bertanggung jawab untuk menjaga pembukuan dan administrasi IIF sesuai dengan praktik-praktik yang berlaku;
  - Direksi bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem akuntansi yang sesuai Standar Akuntansi Indonesia dan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama dalam hal pencatatan, pengarsipan, monitoring dan pengelolaan;
  - Direksi bertanggung jawab untuk mempersiapkan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan, dan akuntansi untuk laporan tersebut di Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- and Directors and their families both in IIF and in other companies;
- The Board of Directors shall be responsible for consulting on the granting of credit above a certain amount with the Board of Commissioners;
  - The Board of Directors shall set the vision, mission, values and corporate culture of IIF;
  - The Board of Directors shall be responsible for keeping IIF's activities in line with the business activities and the objectives of the institution;
  - The Board of Directors shall be responsible for making work plans, annual budgets, and other plans related to the business of IIF;
  - The Board of Directors shall be responsible approving the remuneration for senior management and key personnel, and maintaining the consistency of this remuneration with the culture, objectives, strategies, and other duties and responsibilities stated in prevailing regulations and the Articles of Association of IIF and the business environment;
  - The Board of Directors shall be responsible for balancing the interests of all stakeholders of IIF.
3. Financial reporting responsibilities
- The Board of Directors shall be responsible for maintaining the bookkeeping and administration of IIF in accordance with accepted practices of a Company;
  - The Board of Directors shall be responsible for developing an accounting system that matches the Accounting Standards of Indonesia and the principles of internal control, especially in terms of recording, archiving, monitoring and management;
  - The Board of Directors shall be responsible for preparing Annual Reports, including Financial Reports, and accounting for those reports in the annual general meeting of Shareholders.

**4. Tanggung Jawab terkait dengan Manajemen Risiko dan Pengendalian**

- Direksi bertanggung jawab untuk menjaga proses manajemen risiko, sebagai berikut:
    - a. Memastikan bahwa Perusahaan memiliki proses yang tepat dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan risiko;
    - b. Memastikan bahwa sistem dan proses yang tepat telah dieksekusi dalam pemantauan dan pelaporan risiko utama yang dihadapi oleh perusahaan;
    - c. Memantau dan mengevaluasi keberadaan proses manajemen dalam menilai kecukupan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal, pelaporan keuangan dan kepatuhan;
    - d. Memastikan keberadaan atas sistem pengendalian yang efektif untuk memastikan:
      - i. kehandalan dan integritas dari informasi;
      - ii. kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku, rencana prosedur dan peraturan;
      - iii. pemeliharaan asset Perusahaan;
      - iv. penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien;
      - v. pencapaian atas tujuan dan sasaran operasional yang telah ditentukan.
    - e. Melaksanakan evaluasi tahunan dalam rangka menyusun pernyataan kepada publik mengenai pengendalian internal Perusahaan untuk memastikan bahwa semua aspek penting dari pengendalian internal yang dimiliki telah dipertimbangkan untuk dievaluasi sampai dengan tanggal persetujuan laporan tahunan.
- Direksi bertanggung jawab menciptakan struktur organisasi, tugas, dan struktur tanggung jawab yang jelas, termasuk penunjukan manajemen.
  - Direksi bertanggung jawab untuk memanfaatkan secara efektif hasil audit baik dari auditor internal maupun eksternal.

**4. Responsibilities relating to risk management and control**

- The Board of Directors shall be responsible for maintaining the following processes of risk management:
    - a. Ensuring that the Company has a proper and systematic process in identifying, measuring and controlling risks;
    - b. Ensuring that proper systems and processes have been executed in monitoring and reporting the main risks faced by the Company;
    - c. Monitoring and evaluating the existence of good management processes in assessing the adequacy of the risk management system and the internal control, financial reporting and compliance;
    - d. Ensuring the existence of an effective control system in order to ensure:
      - i. the reliability and integrity of the information;
      - ii. the compliance with the prevailing policies, plans procedures, rules, and regulations;
      - iii. the maintenance of the Company's assets ;
      - iv. the economic and efficient use of resources;
      - v. the achievement of the determined operational objectives and targets.
    - e. Executing annual evaluations for making public statements concerning internal control at the Company to ensure that all significant aspects of internal control have been considered for the evaluated year up to the date of the approval of the annual report.
- The Board of Directors shall be responsible for creating clear organizational, duty, and responsibility structures, including the appointment of the management;
  - The Board of Directors shall be responsible for effectively making use of the audit results of both the internal and external auditors.

Setiap anggota Direksi memiliki tanggung jawab fungsional untuk menjalankan bisnis IIF sebagaimana disebutkan di bawah ini:

### 3 . Presiden Direktur

1. Merumuskan dan melaksanakan visi, strategi, rencana tahunan, tujuan dan anggaran IIF dan memastikan keselarasan dan dukungan dari Dewan Komisaris dan pemegang saham, memberikan arah kepada IIF, Direksi dan departemen untuk mencapai keberhasilan dalam tumbuh kembangnya perusahaan menjadi perusahaan yang menguntungkan dan berkelanjutan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang;
2. Membangun, menetapkan, melaksanakan dan mengkoordinasikan secara efektif struktur dan kerangka kerja tata kelola perusahaan, yang mencakup kebijakan, prosedur dan prinsip-prinsip pemisahan wewenang dan tanggung jawab (*Chinese Wall*) untuk memastikan pelaksanaan strategi dan rencana tahunan perusahaan serta kepatuhan terhadap kebijakan dan pedoman peraturan yang berlaku berjalan secara efektif dan efisien;
3. Mengembangkan dan mengelola regulasi, bisnis dan hubungan dengan para pemilik kepentingan lainnya, bertindak sebagai perwakilan resmi dari IIF bagi para pemilik kepentingan lainnya dan media, dan membangun merek dagang IIF dalam rangka untuk membentuk posisi yang menguntungkan baik secara politis dan peraturan, serta kondisi bisnis dan citra publik yang baik sebagai prasyarat untuk keberhasilan perusahaan pembiayaan infrastruktur;
4. Memastikan pengaruh kebijakan dan peraturan atas *landscape* infrastruktur, penasehat proyek strategis dan mengatur pendanaan atas nama klien, atas dasar produk *fee-based* dan jasa, dalam rangka menciptakan dan menumbuh kembangkan portofolio proyek-proyek infrastruktur untuk IIF yang menguntungkan dan berkelanjutan;

Each member of the Board of Directors will have a functional responsibility for the business of IIF as mentioned below:

### 3. President Director

1. Formulate and implement IIF's vision, strategy, yearly plan, objectives and budgets and ensure alignment with and support from the BoC and Shareholders, in order to provide direction to IIF, BoD and the departments and successfully grow the organization in a profitable and sustainable way in the short and long term;
2. Establish, ensure approval, implement and effectively coordinate the corporate governance structure and framework, including related IIF policies, procedures and Chinese Wall principles to ensure an effective and efficient deployment of IIF's strategy and yearly plan and compliance with regulatory policies and guidelines;
3. Develop and manage regulatory, business and other stakeholder relationships, act as an official representative of IIF for stakeholders and media and build the IIF brand in order to shape favorable political, regulatory and business conditions and good public image as preconditions for successful infrastructure financing;
4. Ensure influencing of the policy and regulatory infrastructure landscape, strategic project advisory and arranging of funding on behalf of clients, on the basis of fee-based products and services, in order to create and grow a portfolio of bankable infrastructure projects for IIF in a profitable and sustainable way;

5. Memastikan pengembangan penawaran produk baru yang lebih baik, yang cocok untuk kondisi di Indonesia, menjamin akses ke pendanaan (jangka panjang), dan menawarkan dana dan produk berbasis non-dana untuk proyek-proyek infrastruktur yang potensial, dengan mempertimbangkan perspektif investor, dalam rangka meningkatkan investasi PPP di Infrastruktur Indonesia yang menguntungkan dan berkelanjutan;
6. Memastikan kerangka kerja manajemen risiko yang terintegrasi dan kebijakan untuk berbagai jenis risiko, serta budaya sadar risiko di seluruh perusahaan dan memperhitungkan parameter risiko dalam semua keputusan bisnis, untuk menjaga portofolio infrastruktur proyek dan investasi yang sehat dalam parameter risiko dan anggaran;
7. Memastikan perencanaan dan siklus pengendalian, integritas dalam administrasi dan pembukuan, operasi *treasury* dan perencanaan pajak yang efektif dan efisien, serta Laporan Keuangan interim dan tahunan, dalam rangka memimpin perusahaan untuk mencapai tujuan finansialnya secara efektif dan efisien dan memberikan wawasan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan pemilik kepentingan lainnya atas posisi keuangan dan kinerja IIF;
8. Memastikan integritas, efektivitas dan efisiensi dari unit-unit yang berfungsi sebagai pendukung seperti bagian Hukum, Asuransi, IT Audit, SDM, Komunikasi dan Pengadaan, sehingga tujuan bisnis IIF baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang itu dapat dicapai dengan cara yang efektif dan efisien;
9. Mengembangkan dan menerapkan kegiatan monitoring dan pelaporan infrastruktur IIF serta pengawasan, pelaporan dan menawarkan nasihat tentang kegiatan IIF dan portofolio, dalam rangka untuk memperoleh informasi yang benar untuk melakukan tindakan yang tepat dan memberikan informasi kepada Dewan Komisaris, namun tetap mematuhi kewajiban pelaporan yang diatur dalam peraturan perusahaan;
5. Ensure development of new and improved product offerings suitable for the Indonesian context, ensure access to long term funds, and offer fund and non-fund based products to bankable infrastructure projects, while taking into account an investor's perspective, in order to increase the level of PPP investment in Indonesia's infrastructure for IIF in a profitable and sustainable way;
6. Ensure an integrated risk management framework and policies for various risk types, as well as a risk awareness culture throughout the organization and take into account risk parameters in all business decisions, in order to safeguard a healthy portfolio of infrastructure projects and investments within risk parameters and budget;
7. Ensure the planning and control cycle, integrity of administration and accounts, effective and efficient treasury operations and tax planning, as well as necessary interim and statutory financial reports and statements, in order to lead the organization in a financially effective and efficient way and provide BoD, BoC and stakeholders with insights on the financial position and performance of IIF;
8. Ensure integrated, effective and efficient supporting functions such as Legal, Insurance, IT, Audit, HR, Communications and Procurement, so that IIF's short and long term business objectives can be achieved in an effective and efficient way;
9. Develop and implement IIF monitoring and reporting infrastructure and monitor, report and offer advice on IIF's activities and portfolio, in order to obtain the right management information to initiate appropriate actions and provide information to the BoC while remaining compliant regarding statutory reporting obligations;

10. Mengembangkan dan memimpin tim yang efektif, memastikan struktur organisasi, tata kelola dan proses IIF yang baik (termasuk didalamnya adanya pemisahan wewenang yang tegas antara Penasehat dan Investasi), dan mengembangkan, menjaga budaya, serta nilai-nilai inti IIF sehingga rencana strategis dan tujuan IIF dapat tercapai.

10. Develop and lead a highly effective and empowered leadership team, ensure well-structured organization, governance and processes of IIF (including Chinese Walls between Advisory and Investment), and develop and protect the right IIF culture and core values in such a way that IIF's strategic plan and objectives are achieved.

#### 4 . Chief Investment Officer

1. Berkontribusi atas rencana strategis IIF, dan mengembangkan serta melaksanakan rencana tahunan departemen, tujuan, anggaran, kebijakan, prosedur dan sistem dalam rangka untuk memberikan arahan bagi IIF dan departemen investasi;
2. Pada kedua aktivitas pendanaan/pinjaman dan proyek/kontraktor, mengembangkan hubungan, mengidentifikasi prospek, mengembangkan portofolio yang potensial dan menawarkan produk dan jasa sedemikian rupa sehingga portofolio prospek tersebut menjadi proyek aktual yang berkualitas tinggi dan mempertahankan hubungan jangka panjang;
3. Mengembangkan produk dan jasa investasi yang berbasis dana dan non-dana dan mengelola portofolio sehingga menjadi satu kesatuan yang lengkap dan inovatif, menarik dan menguntungkan yang dapat ditawarkan kepada para klien IIF;
4. Memastikan proyek yang tepat dan penilaian usaha, valuasi, dll dan bekerja sama dengan kontraktor untuk meningkatkan kondisi proyek dalam hal kelayakan proyek untuk menilai kredibilitas finansial dari proyek;
5. Mengembangkan struktur proyek pembiayaan/ investasi yang layak, berkelanjutan dan menguntungkan dalam parameter risiko, yang dapat diterima oleh kontraktor dan semua pemilik kepentingan sehubungan dengan pendanaan proyek
6. Menetapkan pendanaan proyek jangka panjang yang berkelanjutan (usulan) dalam kaitannya dengan mitra investasi seperti bank asing dan lokal, dana pensiun, perusahaan asuransi, dana

#### 4. Chief Investment Officer

1. Contribute to IIF's strategic plan, and develop and implement the departments yearly plan, objectives, budgets, policies, procedures and systems in order to give direction to IIF and the Investment Department;
2. On both the funding/lending and project/ contractor side develop relations, identify prospects, develop the prospect portfolio and offer investment products and services in such a way that a high quality prospect portfolio converts to a high quality actual project portfolio while long term relationships are maintained;
3. Develop fund based and non-fund based Investment products and services and manage the portfolio so that a complete set of innovative, attractive and profitable products and services can be offered to IIF's client base;
4. Ensure proper project and business appraisals, valuations, etc. and liaise with contractors on improving project conditions for project feasibility in order to assess the bankability of the project;
5. Develop a feasible, sustainable and profitable project finance/investment structure that is within risk parameters, acceptable to project contractor(s) and acceptable to all stakeholders related to the funding of the project;
6. Establish long term sustainable project funding in liaison with investment partners such as foreign and domestic banks, pension funds, insurance companies, private equity

- ekuitas swasta, bank investasi, perusahaan swasta nasional dan Pemerintah Indonesia;
7. Memastikan pelaksanaan dilakukan secara tepat, mulai dari fase contracting hingga penyusunan kesepakatan dengan semua pihak yang terlibat dalam hal pendanaan serta penyelesaian proyek;
  8. Mengembangkan dan melaksanakan prosedur pemantauan dan pelaporan Investasi infrastruktur serta mengawasi, melaporkan dan memberi nasihat tentang kegiatan investasi dan proyek (portofolio) untuk memberikan informasi kepada manajemen, memulai tindakan korektif dan tetap mematuhi aturan setiap waktu;
  9. Merencanakan, menyusun struktur, mengelola dan mengendalikan organisasi, proses dan staf Departemen Investasi IIF, sesuai dengan kebijakan dan peraturan IIF, sehingga rencana investasi dan tujuan perusahaan dapat tercapai.
- funds, investment banks, private national companies and Government;
7. Ensure the proper execution of the project contracting phase and deal closure with all parties involved in the funding as well as the delivery of the project;
  8. Develop and implement an investment monitoring and reporting procedure and monitor, report and advise on investment activities and projects (portfolio) in order to provide management information, initiate corrective actions and remain compliant at all times;
  9. Plan, structure, manage and control the organization, processes and staff of Investment Department, compliant with IIF policies and regulations, in such a way that the Investment plan and objectives are achieved.

## 5. Chief Risk Officer

1. Berkontribusi atas rencana strategis IIF, dan mengembangkan serta melaksanakan rencana tahunan departemen, tujuan, anggaran, kebijakan, prosedur dan sistem dalam rangka untuk memberikan arahan bagi IIF dan Departemen Risiko;
2. Mengembangkan kebijakan risiko, prosedur, tata kelola dan otorisasi, model, *risk rating tools*, dan mendukung sistem pengendalian risiko untuk berbagai kategori risiko dalam rangka menyusun dasar dan prasyarat untuk mencapai tujuan manajemen risiko secara optimal dan terstruktur;
3. Menciptakan budaya sadar risiko pada berbagai jenis risiko di perusahaan, klien/ pemilik kepentingan dengan cara pembinaan, bimbingan dan pelatihan sehingga penilaian risiko dan mitigasinya dapat meliputi dalam tindakan sehari-hari/ keputusan setiap orang;
4. Memberikan saran manajemen risiko kepada Unit/Departemen Penasehat dan Departemen Investasi serta menyaring dan menyetujui (dalam tingkat kewenangan otorisasi)

## 5. Chief Risk Officer

1. Contribute to IIF's strategic plan and develop and implement the department's yearly plan, objectives, budgets, policies, procedures and systems in order to give direction to IIF and the Risk Department;
2. Develop risk policies, procedures, governance and authorization levels, risk rating tools, and supporting risk control systems for various risk categories in order to set the basis and preconditions for achieving the risk management objectives in an optimal, structured way;
3. Create a risk awareness culture on various risks throughout the organization and IIF's client/stakeholder field by means of coaching, guidance and training so that risk assessment and mitigation are embraced as second nature in everybody's daily actions/decisions;
4. Provide risk management advice to Advisory and Investment and screen and approve (within authorization level) Advisory and Investment proposals from a risk



atas proposal proyek dari sudut pandang manajemen risiko untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan masih berada dalam parameter risiko;

5. Memberikan saran dan bantuan kepada CEO dan/atau mempersiapkan komite kredit/ komite Risiko sesuai dengan struktur tata kelola dan wewenang otorisasi untuk memungkinkan CEO dan/atau komite Kredit/ Komite Risiko dalam membuat keputusan yang tepat dengan cara yang efektif dan efisien;
6. Mengidentifikasi, memonitor dan mengelola berbagai risiko yang terkait dengan proses, produk (pengembangan) dan proyek portofolio IIF dan/atau memutuskan mitigasi atas risiko untuk memastikan bahwa bisnis IIF dijalankan dalam parameter risiko yang telah disepakati dan sesuai dengan kebijakan yang berhubungan dengan risiko, hukum, peraturan dan kode etik;
7. Mengembangkan dan melaksanakan pemantauan dan pelaporan risiko infrastruktur dan pengawasan, pelaporan dan memberikan nasihat tentang eksposur risiko dalam kegiatan IIF dan portofolio proyek dalam rangka untuk menyediakan informasi kepada manajemen, melakukan tindakan korektif dan menjaga kepatuhan setiap saat;
8. Merencanakan, menyusun struktur, mengelola dan mengendalikan organisasi, proses dan staf

management perspective to ensure that all IIF deliverables are within risk parameters;

5. Advise and support CEO and/or prepare the Investment/Risk committee according to risk governance structure and authorization levels in order to enable IIF's CEO and/or the Credit/Risk committee to make the right decisions in an effective and efficient way;
6. Identify, monitor and manage various risks in IIF's processes, product (development) and project portfolio and advise and/or decide on mitigation of these risks to ensure that IIF's business is run within the agreed risk parameters and ensure compliance with risk-related policies, laws, regulations and codes of conduct;
7. Develop and implement risk monitoring and reporting infrastructure and monitor, report and advise on risk exposures in IIF activities and project portfolio in order to provide management information, initiate corrective actions and maintain compliance at all times;
8. Plan, structure, manage and control the organization, processes and staff of Risk in

Departemen Risiko IIF, sesuai dengan kebijakan dan peraturan IIF sehingga rencana dan tujuan Risiko perusahaan dapat tercapai.

IIF and remain compliant with IIF policies and regulations in such a way that the Risk plan and objectives are achieved.

## 6 . Chief Financial Officer

1. Berkontribusi atas rencana strategis IIF, dan mengembangkan serta melaksanakan rencana tahunan departemen, tujuan, anggaran, kebijakan, prosedur dan sistem dalam rangka untuk memberikan arahan bagi IIF dan Departemen Keuangan;
2. Mengembangkan, mengatur dan mengkoordinasikan perencanaan, penganggaran dan siklus pengendalian dan sistem IIF, serta mendefinisikan kebutuhan informasi manajemen, laporan dan sistem dalam rangka memberikan dasar untuk pengambilan keputusan atas tujuan dan pengawasan dan penilaian realisasi;
3. Menyusun dan memelihara proyek dan administrasi (utang , piutang , dll), dan menjamin integritas akun-akun dan kepatuhan terhadap peraturan keuangan, yang bertujuan untuk memperoleh akurasi dan informasi terkini atas status keuangan dan proyek-proyek IIF;
4. Memastikan dukungan atas bisnis IIF melalui pembiayaan, sinkronisasi dan mengoptimalkan arus kas dalam rangka untuk menyediakan/mengamankan “ketersedian dana” untuk semua kegiatan usaha IIF dalam rangka untuk meminimalkan – risiko yang terkait dengan treasury dan memberikan saran kepada Direksi mengenai hal-hal yang terkait dengan *treasury*,
5. Memastikan perencanaan, kepatuhan dan pelaporan dan semua aspek yang terkait kinerja pajak dari IIF, sesuai dengan peraturan pajak, dalam rangka untuk mengoptimalkan posisi fiskal IIF dan berkontribusi secara menyeluruhan pada kinerja keuangan IIF;
6. Memantau kinerja bisnis, menganalisa dan memberikan saran, serta mempersiapkan laporan keuangan proyek dan portofolio (baik secara *ad hoc* dan berkala) sesuai dengan bisnis dan proyek monitoring dalam rangka memberikan kontribusi terhadap perbaikan

## 6 . Chief Financial Officer

1. Contribute to IIF's strategic plan and develop and implement the department's yearly plans, objectives, budgets, policies, procedures and systems in order to give direction to IIF and the Finance Department;
2. Develop, organize and coordinate IIF planning, budgeting and control cycle and system as well as define management information needs, reports and systems in order to provide a basis for sound decision making on objectives and monitor and review realization of them;
3. Set up and maintain financial processes, along with IIF administrative functions (accounts payable, receivable, etc.), and ensure integrity of the accounts and compliance with financial regulations, in order to have accurate and up to date insights on the financial status of IIF and its projects;
4. Ensure support of IIF business through financing, synchronizing and optimizing cash flows in order to provide/secure “match funding” for all IIF business activities to minimize treasury-related risks and support and advise BoD in all treasury-related matters;
5. Ensure tax planning, compliance and reporting and all related aspects of fiscal performance of IIF, in compliance with fiscal regulations, in order to optimize the fiscal position of IIF and contribute to the financial performance of IIF as a whole;
6. Monitor business performance, analyze and advise accordingly, and prepare project and portfolio financial reports (ad hoc and periodical) suitable for business and project monitoring in order to contribute to the improvement and optimization of the

- dan optimalisasi kinerja bisnis;
7. Mempersiapkan Laporan Keuangan Interim untuk diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan pemilik kepentingan lainnya yang memungkinkan mereka dalam membuat keputusan yang tepat, serta mempersiapkan laporan keuangan dan laporan resmi untuk publikasi;
  8. Merencanakan, menyusun struktur, mengelola dan mengendalikan organisasi, proses dan staf Departemen Keuangan IIF, sesuai dengan kebijakan dan peraturan IIF, sehingga rencana investasi dan tujuan perusahaan dapat tercapai.

## 7 . Komposisi Direksi

Komposisi Dewan Direksi IIF pada tanggal 31 Desember 2013

**Presiden Direktur:** Kartika Wirjoatmodjo  
**Direktur Pelaksana & Chief Investment - Domestic Client:** Harold Tjiptadjaja  
**Direktur Pelaksana - Chief Investment Officer - International Client:** Haruhiko Takamoto  
**Direktur Pelaksana & Chief Risk Officer:** Wito Krisnahadi  
**Direktur Pelaksana & Chief Financial Officer:** Ari Soerono

## 8 . Independensi Direksi

Direksi melaksanakan peran dan tanggung jawabnya secara independen, yakni tanpa adanya konflik kepentingan. Selain itu, Direksi tidak memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya atau dengan anggota Dewan Komisaris IIF hingga derajat ketiga dari kerabat, baik secara vertikal maupun horizontal atau karena perkawinan .

- business performance;
7. Prepare aggregated periodical Interim Financial Reports (IFR) to provide BoD, BoC and other relevant stakeholders with insights on financial management information of IIF to enable them to make the right decisions, as well as prepare the necessary statutory financial statements and official reports for publication;
  8. Plan, structure, manage and control the organization, processes and staff of IIF Finance and remain compliant with IIF policies and regulations, in such a way that the Finance plan and objectives are achieved.

## 7. Board of Directors Composition

IIF's Board of Directors composition as of 31 December 2013

**President Director:** Kartika Wirjoatmodjo  
**Managing Director & Chief Investment – Domestic Client:** Harold Tjiptadjaja  
**Managing Director & Chief Investment Officer - International Client:** Haruhiko Takamoto  
**Managing Director & Chief of Risk Officer:** Wito Krisnahadi  
**Managing Director & Chief Financial Officer:** Ari Soerono

## 8. Independence of Board of Directors

The BoD carries out its roles and responsibilities independently, i.e. without any conflicts of interest. In addition, the Directors are not related with one another or with any IIF Commissioner up to the third degree of consanguinity, either vertically or horizontally or by marriage.

## 9. Penilaian Kinerja Direksi

Kinerja Direksi diukur dengan sejumlah *Key Performance Indicators* (KPI) yang merupakan turunan dari KPI Perusahaan yang telah disetujui oleh Pemegang Saham. KPI ini kemudian dikaji kembali oleh auditor eksternal yang independen untuk memastikan pencapaian-pencapaian yang terjadi. Setelah mendapatkan laporan dari auditor eksternal yang independen tersebut, Direksi mengkaji ulang kinerja dari para Direktur dan merekomendasikan hasil dari kajian tersebut kepada Pemegang Saham.

## 9. Assessment on Board of Directors Performance

The performance of the BoD is measured through a set of Key Performance Indicators (KPIs) that are cascaded from the Company's KPIs agreed by the Shareholders. These KPIs are then reviewed by an independent external auditor to verify the accomplishments. Upon the report from the independent external auditor, the BoC reviews the performance of individual Directors and recommends the result of such reviews to the Shareholders.

## 10. Rapat Direksi

Direksi secara regular mengadakan pertemuan internal untuk membahas hal-hal yang memerlukan pertimbangan Dewan Direkasi dan untuk mendiskusikan rencana strategis lainnya.

## 10. Board of Directors Meeting

The Board of Directors regularly holds internal meetings to discuss matters requiring the Board's consideration and to discuss other strategic plans.

Tabel/Table 7: Rapat Direksi | Board of Directors Meeting

No.	Tanggal/Date	Bulan/Month	No.	Tanggal/Date	Bulan/Month
1	21 & 29	January	7	30	July
2	4, 18, 25	February	8	2, 13, 19, 22, 27	August
3	25	March	9	2, 6, 23	September
4	1, 8, 10, 22, 29	April	10	11 & 18	November
5	6, 13, 27, 30	May	11	2	December
6	10	June			

## 11. Dewan Direksi Program Pelatihan

Berikut ini adalah daftar Pelatihan Dewan Direksi IIF di tahun 2013:

## 11. Board of Directors Training Program

Below is the 2013 IIF Board of Directors Training Recapitulation List:

Tabel/Table 8: Program Pelatihan Direksi | Board of Directors Training Program

Tgl/Date	Pelatihan/Training	Partisipan/ Participants
17 Oct	Project Financing in Power Sector held by PT Energy Nusantara	Wito Krisnahadi
31 Oct	Infrastructure Leader Forum held by PT Nusantara Infra structure	Kartika Wirjoatmodjo, Haruhiko Takamoto
20 Nov	Asset & Liability Management and Capital Adequacy Planning held by Ethan Hataway	Ari Soerono



## E. Dewan Komisaris – Komite Investasi

Dewan Komisaris – Komite Investasi (BoC-IC) dibentuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan proposal investasi IIF, portofolio, dan strategi.

### 1. Charter

BoC-IC memiliki piagam yang mengatur hal-hal terkait kewenangan, struktur dan kualifikasi, tanggung jawab, rapat, pelaporan, kerahasiaan, dan lain-lain.

### 2. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas utama BoC-IC IIF, antara lain adalah:

- Memberikan pendapat dan/atau rekomendasi mengenai pemberian kredit/investasi untuk persetujuan final dari BoC;
- Mengevaluasi dan memberikan laporan kajian kinerja atas portofolio investasi Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada investasi berupa pinjaman, ekuitas dan *treasury*;
- Mengkaji kebijakan kredit dan investasi Perusahaan dan memberikan masukan

## E. The Board of Commissioners – Investment Committee

The Board of Commissioners – Investment Committee (BoC-IC) was formed to provide a supervisory function, in particular in dealing with IIF's investment proposals, portfolio and strategies.

### 1. Charter

The BoC-IC has a charter that governs matters related to authority, structure and qualification, responsibilities, meetings, reporting, confidentiality and others.

### 2. Duties and Responsibilities

The main duties of IIF's BoC-IC, among other things, are:

- Provide opinions and/or recommendations on the granting of credit/investment for a final approval from the BoC;
- Evaluate and provide a report reviewing the performance of the investment portfolio of the Company, including but not limited to loans, equity and treasury investments;
- Review the credit and investment policy of the Company and provide inputs on the

- terhadap perumusan/revisinya;
- Melakukan kewajiban-kewajiban lain yang berkaitan dengan kegiatan investasi Perusahaan atau kebijakan atau hal-hal lain, yang dari waktu ke waktu ditugaskan oleh BoC kepada Komite.

formulation/revision of the same;  
 • Perform such other responsibilities relating to the Company's investment activities or policies or other matters as the BoC may from time to time assign to the Committee.

### 3. Komposisi

Ketua: Komisaris Independen

Anggota: Semua anggota BoC.

### 3. Composition

Chairman: Independent Commissioner

Members: All members of the BoC.

### 4. Rapat BoC-IC

Pada tahun 2013, BoC-IC mengadakan 12 (dua belas) kali rapat, dengan rincian sebagai berikut:

### 4. BoC-IC Meetings

In 2013, the BoC-IC convened a total of 12 (twelve) meetings, with details as follows:

Tabel/Table 9: Rapat BoC-IC | BoC-IC Meetings

No.	Tanggal/Date	Keterangan/Description	No.	Tanggal/Date	Keterangan/Description
1	20 February 2013	Telekonferensi/ Teleconference	7	22 July 2013	Telekonferensi/ Teleconference
2	6 March 2013	Pertemuan langsung/ Physical Meeting	8	28 August 2013	Telekonferensi/ Teleconference
3	21 March 2013	Telekonferensi/ Teleconference	9	18 September 2013	Pertemuan langsung/ Physical Meeting
4	17 April 2013	Telekonferensi/ Teleconference	10	31 October 2013	Telekonferensi/ Teleconference
5	12 June 2013	Pertemuan langsung/ Physical Meeting	11	4 December 2013	Pertemuan langsung/ Physical Meeting
6	24 June 2013	Telekonferensi/ Teleconference	12	19 December 2013	Telekonferensi/ Teleconference

### F. Dewan Direksi – Komite Investasi

Dewan Direksi – Komite Investasi (BoD-IC) bertanggung jawab untuk mengkaji, mempertimbangkan, dan membuat keputusan mengenai semua proposal investasi untuk IIF yang akan direkomendasikan kepada BoC-IC.

### F. The Board of Directors – Investment Committee

The Board of Directors – Investment Committee (BoD-IC) is responsible mainly to review, consider and make decisions on all investment proposals for IIF to be recommended to the BoC-IC.

## 1. Charter

BoD-IC memiliki charter yang mengatur hal-hal terkait peran dan tanggung jawab, kewenangan, struktur dan kualifikasi, rapat, pelaporan, kerahasiaan, dan lain-lain.

## 2. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas utama BoD-IC IIF meliputi:

- Mengkaji, dan selanjutnya menyetujui dan merekomendasikan proposal investasi untuk ditinjau lebih lanjut dan disetujui oleh BoC-IC;
- Menyediakan informasi, bantuan dan/atau klarifikasi kepada BoC-IC untuk tujuan pengkajian proyek oleh BoC-IC;
- Berkoordinasi dengan Komite Aset dan Kewajiban dari BoD (ALCO) untuk memastikan kecukupan pendanaan untuk kredit/investasi yang diusulkan dan bahwa dana tersebut sesuai dengan jumlah kredit tertentu yang ditetapkan oleh ALCO;
- Meninjau dan menyesuaikan kebijakan kredit dan investasi IIF dari waktu ke waktu jika dianggap diperlukan;
- Meninjau dan memantau implementasi atas semua investasi ekuitas dan semua pinjaman setidaknya setahun sekali, dan meningkatkan frekuensi peninjauan jika dianggap perlu dan menyediakan laporan mengenai tinjauan dan pemantauan kepada BoC-IC.

## 3. Komposisi BoD-IC

Ketua: Presiden Direktur/Chief Executive Officer  
Anggota:

- Direktur Pelaksana & Chief Risk Officer;
- Direktur Pelaksana & Chief Investment Officer – Domestic Client;
- Direktur Pelaksana & Chief Investment Officer – International Client;
- Direktur Pelaksana & Chief Financial Officer;
- EVP - Head of Private Client Advisory.

## 1. Charter

The BoD-IC has a charter that governs matters related to roles and responsibilities, authority, structure and qualification, meetings, reporting, confidentiality and others.

## 2. Duties and Responsibilities

The main duties of IIF's BoD-IC include:

- Review, and subsequently clear and recommend investment proposals for further review and approval from the BoC-IC;
- Provide information, assistance and/or clarifications to the BoC-IC for the purpose of BoC-IC's review of the projects;
- Coordinate with the Assets & Liabilities Committee of the BoD (ALCO) to ensure funding adequacy for the proposed credits/investments and that such funding be in accordance with certain amounts of credit set by ALCO;
- Review and adjust credit and investment policies of IIF from time to time as deemed necessary;
- Review and monitor the implementation of all equity investments and all loans at least annually, and increase the frequency of the review if it is deemed necessary and provide reports on the review and monitoring to the BoC-IC.

## 3. BoD-IC composition

Chairman: President Director/Chief Executive Officer Members:

- Managing Director & Chief Risk Officer;
- Managing Director & Chief Investment Officer – Domestic Client;
- Managing Director & Chief Investment Officer – International Client;
- Managing Director & Chief Financial Officer;
- EVP - Head of Private Client Advisory.

#### 4. Rapat BoD-IC

Pada tahun 2013, BoD-IC mengadakan 15 (lima belas) kali rapat, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel/Table 10: Rapat BoD-IC | BoD-IC Meetings

No.	Tanggal/Date	Bulan/Month	No.	Tanggal/Date	Bulan/Month
1	11	February	6	4, 19	July
2	1	March	7	13, 16	September
3	15	April	8	25	October
4	17	May	9	21	November
5	3, 5, 17	June	10	9, 16	December

#### G. Komite Aset & Liabilitas

Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) dibentuk pada bulan Desember 2013 oleh BoD untuk memantau risiko dan pengelolaan dana dan sumber daya lainnya secara aktif, terutama dalam mengelola risiko pasar dan risiko likuiditas.

##### 1. Charter

ALCO memiliki *charter* yang mengatur hal-hal terkait tanggung jawab, struktur dan kualifikasi, rapat, pelaporan, kerahasiaan dan lain-lain.

##### 2. Tugas dan Tanggung Jawab

Tanggung jawab ALCO dalam kerangka desain manajemen risiko adalah:

- Merumuskan strategi dan rencana tindakan dalam kaitannya dengan risiko pasar dan likuiditas;
- Menyediakan rekomendasi perubahan kebijakan, jika diperlukan, dan menyarankan hal ini kepada BoC untuk mendapatkan persetujuan;
- Memastikan bahwa pengelolaan aset dan liabilitas dijalankan sesuai dengan kebijakan Perusahaan;

#### 4. BoD-IC Meetings

In 2013, the BoD-IC convened a total of 15 (fifteen) meetings, with details as follows:

#### G. The Assets & Liabilities Committee

The Assets & Liabilities Committee (ALCO) was established in December 2013 by the BoD to actively monitor the risk and management of funds and other resources, primarily in managing market risk and liquidity risk.

##### 1. Charter

The ALCO has a charter that governs matters related to responsibilities, structure and qualification, meetings, reporting, confidentiality and others.

##### 2. Duties and Responsibilities

The responsibilities of the ALCO under the risk management design framework are:

- Formulate the strategy and action plan in respect of market and liquidity risk;
- Provide recommendations on changes of policy, if required, and suggesting these to the BoC for approval;
- Ensure that the management of assets and liabilities is executed with the Company's policies;

- Mengelola likuiditas, menetapkan suku bunga, menetapkan, menentukan dan memantau pelaksanaan kebijakan untuk mismatch dan posisi devisa neto, serta mengelola dan menentukan struktur neraca keuangan dan modal IIF;
- Mengelola investasi untuk dana surplus;
- Mengelola risiko pasar yang dilakukan dalam *trading book*;
- Mendesain dan merevisi struktur limit sesuai dengan *risk appetite* IIF dengan berkoordinasi dengan Komite Manajemen Risiko dari BoD (atau jika limit tersebut harus disetujui oleh BoC, kemudian memberikan rekomendasi dan justifikasi untuk persetujuan lebih lanjut dari BoC), dan memantau kepatuhan terhadap struktur limit;
- Menyetujui penggunaan metodologi untuk pengelolaan risiko pasar, risiko likuiditas, dan menetapkan kerangka kerja untuk validasi berkala atas model risiko pasar dan likuiditas;
- Menentukan (atau memperkirakan) risiko pasar dan likuiditas yang melekat dalam semua aktivitas Perusahaan dan menyediakan input strategis kepada BoC dengan berkoordinasi dengan Komite Manajemen Risiko dari BoD;
- Mengkaji proyeksi kas dan menentukan kelebihan yang dapat diinvestasikan, jika ada.
- Manage IIF's liquidity, set interest rates, set, determine and monitor application of the policies for mismatch and net open position, as well as manage and determine the financial and capital balance structures;
- Manage investment of surplus funds;
- Manage the market risk carried in the trading book;
- Design and revise limit structures in line with IIF's risk appetite in coordination with the Risk Management Committee of the BoD (or if such limit shall be approved by the BoC, then to provide recommendation and justification for further approval of the BoC), and monitor the compliance with the limit structure;
- Approve use of methodology for management of market risk, liquidity risk, and establish the framework for periodic validations of market and liquidity risk model;
- Define (or estimate) the market and liquidity risk inherent in all activities of the Company and provide strategic inputs to the BoC in coordination with the Risk Management Committee of the BoD;
- Review the cash forecast and determine investable surplus, if any.

### 3. Komposisi ALCO

Ketua: Presiden Direktur/Chief Executive Officer  
Anggota:

- Direktur Pelaksana & Chief Financial Officer (sebagai penyelenggara);
- Direktur Pelaksana & Chief Risk Officer;
- Direktur Pelaksana & Chief Investment Officer – Domestic Client;
- Direktur Pelaksana & Chief Investment Officer – International Client.

### 4. Rapat ALCO

ALCO mengadakan rapat pertama pada tanggal 19 Desember 2013. Setelah itu, anggota ALCO akan melakukan pertemuan setiap bulan.

### 3. ALCO Composition

Chairman: President Director Chief Executive Officer Members:

- Managing Director & Chief Financial Officer (as the convenor);
- Managing Director & Chief Risk Officer;
- Managing Director & Chief Investment Officer – Domestic Client;
- Managing Director & Chief Investment Officer – International Client.

### 4. ALCO Meetings

The ALCO had its first meeting on 19 December 2013. Thereafter, ALCO members will meet on a monthly basis.

## H. Komite Audit

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk mendukung fungsi pengawasan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan pengendalian internal, kebijakan akuntansi, pelaporan keuangan, dan auditor internal maupun eksternal.

### 1 . Charter

Komite Audit memiliki Komite Audit *Charter* yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan, struktur dan kualifikasi , tanggung jawab, pertemuan, pelaporan, dan masa jabatan.

### 2 . Tanggung Jawab Komite Audit

- Me-review laporan yang mengidentifikasi isu-isu pengendalian yang signifikan yang membutuhkan perhatian atau subjek koreksi serta merangkum tindakan-tindakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Me-review cara dan kerangka kerja manajemen dalam memastikan dan memantau kecukupan dari sifat, tingkat dan efektivitas internal sistem kontrol, termasuk pengendalian sistem akuntansi;
- Me-review laporan dari auditor internal dan eksternal dan memantau status remediasi yang diperlukan;
- Me-review masalah-masalah yang dibahas dan memutuskan apakah ada kebutuhan untuk meng-escalasi masalah kepada Dewan Komisaris atau memberitahukan kepada regulator;
- Secara khusus, komite bertanggung jawab atas perbaikan transparansi dan kualitas laporan keuangan, melalui tugas-tugas berikut:
  - Memastikan adanya kajian yang layak pada laporan keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan;
  - Mendiskusikan dengan auditor setiap area *judgement* yang signifikan dan/atau

## H. The Audit Committee

The Audit Committee was formed by the BoC to support the supervisory function, primarily in dealing with internal control, accounting policy, financial reporting, and internal and external auditors.

### 1 . Charter

The Audit Committee has a charter that governs matters related to authority, structure and qualification, responsibilities, meetings, reporting, and period of tenure.

### 2 . Audit Committee Responsibilities

- Review the report which identifies control issues of significance that require or are subject to corrective attention and summarizes the actions being taken to resolve those issues;
- Review the manner and framework in which management ensures and monitors the adequacy of the nature, extent and effectiveness of internal control systems, including accounting control systems;
- Review reports from internal and external auditors and monitor the status of any necessary remediation;
- Review issues discussed and decide if there is a need to escalate issues to the BoC or notify the local regulator;
- Specifically, the committee is responsible for the improvement of the transparency and financial reporting quality, through the following tasks:
  - Ensure the existence of adequate review on the financial statements to be issued by the Company;
  - Discuss with the auditors any significant areas of judgment and/or accounting

- kebijakan akuntansi dalam penyediaan informasi dalam akun-akun;
- Memastikan bahwa laporan keuangan telah disiapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan peraturan terkait;
  - Memastikan semua laporan yang dikirimkan ke regulator dan lembaga terkait lainnya telah disampaikan secara akurat dan tepat waktu.
  - Dalam kaitannya dengan Internal Auditor, komite akan melakukan tugas-tugas berikut :
    - Mengevaluasi Piagam Internal Audit yang akan disetujui oleh Dewan Komisaris;
    - Mengevaluasi rencana audit tahunan internal auditor sebagai masukan bagi Dewan Komisaris;
    - Mengevaluasi efektivitas fungsi internal audit;
    - Menugaskan internal auditor untuk melakukan audit khusus apabila terdapat adanya indikasi penipuan atau penyimpangan manajemen.
  - Dalam kaitannya dengan Akuntan Publik, Komite akan melakukan tugas-tugas berikut :
    - Merekendasikan kepada Dewan Komisaris dalam pemilihan akuntan publik untuk disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan;
    - Menelaah independensi dan obyektivitas akuntan publik;
    - Me-review konsistensi pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik terhadap standar auditing yang berlaku;
    - Me-review kinerja akuntan publik di untuk merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali atau mengganti akuntan publik.
  - Dalam kaitannya dengan Kepatuhan, Komite akan melakukan tugas-tugas berikut :
    - Me-review efektivitas kepatuhan sistem pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan;
    - Me-review informasi dari manajemen, auditor dan konsultan eksternal lainnya yang berkaitan dengan masalah kepatuhan;
    - Me-review temuan audit dari lembaga berwenang dan efektivitas atas tanggapan
- policy to adopt in the provision of information in the statutory accounts;
- Ensure that financial statements have been prepared according to the generally accepted accounting principles and the underlying regulations;
  - Ensure that all reports to the regulator and other institution(s) have been submitted accurately and in a timely manner.
  - In dealing with the Internal Auditor, the committee will undertake the following tasks:
    - Evaluate the Internal Audit Charter to be approved by the BoC;
    - Evaluate the internal auditor annual audit plan as input for the BoC;
    - Evaluate the effectiveness of internal audit function;
    - Assign the internal auditor to perform a special audit if there is any indication of management fraud or irregularity.
  - With regard to Public Accountant, the Committee will undertake the following tasks:
    - Recommend to the BoC in selecting a public accountant to be approved in the annual Shareholders meeting;
    - Review the independence and objectivity of the Public Accountant;
    - Monitor the consistency of audit implementation conducted by Public Accounting Firm to the prevailing auditing standards;
    - Review the Public Accountant performance in order to recommend to the BoC to reappoint or replace the Public Accountant.
  - With regard to Compliance, the Committee will undertake the following tasks:
    - Review the effectiveness of the compliance monitoring system in preparing financial reports;
    - Review the information from the management, auditor and other external consultants relating to the compliance issues;
    - Review the audit findings of the authoritative institutions and the effectiveness of

dan tindak lanjut manajemen.

management response and follow-up actions.

### 3 . Komposisi Komite Audit

Keanggotaan Komposisi 1 Januari 2013 - 27 Maret 2013

**Ketua :**

Sofyan Djalil (Presiden Komisaris/ Komisaris Independen)

**Anggota :**

Arif Baharudin (Komisaris)

Hans Jurgen Hertel (Komisaris)

Agus Kretarto (Non - Komisaris)

Darminto (Non - Komisaris)

Keanggotaan Komposisi 28 Maret 2013 - 31 Desember 2013

**Ketua:**

Sofyan Djalil (Presiden Komisaris/ Komisaris Independen)

**Anggota:**

Arif Baharudin (Komisaris)

Hans Jurgen Hertel (Komisaris)

Robert Olivier Dolk (Komisaris)

Agus Kretarto (Non - Komisaris)

Loso Judijanto (Non - Komisaris)

### 3. Audit Committee Composition

Membership Composition 1 January 2013 - 27 March 2013

**Chairman :**

Sofyan Djalil (President Commissioner/ Independent Commissioner)

**Member :**

Arif Baharudin (Commissioner)

Hans Jurgen Hertel (Commissioner)

Agus Kretarto (Non-Commissioner)

Darminto (Non-Commissioner)

Membership Composition 28 March 2013 – 31 December 2013

**Chairman :**

Sofyan Djalil (President Commissioner/ Independent Commissioner)

**Member :**

Arif Baharudin (Commissioner)

Hans Jurgen Hertel (Commissioner)

Robert Olivier Dolk (Commissioner)

Agus Kretarto (Non-Commissioner)

Loso Judijanto (Non-Commissioner)

### d . Profil Komite Audit

Sofyan Djalil

Silakan lihat halaman 22.

Arif Baharudin

Silakan lihat halaman 23.

Hans Juergen Hertel

Silakan lihat halaman 24.

Robert Olivier Dolk

Silakan lihat halaman 23.

Agus Kretarto

Agus Kretarto memperoleh gelar Master of Manajemen untuk Akuntansi Manajemen dari Universitas Indonesia. Beliau juga telah mengikuti berbagai kursus dan seminar baik di dalam

### d. Audit Committee Profiles

Sofyan Djalil

Please see page 22.

Arif Baharudin

Please see page 23.

Hans Juergen Hertel

Please see page 24.

Robert Olivier Dolk

Please see page 23.

Agus Kretarto

Agus Kretarto earned a Master of Management in Management Accounting from the University of Indonesia. He has also attended various courses and seminars both at home and abroad

maupun di luar negeri dalam bidang auditing, akuntansi, perbankan, pasar modal, manajemen risiko, peraturan ekonomi infrastruktur dan Kerjasama Publik-Swasta.

Beliau memulai karirnya sebagai auditor di Departemen Keuangan (1981-1983) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (1987-1992). Beliau pernah bekerja di Bank Rama dari tahun 1993-2000 dengan posisi sebagai Kepala Internal Audit, Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan, Sekretaris Perusahaan, dan Koordinator merger untuk Keuangan, Pajak & Accounting. Pada tahun 2001, beliau menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan di Mustika Ratu, kemudian sebagai Direktur Kepatuhan Bank Harmoni Internasional (2002-2003), Anggota Komite Audit Bank Internasional Indonesia (2003-2008), dan Anggota Dewan Eksekutif Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyedian Air Minum jakarta (2005-2012).

#### Loso Judijanto

Loso Judijanto menerima gelar Bachelor of Science (S.Si) jurusan Statistik dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1994 , Magister Manajemen (MM) jurusan Manajemen Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1995, dan Master of Statistik (M.Stats) dari University of New South Wales, Sydney , Australia pada tahun 1998.

Beliau adalah Akuntan Manajemen Chartered (Australia) dan memegang berbagai sertifikasi profesional lainnya. Memulai karirnya di Pusat Kebijakan dan Studi Implementasi sebagai Staf Peneliti (1995 - 1996), kemudian di Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (1998 - 2000), PT Pupuk Iskandar Muda sebagai Sekretaris kepada Dewan Komisaris (1999 - 2006), SDP Spesialis Corporate Governance sebagai Partner dan Managing Partner (2000 - 2005), Penasehat Khusus Menteri Komunikasi Informasi dan Teknologi Republik Indonesia (2005 - 2007), dan kemudian sebagai Penasihat Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (2007-2009).

in auditing, accounting, banking, capital markets, risk management, economic regulation of infrastructure, and public private partnerships.

He began his career as an auditor at the Ministry of Finance (1981-1983) and the Financial and Development Supervisory Board (1987-1992). He worked at Bank Rama from 1993 to 2000 with positions as Head of Internal Audit, Head of Planning and Development Division, Corporate Secretary, and Merger Coordinator for Finance, Tax & Accounting. In 2001 he served as Corporate Secretary of Mustika Ratu, then as Compliance Director of Bank Harmoni Internasional (2002-2003), Member of Audit Committee of Bank Internasional Indonesia (2003-2008), and Member of the Executive Board of Jakarta Water Supply Regulatory Body (2005-2012).

#### Loso Judijanto

Loso Judijanto received a Bachelor of Science (S.Si) in Statistics from the Bogor Institute of Agriculture in 1994, Master of Management (MM) in Management Accounting from the University of Indonesia in 1995, and Master of Statistics (M.Stats) from the University of New South Wales, Sydney, Australia in 1998.

He is a Chartered Management Accountant (Australia) and holds a variety of other professional certifications. Starting his career in the Center for Policy and Implementation Studies as Research Staff (1995 - 1996), then in the Ministry of State Owned Enterprises of the Republic of Indonesia (1998 - 2000), PT Pupuk Iskandar Muda as Secretary to the Board of Commissioners (1999 - 2006), SDP Corporate Governance Specialists as Partner and Managing Partner (2000 - 2005), Special Adviser to the Minister of Information and Communication Technology of the Republic of Indonesia (2005 - 2007), and then as Special Adviser to Minister of State Owned Enterprises of the Republic of Indonesia (2007 - 2009).

Beliau memiliki eksposur yang luas di perusahaan, antara lain, PT Pelabuhan Indonesia II sebagai Komisaris dan sebagai Ketua Komite Audit (2007 - 2009), PT Bank Bukopin Tbk. sebagai Independen Komisaris dan Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko (2009 - 2010), PT Telkomsel sebagai Komisaris ( 2007-2012 ). Ia telah menjadi anggota Komite Audit Perusahaan sejak tahun 2013.

Selama tahun 2013, Komite Audit telah mengadakan 5 (lima) kali pertemuan .

#### 4 . Independensi Komite Audit

Untuk menjaga independensi, sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit tanggal 6 Oktober 2010, susunan komite audit harus terdiri dari paling sedikit 1 (satu) komisaris independen dan minimal 2 (dua) orang anggota dari luar perusahaan (pihak independen). Komisaris independen dan Pihak Independen adalah anggota Komite tanpa adanya hubungan keuangan, manajemen, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris , Direksi , dan/atau pemegang saham pengendali lainnya, atau bentuk lain dari hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak independen.

Anggota Komite Audit IIF adalah professional yang dilengkapi dengan latar belakang bidang keuangan dan/atau akuntansi untuk menjamin kualitas pelaksanaan tugas dan saran yang diberikan. Jadi, semua prasyarat mengenai independensi Komite Audit seperti yang tercantum dalam peraturan dan Praktek GCG telah dipenuhi .

#### 5 . Kegiatan Komite Audit

##### Kegiatan internal

- Mengadakan pertemuan rutin dengan Internal Auditor untuk membahas sistem pengendalian internal, kemajuan status pengembangan

He has extensive corporate exposure in, among others, PT Pelabuhan Indonesia II as Commissioner and as Chairperson of Audit Committee (2007 - 2009), PT Bank Bukopin Tbk. as Independent Commissioner and Chairperson of Risk Management Oversight Committee (2009 - 2010), and PT Telkomsel as Commissioner (2007 - 2012). He has been a member of the Audit Committee of the Company since 2013.

During 2013, the Audit Committee held 5 (five) meetings.

#### 4. The Independence of Audit Committee

In order to maintain independence, as stipulated in the Audit Committee Charter dated 6 October 2010, the composition of the audit committee shall consist of at least 1 (one) Independent Commissioner and at least 2 (two) members from outside the Company (Independent Party). The Independent Commissioner and Independent Parties are members of the Committee without financial, management, shareholding and/or family relationship with other BoC members, BoD, and/or controlling Shareholders, or any other form of relationship that may impact their ability to act independently.

IIF's Audit Committee members are professionals equipped with financial and/ or accounting backgrounds to guarantee the quality of its performance of duties and advice. Thus, all prerequisites regarding the Audit Committee's independence and GCG practices have been fulfilled.

#### 5. Audit Committee Activities

##### Internal Activity

- Held regular meetings with Internal Auditors to discuss internal control system, progress status of Standard Operating Procedures

Prosedur Operasional Standar, dan Laporan keuangan Perusahaan;

- Melakukan review dan memberikan saran pada Laporan Manajemen Risiko Triwulan-an sebelum diajukan kepada para pemegang saham.
- Melakukan *review* terhadap kinerja, independensi dan objektivitas dari akuntan publik untuk direkomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali atau mengganti akuntan publik tersebut.

#### Kegiatan eksternal

- Mengadakan pertemuan dengan Auditor Eksternal sebelum dan setelah audit laporan keuangan Perusahaan;

development, and Company's financial statements;

- Conducted review and provided suggestions on the Quarterly Risk Management Report prior to being submitted to the Shareholders;
- Conducted review on the performance, independence and objectivity of the Public Accountant in order to recommend the BoC to reappoint or replace said Public Accountant.

#### External Activity

- Held a meeting with External Auditors before and after the audit of the Company's financial statements;



- Mengadakan pertemuan dengan pihak terkait mengenai perbaikan sistem pengendalian internal.

- Held a meeting with related parties regarding internal control system improvement.

## I. Sekretaris Perusahaan

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan antara lain:

- Memastikan kepatuhan terhadap tata kelola yang baik;
- Mengelola hubungan dengan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan;
- Melakukan fungsi legal dan konsultan legal terutama menyangkut hal-hal yang terkait dengan permasalahan Perusahaan;
- Memastikan ketersediaan laporan-laporan, antara lain Laporan Manajemen Risiko, Laporan Kinerja Sosial dan Lingkungan dan Laporan Uji Tuntas atau *Due Diligence* sesuai dengan Pedoman Operasional Perusahaan, Kesepakatan Pemegang Saham dan/atau hukum dan regulasi yang berlaku.

## I. Corporate Secretary

The duties and responsibilities of Corporate Secretary include:

- Ensure compliance with good corporate governance;
- Manage relationship with Shareholders and Stakeholders;
- Carry out legal function and legal consultant mainly on things related to corporate matters;
- Ensure the availability of reports, including Risk Management Report, Social and Environmental Performance Report and Due Diligence Report, in accordance with the Company's Operating Manual, Shareholders' Agreements and/or applicable laws and regulations.

### Profil Sekretaris Perusahaan

Nstantio W. Hadi telah menjabat VP Legal & Sekretaris Perusahaan sejak 22 Februari 2012. Sebelum bergabung dengan IIF sebagai seorang pengacara *in-house* pada 2011, Hadi berkarir selama 15 tahun di beberapa kantor hukum ternama di Indonesia. Dia mendapatkan lisensi Advokat pada 2004. Dia adalah anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

### Profile of Corporate Secretary

Nstantio W. Hadi has held the position of VP Legal & Corporate Secretary since 22 February 2012. Prior to joining IIF as an in-house lawyer in 2011, Mr. Hadi had spent 15 years of his career as a lawyer in Indonesian prominent law firms. He obtained an Advocate Licence in 2004. He is a member of the Indonesian Advocate Association (PERADI).

## J. Audit Internal

Satuan Internal Audit adalah unit independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris, melalui Komite Audit. Sebagai layanan kepada Manajemen, Audit Internal bertindak sebagai pemberi penilaian indepeden, yang memeriksa dan mengevaluasi kecukupan dan keefektifvan sistem pengendalian internal Perusahaan dan

## J. Internal Audit

The Internal Audit Unit is an independent unit reporting directly to the President Director and to the BoC, through the Audit Committee. As a service to Management, Internal Audit acts as an independent appraisal function by examining and evaluating the adequacy and effectiveness of the Company's system of internal control and quality of performance. This control assurance

kualitas kinerja. Fungsi penjamin pengendalian ini secara sistematis mengevaluasi dan memperbaiki keefektifan manajemen risiko, proses pengendalian dan tata kelola, yang memungkinkan Manajemen menjadi lebih efektif dalam mencapai target usaha dan memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Pemegang Saham Perusahaan.

## 1. Charter

Audit Internal *Charter* adalah sebuah dokumen formal tertulis yang menjabarkan tujuan, wewenang dan tanggung jawab Audit Internal. *Charter* ini menetapkan posisi Audit Internal di dalam organisasi, memberi wewenang untuk mendapatkan berbagai catatan, memasuki berbagai bangunan fisik yang relevan dengan kinerja; dan menguraikan lingkup kerja. Audit Internal IIF *Charter* telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Presiden Komisaris dan Presiden Direktur tanggal 28 November 2012.

## 2. Tanggung Jawab Internal Audit

Tanggung jawab Internal Audit, sebagaimana diatur dalam Piagam Internal Audit, yaitu :

- Mengembangkan rencana audit tahunan yang fleksibel yang menggunakan metodologi berbasis risiko yang tepat, termasuk resiko atau masalah kontrol yang diidentifikasi oleh manajemen, dan menyampaikan rencana itu kepada Komite Audit untuk ditelaah dan disetujui serta diperbarui secara periodik;
- Melaksanakan rencana kerja audit tahunan yang disetujui, termasuk didalamnya tugas-tugas khusus atau proyek yang diminta langsung oleh manajemen dan komite Audit;
- Menilai efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional , sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Melakukan audit kepatuhan terhadap peraturan dan hukum terkait;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan status penyelesaian atas tindak lanjut yang direkomendasikan;

function systematically evaluates and improves the effectiveness of the risk management, control, and governance processes, which enables management to be more effective in meeting its business objectives and in fulfilling its obligations to the Company's Shareholders.

## 1. Charter

The Internal Audit Charter is a formal written document that defines the purpose, authority, and responsibility of the Internal Audit. The Charter establishes the Internal Audit's position within the organization; authorizes access to records, personnel, and physical properties relevant to the performance of engagements; and defines the scope of work. The IIF Internal Audit Charter has been issued and signed by the President Commissioner and President Director dated 28 November 2012.

## 2. Internal Audit Responsibilities

Internal Audit's responsibilities, as stipulated in the Internal Audit Charter, include:

- Develop a flexible annual audit plan using an appropriate risk-based methodology, including any risks or control concerns identified by management, and submit that plan to the Audit Committee for review and approval as well as periodic updates;
- Implement the annual audit plan, as approved, including as appropriate any special tasks or projects requested by management and the Audit Committee;
- Assess the efficiency and effectiveness in area of finance, accounting, operation, human resources, marketing, information technology and other activities;
- Perform audit of compliance to related regulations and laws;
- Monitor, analyze and report the progress of recommended follow-up actions;

- Audit dan menginformasikan secara berkesinambungan kepada Komite Audit mengenai tren dan praktik sukses dalam internal audit;
- Membantu dalam penyelidikan kasus signifikan yang diduga merupakan kegiatan penipuan dalam organisasi dan memberitahukan hasil dari penyelidikan tersebut kepada Komite Audit dan Manajemen;
- Mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan eksternal auditor dan regulator, untuk tujuan menyediakan cakupan audit yang optimal untuk organisasi dengan biaya keseluruhan yang wajar.
- Perform coordination with the Audit Committee and keep the Audit Committee informed of emerging trends and successful practices in internal auditing;
- Assist in the investigation of significant suspected fraudulent activities within the organization and notify management and the Audit Committee of the results;
- Consider the scope of work of the external auditors and regulators, as appropriate, for the purpose of providing optimal audit coverage to the organization at a reasonable overall cost.

### 3. Kegiatan Internal Audit

Pada 2013 , Unit Internal Audit telah melakukan tugas pemeriksaan dan kegiatan konsultasi, sebagai berikut :

- Internal Audit telah melakukan penilaian atas Program dan Implementasi AML/CFT. Sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian Pemegang Saham (“SHA”), IIF wajib menyampaikan laporan penilaian atas program dan implementasi AML/ CFT ke pemegang saham;
- Sebagai bagian dari kegiatan penasihat dan konsultasi, internal Audit telah melakukan *review* yang komprehensif atas draft SOP dari bisnis unit terkait yang bertujuan untuk memastikan alur proses dan desain pengendalian internal yang tepat tercantum dalam SOP tersebut;
- Internal Audit telah melakukan *review* yang komprehensif atas draft Peraturan Perusahaan. Penugasan ini bertujuan untuk memastikan peraturan tersebut dapat mengakomodasi sepenuhnya hal-hal yang diperlukan dan sesuai dengan Manual Operasi IIF;
- Dalam rangka menjabarkan Manual Operasi dan menetapkan pedoman yang komprehensif untuk auditor dalam melakukan penugasan audit, Internal Audit telah mengembangkan SOP Internal Audit;

### 3. Internal Audit Activities

In 2013, Internal Audit Unit carried out assurance and consulting activities, as follows:

- Internal Audit has conducted an assessment of IIF Anti Money Laundering (AML)/ Combating the Financing of Terrorism (CFT) Program and Implementation. As stipulated in the Shareholders' Agreement ("SHA"), IIF is obliged to submit an assessment report with regard to the AML/CFT program and its implementation to the Shareholders;
- As part of the advisory and consulting activity, Internal Audit has performed a comprehensive review of the draft from related Business Units in order to ensure the flow of process and the design of internal controls were appropriately incorporated in the SOP;
- Internal Audit has performed a comprehensive review of the Company Regulation draft. This assignment is aimed to ensure the regulation is able to fully accommodate the required matters and is in accordance with IIF Operating Manual;
- In order to detail the Operating Manual and establish a comprehensive guidance for the auditor in performing an audit engagement, Internal Audit has developed an Internal Audit SOP;

- Internal Audit telah melakukan *review* komprehensif atas Laporan Keuangan bulanan Perusahaan. Penugasan ini bertujuan untuk memastikan Laporan Keuangan disajikan secara akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku;
- Sebagaimana yang diminta oleh ketua Komite Audit , Internal Audit telah menyusun analisis mengenai perluasan ruang lingkup pekerjaan Komite Audit dan usulan penggantian Ketua Komite Audit;
- Sehubungan dengan penunjukan Auditor Independen, Komite Audit telah ditugaskan untuk melakukan proses seleksi. Sehubungan dengan hal tersebut, Internal Audit juga turut membantu komite audit dalam melakukan proses seleksi, yang mana hasil dari proses ini selanjutnya akan diusulkan kepada pemegang saham untuk mendapatkan persetujuan;
- Dalam rangka untuk membantu auditor independen dalam melakukan tugas audit, Internal Audit bertugas untuk memfasilitasi proses audit tersebut sehingga semua dokumen yang diminta oleh auditor dapat diserahkan tepat waktu.
- Internal Audit has performed a comprehensive review of the monthly Company Financial Statements. This assignment is aimed to ensure Financial Statements are accurately presented in accordance with the prevailing standards;
- As requested by the chairman of the Audit Committee, Internal Audit has issued a position paper regarding the extension of the Audit Committee scope and the proposal of the replacement of the Audit Committee chairman;
- With regard to the appointment of the Independent Auditor, the Audit Committee has been authorized to conduct the selection process. Pertaining to this matter, Internal Audit has assisted the Audit Committee in the selection process whereby the result of this process will be further proposed to the Shareholders to get their approval;
- In order to assist the Independent Auditor in performing its field work, Internal Audit has been tasked with facilitating the process so that the documents required by the auditor could be provided in a timely manner.

#### 4 . Profil Kepala Internal Audit

Yudi Adrial meraih gelar Sarjana dari Universitas Indonesia. Yudi memiliki pengalaman 10 tahun di Konsultan Manajemen dan Lembaga Keuangan. Pengalaman auditnya meliputi pengalaman 6 tahun sebagai seorang konsultan di Ernst & Young, dan sebagai Kepala Unit Kepatuhan di PT. NISP Sekuritas selama 2 tahun. Beliau juga memegang sertifikat CIA yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditor.

#### 4. Profile of Head of Internal Audit

Yudi Adrial earned his Bachelor degree from the University of Indonesia. Yudi has 10 years' experience in Management Consulting and Financial Services Industry. His audit experience includes 6 years' experience as a consultant at Ernst & Young, and as NISP Sekuritas' Compliance Head for 2 years. He also holds CIA Certificates from the Institute of Internal Auditors.

#### K. Eksternal Auditor

Laporan Keuangan IIF tahun 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman, Bing, Satrio & Eny (anggota Perusahaan dari Deloitte Touche Tohmatsu) dengan biaya jasa audit sebesar US\$ 30.000.

#### K. External Audit

The financial statements of PT. Indonesia Infrastructure Finance for 2013 were audited by Public Accounting Firm Osman, Bing, Satrio & Eny (a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) for an audit fee amounting to US\$ 30,000.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik ini telah disetujui oleh RUPST tanggal 23 April 2013. Kantor Akuntan Publik ini dipilih oleh Dewan Komisaris, sebagaimana yang telah ditugaskan oleh Pemegang Saham untuk menunjuk Akuntan Publik, yang didasarkan pada rekomendasi dari Komite Audit.

Kantor Akuntan Publik OBS & Eny telah melakukan audit atas laporan keuangan IIF untuk 4 (empat) periode mulai dari tahun 2010, dimana dua diantaranya dilakukan ketika masih di bawah Osman Bing Satrio (OBS) sebelum berganti mitra dan berubah nama di bulan Desember 2012.

Pada tahun 2013, Kantor Akuntan Publik Osman, Bing, Satrio & Eny (anggota Perusahaan dari Deloitte Touche Tohmatsu) telah memberikan jasa tidak hanya jasa audit atas laporan Keuangan, tetapi juga telah memberikan jasa *review* atas laporan Kinerja IIF.

The appointment of the Public Accountant was approved by the AGMS dated 23 April 2013. The Public Accountant was selected by the BoC, as authorized by Shareholders to appoint registered Public Accounting Firm, based on the recommendation of Audit Committee.

OBS & Eny has conducted the audit on IIF's financial statement for 4 (four) periods starting 2010, 2 (two) of which were under Osman Bing Satrio before they have a change of partnership and change of name in December 2012.

In 2013, Public Accounting Firm Osman, Bing, Satrio & Eny (a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) has provided not only Financial Statement audit services, but also IIF's Performance Evaluation review report.

## L. Sistem Manajemen Risiko

IIF mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengelola berbagai risiko yang timbul dari lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat. IIF juga mengadopsi suatu konsep manajemen risiko perusahaan dengan parameter risiko yang terintegrasi yang meliputi antara lain risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, serta risiko reputasi. Untuk itu, IIF telah membentuk Divisi Manajemen Risiko yang dipimpin oleh seorang Chief Risk Officer, yang secara garis besar terdiri dari empat tim, yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Pasar dan Portofolio, serta Risiko Sosial & Lingkungan.

Fungsi manajemen risiko IIF merupakan tugas yang harus tertanam dalam organisasi. Fungsi ini dalam organisasi dilaksanakan berdasarkan tiga lini konsep pertahanan. Dimulai dengan unit bisnis (tim Investasi atau tim Treasuri) sebagai unit pengambil risiko dalam lini pertahanan pertama, diikuti dengan tim Manajemen Risiko yang menyediakan lini pertahanan kedua untuk

## L. The Risk Management System

IIF takes proactive measures to manage various risks that arise from the rapidly changing business environment. IIF also adopts an enterprise risk management concept with integrated risk parameters involving among others credit risk, operational risk, market risk, as well as reputational risk. For this purpose, IIF has established a Risk Management Division that is led by the Chief Risk Officer, which generally consists of four teams, i.e. Credit Risk, Operational Risk, Market and Portfolio Risk, and Social & Environmental Risk.

IIF's risk management function is a task that shall be embedded in the organization. This function in the organization is implemented based on the three lines of defense concept. It starts with the business units (Investment team or Treasury team) as a risk-taking unit in the first line of defense, followed by the Risk Management team that provides a second

mengkaji secara independen risiko-risiko yang diambil atas masing-masing transaksi maupun dalam lingkup perusahaan. Lini pertahanan ketiga dilakukan oleh tim Audit yang berfungsi untuk mengkaji kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko.

Pada tahun 2013, seiring dengan pesatnya pertumbuhan pemberian asset IIF, Divisi Manajemen Risiko IIF terutama difokuskan pada kemampuan untuk memastikan kualitas pemberian masing-masing aset yang dapat diterima, serta dampaknya terhadap komposisi portofolio, risiko konsentrasi, kecukupan provisi, dan kecukupan modal untuk menutupi risiko kredit. Dalam mengelola risiko operasional pemberian aset, tim Manajemen Risiko, bersama-sama dengan tim *Loan Operations* (di bawah Divisi Keuangan) dan tim Investasi telah secara lengkap membentuk dan menerapkan prosedur operasional standar terkait dengan proses investasi/kredit. Selain itu, beberapa perbaikan juga telah dilakukan dalam rangka meningkatkan *platform* dan kerangka Manajemen Risiko.

Bagian Risiko Kredit IIF memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan risiko kredit dan untuk meyakinkan bahwa analisis yang tepat terhadap manajemen risiko kredit, struktur, dan keputusan telah diimplementasikan selama proses kredit dilaksanakan. Tim Risiko Kredit berfungsi secara independen dari tim Investasi sehingga memastikan IIF mendapatkan manfaat dari penilaian investasi kredit yang independen dan obyektif.

Setiap keputusan investasi dilakukan setelah melalui proses kredit yang ekstensif yang memerlukan penilaian yang ketat, evaluasi, dan persetujuan dari komite investasi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Total portofolio secara keseluruhan juga dipantau dari segi sektor, jenis proyek, jenis fasilitas, mata uang, dan tenor.

IIF melakukan penilaian sendiri atas risiko operasionalnya melalui beberapa faktor risiko, yaitu proses internal, sumber daya manusia,

line of defense to independently review risks taken in each individual transaction, as well as company wide. The third line of defense is undertaken by the Audit team that functions to review the adequacy and effectiveness of the risk management processes.

In 2013, in line with the rapid growth on IIF's financing assets, the Risk Management Division of IIF mainly focused on its ability to ensure acceptable quality of the individual financing assets, as well as the impact toward the portfolio composition, concentration risk, provision adequacy, and the capital adequacy to cover credit risk. In managing the operational risks of financing assets, the Risk Management team, together with Loan Operations team (under the Finance Division) and Investment team have fully established and implemented a standard operating procedure in relation to the investment/credit process. Aside from that, some improvements have also been made in order to enhance the Risk Management platform and framework.

IIF's Credit Risk has the primary responsibility to oversee implementation of a credit risk policy and for assuring that appropriate credit management analysis, structures, and decisions are implemented throughout IIF's credit process. The Credit Risk team is functioning independently from the Investment team so as to assure that IIF benefits from independent and objective credit investment assessment.

Any investment decision is made after going through an extensive credit process requiring rigorous assessment, evaluation, and approval from the investment committees of Board of Directors and Board of Commissioners. The overall total portfolio is also monitored in terms of sectors, project type, facility type, currency, and tenor.

IIF self-assesses its operational risk over several risk factors, i.e. internal process, human resources, information system and

sistem informasi dan infrastruktur pendukung, kecurangan internal dan eksternal. Selanjutnya, untuk memitigasi sebagian dari eksposur risiko operasional, IIF melakukan transfer atas sebagian besar risiko kepada perusahaan asuransi.

Sementara untuk risiko pasar, meskipun eksposur risiko pasar saat ini dapat dianggap minimal, pemantauan berkala dan pengendalian dilakukan terhadap eksposur atas risiko suku bunga, mata uang, dan kesenjangan likuiditas untuk meminimalisasi dampak yang merugikan dari perubahan dalam kondisi pasar, antara lain melalui pengembangan dan diskusi pada Komite Aset dan Liabilitas dari BoD.

Selanjutnya, mengingat tingginya standar perhatian pemegang saham IIF terhadap praktek-praktek Sosial dan Lingkungan (S&E), IIF menerapkan delapan prinsip S&E yang harus dipenuhi oleh peminjam, dan memastikan bahwa tidak ada dampak yang merugikan bagi reputasi IIF. Tim S&E di bawah Divisi Manajemen Risiko telah terlibat dalam proses penilaian sebelum proposal diajukan kepada komite investasi. Penilaian S&E dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara eksposur risiko S&E dari perusahaan pemilik proyek dibandingkan dengan prinsip-prinsip dan standar-standar S&E dari IIF, dan bagi perusahaan pemilik proyek untuk menyediakan dan mengadopsi setiap Rencana Tindakan Perbaikan yang diperlukan untuk memitigasi kesenjangan dalam jangka waktu yang dapat diterima.

## M. Kasus Hukum yang Material

IIF tidak memiliki kasus hukum yang material selama tahun 2013.

## N. Informasi Sanksi Administratif

IIF tidak mendapatkan sanksi administratif apapun dari Pemerintah atau otoritas lainnya di tahun 2013.

supporting infrastructure, internal and external fraud. Furthermore, to partially mitigate the operational risk exposure, IIF transfers most of the risk to an insurance company.

As for market risk, although the market risk exposure can currently be regarded as minimal, regular monitoring and control is conducted towards the exposures to interest rate, currency and liquidity gap risks to minimize any adverse impact from changes in market conditions, among others through the development & discussions on the Assets and Liabilities Committee of the BoD.

Furthermore, given the high standards of IIF's Shareholders with regards to Social and Environmental (S&E) practices, IIF applies eight S&E principles that its borrowers need to comply with and to ensure that there is no adverse reputational impact for IIF. The S&E team under the Risk Management Division has been involved in the assessment process before the proposal is submitted to the investment committees. The S&E assessment is conducted to identify any gaps between the project company's S&E risk exposure with IIF's S&E principles and standards, and for the project company to provide and adopt any necessary Corrective Action Plan to mitigate any gaps within an acceptable period of time.

## M. Material Legal Cases

IIF had no material legal cases in 2013.

## N. Information on Administrative Sanctions

IIF did not receive any administrative sanctions from the Government or other authorities in 2013.



## O. Informasi tentang Kode Etik dan Budaya Perusahaan

Nilai pokok dalam Kode Etik IIF diartikan sebagai kepatuhan terhadap hukum dan prinsip-prinsip tentang nilai-nilai kemanusiaan, seperti sikap saling menghormati, kejujuran dan integritas. Kode Etik IIF diartikan sebagai melakukan usaha secara legal dan beretika, perlindungan dan pengawalan terhadap aset dan reputasi IIF, sikap hormat terhadap individu dan masyarakat, dan perilaku beretika terhadap mitra usaha dan pihak ketiga.

Sesuai dengan nilai-nilai, visi, norma, bahasa dan sistem kerja, Kode Etik menjadi budaya yang mempengaruhi interaksi antarkaryawan, dengan klien, dan dengan para pemangku kepentingan. Budaya kepatuhan dan integritas mengalir dari atas, yang secara implisit mengatakan bahwa Manajemen harus menekankan pentingnya perilaku beretika dan kepatuhan serta mendukung semua itu melalui kepemimpinan dan pelatihan. Setelah disusunnya Kode Etik dan munculnya aspirasi IIF untuk dikenal sebagai sebuah organisasi yang beretika dan taat hukum,

## O. Information on Code of Ethics and Corporate Culture

The core values of IIF's Code of Ethics are defined as compliance with law and human values principles such as mutual respect, honesty and integrity. IIF's Code of Conduct is defined as doing business legally and ethically, protection and safeguard of IIF's assets and reputation, respect for individuals and communities, and ethical conduct with business partners and third parties.

In line with our values, vision, norms, working language and systems, the Code of Conduct becomes the culture which affects the way employees interact with one another, with clients, and with stakeholders. The culture of compliance and integrity flows from the top, which itself implies that the Management must emphasize the importance of ethical conduct and compliance and promote them through personal leadership and training. Following the Code of Conduct and IIF's aspiration to be recognized as an ethical and law-abiding

IIF wajib melakukan usahanya secara legal dan beretika di semua aspek operasinya.

Semua karyawan dan Direksi serta Dewan Komisaris, setelah bergabung dengan IIF, harus membaca Kode Etik IIF dan menandatangani pernyataan bahwa mereka telah membaca dan memahami isinya. Karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik atau yang terbukti bersalah telah melakukan tindakan kriminal akan menerima tindakan disiplin internal, sampai pada dan mencakup tindakan pemberhentian sebagai karyawan.

Selain kebijakan IIF dan Kode Etik, semua pihak yang berkepentingan di IIF harus mematuhi baik regulasi maupun semangat hukum di Indonesia atau hukum di negara lain tempat mereka beroperasi. Mereka harus menghindari pelanggaran hukum. Semua pihak yang berkepentingan dan yang bertanggung jawab atas pelanggaran apapun, khususnya penipuan, korupsi, ketidakjujuran atau kekerasan, akan menerima konsekuensi hukuman, termasuk pemecatan.

### 1. Melakukan Usaha dengan Taat Hukum dan Beretika

Kebijakan Etika Bisnis IIF memberikan panduan untuk melakukan kegiatan usaha sehari-hari. Pernyataan yang paling penting menuntut bahwa semua kegiatan usaha harus dipandu oleh nilai-nilai mendasar IIF, yakni integritas dan kejujuran yang tak tergoyahkan, yang mencakup Integritas, kewajaran, hormat dan memberi perhatian pada orang lain, dan pertanggungjawaban pribadi. Semua ini merupakan panduan untuk membuat keputusan beretika sehari-hari, dan untuk mematuhi etika personal, seperti penerimaan hadiah, pengungkapan kekayaan pribadi, sikap politik dan donasi, serta kepatuhan terhadap panduan Anti-korupsi dan Pencegahan Penipuan.

organization, IIF is bound to do business legally and ethically in all aspects of its operations.

All employees as well as members of BoD and BoC, upon joining IIF, need to read the IIF Code of Conduct and sign a declaration stating that they have read and understood its contents. Employees who breach IIF's Code of Conduct or are found guilty of a serious criminal offence will be subject to internal disciplinary action, up to and including termination of employment.

In addition to IIF policies and Code of Conduct, all IIF concerned parties should obey both the regulations and the spirit of Indonesian laws or that of any other country in which they operate. Violation of the law must be avoided. All the concerned parties responsible for any violation, especially involving fraud, corruption, dishonesty or violence will be subject to disciplinary consequences, including dismissal.

### 1. Doing Business Legally and Ethically

IIF Business Conduct Policies provide guidance for conducting day-to-day business. The most important statement demands that all business actions should be guided by IIF's fundamental values of uncompromising integrity and honesty, which include integrity, fairness, respect and concern for others, and personal accountability. These serve as guidelines to making ethical day-to-day decisions, as well as in complying with personal ethical conduct such as accepting gifts, disclosure of personal wealth, political affiliations and donations, and adherence to Anti-corruption and Fraud Prevention guidelines.

## 2. Kebijakan Informasi, Pengendalian Internal dan Pelaporan Keuangan

Kebijakan untuk Perlindungan dan Pengawalan aset dan reputasi IIF berlandaskan pada kebijakan Konflik Kepentingan, Kebijakan Sumber Daya Elektronik, Perlindungan Data dan Kebijakan Keamanan, Perdagangan Efek dan Informasi Perdagangan Orang Dalam, dan Pengendalian Internal, Pelaporan Keuangan, Retensi Dokumen dan Auditing.

- **Konflik Kepentingan**

Segenap karyawan IIF dan orang yang bertindak atas nama IIF harus bebas dari konflik kepentingan yang dapat berpengaruh buruk pada keputusan mereka, obyektivitas atau kesetiaan mereka pada Perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha dan pelaksanaan tugas dari IIF.

- **Kebijakan Sumber Daya Elektronik**

Merupakan kebijakan IIF bahwa semua sumber daya elektronik digunakan hanya dengan cara yang tidak melanggar hukum dalam Kebijakan Perilaku Usaha IIF. Semua karyawan IIF harus melindungi sumber daya elektronik IIF dari penggunaan tanpa izin dan dari ancaman keamanan.

- **Keamanan Informasi dan Kebijakan Kerahasiaan**

Segenap karyawan IIF dan orang yang bertindak atas nama IIF bertanggung jawab untuk melindungi informasi rahasia dari IIF terhadap pengungkapan tanpa izin, entah pengungkapan tersebut bersifat internal atau eksternal, sengaja atau kebetulan. IIF juga menghormati kerahasiaan dan sensitivitas informasi yang bukan milik IIF. Merupakan kebijakan IIF untuk hanya menggunakan sarana yang legal dan beretika untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi bisnis dan pasar dengan tujuan memahami secara lebih baik tentang pasar, pelanggan dan pesaing. IIF tidak mengumpulkan atau menggunakan informasi rahasia milik pihak lain tanpa pemberian ijin secara eksplisit oleh pihak tersebut.

- **Pengendalian Internal, Pelaporan Keuangan, Retensi Dokumen dan Kebijakan Audit**

Manajemen IIF bertanggung jawab untuk

## 2. Information, Internal Control and Financial Reporting Policies

Policy for Protection and Safeguard of IIF's assets and reputation is based on Conflict of Interest policy, Policy on Electronic Resources, Data Protection and Security Policy, Securities Trading and Insider Information, and Internal Controls, Financial Reporting, Document Retention and Auditing.

- **Conflicts of Interest**

All IIF employees and others acting on behalf of IIF must be free from conflicts of interest that could adversely influence their judgment, objectivity or loyalty to the Company in conducting IIF business activities and assignments.

- **Electronic Resource Policy**

It is IIF's policy that all electronic resources be used only in ways that do not violate the law of IIF's Business Conduct Policies. All IIF employees must protect IIF electronic resources from unauthorized use and security threats.

- **Information Security and Confidentiality Policy**

All IIF employees and others acting on behalf of IIF are responsible for protecting IIF's confidential information from unauthorized disclosure, whether internal or external, deliberate or accidental. IIF also respects the confidentiality and sensitivity of information which does not belong to IIF. It is IIF's policy to use only legal and ethical means to collect and use business and market information in order to better understand markets, customers and competitors. IIF will not collect or use another party's confidential information without that party's explicit permission.

- **Internal Controls, Financial Reporting, Document Retention and Auditing Policy**

The management of IIF is responsible for

mempersiapkan laporan keuangan tahunan dan triwulan yang lengkap dan akurat sesuai dengan prinsip-prinsip akunting Indonesia yang diterima luas dan IFRS dan demi mempertahankan prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dan pengendalian internal yang dirancang untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap standar, hukum dan regulasi terkait akuntansi, hukum dan regulasi.

IIF mematuhi kebijakan dari semua pihak yang bertanggung jawab untuk ketepatan, kelengkapan dan ketepatan waktu terkait informasi keuangan yang aktual dan bersifat prediksi dan atas kepatuhan terhadap pengendalian internal atas pelaporan keuangan, pengendalian dan prosedur pengungkapan, retensi dokumen dan kebijakan akuntansi. IIF memastikan adanya kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan ini melalui kegiatan auditor internal dan auditor independen, dan melalui mekanisme pemantauan internal.

Keamanan informasi juga harus mencakup perlindungan terhadap informasi yang bersifat rahasia dari berbagai divisi. Kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara divisi yang berbeda yang mungkin sedang memberikan layanan *advisory* dan yang melakukan transaksi pendanaan.

### 3. Menghormati Individu dan Masyarakat

Sikap hormat kita kepada individu dan masyarakat merupakan bagian dari prinsip-prinsip yang lebih besar dan terkandung dalam Delapan Prinsip, yang dapat ditemukan pada halaman 63 dan yang menjadi satu faktor yang membedakan IIF dari lembaga keuangan lainnya di Indonesia, terkait dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut secara ketat.

Terkait dengan lingkungan kerja, IIF bertujuan menarik dan mempertahankan karyawan terbaik di industri, dan karena itu Perusahaan

the preparation of complete and accurate annual and quarterly financial statements in accordance with generally accepted accounting principles of Indonesia and IFRS and for maintaining appropriate accounting and financial reporting principles and policies and internal controls designed to ensure compliance with accounting standards, laws and regulations.

IIF follows the policy of all concerned parties having a responsibility for the accuracy, thoroughness and timeliness of actual and forecast financial information and for compliance with internal controls over financial reporting, disclosure controls and procedures, document retention and auditing policies. IIF ensures compliance with these policies through our internal and independent auditors, and by internal monitoring mechanism.

Information security shall also include maintaining the proprietary information received by the various divisions. There is also the possibility of a conflict of interest between the different divisions who might be advising and funding the transaction.

### 3. Respect for Individuals And Communities

Our respect to individuals and communities is part of the larger principles enshrined in our Eight Principles, which can be found in page 63 and is a factor that differentiates IIF from other financial institutions in Indonesia, in terms of our rigor in applying those principles.

In terms of our workplace, IIF aims to attract and retain the best talent in the industry, hence its commitment to create a working

berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan memberikan kepuasan kepada karyawan dan semua orang yang mewakili IIF. Ini semua diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan berikut:

- **Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan**  
IIF berkomitment memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua karyawan, dan semua karyawan bertanggung jawab mendapatkan pengetahuan mengenai hukum dan regulasi yang berlaku terkait Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan dan menaatinya. Manajemen IIF bertanggung jawab memberikan pelatihan bagi semua karyawan mengenai hukum dan kebijakan yang relevan.
- **Kebijakan mengenai Pelecehan**  
IIF berkomitmen memberikan lingkungan kerja dimana martabat setiap orang dihormati. Lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk perilaku yang tidak pantas dan pelecehan berdasarkan usia, cacat tubuh, status pernikahan, ras atau warna kulit, asal-usul negara, agama, seks, orientasi seksual atau identitas jenender. Setiap karyawan harus memahami bahwa tindakan pelecehan dan perilaku tak pantas tidak akan ditoleransi di IIF.
- **Kebijakan Privasi**  
IIF memberikan nilai yang signifikan pada upaya memperoleh dan mempertahankan kepercayaan dari para pemangku kepentingan, termasuk karyawan, klien, mitra usaha dan orang lain yang membagikan informasi pribadi mereka dengan IIF. Oleh karena itu, IIF mematuhi kebijakan tentang kepatuhan sepenuh-penuhnya pada semua hukum terkait privasi dan perlindungan data.

#### 4. Perilaku dengan Mitra Usaha dan Pihak Ketiga

IIF mematuhi semua hukum terkait anti-suap yang berlaku dan secara akurat membukukan semua transaksi dalam pembukunya. Penyuapan menunjuk pada tindakan menawarkan, memberi ijin atau memberikan sesuatu yang bernilai kepada Pejabat Pemerintah secara langsung

environment that is safe, healthy and rewarding for the employees and all those who represent IIF. These are manifested in the following policies:

- **Environmental, Health and Safety**  
IIF is committed to providing a safe and healthy workplace for all employees, and all employees are responsible to acquire knowledge of and comply with applicable laws and regulations related to EHS. IIF Management is responsible for training all employees on the relevant laws and policies.
- **Harassment Policy**  
IIF is committed to providing a workplace in which the dignity of every individual is respected. It is a working environment that is free of inappropriate behavior of all kinds and harassment based on age, disability, marital status, race or color, national origin, religion, sex, sexual orientation or gender identity. Each employee should understand that incidents of harassment and inappropriate behavior will not be tolerated at IIF.
- **Privacy Policy**  
IIF places significant value on earning and retaining the trust of all stakeholders of the institution, including employees, clients, business partners and others who share their personal information with IIF. Therefore, IIF follows the policy of complete compliance with all applicable privacy and data protection laws.

#### 4. Conduct With Business Partners and Third Parties

IIF complies with all applicable anti-bribery laws and accurately records all transactions in its books and records. Bribery refers to offering, authorizing or giving of anything of value to Government Officers directly or indirectly with the intent to obtain or retain business or

ataupun tidak langsung dengan maksud mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau mendapatkan keuntungan yang tidak pantas, yakni persetujuan kenaikan harga, pemberian kontrak, pemberian ijin operasi, persetujuan atas penggunaan/registrasi produk, vonis pengadilan yang menguntungkan, atau penyelesaian sengketa perpajakan.

IIF mematuhi kebijakan untuk menjalankan kontraknya dengan pemerintah dan melakukan sub-kontrak bisnis dengan kepatuhan yang ketat pada hukum dan regulasi nasional, negara, provinsi dan lokal yang berlaku dan pada semua persyaratan kontrak.

gain an improper advantage, i.e. price increase approval, contract award, grant of operating permits, product use/registration approval, favorable court decision, or tax dispute settlement.

IIF follows a policy to conduct its government contract and subcontract business in strict compliance with all applicable national, state, provincial and local laws and regulations and all contract requirements.

## P. Akses terhadap Informasi bagi Pemangku Kepentingan

IIF membagikan informasi melalui saluran sebagai berikut:

### 1. Menjadi Sponsor

IIF menjadi sponsor dalam kegiatan:

1. Penerbitan buku untuk Sulawesi Tengah "Merajut Impian Baru, Sejarah Dengan Provinsi Maju di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2020", 1 February 2013;
2. 31<sup>st</sup> Conference of ASEAN Federation of Engineering Organizations 2013 (31<sup>st</sup> of CAFEO), 11-14 November 2013;
3. IPFA Asia: Jakarta: Recent Developments in the Indonesian PPP Market & What the Government Still Needs to Do. 26 November 2013.

### 2. Profil Perusahaan dan Laporan Tahunan

IIF menyiapkan Laporan Tahunan untuk memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan mengenai kinerja keuangan dan non-keuangan, serta Rencana Bisnis dan Inisiatif Strategis.

## P. Access to Information for Stakeholders

IIF shares its information through the following channels:

### 1. Sponsorship

IIF provided several Sponsorships to:

1. Publishing book for Central Sulawesi "Merajut Impian Baru, Sejarah Dengan Provinsi Maju di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2020", 1 February 2013;
2. 31<sup>st</sup> Conference of ASEAN Federation of Engineering Organizations 2013 (31<sup>st</sup> of CAFEO), 11-14 November 2013;
3. IPFA Asia: Jakarta: Recent Developments in the Indonesian PPP Market & What the Government Still Needs to Do. 26 November 2013.

### 2. Company Profile and Annual Report

IIF prepares an Annual Report to provide information to Stakeholders on the financial and non-financial achievements, as well as the Business Plan and Strategic Initiatives.

IIF juga mempersiapkan Profil Perusahaan dan brosur untuk memberikan informasi umum, antara lain tentang produk-produk IIF, lini usaha, dan Prinsip-prinsip Sosial dan Lingkungan.

### 3. Website

Alamat situs IIF: [www.iif.co.id](http://www.iif.co.id)

Kami melakukan pemutakhiran informasi di situs internet secara teratur untuk memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan mengenai peristiwa, proyek yang sedang berlangsung, dan sebagainya.

### 4. Pameran dan Peristiwa Lain

1. Year End Investment Gathering: Soehanna Hall bulan Desember 2013;
2. Buka Puasa Bersama IIF, IIGF, SMF, Geodipa, LPEI dan SMF Agustus 2013.

IIF also prepares a Company Profile and brochures to provide general information on, among others, IIF's products, business lines, and Social and Environmental Principles.

### 3. Website

IIF's website address: [www.iif.co.id](http://www.iif.co.id)

The Company updates the information on the website regularly to provide information to stakeholders on events, ongoing projects, etc.

### 4. Exhibitions and Other Events

1. Year End Investment Gathering: Soehanna Hall in December 2013;
2. Breakfasting together with IIF, IIGF, SMF, Geodipa, LPEI and SMF in August 2013.





# Memperkuat Sumber Daya Manusia | Strengthening Human Resources



Keberhasilan IIF bergantung pada strategi sumber daya manusia, sumber daya manusia terbaik, dengan semua pengalaman yang relevan.

IIF's success relies on its sourcing strategy, bringing in the best human resources with relevant experience and expertise.

Karyawan merupakan aset IIF yang paling berharga. Kreativitas, visi dan komitmen mereka terhadap nilai-nilai organisasi merupakan hal-hal yang mendorong kemajuan bisnis IIF, dan mereka memainkan peran utama bagi Perusahaan untuk senantiasa menjaga dan menjalankan bisnis secara efektif. Itulah sebabnya IIF berkomitmen untuk berinvestasi dalam mengembangkan dan mempertahankan talenta terbaik, dan memupuknya dalam suatu lingkungan yang mendukung pertumbuhannya. Memastikan bahwa para karyawan memperoleh kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri adalah prioritas bagi IIF, komitmen ini berarti baik untuk membantu mereka meraih tujuan pribadi dan profesional mereka, maupun pengembangan ketrampilan dan kompetensi yang dibutuhkan Perusahaan untuk terus bertumbuh.

Keberhasilan IIF bergantung pada strategi sumber daya manusia, sumber daya manusia terbaik, dengan semua pengalaman yang

Human resources are IIF's greatest assets. Their creativity, vision and commitment to the values of the Company's organization are what drive the IIF's business—they are the key to keep its business up and running most effectively. IIF is committed to developing and investing in them, not to mention fostering an environment in which they can thrive to the best of their abilities. Ensuring that IIF's human resources have the opportunity for continuous learning is a priority. This commitment means supporting them in reaching their own personal and professional goals, and developing skills and competencies to sustain the company's growth.

IIF's success relies on its sourcing strategy, bringing in the best human resources, all with relevant experience. To ensure the availability

relevan. Untuk memastikan ketersediaan atas kebutuhan keahlian yang beragam, IIF melakukannya dengan beberapa pendekatan dalam strategi sumber daya manusia meliputi penunjukan langsung, perekrutan karyawan, penugasan, pertukaran program, *deputations* dan kontrak manajemen dengan konsultan.

### A. Training yang Berkelanjutan

IIF bertujuan untuk menjadi repositori pengetahuan dan keterampilan dalam pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia, Perusahaan telah menetapkan dan akan terus untuk mengembangkan program pelatihan atau pendidikan untuk karyawan atas biaya Perusahaan. Pelatihan IIF tidak hanya mencakup pelatihan *hard skill*, tetapi juga mencakup *soft skill* atau pelatihan kompetensi, untuk membangun dan selanjutnya mengembangkan nilai-nilai inti karyawannya. Pada 2013, dengan biaya sebesar Rp 785.000.000, total 29 pelatihan yang diselenggarakan lebih dari dua kali jumlah kegiatan pelatihan yang diadakan tahun sebelumnya, yaitu 8 pelatihan dan 1 Program team building. Untuk Rencana pelatihan pengembangan di tahun 2014, IIF telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,2 miliar.

#### Peningkatan Kompetensi dan Keahlian Karyawan

- 8 *training* dan 1 program *team building* di tahun 2012;
- 29 *training* diselenggarakan dengan biaya Rp 785 juta di tahun 2013;
- Alokasikan dana sebesar Rp 2.2 miliar untuk *training* selama 2014.

Manajer dan *supervisor* memainkan peran penting dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan untuk unit mereka masing-masing. Tanggung jawab ini juga mempromosikan perilaku proaktif dalam memilih para calon pemimpin,

of the required mix of skills, IIF follows a multi-pronged approach in staffing strategy covering direct appointments, recruitment of employee, assignments, exchange programs, deputations and management contract with consultants.

### A. Continuous Training

As IIF aims to be the repository of knowledge and skills in infrastructure project financing in Indonesia, the Company has established and will continue to develop training or education programs for employees at the Company's cost. IIF's training not only covers hard skill training, but also includes soft skill or competency training, to establish and further develop its employee's core values. In 2013, at a cost of Rp 785 million, a total of 29 trainings were held—more than twice the number of training activities held the previous year, i.e. 8 training and 1 team building program. As for the 2014 training and development plan, IIF has allocated a budget of Rp 2.2 billion.

#### Enhancing Employees' Competency and Skill

- 8 trainings and 1 team building program in 2012;
- 29 trainings held at the cost of Rp 785 million in 2013;
- Allocated Rp 2.2 billion for trainings in 2014.

Line managers and supervisors play a critical role in identifying training and development needs for their respective units. This responsibility also promotes proactive behavior in selecting potential leaders, motivating team members and participating in recruitment.

memotivasi anggota tim dan berpartisipasi dalam perekruitmen. Manajer berkoordinasi dengan Divisi Sumber Daya Manusia dan Direksi membahas pelatihan dan rencana pengembangan, yang akhirnya akan menghasilkan masukan untuk program sukses dan jalur pengembangan karir.

Managers coordinate with the Human Resource Division and the BoD discussing training and development plans, which would eventually generate input for the succession program and career development paths.

## B. Komitmen untuk Kesetaraan

Pendekatan IIF secara keseluruhan untuk pengelolaan sumber daya manusia dan pengembangan didukung dengan komitmen yang kuat untuk kesetaraan, keragaman dan inklusif di lingkungan kerja. Perusahaan tidak mentolerir diskriminasi dan secara teratur mengkaji kebijakan dan hasil regulasi IIF untuk perekruitmen, pengembangan karir dan promosi untuk memastikan bahwa perusahaan menyediakan kesempatan yang sama untuk semua.

## B. Commitment to Equality

IIF's overall approach to human resource management and development is underpinned by a strong commitment to equality, diversity and inclusiveness in the work environment. The company does not tolerate discrimination and regularly reviews the policies and outcomes of IIF's regulation, recruitment, career development and promotion to ensure that the company is providing equal opportunities to all.

Tabel/Table 11: Tingkat Pendidikan Karyawan | Employee Education Level

Per 31 Desember 2012/As of 31 December 2012\*)

<b>Jenis Kelamin/ Gender</b>	<b>Pendidikan/Education</b>			<b>Jumlah/Total</b>
	Diploma	Under Graduate Degree	Master's Degree	
Wanita/Female	2	4	3	9
Pria/Male	2	8	8	18
<b>Jumlah/Total</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>27</b>

Per 31 Desember 2013/As of 31 December 2013\*)

<b>Jenis Kelamin/ Gender</b>	<b>Pendidikan/Education</b>			<b>Jumlah/Total</b>
	Diploma	Under graduate Degree	Master's Degree	
Wanita/Female	2	5	8	15
Pria/Male	2	9	8	19
<b>Jumlah/Total</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>34</b>

Sebagai salah satu bentuk implementasi dari Komitmen tersebut terhadap kesetaraan dan keragaman, IIF telah mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa IIF menghindari bias gender dalam praktik remunerasi yang termasuk di dalamnya adalah

As one form of implementation of the aforementioned commitment to equality and diversity, IIF has taken the necessary steps to ensure that it avoids gender bias in its remuneration practices, which include the standard reward strategy that applies

strategi pengupahan standar yang berlaku untuk semua karyawan, terlepas dari gender mereka. Saat ini, jumlah karyawan perempuan adalah 38% dari total seluruh jumlah karyawan IIF, termasuk manajer dan senior manajer, yang merupakan peningkatan dalam persentase dibandingkan dengan persentase tahun lalu, di mana jumlah karyawan perempuan adalah 29%.

IIF menyadari bahwa masih ada ruang untuk perbaikan pada indikator ini, dan perusahaan tetap berkomitmen untuk meningkatkan keterlibatan dan keterwakilan perempuan di semua level pekerjaan di perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2013 IIF mempekerjakan total 34 orang dibandingkan dengan total 27 orang pada tanggal 31 Desember 2012.

to all employees, regardless of their gender. Currently, women account for 38% of IIF's total number of employees, including managers and senior managers, which is an increase in percentage as compared to last year's percentage, where women accounted for 29%.

IIF is aware that there is still space for improvement on this indicator, and the company remains committed to further improving the engagement and representation of women at all employment grades of the company.

As of 31 December 2013, IIF employed a total of 34 people compared with a total 27 people as of 31 December 2012.

Tabel/Table 12: Kategori Karyawan | Employee Category

Per 31 Desember 2012/As of 31 December 2012\*)

<i>Keterangan/Description</i>	<i>Jumlah Karyawan/No. of Employee</i>		<i>Jumlah/Total</i>
	<i>Wanita/Female</i>	<i>Pria/Male</i>	
Karyawan Tetap/Permanent Employee	6	15	21
Karyawan Kontrak/Contract Employee	3	3	6
<b>Jumlah/Total</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>27</b>
<b>Percentase/Percentage</b>	<b>29%</b>	<b>71%</b>	<b>100%</b>

Per 31 Desember 2013/As of 31 December 2013\*)

<i>Keterangan/Description</i>	<i>Jumlah Karyawan/No. of Employee</i>		<i>Jumlah/Total</i>
	<i>Wanita/Female</i>	<i>Pria/Male</i>	
Karyawan Tetap/Permanent Employee	12	18	30
Karyawan Kontrak/Contract Employee	3	1	4
<b>Jumlah/Total</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>34</b>
<b>Percentase/Percentage</b>	<b>38%</b>	<b>62%</b>	<b>100%</b>

\*) Dewan Direksi tidak termasuk karyawan/Board of Director's is not considered as employees



Ritual lompat batu melibatkan seluruh komunitas. Karena pemangku kepentingan sangat penting bagi IIF, Perusahaan berkomitmen memberikan nilai tambah melalui operasi usahanya.

The stone jumping ritual involves the entire community. As stakeholders are important to IIF, the Company is committed to providing added value to them through its business operations



Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, IIF ingin memastikan bahwa semua pemilik proyek bertindak dengan bertanggung jawab secara sosial maupun lingkungan.

*As a socially and environmentally responsible company, IIF would like to ensure that all project owners act in a socially and environmentally responsible manner*

## Menjunjung Prinsip Berkelanjutan | Upholding Sustainability Principles

### A. Isu-isu Berkelanjutan secara Global maupun Nasional

Masyarakat telah menyadari secara istilah praktis, bahwa mereka semua tinggal di perahu yang sama dan kerusakan lingkungan yang terjadi bahkan di daerah terpencil dibelahan dunia ini saja, dapat memberikan dampak secara global. Dari kesadaran ini, timbul keinginan untuk dapat melestarikan hutan hujan, mempromosikan keanekaragaman hayati, dan mengatasi masalah peningkatan emisi Gas Rumah Kaca - GRK (Greenhouse Gas - GHG). Seluruh dunia telah mulai timbul kesadaran akan keterkaitan antara kerusakan lingkungan dan pemanasan global.

### A. Global and National Sustainability Issues

People have come to realize that in practical terms they all live in the same boat and that any environmental damage occurring in even a remote area in the world could have a global impact. Out of this awareness came the desire to preserve rain forests, promote biodiversity, and address the issue of increasing the Greenhouse Gas (GHG) emission. The whole world has started to gain awareness of the link between the destruction of the environment and global warming.

Demikian pula, banyak perusahaan telah menjadi semakin sadar bahwa berkelanjutan perusahaan mereka sangat terkait erat dengan praktik-praktek sosial dan tenaga kerja mereka. Setiap liputan media pada penggunaan pekerja anak oleh suatu perusahaan akan memiliki dampak merusak dalam skala global. Masyarakat sudah memahami bahwa pada dasarnya mereka tinggal di sebuah desa yang maju, di mana informasi dapat berjalan ke sisi lain dunia, dalam hitungan detik saja.

Beroperasi di Indonesia, IIF sangat menyadari bahwa negara ini adalah rumah bagi hutan hujan tropis dengan urutan ketiga terbesar di dunia dan menyumbang 10% dari tutupan hutan global. Sementara hutan tersebut memainkan peranan yang sangat penting dalam mempertahankan keseluruhan *biosfer* planet kita, Kementerian Kehutanan Indonesia memperkirakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini, negara telah kehilangan sebesar 1,6-2,8 juta hektar lahan hutan setiap tahunnya. Untuk alasan inilah isu-isu lingkungan telah menjadi salah satu masalah utama negara ini. Sayangnya, meskipun fakta Indonesia telah dimasukkan dalam kelompok ekonomi utama (G20), negara ini masih memiliki kantong-kantong masyarakat yang kurang beruntung dan daerah yang masih tertinggal.

Similarly, companies have become increasingly aware that their sustainability is closely linked with their social and labor practices. Any media coverage on the use of child labor by a company will have damaging repercussions on a global scale. People have come to understand that they essentially live in a global village in which information can travel to the other side of the world in the span of a second.

Operating in Indonesia, IIF is well aware that the country is home to the third highest number of tropical rainforests and accounts for 10% of global forest cover. While the country's forests play a significant role in sustaining the entirety of our planet's biosphere, the Indonesian Ministry of Forestry estimates that in recent years, the country has lost as much as 1.6-2.8 million hectares annually. For this reason, environmental issues have become one of the country's major concerns. Sadly, despite the fact Indonesia has been included in the group of major economies (the G20), the country still has pockets of disadvantaged communities and less developed areas.

## B. Pendekatan IIF yang Berkelanjutan

Bertekad untuk memberikan dampak yang signifikan dan positif terhadap lingkungan dan masyarakat yang kurang beruntung, IIF telah mengembangkan delapan prinsip-prinsip berkelanjutan. Secara internal, Perusahaan memastikan bahwa semua karyawan memahami dan menjalankan secara konsisten semua prinsip-prinsip ini. Secara eksternal, IIF telah mensosialisasikan prinsip-prinsip ini untuk semua klien dan klien potensial yang akan menerima pembiayaan dari IIF dan memastikan bahwa mereka setuju untuk mematuhi prinsip-prinsip

## B. IIF Approach to Sustainability

Determined to have a significant and positive impact on the country's environment and less advantaged people, IIF has developed eight sustainability principles. Internally, the Company ensures that all employees understand and consistently live up to these principles. Externally, IIF has socialized the principles to all prospective recipients of its financing and ensures that they agree to comply with those principles in carrying out their infrastructure projects.

tersebut dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur mereka.

#### Delapan Prinsip yang Berkelanjutan

##### Prinsip 1:

###### Sistem Manajemen Sosial dan Lingkungan

- Penyaringan dan kategorisasi proyek;
- Penilaian sosial dan lingkungan (S&E)
- Pengelolaan S&E;
- Kapasitas organisasi;
- Pelatihan;
- Keterlibatan masyarakat dan konsultasi; dan
- Pemantauan, pelaporan, dan perbaikan yang menerus.

*Berlaku untuk semua proyek*

##### Prinsip 2:

###### Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja

- Membangun, menjaga, dan meningkatkan managemen hubungan buruh;
- Mengatasi buruh anak dan pekerja paksa;
- Meningkatkan kondisi kerja yang aman dan sehat.

*Berlaku untuk semua proyek IIF*

##### Prinsip 3:

###### Pencegahan Polusi, Pengurangan, dan Perubahan Iklim

- Mencegah polusi dan mengelola dampak yang timbul dari kegiatan proyek;
- Memastikan sesuai dengan praktik yang terbaik dan standar global;
- Memastikan bahwa masalah perubahan iklim yang terkait dengan kegiatan proyek diperhitungkan, dikurangi, dan dipantau selama kurun waktu investasi IIF.

*Berlaku untuk semua proyek IIF*

##### Prinsip 4:

###### Kesehatan Masyarakat, Keselamatan dan Keamanan/Keselamatan Bendungan

- Berusaha untuk menghindari atau meminimalkan risiko dan dampak terhadap kesehatan masyarakat, keselamatan,

#### The Eight Sustainability Principles

##### Principle 1:

###### Social and Environmental Assessment and Management System (SEMS)

Incorporates the following elements:

- Screening and categorization of projects;
- Social and Environmental (S&E) assessment;
- S&E management;
- Organizational capacity;
- Training;
- Community engagement and consultation;
- Monitoring, reporting and continuous improvement.

*Applicable to all IIF projects*

##### Principle 2:

###### Labor and Working Conditions

- Establishes, maintains and improves worker-management relationship;
- Addresses child labor and forced labor;
- Promotes safe and healthy working conditions.

*Applicable to all IIF projects*

##### Principle 3:

###### Pollution Prevention, Abatement, & Climate Change

- Addresses pollution prevention and management of impacts arising from project activities;
- Ensures conformance with global good practice and standards;
- Ensures that climate change issues associated with project activities are assessed, mitigated, and monitored over the life of IIF's investments.

*Applicable to all IIF projects*

##### Principle 4:

###### Community Health, Safety, & Security/Dam Safety

- Seeks to avoid or minimize the risks and impacts to community health, safety and security that may arise from project

- dan keamanan yang mungkin timbul dari kegiatan proyek;
- Termasuk persyaratan khusus yang berkaitan dengan keamanan bendungan yang berhubungan dengan proyek.

Berlaku untuk semua proyek IIF

#### Prinsip 5:

##### Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela

- Mengacu kepada pemindahan secara fisik (relokasi atau kehilangan tempat tinggal) dan pemindahan ekonomi (kehilangan aset atau akses ke aset yang menyebabkan hilangnya sumber penghasilan atau mata pencaharian) sebagai hasil dari proyek yang terkait dengan pembebasan lahan;
- Pemindahan secara fisik atau pemukiman kembali tidak berlaku bila dihasilkan dari transaksi tanah secara sukarela;
- Dampak harus dihindari, diminimalkan, dikurangi atau dikompensasi, melalui proses Penilaian Sosial dan Lingkungan dalam Prinsip 1.

*Penerapan Prinsip ini akan ditentukan selama penyaringan dan penilaian proyek*

#### Prinsip 6:

##### Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

- Termasuk perlindungan, konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati, dan mempromosikan penggunaan sumber daya alam yang terbarukan .

*Penerapan Prinsip ini akan ditentukan selama penyaringan dan penilaian proyek*

#### Prinsip 7:

##### Masyarakat Adat (*Indigenous People*)

- Termasuk identifikasi semua dampak (positif dan negatif) terhadap Masyarakat Adat (IP), penilaian sosial, konsultasi dan keterbukaan terhadap Rencana Pembangunan Masyarakat Adat;
- Berlaku untuk proyek-proyek yang berdampak terhadap individu-individu atau masyarakat yang memenuhi definisi Masyarakat Adat,

activities;

- Includes special requirements related to the safety of dams associated with projects.

*Applicable to all IIF projects*

#### Principle 5:

##### Land Acquisition and Involuntary Resettlement

- Refers to both physical displacement (relocation or loss of shelter) and economic displacement (loss of assets or access to assets that leads to loss of income sources or means of livelihood) as a result of project-related land acquisition;
- Does not apply to physical displacement or resettlement resulting from voluntary land transactions;
- Impacts are to be avoided, minimized, mitigated or compensated for, through the process of Social and Environmental Assessment under Principle 1.

*Applicability of this Principle will be determined during project screening and appraisal*

#### Principle 6:

##### Biodiversity Conservation and Sustainable Natural Resources Management

- Includes protection, conservation and management of biodiversity, and promotes the use of renewable natural resources.

*Applicability of this Principle will be determined during project screening and appraisal*

#### Principle 7:

##### Indigenous People (IP)

- Includes identification of all impacts (positive and negative) on IP; social assessment, informed consultation and disclosure to IP's Development Plan;
- Applies to projects that impact individuals or communities that meet the definition of Indigenous People, the determination

penentuan definisi mungkin memerlukan konsultasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk investor strategis.

Istilah Masyarakat Adat mengacu pada suatu kelompok yang berbeda, rentan, dan memiliki tingkat keragaman karakteristik sosial dan budaya sebagai berikut:

1. Identifikasi sendiri dan identifikasi oleh orang lain;
2. Keterikatan kolektif dengan lahan dan sumber daya alam;
3. Adat budaya, ekonomi, sosial atau lembaga-lembaga politik yang terpisah dari masyarakat dan budaya yang dominan;
4. Berbahasa adat.

*Penerapan Prinsip ini akan ditentukan selama penyaringan dan penilaian proyek*

#### Prinsip 8:

##### Kekayaan Budaya dan Warisan

- Mengakui pentingnya kekayaan budaya dan warisan bagi generasi sekarang dan masa depan, sesuai dengan Konvensi Mengenai Perlindungan Budaya Dunia dan Warisan Alam;
- Berusaha untuk membimbing para sponsor proyek dalam mengidentifikasi dan melindungi warisan budaya dalam desain proyek dan eksekusi proyek.

*Penerapan Prinsip ini akan ditentukan selama penyaringan dan penilaian proyek*

of which may require consultation with stakeholders, including strategic investors.

The term Indigenous People refers to a distinct, vulnerable, social and cultural group possessing the following characteristics in varying degrees:

1. Self-identification and identification by others;
2. Collective attachment to land and natural resources;
3. Customary cultural, economic, social or political institutions that are separate from those of the dominant society and culture;
4. Indigenous language.

*Applicability of this Principle will be determined during project screening and appraisal*

#### Principle 8:

##### Cultural Property and Heritage

- Recognizes the importance of cultural property and heritage for current and future generations, consistent with the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage;
- Seeks to guide IIF project sponsors in identifying and protecting cultural heritage in the course of project design and execution.

*Applicability of this Principle will be determined during project screening and appraisal*

## C. Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan

Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial, IIF telah memastikan bahwa semua karyawan diperlakukan dengan adil tanpa bentuk diskriminasi berdasarkan ras maupun jenis kelamin. Perusahaan memberikan manfaat kepada karyawan sebagai berikut:

- Asuransi jiwa;
- Perawatan kesehatan;
- Cuti orang tua;
- Provisi pensiun.

## C. Enhancing Employees Welfare

As a socially responsible company, IIF has ensured that all of its employees are fairly treated without any form of discrimination based on race or gender. The Company provides its employees with the following benefits:

- Life insurance;
- Health care;
- Parental leave;
- Retirement provision.

Untuk meningkatkan pengembangan karir karyawan, IIF telah memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian para karyawannya. Pelatihan diberikan berdasarkan penilaian kinerja karyawan dan kajian pengembangan karir.

To enhance employees' career development, IIF has provided them with training to upgrade their skills and expertise. Training is provided based on their performance appraisal and career development review.

#### D. IIF Peduli dan Berbagi

IIF telah memulai kegiatan tanggung jawab sosial di tingkat masyarakat setempat, yaitu "IIF Peduli dan Berbagi". Selama bulan puasa tahun 2013, karyawan IIF telah mengunjungi RUMAH JOMPO di kawasan Menteng Pulo, Jakarta. Dalam kegiatan itu juga Karyawan IIF berbuka puasa bersama dengan para orang tua dan memberikan sumbangan berupa makanan dan uang. Di masa depan, IIF berencana untuk mengadakan program CSR yang lebih formal dengan memberikan kontribusi kepada masyarakat setempat dan perbaikan lingkungan seperti pendidikan dan penanaman pohon.

#### D. IIF Care and Share

IIF has started its social responsibility activities at the local community level, i.e. "IIF Care and Share". During the fasting month of 2013, IIF employees visited Homes for Old People called RUMAH JOMPO in the area of Menteng Pulo, Jakarta. The employees also celebrated breaking their fast together with the elders and provided them with food and money. In future, IIF plans to hold more formal CSR programs by contributing to the local community and the improvement of the environment through means such as education and tree planting.

#### E. Memastikan Kepatuhan Pemilik Proyek

Sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur, IIF menyalurkan pinjaman kepada pemilik proyek infrastruktur di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, IIF ingin memastikan bahwa semua pemilik proyek yang telah menerima pembiayaan dari IIF bertindak dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Sampai dengan akhir tahun, IIF belum menerima satu laporan pun yang berkaitan dengan praktik sosial atau lingkungan yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh Perusahaan pemilik proyek.

#### E. Ensuring Project Owner Compliance

As an infrastructure financing company, IIF disburses loans to infrastructure project owners in areas throughout Indonesia. As a socially and environmentally responsible company, IIF would like to ensure that all project owners who have received financing from the Company act in a socially and environmentally responsible manner.

As of the end of the year, IIF had not received a single report on any socially or environmentally irresponsible practices perpetrated by the Company's project owners.



Laporan Keuangan |  
Financial Report



Halaman ini sengaja dikosongkan  
*This page is intentionally left blank*

**P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE**

**LAPORAN KEUANGAN/  
FINANCIAL STATEMENTS**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013/  
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2013**

**DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/  
AND INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

	<u>Halaman/ Pages</u>	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	1	INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
LAPORAN KEUANGAN – Pada tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut		FINANCIAL STATEMENTS – As of December 31, 2013 and for the year then ended
Laporan Posisi Keuangan	3	Statement of Financial Position
Laporan Laba Rugi Komprehensif	4	Statement of Comprehensive Income
Laporan Perubahan Ekuitas	5	Statement of Changes in Equity
Laporan Arus Kas	6	Statement of Cash Flows
Catatan Atas Laporan Keuangan	7	Notes to Financial Statements

SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2013  
**P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE/**  
**DIRECTORS' STATEMENT LETTER**  
**RELATING TO**  
**THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED**  
**DECEMBER 31, 2013**  
**P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE**

---

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/*We, the undersigned:*

- |   |   |
|---|---|
| 1. Nama/ <i>Name</i><br>Alamat kantor/ <i>Office address</i>                                  | : Arisudono Soerono<br>Energy Building Lantai 15 SCBD Lot 11A.<br>Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas<br>lain/ <i>Domicile as stated in ID Card</i> | : Jl. Bunga Kamboja No. 1, Cipete Selatan, Cilandak,<br>Jakarta Selatan                                       |
| Nomor Telepon/ <i>Phone Number</i>  | : +62 21 29915060   |
| Jabatan/ <i>Position</i>  | : Acting President Director/ <i>Chief Financial Officer</i>   |

menyatakan bahwa/*state that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements;*
2. *The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information contained in the financial statements is complete and correct;*  
b. *The financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;*
4. *We are responsible for the internal control system in the Company.*

*This statement letter is made truthfully.*

Jakarta, 28 Pebruari/ February 28, 2014

Acting President Director/*Chief Financial Officer*



Arisudono Soerono

## Laporan Auditor Independen

No. GA114 0098 IIF OS

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

P.T. Indonesia Infrastructure Finance

Kami telah mengaudit laporan keuangan P.T. Indonesia Infrastructure Finance terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2013, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

## Independent Auditors' Report

No. GA114 0098 IIF OS

The Stockholders, Board of Commissioners and Directors

P.T. Indonesia Infrastructure Finance

We have audited the accompanying financial statements of P.T. Indonesia Infrastructure Finance, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2013, and the statement of comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

### Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

### Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

# Osman Bing Satrio & Eny

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

# Osman Bing Satrio & Eny

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

## Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan P.T. Indonesia Infrastructure Finance tanggal 31 Desember 2013, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

## Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of P.T. Indonesia Infrastructure Finance as of December 31, 2013, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

OSMAN BING SATRIO & ENY



Drs. Osman Sitorus

Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP.0567

28 Februari 2014/February 28, 2014

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
31 DESEMBER 2013

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  
DECEMBER 31, 2013

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012	
		Rp	Rp	
<b>ASET</b>				
Kas dan setara kas	5	2.461.932.586.423	1.783.281.186.137	Cash and cash equivalents
Surat berharga	6	366.331.540.124	152.486.732.750	Marketable securities
Pinjaman diberikan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 3.184.279.997	7	990.304.285.244	-	Loans - net of allowance for impairment losses of Rp 3,184,279,997
Piutang usaha		-	644.647.850	Accounts receivable
Piutang bunga	8	4.105.090.429	2.311.876.367	Accrued interest receivable
Piutang lain-lain		32.795.386	76.110.646	Other receivables
Uang muka		31.800.000	941.751.176	Advances
Beban dibayar dimuka	9	2.107.521.358	1.929.389.210	Prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka	24	2.899.080.415	1.968.142.117	Prepaid tax
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 4.319.564.374 tahun 2013 dan Rp 2.625.200.606 tahun 2012	10	2.909.769.884	3.578.138.814	Property and equipment - net of accumulated depreciation of Rp 4,319,564,374 in 2013 and Rp 2,625,200,606 in 2012
Aset pajak tangguhan	24	30.446.368.250	19.434.957.048	Deferred tax assets
Beban tangguhan	11	1.825.097.703	-	Deferred charges
Aset lain-lain	12	2.536.685.326	2.388.679.958	Other assets
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>3.865.462.620.542</b>	<b>1.969.041.612.073</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
<b>LIABILITAS</b>				
Utang lain-lain	13	1.733.502.210	1.672.882.680	LIABILITIES
Utang pajak	24	634.991.369	506.123.895	Other payables
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	14	17.776.835.325	10.162.429.370	Taxes payable
Liabilitas imbalan pasca kerja	25	2.374.144.147	1.022.442.839	Accrued expenses and other liabilities
Pendapatan diterima dimuka	15	1.410.000.000	3.750.000.000	Employment benefits obligation
Pinjaman subordinasi	16	2.031.864.023.367	778.349.766.043	Unearned revenue
Jumlah Liabilitas		2.055.793.496.418	795.463.644.827	Subordinated loan
<b>EKUITAS</b>				Total Liabilities
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham				<b>EQUITY</b>
Modal dasar 2.000.000 saham				Capital Stock - par value of Rp 1,000,000 per share
Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.175.000 saham	17	1.175.000.000.000	1.175.000.000.000	Authorized 2,000,000 shares
Tambahan modal disetor	17	17.500.000.000	17.500.000.000	Subscribed and paid up 1,175,000 shares
Uang muka modal saham dipesan	18	604.746.000.000	-	Additional paid-in capital
Kenaikan nilai wajar surat berharga tersedia untuk dijual - bersih setelah efek pajak		3.123.225.000	-	Advances for capital stock subscription
Laba ditahan (akumulasi kerugian)		9.299.899.124	(18.922.032.754)	Increase in fair value of available for sale securities - net of tax effect
Jumlah Ekuitas		1.809.669.124.124	1.173.577.967.246	Retained earnings (deficit)
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>3.865.462.620.542</b>	<b>1.969.041.612.073</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME  
 FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2013

	Catatan/ Notes	2013 Rp	2012 Rp	
<b>PENDAPATAN USAHA</b>				<b>REVENUES</b>
Penghasilan investasi	19	118.292.820.334	65.377.470.143	Investment income
Pendapatan provisi dan komisi	20	6.517.768.000	-	Provision and commission income
Pendapatan jasa <i>advisory</i>	21	96.430.000	384.490.000	Advisory income
Pendapatan lainnya		9.090.909	6.177.636	Other income
Jumlah Pendapatan Usaha		<u>124.916.109.243</u>	<u>65.768.137.779</u>	Total Revenues
<b>BEBAN USAHA</b>				<b>EXPENSES</b>
Umum dan administrasi	22	(66.837.805.830)	(49.770.498.248)	General and administrative expenses
Beban bunga	23	(21.633.105.361)	(741.570.160)	Interest expense
Beban penyisihan penurunan nilai	7	(3.101.982.507)	-	Provision for impairment losses
Jumlah Beban Usaha		<u>(91.572.893.698)</u>	<u>(50.512.068.408)</u>	Total Expenses
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>		33.343.215.545	15.256.069.371	INCOME BEFORE TAX
<b>BEBAN PAJAK</b>	24	<u>(5.806.663.087)</u>	<u>(929.706.701)</u>	TAX EXPENSE
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>		<u>27.536.552.458</u>	<u>14.326.362.670</u>	INCOME FOR THE YEAR
<b>PENDAPATAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN:</b>				<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS):</b>
Kenaikan nilai wajar surat berharga tersedia untuk dijual - bersih setelah efek pajak		3.123.225.000	-	Increase in fair value of available for sale securities - net of tax effect
Kerugian (kerugian) aktuarial - bersih setelah efek pajak		<u>685.379.420</u>	<u>(84.678.666)</u>	Actuarial gain (loss) - net of tax effect
Pendapatan (rugi) komprehensif lain		<u>3.808.604.420</u>	<u>(84.678.666)</u>	Other comprehensive income (loss)
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF</b>		<u>31.345.156.878</u>	<u>14.241.684.004</u>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	Catatan/ Notes	Modal saham/ Capital Stock	Rp	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Rp	Uang muka modal saham dipesan/ Advances for capital stock subscription	Rp	Laba ditahan (akumulasi kerugian)/ Retained earnings (deficit)	Rp	Kenaikan nilai wajar surat berharga tersedia untuk dijual - bersih setelah efek pajak/ <i>Increase in fair value of available for sale securities - net of tax effect</i>	Rp	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	Rp
Saldo 1 Januari 2012		1.000.000.000.000		-		-		(33.163.716.758)		-		966.836.283.242	Balance as of January 1, 2012
Modal ditempatkan dan disetor	17	175.000.000.000		-		-		-		-		175.000.000.000	Issued and paid-up capital
Tambahan modal disetor	17	-		17.500.000.000		-		-		-		17.500.000.000	Additional paid-in capital
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan		-		-		-		14.241.684.004		-		14.241.684.004	Total comprehensive income during the year
Saldo 31 Desember 2012		1.175.000.000.000		17.500.000.000		-		(18.922.032.754)		-		1.173.577.967.246	Balance as of December 31, 2012
Uang muka modal saham dipesan	18	-		-		604.746.000.000		-		-		604.746.000.000	Advances for capital stock subscription
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan		-		-		-		28.221.931.878		3.123.225.000		31.345.156.878	Total comprehensive income during the year
Saldo 31 Desember 2013		<u>1.175.000.000.000</u>		<u>17.500.000.000</u>		<u>604.746.000.000</u>		<u>9.299.899.124</u>		<u>3.123.225.000</u>		<u>1.809.669.124.124</u>	Balance as of December 31, 2013

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian  
 yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements  
 which are an integral part of the financial statements.

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 LAPORAN ARUS KAS  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 STATEMENT OF CASH FLOWS  
 FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2013

	2013 Rp	2012 Rp	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan pendapatan bunga	109.433.026.538	65.219.131.034	Receipt from interest income
Penerimaan pendapatan diterima di muka	7.927.768.000	3.750.000.000	Receipt from upfront fee
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan	(56.230.802.539)	(45.063.858.201)	Payment to suppliers and employees
Penerimaan pendapatan advisory	482.144.150	200.691.150	Receipt from advisory income
Pinjaman diberikan kepada nasabah	(906.838.035.327)	-	Loans granted to customers
Penerimaan pembayaran kredit yang diberikan	21.490.493.807	-	Repayment of loans
Pembayaran pajak penghasilan final	(18.087.609.093)	(12.792.149.970)	Payment of final income tax
Pembayaran beban bunga	(15.480.787.051)	-	Payment of interest expenses
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	<u>(857.303.801.515)</u>	<u>11.313.814.013</u>	Net cash provided by (used in) operating activities
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Pembelian investasi surat berharga	(552.149.450.000)	(151.685.687.500)	Purchase of securities
Penjualan investasi surat berharga	353.966.345.541	-	Sale of securities
Perolehan aset tetap	(1.025.994.838)	(1.689.302.898)	Acquisition of property and equipment
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(199.209.099.297)</u>	<u>(153.374.990.398)</u>	Net cash used in investing activities
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penerimaan pinjaman subordinasi	936.804.160.768	784.565.983.070	Proceeds from subordinated loan
Penerimaan setoran modal	604.746.000.000	192.500.000.000	Proceeds from paid up capital
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	<u>1.541.550.160.768</u>	<u>977.065.983.070</u>	Net cash provided by financing activities
<b>KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>678.651.400.286</b>	<b>835.004.806.685</b>	<b>NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
Pengaruh perubahan kurs mata uang pada kas dan setara kas	<u>193.614.140.330</u>	<u>-</u>	Impact of changes in exchange rate on cash and cash equivalents
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN</b>	<b>1.783.281.186.137</b>	<b>948.276.379.452</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>2.461.932.586.423</b>	<b>1.783.281.186.137</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

## 1. UMUM

P.T. Indonesia Infrastructure Finance ("Perusahaan") didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian No. 34 tanggal 15 Januari 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti Sutijpto, S.H., Notaris di Jakarta, yang disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-21503.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 28 April 2010 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 11 Maret 2011, Tambahan No. 5123. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 74 tanggal 12 September 2013 yang dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., Mkn., notaris di Jakarta, mengenai pengangkatan Bapak Arisudono Soerono sebagai Direktur Perusahaan dan akta No. 10 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., Mkn., notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat No. AH-AHU.01.10-01269 tanggal 10 Januari 2014.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang pembiayaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha berikut ini:

- a. memberikan pinjaman dalam bentuk, antara lain, pinjaman senior, pinjaman subordinasi/mezzanine financing, bridge financing, take out financing dan/atau pembiayaan kembali;
- b. memberikan jaminan dalam bentuk, antara lain, pemenuhan liabilitas keuangan, credit enhancement dan/atau performance bonds;
- c. penyertaan modal;
- d. memberikan jasa dalam mencari pasar swap yang berkaitan dengan perusahaan pembiayaan infrastruktur;
- e. memberikan jasa konsultasi yang berkaitan dengan, antara lain, penilaian risiko, analisa kelayakan, struktur proyek, model pembiayaan, dan/atau pembangunan proyek; dan
- f. melakukan kegiatan pembiayaan lain yang terkait dengan proyek-proyek infrastruktur sebagaimana diizinkan oleh Undang-undang.

## 1. GENERAL

P.T. Indonesia Infrastructure Finance ("the Company") was established under the laws of the Republic of Indonesia through Deed of Establishment No. 34 dated January 15, 2010, drawn up before Aulia Taufani, S.H., as substitute of Sutijpto, S.H., Notary in Jakarta, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decision letter No. AHU-21503. AH.01.01.Tahun 2010 dated April 28, 2010 and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 20 dated March 11, 2011, Supplementary No. 5123. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently with notarial deed No. 74 of Utiek R. Abdurachman, S.H.,MLI, Mkn dated September 12, 2013 concerning the appointment of Mr. Arisudono Soerono as the Company's Director and deed No. 10 of Utiek R. Abdurachman, S.H.,MLI, Mkn dated December 20, 2013 concerning the increase in issued and paid-up capital. The increase in issued and paid-up capital had been accepted by the Minister of Law and Human Rights as stated in the Letter No. AH-AHU.01.10-01269 dated January 10, 2014.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the objective of its activities is to engage in financing infrastructure projects in Indonesia.

The Company may perform the following activities to achieve its objectives:

- a. providing loans in the form of, among others, senior debts, subordinated debts/mezzanine financing, bridge financing, take-out financing and/or refinancing;
- b. providing guarantees in the form of, among others, fulfilment of financial liabilities, credit enhancement, and/or performance bonds;
- c. equity investment;
- d. providing services in searching for swap market related to infrastructure financing companies;
- e. providing consultation services related to, among others, risk assessment, feasibility analysis, project structuring, financing scheme, and/or project development; and
- f. financing other activities related to infrastructure projects as permitted by the Law.

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2013 - Lanjutan

Perusahaan telah mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan untuk melakukan kegiatannya melalui Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-439/KM.10/2010 tanggal 6 Agustus 2010.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Gedung Energi lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta, Indonesia.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	2013
Dewan Komisaris Presiden Komisaris Komisaris	Sofyan Djalil Arif Baharudin Jemal-Ud-Din Al Noor Kassum Robert Olivier Dolk Hans Juergen Hertel Marwanto Harjowiryono Rajeev Kannan
Direksi Presiden Direktur Direktur	Kartika Wirjoatmodjo Harold J.D. Tjiptadjaja Haruhiko Takamoto Wito Krisnahadi Arisudono Soerono

Susunan anggota Komite Investasi pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 berasal dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Komite Audit Perusahaan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	2013
Ketua Anggota	Sofyan Djalil Arif Baharudin Hans Juergen Hertel Robert Olivier Dolk
Anggota independen	Agus Kretarto Loso Judijanto

Efektif tanggal 1 September 2013, pemegang saham mengangkat Bapak Arisudono Soerono sebagai Direktur Perusahaan.

Pada tanggal 27 Maret 2013, komisaris menunjuk Bapak Robert Olivier Dolk sebagai tambahan anggota baru Komite Audit dan Bapak Loso Judijanto sebagai anggota baru Komite Audit Independen menggantikan Bapak Darminto yang mengundurkan diri.

Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah karyawan Perusahaan adalah 39 orang (31 Desember 2012: 31 orang).

Total jumlah remunerasi (imbalan jangka pendek) yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah Rp 18.382.008.956 dan Rp 10.778.383.902.

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2013 - Continued

The Company has obtained its business license from the Minister of Finance through Decree No. KEP-439/KM.10/2010 dated August 6, 2010.

The Company's head office is located at Energy Building, 15<sup>th</sup> floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta, Indonesia.

The members of the Company's Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2013 and 2012 are as follows:

	2012	
	Sofyan Djalil Arif Baharudin Jemal-Ud-Din Al Noor Kassum Robert Olivier Dolk Hans Juergen Hertel Marwanto Harjowiryono Rajeev Kannan	Board of Commissioners President Commissioner Commissioner
	Kartika Wirjoatmodjo Harold J.D. Tjiptadjaja Haruhiko Takamoto Wito Krisnahadi -	Directors President Director Director

The members of the Company's Investment Committee as of December 31, 2013 and 2012 comprise of all members of Board of Commissioners.

The Company's Audit Committee as of December 31, 2013 and 2012 were as follows:

	2012	
	Sofyan Djalil Arif Baharudin Hans Juergen Hertel -	Chairman Members
	Agus Kretarto Darminto	Independent members

Effective on September 1, 2013, the shareholders appointed Mr. Arisudono Soerono to serve as a Director of the Company.

On March 27, 2013, the commissioners appointed Mr. Robert Olivier Dolk to serve as additional new member of the Audit Committee and Mr. Loso Judijanto as new Independent Member of the Audit Committee replacing Mr. Darminto who resigned.

As of December 31, 2013, the Company had 39 employees (December 31, 2012: 31 employees).

Total remuneration (short-term benefit) paid to the Company's Board of Commissioners and Directors for the years ended December 31, 2013 and 2012 amounted to Rp 18,382,008,956 and Rp 10,778,383,902 respectively.

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2013 - Lanjutan

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2013 - Continued

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STÁNDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Standar yang berlaku pada tahun berjalan

Perusahaan telah menerapkan semua standar baru dan revisi serta interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013.

- Penyesuaian PSAK 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan

Standar ini mensyaratkan pengungkapan antara lain deskripsi agunan yang dimiliki entitas sebagai jaminan, dan peningkatan kualitas kredit lain, dan dampak keuangannya (misalnya kuantifikasi sejauh mana agunan dan peningkatan kualitas kredit lain dalam memitigasi risiko kredit) dengan mengacu pada jumlah terbaik yang mencerminkan eksposur maksimum terhadap risiko kredit.

b. Standar dan interpretasi telah diterbitkan tapi belum diterapkan

- i. Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2014 adalah:
  - ISAK 27, Pengalihan Aset dari Pelanggan
  - ISAK 28, Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas

Penerapan awal interpretasi tersebut tidak memiliki dampak pada laporan keuangan tapi mungkin memiliki dampak pada transaksi dan perjanjian di masa depan.

- ii. Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2015 adalah:
  - PSAK 1 (revisi 2013), Penyajian Laporan Keuangan
  - PSAK 4 (revisi 2013), Laporan Keuangan Tersendiri
  - PSAK 15 (revisi 2013), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
  - PSAK 24 (revisi 2013), Imbalan Kerja
  - PSAK 66, Pengaturan Bersama
  - PSAK 67, Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain
  - PSAK 68, Pengukuran Nilai Wajar

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATION OF PSAK ("ISAK")

a. Standards effective in the current year

The Company has adopted all of the new and revised standards and interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of the Indonesian Institute of Accountants that are relevant to their operations and effective for accounting periods beginning on January 1, 2013.

- Amendment to PSAK 60, Financial Instruments: Disclosure

Among other things, the standard requires the disclosures of the description of collateral held as security and of other credit enhancements, and their financial effect (e.g., quantification of the extent to which collateral and other credit enhancements mitigate credit risk) in respect of the amount that best represents the maximum exposure to credit risk.

b. Standards and interpretation in issue not yet adopted

- i. Effective for periods beginning on or after January 1, 2014 :
  - ISAK 27, Transfers of Assets from Customers
  - ISAK 28, Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments

The initial adoption of the above interpretations does not have an impact on this financial statements but may impact upon future transactions and arrangements.

- ii. Effective for periods beginning on or after January 1, 2015:
  - PSAK 1 (revised 2013), Presentation of Financial Statements
  - PSAK 4 (revised 2013), Separate Financial Statements
  - PSAK 15 (revised 2013), Investments in Associates and Joint Ventures
  - PSAK 24 (revised 2013), Employee Benefits
  - PSAK 66, Joint Arrangements
  - PSAK 67, Disclosures of Interests in Other Entities
  - PSAK 68, Fair Value Measurements

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan manajemen sedang mengevaluasi dampak dari standar dan interpretasi terhadap laporan keuangan.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan ini tidak dimaksudkan untuk menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan standar akuntansi dan pelaporan yang berlaku di negara dan yurisdiksi lain.

b. Penyajian Laporan Keuangan

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi periode yang bersangkutan.

d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor):

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor;

As of the issuance date of the financial statements, management is evaluating the effect of these standards on the financial statements.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Such financial statements are not intended to present the financial position, result of operations and cash flows in accordance with accounting standards and reporting practices in other countries and jurisdictions.

b. Financial Statements Presentation

The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting. The financial statements are prepared based on the historical cost, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

c. Foreign Currency Transactions and Translation

The books of accounts of the Company are maintained in Indonesian Rupiah. Transactions during the year involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the rates of exchange prevailing at that date. The resulting gains or losses are credited or charged to the profit and loss account.

d. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Company (the reporting entity):

- a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
  - i. has control or joint control over the reporting entity;

- ii. memiliki pengaruh signifikan entitas pelapor; atau
  - iii. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
- i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
  - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
  - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
  - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
  - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
  - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
  - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

- ii. has significant influence over the reporting entity; or
  - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
- i. The entity, and the reporting entity are members of the same Company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
  - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Company of which the other entity is a member).
  - iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
  - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
  - v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
  - vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
  - vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).

All transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the financial statements.

e. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuan pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai berikut:

- Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)
- Pinjaman yang diberikan dan piutang
- Dimiliki hingga jatuh tempo
- Tersedia untuk dijual

Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuan.

Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Aset keuangan diklasifikasi dalam FVTPL, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual terkini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan yang diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal jika:

- penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau

e. Financial Assets

All financial assets are recognised and derecognised on trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the time frame established by the market concerned, and are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as at fair value through profit and loss, which are initially measured at fair value.

The Company's financial assets are classified as the following:

- Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)
- Loans and receivables
- Held-to-maturity
- Available-for-sale

The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. The management determines the classification of the financial assets at the time of the initial recognition.

Fair Value Through Profit Or Loss (FVTPL)

Financial assets are classified as at FVTPL when the financial asset is either held for trading or it is designated as at FVTPL.

A financial asset is classified as held for trading if:

- it has been acquired principally for the purpose of selling in the near term; or
- on initial recognition it is part of an identified portfolio of financial instruments that the entity manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or
- it is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument.

A financial asset other than a financial asset held for trading may be designated as at FVTPL upon initial recognition if:

- such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would otherwise arise; or

- kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya, dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan, dan informasi tentang kelompok disediakan secara internal kepada manajemen kunci entitas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi), misalnya direksi dan CEO.

Aset keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada Catatan 6.

#### Pinjaman diberikan dan piutang

Piutang nasabah dan piutang lain-lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman diberikan dan piutang".

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material. Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi komprehensif dan dilaporkan sebagai 'Pendapatan bunga'.

#### Dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- aset keuangan yang ditetapkan oleh Perusahaan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- aset keuangan yang memiliki definisi pinjaman diberikan dan piutang.

- a group of financial assets, financial liabilities or both is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the group is provided internally on that basis to the entity's key management personnel (as defined in PSAK 7: Related Party Disclosures), for example the entity's board of directors and chief executive officer.

Financial assets at FVTPL are stated at fair value, with any resultant gain or loss recognised in profit or loss. Fair value is determined in the manner described in Note 6.

#### Loans and receivables

Loans and receivables from customers and other receivables that have fixed or determinable payments that are not quoted in an active market are classified as "loans and receivables".

Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method less impairment. Interest is recognised by applying the effective interest rate method, except for short-term receivables when the recognition of interest would be immaterial. Interest income on financial assets classified as loans and receivables is included in the statement of comprehensive income and is reported as 'Interest income'.

#### Held-to-maturity

Held-to-maturity financial assets are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities that the Company has the positive intention and ability to hold to maturity, other than:

- those that the group of financial assets upon initial recognition are designated as at fair value through profit or loss;
- those that the group of financial assets are designated as available for sale; and
- those that meet the definition of loans and receivables.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Pendapatan bunga dari aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dicatat dalam laporan laba rugi dan diakui sebagai "Pendapatan bunga".

Tersedia untuk dijual

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan yang ditetapkan untuk dimiliki untuk periode tertentu dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman diberikan atau piutang, aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana nilai wajar diakui pada laporan laba rugi komprehensif kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi selisih kurs untuk instrumen utang yang diakui pada laporan laba rugi. Untuk instrumen ekuitas, laba rugi selisih kurs diakui sebagai bagian dari ekuitas, hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar, yang sebelumnya diakui di laporan perubahan laporan laba rugi komprehensif, diakui pada laporan laba rugi. Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian yang timbul akibat perubahan nilai tukar dari aset moneter yang diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Held-to-maturity financial assets are initially recognised at fair value including transaction costs and subsequently measured at amortised cost, using the effective interest method less impairment. Interest income on held-to-maturity financial assets is included in the statement of income and reported as "Interest income".

Available-for-sale

Available-for-sale are financial assets that are intended to be held for indefinite period of time, which may be sold in response to needs for liquidity or changes in interest rates, exchange rates or that are not classified as loans and receivables, held-to-maturity or financial assets at fair value through profit or loss.

Available-for-sale financial assets are initially recognised at fair value, plus transaction costs, and measured subsequently at fair value with changes in fair value recognised in the statement of comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains or losses for debt instrument which are recognized in profit or loss. For equity instrument, foreign exchange gains or losses is recognised as part of equity, until the financial assets is derecognised. If an available-for-sale financial asset is determined to be impaired, the cumulative unrealised gain or loss arising from the changes in fair value previously recognised in the statement of comprehensive income is recognised in the profit and loss account. Interest income is calculated using the effective interest method, and foreign currency gains or losses on monetary assets classified as available for-sale are recognised in the profit and loss account.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan.

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk aset keuangan, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat penundaan dalam pelaksanaan konstruksi proyek yang dapat membuat penundaan dalam pembayaran pokok dan/atau bunga pada saat debitur beroperasi secara komersial; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan restrukturisasi keuangan.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and allocating of interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and commissions paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or, where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Revenue is recognized on an effective interest basis for financial instruments.

Impairment of financial assets

The Company assesses at each reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. Financial assets are impaired where there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the investment have been impacted.

For financial assets, the objective evidences of impairment may include:

- significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or
- default or delinquency in principal or interest payments; or
- delays in the project construction occur which could further delay the principal and/or interest payments when the debtor has commercially operated the project; or
- it becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or financial restructuring.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu yang memiliki karakteristik yang sama, akan dilakukan penurunan nilai secara kolektif. Aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit seperti mempertimbangkan segmentasi kredit dan status tunggakan. Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur atau rekanan untuk membayar seluruh kewajiban yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi.

Berdasarkan hasil penelaahan Perusahaan atas tipe dan karakteristik produk aset keuangan yang dimiliki, Perusahaan saat ini menentukan penurunan nilai secara individual atas aset keuangan kecuali untuk debitur "green field" yang masih menyelesaikan konstruksi namun belum beroperasi secara komersial. Untuk debitur "green field", Perusahaan membentuk penyisihan penurunan nilai berdasarkan estimasi yang dianggap manajemen cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian penurunan nilai.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi.

#### Reklasifikasi asset keuangan

Reklasifikasi hanya diperbolehkan pada kondisi tertentu dan jika aset sudah tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua kasus, reklasifikasi aset keuangan dibatasi pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

For certain categories of financial assets which have similar characteristics, the assets are assessed for impairment on a collective basis. The financial assets are grouped on the basis of similar credit risk characteristics by considering credit segmentation and past-due status. Those characteristics are relevant to the estimation of future cash flows for groups of such assets by being indicative of the debtor or counterparty ability to pay all amounts due according to the contractual terms of the assets being evaluated.

Based on the Company's review on the type and characteristics of the existing financial assets, the Company currently assesses the impairment using individual basis for its financial assets except for "green field" debtors which is in the construction process but not yet commercially operating. For such "green field" debtors, the Company establishes impairment provision based on estimation which management believes is sufficient to cover potential impairment losses.

For financial assets carried at amortized cost, the amount of the impairment is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognised in the profit and loss account.

#### Reclassification of financial assets

Reclassification is only permitted in rare circumstances and where the asset is no longer held for the purpose of selling in the short-term. In all cases, reclassifications of financial assets are limited to debt instruments. Reclassifications are accounted for at the fair value of the financial asset at the date of reclassification.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

f. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan dan entitas anak setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas keuangan

Utang usaha dan utang lain-lain serta pinjaman subordinasi pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

Selisih antara hasil emisi (setelah dikurangi biaya transaksi) dan penyelesaian atau pelunasan pinjaman diakui selama jangka waktu pinjaman.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Derecognition of financial assets

The Company derecognises a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company recognises its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company continues to recognise the financial asset and also recognises a collateralised borrowing for the proceeds received.

f. Financial Liabilities and Equity Instruments

Classification as debt or equity

Financial liabilities and equity instruments issued by the Company are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Company and its subsidiaries after deducting all of its liabilities.

Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Financial liabilities

Trade, other payables and subordinated loans are initially measured at fair value, net of transaction costs, and are subsequently measured at amortized cost, using the effective interest rate method, with interest expense recognised on an effective yield basis.

Any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the settlement or redemption of borrowings is recognized over the term of the borrowings.

Derecognition of financial liabilities

The Company derecognises financial liabilities when, and only when, the Company's obligations are discharged or cancelled or they expire.

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
 31 DESEMBER 2013 - Lanjutan

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
 FOR THE YEAR ENDED  
 DECEMBER 31, 2013 - Continued

**g. Kas dan Setara Kas**

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaanya.

**h. Beban Dibayar Dimuka**

Beban dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

**i. Aset Tetap – Pemilikan Langsung**

Aset tetap dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Harga perolehan mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tetap.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah sebagaimana mestinya, hanya apabila kemungkinan besar Perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomis masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal. Nilai tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari aset tetap sebagai berikut:

<u>Tahun/Years</u>	
Komputer	4
Peralatan kantor	4
Kendaraan	4
Perabotan dan peralatan	4

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, dengan menggunakan nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai.

Akumulasi biaya konstruksi serta pemasangan peralatan kantor dan komputer, dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal yang sama. Biaya pemeliharaan dan perbaikan dicatat sebagai beban pada saat terjadinya.

**g. Cash and Cash Equivalents**

For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

**h. Prepaid Expenses**

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

**i. Property and Equipment – Direct Acquisition**

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment. Historical cost includes expenditures that are directly attributable to the acquisition of the items.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or are recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised.

Depreciation of property and equipment is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives as follows:

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down immediately to its recoverable amount, which is determined as the higher of net selling price or value in use.

The accumulated costs of the construction of and the installation of office equipment and computers are capitalised as construction in progress. These costs are reclassified to fixed assets accounts when the construction or installation is complete. Depreciation is charged from such date. Maintenance and repair cost are charged as an expense when incurred.

j. Beban Tangguhan

Beban tangguhan merupakan biaya transaksi yang terjadi berkaitan dengan proses pemberian persetujuan kredit kepada debitur. Biaya transaksi akan disajikan secara neto dalam akun "Pinjaman yang Diberikan" jika telah dicairkan kepada debitur.

k. Aset Lain-lain

Aset lain-lain termasuk aset tidak berwujud yang dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Harga perolehan mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tidak berwujud.

I. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada tanggal pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Perusahaan mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

m. Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sebagai Lessee

Aset pada sewa pembiayaan dicatat pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan Perusahaan yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Liabilitas kepada lessor disajikan di dalam neraca sebagai liabilitas sewa pembiayaan.

j. Deferred Charges

Deferred charges represent transaction costs incurred in relation to the process of loan approval to the debtors. The transaction costs will be presented net in "Loans" account when the loan is disbursed to the debtors.

k. Other Assets

Other assets include intangible assets that are stated at cost less accumulated amortization and impairment. Historical cost includes expenditures that are directly attributable to the acquisition of the items.

I. Impairment of Non-Financial Assets

At reporting dates, the Company reviews the carrying amounts of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of net selling price or value in use. If the recoverable amount of a non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in the profit and loss account.

m. Leases

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee. All other leases are classified as operating leases.

As lessee

Assets held under finance leases are initially recognized as assets of the Company at their fair value at the inception of the lease or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. The corresponding liability to the lessor is included in the balance sheet as a finance lease obligation.

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga yang konstan (tetap) atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan langsung ke laba rugi. Rental kontinen dibebankan pada periode terjadinya.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line* basis) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontinen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan dengan pemberian kredit diakui ketika jasa-jasa telah diberikan sesuai dengan kontrak perjanjian seperti jasa *mandatory lead arranger*.

Pendapatan jasa advisory

Jasa *advisory* diakui ketika jasa-jasa telah diberikan sesuai dengan kontrak perjanjian.

Pendapatan dan beban bunga

Pendapatan dan beban bunga yang diakui dalam laporan keuangan termasuk bunga pada aset dan liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi yang dihitung menggunakan suku bunga efektif.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

o. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease obligation so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are charged directly to profit or loss. Contingent rentals are recognized as expenses in the periods in which they are incurred.

Operating lease payments are recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rentals arising under operating leases are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

In the event that lease incentives are received to enter into operating leases, such incentives are recognized as a liability. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight-line basis, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.

n. Recognition of Revenues and Expenses

Provision and commission income

Provision and commission income related to the loan disbursement is recognized when the services are rendered in accordance with the respective engagement contracts such as mandatory lead arranger services.

Advisory income

Advisory service is recognized when the services are rendered in accordance with the respective engagement contracts.

Interest income and expenses

Interest revenues and expense recognized in the financial statements include interest on financial assets and liabilities measured at amortized costs using the effective interest rate method.

Expenses

Expenses are recognized when incurred.

o. Income Tax

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year, computed using the prevailing tax rates.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas, kecuali perbedaan yang berhubungan dengan pajak penghasilan final. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substancial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan bersih di neraca, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

p. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Imbalan kerja karyawan jangka pendek

Imbalan kerja karyawan jangka pendek diakui pada saat terhutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Imbalan cuti besar

Perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode Projected Unit Credit. Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak atau *vested*, dan sebaliknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi vested.

Keuntungan atau kerugian aktuarial dapat timbul dari penyesuaian yang dibuat berdasarkan pengalaman, perubahan asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya di laba rugi.

Liabilitas pensiun

Perusahaan membukukan imbalan pasca kerja untuk karyawan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 yang pada dasarnya merupakan program imbalan pasti. Untuk usia pensiun normal, Perusahaan menghitung imbalan kerja karyawan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the financial statements carrying amounts of assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences can be utilized.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted by the reporting date. Deferred tax is charged or credited immediately in the profit and loss account, except when it relates to items charged or credited directly to equity, in which case the deferred tax is also charged or credited directly to equity.

Deferred tax assets and liabilities, except for deferred tax assets and liabilities for different entities, are offset in the balance sheets in the same manner the current tax assets and liabilities are presented.

p. Post-Employment Benefit Obligation

Short-term employee benefit

Short-term employee benefits are recognised when they accrue to the employees.

Long-service leave

The cost of providing post-employment benefits is determined using the Projected Unit Credit Method. Past service cost is recognized immediately to the extent that the benefits are already vested, and otherwise is amortized on a straight-line basis over the average period until the benefits become vested.

Actuarial gains or losses arising from experience adjustments, changes in actuarial assumptions are directly recognized in profit or loss.

Pension obligation

The Company provides post-employment benefits as required under Labor Law No. 13/2003 (the "Labor Law") which in substance represent a defined benefit plan. For normal pension scheme, the Company calculates the employee benefits under the Labor Law.

Perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode Projected Unit Credit. Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak atau vested, dan sebaliknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi vested.

Keuntungan atau kerugian aktuarial dapat timbul dari penyesuaian yang dibuat berdasarkan pengalaman, perubahan asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya di pendapatan komprehensif lainnya.

#### 4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diharuskan untuk membuat penilaian, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan

##### Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Di bawah ini adalah pertimbangan kritis, selain dari estimasi yang telah diatur, dimana direksi telah membuat suatu proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

##### Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo

Direktur telah menelaah aset keuangan Perusahaan yang dimiliki hingga jatuh tempo karena persyaratan pemeliharaan modal dan likuiditas dan telah dikonfirmasi intensi positif Perusahaan dan kemampuan untuk memiliki aset tersebut hingga jatuh tempo.

##### Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan dijelaskan dibawah ini:

The cost of providing post-employment benefits is determined using the Projected Unit Credit Method. Past service cost is recognized immediately to the extent that the benefits are already vested, and otherwise is amortized on a straight-line basis over the average period until the benefits become vested.

Actuarial gains or losses arising from experience adjustments, changes in actuarial assumptions are directly recognized in other comprehensive income.

#### 4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND ESTIMATES

In the application of the Company's accounting policies, which is described in Note 3, management is required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period where the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

##### Critical Judgments in Applying Accounting Policies

Below are the critical judgments, apart from those involving estimations, that the directors have made in the process of applying the Company accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements.

##### Held-to-maturity financial assets

The directors have reviewed the Company's held-to-maturity financial assets in the light of its future reserve and liquidity requirements and have confirmed the Company's positive intention and ability to hold those assets to maturity.

##### Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period are discussed below:

Pajak tangguhan

Perusahaan mengakui aset pajak tangguhan dari akumulasi rugi fiskal. Manajemen memperkirakan bahwa rugi fiskal tersebut akan dapat dikompensasi terhadap laba fiskal untuk lima tahun mendatang sejak terjadinya. Dalam menyusun perkiraan tersebut mengharuskan manajemen mengestimasi laba fiskal yang diharapkan akan dihasilkan dari operasi Perusahaan. Perubahan signifikan terhadap asumsi dapat secara material mempengaruhi nilai aset pajak tangguhan.

Perhitungan akumulasi rugi fiskal dan aset pajak tangguhan disajikan pada Catatan 24.

Rugi penurunan nilai aset keuangan

Perusahaan menilai penurunan nilai aset keuangan pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti obyektif bahwa kerugian telah terjadi. Suatu aset keuangan dinyatakan mengalami penurunan nilai bila ada bukti obyektif terjadinya peristiwa yang berdampak pada estimasi arus kas atas aset keuangan. Bukti tersebut meliputi data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi peristiwa yang merugikan dalam status pembayaran debitur atau kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan kelalaian membayar piutang.

Perusahaan melakukan penilaian terhadap penurunan nilai berdasarkan estimasi terbaik pada tanggal pelaporan. Estimasi jumlah dan waktu pemulihan masa depan akan membutuhkan banyak pertimbangan dan mungkin akan berbeda dari estimasi tersebut dan akibatnya kerugian aktual yang terjadi mungkin berbeda dengan yang diakui dalam laporan keuangan.

Deferred taxes

The Company recognized deferred tax assets on its accumulated fiscal loss and deductible temporary differences. Management estimated the fiscal loss which can be compensated against the taxable income for the next five years. In preparing the forecast management makes judgement as to the assumptions needed to estimate the future taxable income expected to be generated from the Company's operations. Any significant changes in the assumptions may materially affect the amount of deferred tax assets.

Calculation of accumulated fiscal losses and deferred tax assets is disclosed in Note 24.

Impairment Loss on Financial Assets

The Company assesses its financial assets at each reporting date. In determining whether the impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes judgement as to whether there is objective evidence that a loss event has occurred. Financial assets are considered to be impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the financial assets have been affected. The evidence includes observable data which indicates that an adverse event has occurred in the payment status of borrowers or in the national or local economic conditions that correlate with the default in payment of receivables.

The Company performs assessment of the impairment amounts based on the best estimation on the reporting date. Estimating the amount and timing of future recovery requires a lot of considerations and the actual amount may differ from the estimates and as a result, actual loss which occurs may be different from the amount recognized in the financial statements.

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
 31 DESEMBER 2013 - Lanjutan

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
 FOR THE YEAR ENDED  
 DECEMBER 31, 2013 - Continued

**5. KAS DAN SETARA KAS**

**5. CASH AND CASH EQUIVALENTS**

	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012	
	Rp	Rp	
Kas	27.416.184	20.767.584	Cash on hand
Bank			Cash in banks
Rupiah			Rupiah
Pihak berelasi			Related parties
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.929.450.372	7.089.176	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.411.316.288	1.627.754.264	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk	107.965.077	5.311.514	PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	103.670.667	173.962.242	PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
Pihak ketiga			Third parties
Standard Chartered Bank	77.444.079.618	64.679.979.840	Standard Chartered Bank
PT Bank International Indonesia Tbk	2.925.809.834	4.095.233	PT Bank International Indonesia Tbk
PT Bank UOB Buana Indonesia Tbk	2.491.203.221	23.303.914	PT Bank UOB Buana Indonesia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	789.975.374	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - Cabang Indonesia	554.656.015	374.737.578	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - Indonesia Branch
PT Bank Permata Tbk	541.711.713	502.760.559	PT Bank Permata Tbk
PT Bank ANZ Indonesia	7.337.648	478.134.648	PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank CIMB Niaga Tbk	6.743.012	86.124.162	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Dolar Amerika Serikat			U.S. Dollar
Pihak berelasi			Related party
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	384.790.642	210.848.935	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Pihak ketiga			Third party
PT Bank Danamon Indonesia	318.801.517.234	225.497.158.524	PT Bank Danamon Indonesia
Standard Chartered Bank	211.797.253.525	156.337.726.212	Standard Chartered Bank
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.132.723.648	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Permata Tbk	1.054.373.609	6.639.229	PT Bank Permata Tbk
PT Bank International Indonesia Tbk	915.624.516	-	PT Bank International Indonesia Tbk
PT Bank UOB Buana Indonesia Tbk	826.168.226	5.792.523	PT Bank UOB Buana Indonesia Tbk
Jumlah	<u>623.226.370.239</u>	<u>450.021.418.553</u>	Total
Deposito Berjangka			Time deposits
Rupiah			Rupiah
Pihak berelasi			Related parties
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	624.590.000.000	280.000.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	110.000.000.000	167.500.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	10.000.000.000	10.000.000.000	PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk	2.500.000.000	52.500.000.000	PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk
Pihak ketiga			Third party
PT Bank International Indonesia Tbk	210.000.000.000	160.000.000.000	PT Bank International Indonesia Tbk
PT Bank UOB Buana Indonesia Tbk	130.000.000.000	20.000.000.000	PT Bank UOB Buana Indonesia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	30.000.000.000	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	120.000.000.000	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Permata Tbk	-	120.000.000.000	PT Bank Permata Tbk
Dolar Amerika Serikat			U.S. Dollar
Pihak berelasi			Related party
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	96.700.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Pihak ketiga			Third party
PT Bank CIMB Niaga Tbk	262.063.500.000	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank UOB Buana Indonesia Tbk	193.805.100.000	153.753.000.000	PT Bank UOB Buana Indonesia Tbk
PT Bank International Indonesia Tbk	146.268.000.000	-	PT Bank International Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk	119.452.200.000	152.786.000.000	PT Bank Permata Tbk
Jumlah	<u>1.838.678.800.000</u>	<u>1.333.239.000.000</u>	Total
Jumlah	<u>2.461.932.586.423</u>	<u>1.783.281.186.137</u>	Total

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
 31 DESEMBER 2013 - Lanjutan

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
 FOR THE YEAR ENDED  
 DECEMBER 31, 2013 - Continued

	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012	
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun:			Interest rate per annum of time deposits:
Rupiah	4,95% - 11,00%	4,50% - 7,25%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	3,00% - 3,30%	1,00% - 3,25%	U.S. Dollar
Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang mengalami penurunan nilai.			At December 31, 2013 and 2012, there are no impaired cash and cash equivalents.
<b>6. SURAT BERHARGA</b>			<b>6. MARKETABLE SECURITIES</b>
Perusahaan memiliki investasi pada reksadana dan obligasi sebagai berikut:			The Company has investments in mutual funds and corporate bonds as follows:
	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012	
	Rp	Rp	
Dimiliki hingga jatuh tempo			Held-to-maturity
Dolar Amerika Serikat			U.S. Dollar
Obligasi - Pihak ketiga			Bonds - Third party
Tower Bersama	60.945.000.000	-	Tower Bersama
Tersedia untuk dijual			Available-for-sale
Rupiah			Rupiah
Obligasi - Pihak berelasi			Bonds - Related party
Jasa Marga 2013	54.490.000.000	-	Jasa Marga 2013
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi			Fair value through profit or loss
Rupiah			Rupiah
Reksadana - Pihak berelasi			Mutual funds - Related party
Mandiri Protected Dynamic Seri 9	50.927.538.200	-	Mandiri Protected Dynamic Seri 9
Mandiri Protected Dynamic Seri 2	50.307.308.124	-	Mandiri Protected Dynamic Seri 2
Mandiri Protected Dynamic Seri 10	-	101.977.254.720	Mandiri Protected Dynamic Series 10
Reksadana - Pihak ketiga			Mutual funds - Third party
CIMB Principal CPF CB IX	99.961.693.800	-	CIMB Principal CPF CB IX
CIMB Principal CPF CB VII - MN	-	50.509.478.030	CIMB Principal CPF CB VII - MN
Obligasi - Pihak ketiga			Bonds - Third party
Adira 2013	49.700.000.000	-	Adira 2013
Jumlah	250.896.540.124	152.486.732.750	Total
Jumlah	366.331.540.124	152.486.732.750	Total

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
 31 DESEMBER 2013 - Lanjutan

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
 FOR THE YEAR ENDED  
 DECEMBER 31, 2013 - Continued

Rincian reksadana dan obligasi pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

The detail of mutual funds and bonds as of December 31, 2013 and 2012 is as follows:

31 Desember/December 31, 2013						
Peringkat/ Rating	Tanggal pembelian/ Purchase date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Perusahaan penerbit/ Issuer Company	Nilai pokok/ Principal amount	Nilai wajar/ Fair value	
				Rp	Rp	
<b>Rupiah</b>						
<i>Reksadana/Mutual funds</i>						
Pihak berelasi/Related party						
Mandiri Protected Dynamic Seri 2	idAA+	18 Jul/Jul 2013	27 Jun/Jun 2014	PT Mandiri Manajemen Investasi	50.196.875.000	50.307.308.124
Mandiri Protected Dynamic Seri 9	idAA+	9 Okt/Oct 2013	14 Jul/Jul 2014	PT Mandiri Manajemen Investasi	50.030.000.000	50.927.538.200
Pihak ketiga/Third party						
CIMB Principal CPF CB IX	idAA	3 Jun/Jun 2013	31 Mar/Mar 2014	PT CIMB Principal Asset Management	101.380.000.000	99.961.693.800
<i>Obligasi/Bonds</i>						
Pihak berelasi/Related party						
Jasa Marga 2013	idAA	28 Okt/Oct 2013	27 Sep/Sep 2014	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	50.325.700.000	54.490.000.000
Pihak ketiga/Third party						
Adira 2013	idAA+	23 Okt/Oct 2013	24 Okt/Oct 2014	PT Adira Dinamika Multi Finance	50.000.000.000	49.700.000.000
				<u>301.932.575.000</u>	<u>305.386.540.124</u>	
<b>Dolar Amerika Serikat/U.S. Dollar</b>						
<i>Obligasi /Bonds</i>						
Pihak ketiga/Third party						
Tower Bersama	BB /AA-*)	3 Apr/Apr 2013	3 Apr/Apr 2018	PT Tower Bersama Infrastructure	60.945.000.000	N/A
<b>Jumlah</b>				<u>362.877.575.000</u>		

31 Desember/December 31, 2012						
Peringkat/ Rating	Tanggal pembelian/ Purchase date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Perusahaan penerbit/ Issuer Company	Nilai pokok/ Principal amount	Nilai wajar/ Fair value	
				Rp	Rp	
<b>Rupiah</b>						
<i>Reksadana/Mutual funds</i>						
Pihak berelasi/Related party						
Mandiri Protected Dynamic Seri 10	idAA+	27 Des/Dec 2012	22 Okt/Oct 2013	PT Mandiri Manajemen Investasi	101.425.500.000	101.977.254.720
Pihak ketiga/Third party						
CIMB Principal CPF CB VII-MN	idAA	25 Okt/Oct 2012	7 Okt/Oct 2013	PT CIMB Principal Asset Management	50.260.187.500	50.509.478.030
				<u>151.685.687.500</u>	<u>152.486.732.750</u>	

\*) Peringkat BB berdasarkan hasil pemeringkatan internasional yang diterbitkan di Bursa Efek Singapura. Peringkat AA- untuk penyetaraan dengan peringkat lokal.

\*) BB rating for international rating issued in Singapore Stock Exchange. AA- rating represents the local rating equivalent.

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
 31 DESEMBER 2013 - Lanjutan

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
 FOR THE YEAR ENDED  
 DECEMBER 31, 2013 - Continued

	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012	
Tingkat bunga/dividen per tahun			Average interest rate/dividend per annum
Rupiah	6,75% - 9,15%	5,75% - 5,80%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	4,625%	-	U.S. Dollar
Obligasi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) memiliki nilai nominal USD 5.000.000.			PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) Bonds have nominal value of USD 5,000,000.
Tidak terdapat surat berharga yang mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.			There were no impaired marketable securities as of December 31, 2013 and 2012.
Nilai wajar reksadana ditetapkan berdasarkan nilai aset bersih dari masing-masing reksadana yang dipublikasikan oleh manajer investasi. Nilai wajar obligasi ditetapkan berdasarkan harga yang dipublikasikan secara rutin dan berasal dari sumber yang terpercaya pada tanggal laporan posisi keuangan.			The fair value of mutual fund is determined based on its net asset value published by the investment manager. The fair value of bonds is determined based on quoted market prices at the statement of financial position date from credible sources.
Pada tanggal 7 dan 22 Oktober 2013, Perusahaan telah menerima pendapatan dari investasi yang jatuh tempo atas reksadana CIMB Principal CPF CB VII-MN dan Mandiri Protected Dynamic Seri 10.			On October 7 and 22, 2013, the Company received the proceeds on maturity of the investments in CIMB Principal CPF CB VII-MN and Mandiri Protected Dynamic Seri 10 mutual funds.
<b>7. PINJAMAN DIBERIKAN</b>			<b>7. LOANS</b>
Pinjaman diberikan berdasarkan mata uang dan jenis kredit.			Loans based on currency and type of loans.
	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012	
	Rp	Rp	
Rupiah - Pihak ketiga			Rupiah - Third party
Investasi	99.350.512.713	-	Investment
Modal kerja	160.000.000.000	-	Working capital
Jumlah	<u>259.350.512.713</u>	<u>-</u>	Total
Dolar Amerika Serikat - Pihak berelasi			U.S. Dollar - Related party
Modal kerja	60.945.000.000	-	Working capital
Dolar Amerika Serikat - Pihak ketiga			U.S. Dollar - Third party
Investasi	556.061.376.413	-	Investment
Modal kerja	119.057.803.940	-	Working capital
Jumlah	<u>675.119.180.353</u>	<u>-</u>	Total
Jumlah	995.414.693.066	-	Total
Ditambah (dikurangi):			Add (less):
Piutang bunga	4.958.280.799	-	Accrued interest
Biaya transaksi dan fee belum diamortisasi	(6.884.408.624)	-	Unamortised transaction costs and fee
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.184.279.997)	-	Allowance for impairment losses
Bersih	<u>990.304.285.244</u>	<u>-</u>	Net

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
 31 DESEMBER 2013 - Lanjutan

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
 FOR THE YEAR ENDED  
 DECEMBER 31, 2013 - Continued

Tabel dibawah meringkas pinjaman diberikan yang tidak diturunkan nilainya secara individual tetapi ditelaah untuk penurunan nilai atas dasar kolektif:

The table below summarizes the loans that are not individually impaired but were assessed for impairment on a collective basis:

	31 Desember/December 31, 2013		
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Unimpaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/Total
	Rp	Rp	
Rupiah - Pihak ketiga			
Jalan tol	99.350.512.713	-	99.350.512.713
Telekomunikasi	160.000.000.000	-	160.000.000.000
Jumlah	259.350.512.713	-	259.350.512.713
Dolar Amerika Serikat -			
Pihak berelasi			
Pemeliharaan pesawat	60.945.000.000	-	60.945.000.000
Dolar Amerika Serikat -			
Pihak ketiga			
Telekomunikasi	449.572.175.929	-	449.572.175.929
Energi	225.547.004.424	-	225.547.004.424
Jumlah	675.119.180.353	-	675.119.180.353
Jumlah	995.414.693.066	-	995.414.693.066
Ditambah (dikurangi):			
Piutang bunga	4.958.280.799	-	4.958.280.799
Biaya dan fee transaksi belum diamortisasi	(6.884.408.624)	-	(6.884.408.624)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.184.279.997)	-	(3.184.279.997)
Bersih	990.304.285.244	-	990.304.285.244

Pinjaman diberikan berdasarkan jangka waktu:

Loans based on credit term:

	31 Desember/ December 31, 2013	
	Rp	
Rupiah - Pihak ketiga		
2 - 5 tahun	160.000.000.000	Rupiah - Third party
Lebih dari 5 tahun	99.350.512.713	2 - 5 years
Jumlah	259.350.512.713	More than 5 years
		Total
Dolar Amerika Serikat - Pihak berelasi		
1 - 2 tahun	60.945.000.000	U.S. Dollar - Related party
		1 - 2 years
Dolar Amerika Serikat - Pihak ketiga		
<2 - 5 tahun	449.572.175.929	U.S. Dollar - Third party
Lebih dari 5 tahun	225.547.004.424	<2 - 5 years
Jumlah	675.119.180.353	More than 5 years
		Total
Jumlah	995.414.693.066	
Ditambah (dikurangi):		
Piutang bunga	4.958.280.799	Add (less):
Biaya dan fee transaksi belum diamortisasi	(6.884.408.624)	Accrued interest
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.184.279.997)	Unamortised transaction costs and fee
Bersih	990.304.285.244	Allowance for impairment losses
		Net

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
 31 DESEMBER 2013 - Lanjutan

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
 FOR THE YEAR ENDED  
 DECEMBER 31, 2013 - Continued

Pada tanggal 31 Desember 2013, tidak terdapat pinjaman diberikan yang jatuh tempo tetapi tidak dicadangkan.

Pada tahun 2013, terdapat kenaikan atas pinjaman yang diberikan yang berasal dari kapitalisasi bunga sebesar Rp 3.940.053.364

Mutasi penyisihan penurunan nilai:

	31 Desember/ December 31, 2013	
	Rp	
Saldo awal	-	Beginning balance
Penyisihan selama tahun berjalan	3.101.982.507	Provision for the year
Efek selisih kurs	<u>82.297.490</u>	Foreign exchange effect
Saldo akhir	<u>3.184.279.997</u>	Ending balance

Perusahaan menghitung penyisihan atas penurunan nilai berdasarkan penilaian secara kolektif.

Pada tanggal 31 Desember 2013, kualitas kredit seluruh pinjaman diberikan di atas memiliki kategori lancar. Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman diberikan telah memadai untuk menutupi potensi kerugian.

Komitmen kredit

Rincian komitmen kredit yang diberikan kepada debitur adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2013, there are no past due but unimpaired loans.

In 2013, there is increase in loans from capitalized interest amounting to Rp 3,940,053,364.

Movement of allowance for impairment losses:

The Company provides allowance for impairment losses based on collective assessment.

As of December 31, 2013, credit qualities of all loans are classified as current. Management believes the allowance for impairment losses on loans is sufficient to cover the possible losses.

Loan commitment

Details of loan commitment to the debtors are as follows:

	31 Desember/December 31, 2013			
	Komitmen yang sudah dicairkan/ <i>Commitment drawdown</i>	Komitmen yang belum dicairkan/ <i>Commitment undrawdown</i>	Jumlah/Total	
	Rp	Rp		
Rupiah - Pihak ketiga				
Jalan tol	99.350.512.713	400.649.487.287	500.000.000.000	Rupiah - Third party
Telekomunikasi	160.000.000.000	240.000.000.000	400.000.000.000	Toll road
Pengolahan air	-	282.000.000.000	282.000.000.000	Telecommunication
Jumlah	<u>259.350.512.713</u>	<u>922.649.487.287</u>	<u>1.182.000.000.000</u>	Water treatment
				Total
Dolar Amerika Serikat -				U.S. Dollar -
Pihak berelasi				Related party
Pemeliharaan pesawat	<u>60.945.000.000</u>	-	<u>60.945.000.000</u>	Aircraft maintenance
Dolar Amerika Serikat -				U.S. Dollar -
Pihak ketiga				Third party
Telekomunikasi	449.572.175.929	18.228.813.564	467.800.989.493	Telecommunication
Energi	225.547.004.424	554.548.995.576	780.096.000.000	Power
Jumlah	<u>675.119.180.353</u>	<u>572.777.809.140</u>	<u>1.247.896.989.493</u>	Total
Jumlah	<u>995.414.693.066</u>	<u>1.495.427.296.427</u>	<u>2.490.841.989.493</u>	Total

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
 31 DESEMBER 2013 - Lanjutan

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
 FOR THE YEAR ENDED  
 DECEMBER 31, 2013 - Continued

Termasuk dalam jumlah komitmen di atas adalah kapitalisasi bunga dalam masa konstruksi (IDC) sebesar Rp 73.863.636.364 dan US\$ 1.250.000.

Pinjaman diberikan oleh Perusahaan memiliki tingkat bunga mengambang dengan suku bunga rata-rata di tahun 2013 sebesar 10,35% per tahun untuk pinjaman dalam Rupiah dan 4,10% per tahun untuk pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat.

Pinjaman diberikan pada umumnya dijamin dengan agunan berupa salah satu atau kombinasi dari aktiva tetap, saham, mesin atau peralatan, piutang, rekening bank, jaminan perusahaan atau personal dan jaminan lain yang relevan, serta pengikatan secara hak tanggungan, gadai atau fidusia. Pada beberapa debitur, pemberian pinjaman diberikan secara sindikasi atau *club deal* dengan melibatkan minimal dua kreditur. Dalam hal ini, agunan yang diterima dilakukan pengikatan secara *pari passu* sesuai proporsional dengan nilai fasilitas yang diberikan.

The total commitment above includes capitalized interest during construction (IDC) amounting to Rp 73,863,636,364 and US\$ 1,250,000.

The Company disbursed the loans at floating rates whereby the average interest rates in 2013 are 10.35% per annum for Rupiah loans and 4.10% per annum for U.S. Dollar loans.

Loans are generally secured by collateral in the form of one or a combination of fixed assets, shares, machinery or equipment, accounts receivable, bank accounts, personal and corporate guarantees, or other relevant guarantees as well as a binding mortgage, lien or fiduciary. For some debtors, the loans are syndicated loans or club deal involving at least two creditors. In this case, the collateral received is in accordance the Company's portion on the syndicated loan provided to the debtor.

**8. PIUTANG BUNGA**

	31 Desember/ December 31, 2013	Rp	31 Desember/ December 31, 2012	Rp
Deposito berjangka	3.699.118.354		2.311.876.367	Time deposit
Surat berharga	405.972.075		-	Marketable securities
Jumlah	<u>4.105.090.429</u>		<u>2.311.876.367</u>	Total

**9. BEBAN DIBAYAR DIMUKA**

	31 Desember/ December 31, 2013	Rp	31 Desember/ December 31, 2012	Rp
Sewa dan pemeliharaan	815.785.986		673.129.984	Rent and service charge
Asuransi	557.605.058		502.300.716	Insurance
Lainnya	734.130.314		753.958.510	Others
Jumlah	<u>2.107.521.358</u>		<u>1.929.389.210</u>	Total

**8. ACCRUED INTEREST RECEIVABLES**

**9. PREPAID EXPENSES**

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
 31 DESEMBER 2013 - Lanjutan

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
 FOR THE YEAR ENDED  
 DECEMBER 31, 2013 - Continued

**10. ASET TETAP**

**10. PROPERTY AND EQUIPMENT**

	1 Januari/ January 1, 2013	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	31 Desember/ December 31, 2013	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Cost
Harga Perolehan					Akumulasi Penyusutan
Kendaraan	2.629.100.000	469.959.091	-	3.099.059.091	Vehicles
Komputer	692.892.371	249.880.450	-	942.772.821	Computer
Peralatan kantor	90.960.000	32.517.000	-	123.477.000	Office equipment
Peralatan dan perabotan kantor	2.790.387.049	273.638.297	-	3.064.025.346	Office furniture and fixtures
Jumlah	<u>6.203.339.420</u>	<u>1.025.994.838</u>	<u>-</u>	<u>7.229.334.258</u>	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated depreciation
Kendaraan	1.294.827.083	706.229.072	-	2.001.056.155	Vehicles
Komputer	201.022.645	205.958.706	-	406.981.351	Computer
Peralatan kantor	26.483.095	28.942.125	-	55.425.220	Office equipment
Peralatan dan perabotan kantor	1.102.867.783	753.233.865	-	1.856.101.648	Office furniture and fixtures
Jumlah	<u>2.625.200.606</u>	<u>1.694.363.768</u>	<u>-</u>	<u>4.319.564.374</u>	Total
Jumlah tercatat	<u><u>3.578.138.814</u></u>			<u><u>2.909.769.884</u></u>	Net carrying value
	1 Januari/ January 1, 2012	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	31 Desember/ December 31, 2012	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Cost
Harga Perolehan					Akumulasi Penyusutan
Kendaraan	2.106.400.000	522.700.000	-	2.629.100.000	Vehicles
Komputer	335.299.872	357.592.499	-	692.892.371	Computer
Peralatan kantor	51.310.000	39.650.000	-	90.960.000	Office equipment
Peralatan dan perabotan kantor	2.021.026.650	769.360.399	-	2.790.387.049	Office furniture and fixtures
Jumlah	<u>4.514.036.522</u>	<u>1.689.302.898</u>	<u>-</u>	<u>6.203.339.420</u>	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated depreciation
Kendaraan	702.133.332	592.693.751	-	1.294.827.083	Vehicles
Komputer	73.054.252	127.968.393	-	201.022.645	Computer
Peralatan kantor	7.768.547	18.714.548	-	26.483.095	Office equipment
Peralatan dan perabotan kantor	470.251.046	632.616.737	-	1.102.867.783	Office furniture and fixtures
Jumlah	<u>1.253.207.177</u>	<u>1.371.993.429</u>	<u>-</u>	<u>2.625.200.606</u>	Total
Jumlah tercatat	<u><u>3.260.829.345</u></u>			<u><u>3.578.138.814</u></u>	Net carrying value

Penyusutan aset tetap dicatat sebagai bagian dari beban umum dan administrasi (Catatan 22).

Pada tanggal 31 Desember 2013, aset tetap telah diasuransikan kepada PT Chartis Insurance Indonesia dan PT Asuransi Central Asia terhadap risiko kerugian dan kehilangan dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 4.695.832.238. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Depreciation of property and equipment is charged to general and administrative expenses (Note 22).

At December 31, 2013, property and equipment were insured with PT Chartis Insurance Indonesia and PT Asuransi Central Asia against damage and loss risks with sum insured of Rp 4,695,832,238. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
 31 DESEMBER 2013 - Lanjutan

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
 FOR THE YEAR ENDED  
 DECEMBER 31, 2013 - Continued

**11. BEBAN TANGGUHAN**

Beban tangguhan merupakan biaya transaksi yang dibayarkan kepada pihak ketiga berkaitan dengan proses pemberian kredit. Biaya transaksi akan disajikan sebagai bagian dari pinjaman yang diberikan dan diamortisasi ketika pinjaman tersebut disalurkan kepada debitur.

**11. DEFERRED CHARGES**

Deferred charges represent transaction costs paid to third parties in relation to the processing of the loan. The transaction cost will be presented as part of the loan and amortised when the loan is disbursed to the debtors.

**12. ASET LAIN-LAIN**

	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
	Rp	Rp
Perangkat lunak komputer - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 538.294.615 tahun 2013 dan Rp 37.861.368 tahun 2012	1.833.586.054	1.779.484.301
Lain-lain	<u>703.099.272</u>	<u>609.195.657</u>
<b>Saldo akhir</b>	<b><u>2.536.685.326</u></b>	<b><u>2.388.679.958</u></b>

**13. UTANG LAIN-LAIN**

	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
	Rp	Rp
Phak berelasi		
Jasa profesional	1.489.455.454	1.181.641.992
Phak ketiga		
Jasa profesional	70.568.693	383.764.476
Pemeliharaan gedung	25.722.221	14.107.823
Lainnya	<u>147.755.842</u>	<u>93.368.389</u>
Jumlah	<u>244.046.756</u>	<u>491.240.688</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>1.733.502.210</u></b>	<b><u>1.672.882.680</u></b>

Utang lain-lain kepada pihak berelasi merupakan tagihan atas jasa *advisory* yang diberikan oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation kepada Perusahaan.

**13. OTHER PAYABLES**

	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
	Rp	Rp
Related parties		
Professional services		
Third parties		
Professional services		
Building maintenance		
Others		
Total		
Total		

Other payable to related party represents advisory services rendered by Sumitomo Mitsui Banking Corporation to the Company.

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
 31 DESEMBER 2013 - Lanjutan

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
 FOR THE YEAR ENDED  
 DECEMBER 31, 2013 - Continued

**14. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR DAN LIABILITAS LAIN-LAIN**

	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012	
	Rp	Rp	
Bonus dan insentif	12.108.662.908	4.607.160.396	Bonus and incentives
Biaya jasa profesional	4.661.428.475	1.727.846.241	Professional fee expense
Cadangan tunjangan	447.975.686	1.181.259.877	Benefits provision
Beban komitmen	129.326.387	439.956.411	Commitment fee
Remunerasi dan operasional			Remuneration and operational expense
Dewan Komisaris	108.657.021	1.756.266.450	of Board of Commissioners
Perangkat lunak komputer	-	355.807.161	Computer software
Lain-lain	320.784.848	94.132.834	Others
Jumlah	<u>17.776.835.325</u>	<u>10.162.429.370</u>	Total

**15. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA**

Pendapatan diterima dimuka merupakan upfront fee yang diterima berkaitan dengan fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur yang disajikan sebagai bagian dari pinjaman diberikan dan diamortisasi ketika pinjaman disalurkan kepada debitur.

**15. UNEARNED REVENUE**

Unearned revenue represents upfront fee received in relation to credit facility provided to debtors which will be presented as part of the loan and amortized when the loans is disbursed to the debtors.

**16. PINJAMAN SUBORDINASI**

	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012	
	Rp	Rp	
Asian Development Bank	1.153.138.650.729	687.865.983.070	Asian Development Bank
World Bank	<u>877.608.000.000</u>	<u>96.700.000.000</u>	World Bank
	2.030.746.650.729	784.565.983.070	
Beban bunga masih harus dibayar	8.135.610.580	733.523.775	Accrued interest expenses
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(7.018.237.942)	(6.949.740.802)	Unamortized transaction costs
Jumlah	<u>2.031.864.023.367</u>	<u>778.349.766.043</u>	Total

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman subordinasi dari SMI yang merupakan pinjaman penerusan dengan jumlah masing-masing sebesar USD 100.000.000 dari Asian Development Bank (ADB) dan World Bank (WB) (Catatan 28).

Pada tanggal 31 Desember 2013, pokok pinjaman yang sudah ditarik dari fasilitas pinjaman subordinasi masing-masing sebesar USD 94.604.861 dari ADB dan USD 72.000.000 dari WB.

The Company obtained subordinated loan facilities from SMI which represents channeling facilities amounting to USD 100,000,000 each from Asian Development Bank (ADB) and World Bank (WB) (Note 28).

As of December 31, 2013, principal loan drawdown from the subordinated loan facilities amounted to USD 94,604,861 and USD 72,000,000 from ADB and WB, respectively.

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
 31 DESEMBER 2013 - Lanjutan

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
 FOR THE YEAR ENDED  
 DECEMBER 31, 2013 - Continued

Rincian penarikan atas fasilitas pinjaman subordinasi dari ADB adalah sebagai berikut:

Detail drawdown of subordinated loan facilities from ADB is as follows:

	Tanggal/Date	Jumlah/Amount	
		USD	
Penarikan 1	13 Desember/ December 13, 2012	71.134.021	1st draw down
Penarikan 2	13 Nopember/ November 13, 2013	16.732.954	2nd draw down
Penarikan 3	19 Nopember/ November 19, 2013	337.886	3rd draw down
Penarikan 4	6 Desember/ December 6, 2013	<u>6.400.000</u>	4th draw down
Jumlah		<u>94.604.861</u>	Total

Rincian penarikan atas fasilitas pinjaman subordinasi dari WB adalah sebagai berikut:

Detail drawdown of subordinated loan facilities from WB is as follows:

	Tanggal/Date	Jumlah/Amount	
		USD	
Penarikan 1	21 Desember/ December 21, 2012	10.000.000	1st draw down
Penarikan 2	12 Juli/July 12, 2013	40.000.000	2nd draw down
Penarikan 3	3 Desember/ December 3, 2013	<u>22.000.000</u>	3rd draw down
Jumlah		<u>72.000.000</u>	Total

Pinjaman subordinasi dari SMI yang merupakan pinjaman penerusan dari ADB memiliki tingkat bunga LIBOR 6 bulan + 1,45% per tahun yang dibayarkan setiap enam bulanan pada tanggal 1 Maret dan 1 September. Pembayaran pokok pinjaman yang pertama dilakukan pada tanggal 1 September 2014 dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2034.

Pinjaman subordinasi dari SMI yang merupakan pinjaman penerusan dari WB memiliki tingkat bunga LIBOR 6 bulan + 1,52% per tahun yang dibayarkan setiap enam bulanan pada tanggal 1 Mei dan 1 November. Pembayaran pokok pinjaman yang pertama dilakukan pada tanggal 1 Nopember 2018 dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Nopember 2033.

Dalam Perjanjian Pinjaman Subordinasi, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi persyaratan berikut, di antaranya menjaga persyaratan rasio lancar sebesar 1,2 dan persyaratan kecukupan modal (*capital adequacy ratio*) sebesar 12%.

The subordinated loan facility from SMI, which represents the channeling from ADB, bears an interest rate of LIBOR 6 months + 1.45% per annum payable semiannually on 1 March and 1 September. The first repayment installment of the loan's principal will commence on September 1, 2014 and will mature on March 1, 2034.

The subordinated loan facility from SMI, which represents the channeling from WB, bears an interest rate of LIBOR 6 months + 1.52% per annum payable semiannually on 1 May and 1 November. The first repayment installment of the loan's principal will commence on November 1, 2018 and will mature on November 1, 2033.

According to the Subordinated Loan Agreement, the Company must satisfy certain financial ratios, which include among others, maintaining a current ratio of 1.2 and a capital adequacy ratio of 12%.

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
 31 DESEMBER 2013 - Lanjutan

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
 FOR THE YEAR ENDED  
 DECEMBER 31, 2013 - Continued

Selain itu, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari SMI, Perusahaan tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut, di antaranya:

1. Menjamin atau bertanggung jawab atas kewajiban utang, baik kontingen atau dengan cara lain kecuali merupakan bagian dari kegiatan usaha normal Perusahaan dan tetap memenuhi persyaratan rasio *leverage* yang ditetapkan.
2. Mengubah tahun fiskal.
3. Melakukan penggabungan, pemisahan (*spin off*), konsolidasi atau reorganisasi.
4. Membayar kembali atau membayar dimuka, membeli, menebus, mengganti atau melepaskan diri dari kewajiban utang apapun selain sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kredit.
5. Melakukan tindakan yang akan menyebabkan *money laundering* (pencucian uang) dan *financing of terrorism* (pembiayaan terorisme), penipuan, atau tindakan korupsi dan praktik ilegal lainnya.
6. Menimbulkan utang subordinasi apapun, jika setelah timbulnya utang subordinasi tersebut rasio utang subordinasi terhadap ekuitas akan lebih besar dari 2,5 berbanding 1.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Perusahaan telah memenuhi ketentuan batas minimum rasio lancar sebesar 1,2 dan rasio kecukupan modal minimum sebesar 12%.

Periode penarikan fasilitas pinjaman subordinasi dari WB dan ADB telah diperpanjang dari sebelumnya tanggal 31 Desember 2013 menjadi masing-masing 30 Nopember 2015 dan 31 Desember 2014.

#### 17. MODAL SAHAM

Nama pemegang saham/ <i>Name of Shareholders</i>
PT Sarana Multi Infrastruktur
Asian Development Bank
DEG - Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH
International Finance Corporation
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Jumlah/ <i>Total</i>

In addition, unless prior written consent of SMI is obtained, the Company is not allowed to carry-out the following, amongst others:

1. Guarantee or become liable with respect to any indebtedness, whether contingent or otherwise, unless it is in the ordinary course of the Company's business and in compliance with the leverage ratio requirements.
2. Change its financial year.
3. Undertake any merger, spin off, consolidation or reorganization.
4. Repay or prepay, purchase, redeem, reimburse or discharge any of its indebtedness other than in accordance with the provisions of the Loan Agreement.
5. Commit to any act that will cause money laundering, financing of terrorism, fraud, or other corrupt or illegal practices.
6. Incur any subordinated debt, if after the incurrence of such subordinated debt the ratio of subordinated debt to equity shall be greater than 2.5 to 1.

As of December 31, 2013 and 2012, the Company has complied with the minimum current ratio of 1.2 and capital adequacy ratio of 12%.

The availability period of the subordinated loans from WB and ADB has been extended from initially 31 December 2013 to become 30 November 2015 and 31 December 2014, respectively.

#### 17. CAPITAL STOCK

31 Desember/December 31, 2013 dan/and 2012		
Jumlah saham/ <i>Number of Shares</i>	Percentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
	%	Rp
403.000	34,29	403.000.000.000
199.000	16,94	199.000.000.000
199.000	16,94	199.000.000.000
199.000	16,94	199.000.000.000
175.000	14,89	175.000.000.000
<b>1.175.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.175.000.000.000</b>

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
 31 DESEMBER 2013 - Lanjutan

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
 FOR THE YEAR ENDED  
 DECEMBER 31, 2013 - Continued

Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 7 Maret 2012 yang dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., Mkn., notaris di Jakarta, para Pemegang Saham Perusahaan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 1.000.000.000.000 menjadi Rp 1.175.000.000.000 yang tambahannya diambil dan disetor seluruhnya oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) sebesar Rp 192.500.000.000 termasuk agio sebesar Rp 17.500.000.000.

**18. UANG MUKA MODAL SAHAM DIPESAN**

Berdasarkan Akta No. 10 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., Mkn., notaris di Jakarta, para pemegang Saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 1.175.000.000.000 menjadi Rp 1.770.868.000.000 yang diambil dan disetor seluruhnya oleh para pemegang Saham.

Dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut, pada bulan Desember 2013, masing-masing pemegang saham telah melakukan pemesanan dan setoran modal tambahan sebagai berikut:

Nama pemegang saham/Name of Shareholders	Jumlah saham/ Number of Shares	Jumlah saham dipesan/ Capital subscribed	Tambahan modal disetor/ Additional paid in capital	Jumlah/ Total
		Rp	Rp	Rp
PT Sarana Multi Infrastruktur	197.000	197.000.000.000	-	197.000.000.000
Asian Development Bank	155.044	155.044.000.000	-	155.044.000.000
International Finance Corporation	155.044	155.044.000.000	-	155.044.000.000
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	88.780	88.780.000.000	8.878.000.000	97.658.000.000
Jumlah/Total	595.868	595.868.000.000	8.878.000.000	604.746.000.000

Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan telah menerima seluruh pesanan tambahan setoran modal. Perubahan ini diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Januari 2014, oleh karena itu, setoran modal ini dicatat sebagai Uang Muka Modal Saham Dipesan.

Based on Notarial Deed No. 3 dated March 7, 2012 of Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., Mkn., notary in Jakarta, the Shareholders of the Company had agreed to increase the issued and paid-up capital from Rp 1,000,000,000,000 to Rp 1,175,000,000,000 in which all additional shares have been subscribed to and fully paid by Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) amounting to Rp 192,500,000,000 which included a premium (additional paid-in capital) of Rp 17,500,000,000.

**18. ADVANCES FOR CAPITAL STOCK SUBSCRIPTION**

Based on Notarial Deed No. 10 dated December 20, 2013 of Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., Mkn., notary in Jakarta, the shareholders had agreed to increase the issued and paid-up capital from Rp 1,175,000,000,000 to Rp 1,770,868,000,000 in which all of shares have been subscribed to and fully paid by the shareholders.

With the increase in the issued and paid capital above, in December 2013, each shareholders have subscribed to and paid additional capital as follows:

Nama pemegang saham/Name of Shareholders	Jumlah saham/ Number of Shares	Jumlah saham dipesan/ Capital subscribed	Tambahan modal disetor/ Additional paid in capital	Jumlah/ Total
		Rp	Rp	Rp
PT Sarana Multi Infrastruktur	197.000	197.000.000.000	-	197.000.000.000
Asian Development Bank	155.044	155.044.000.000	-	155.044.000.000
International Finance Corporation	155.044	155.044.000.000	-	155.044.000.000
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	88.780	88.780.000.000	8.878.000.000	97.658.000.000
Jumlah/Total	595.868	595.868.000.000	8.878.000.000	604.746.000.000

As of December 31, 2013, the Company had received payments for all additional capital stock subscription. The changes received by the Minister of Law and Human Rights on January 10, 2014, accordingly, the additional capital stock was recorded as Advances for Capital Stock Subscription.

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
 31 DESEMBER 2013 - Lanjutan

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
 FOR THE YEAR ENDED  
 DECEMBER 31, 2013 - Continued

Susunan pemegang saham Perusahaan setelah penambahan modal disetor di atas adalah sebagai berikut:

Detail of the Company's shareholders after increase in paid-up capital above is as follows:

Nama pemegang saham/ <i>Name of Shareholders</i>	Jumlah saham/ <i>Number of Shares</i>	Percentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
		%	Rp
PT Sarana Multi Infrastruktur	600.000	33,88%	600.000.000.000
Asian Development Bank	354.044	19,99%	354.044.000.000
International Finance Corporation	354.044	19,99%	354.044.000.000
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	263.780	14,90%	263.780.000.000
DEG - Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH	199.000	11,24%	199.000.000.000
Jumlah/Total	1.770.868	100,00%	1.770.868.000.000

19. PENGHASILAN INVESTASI

19. INVESTMENT INCOME

	2013 Rp	2012 Rp	
Pendapatan bunga pinjaman diberikan	17.465.136.599	-	Interest income from loans
Pendapatan bunga deposito berjangka dan obligasi	71.266.633.053	61.592.554.062	Interest income from time deposits and bonds
Pendapatan bunga giro	13.260.916.794	2.000.494.303	Interest income from current account
Jumlah pendapatan bunga aset keuangan yang tidak diklasifikasikan dalam FVTPL	101.992.686.446	63.593.048.365	Total interest income on financial assets not designated as FVTPL
 Pendapatan dari unit penyertaan reksadana dan obligasi yang diklasifikasikan dalam FVTPL	 17.137.730.973	 983.376.528	 Income from investment in mutual funds and bonds designated as FVTPL
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar surat berharga - bersih	(837.597.085)	801.045.250	Unrealized (loss) gain on changes in fair value of marketable securities - net
Jumlah	118.292.820.334	65.377.470.143	Total

20. PENDAPATAN PROVISI DAN KOMISI

20. PROVISION AND COMMISSION INCOME

Pendapatan provisi dan komisi berasal dari jasa yang dilaksanakan berkaitan dengan pinjaman diberikan.

Provision and commission income represents services provided in relation to the loans disbursements.

21. PENDAPATAN JASA ADVISORY

21. ADVISORY INCOME

Pendapatan jasa advisory merupakan pendapatan dari jasa advisory yang diberikan kepada klien Perusahaan.

Advisory income represents income from advisory services provided by the Company to its customers.

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
 31 DESEMBER 2013 - Lanjutan

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
 FOR THE YEAR ENDED  
 DECEMBER 31, 2013 - Continued

**22. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

**22. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSE**

	2013	2012	
	Rp	Rp	
Gaji dan tunjangan	51.121.876.365	30.085.071.837	Salaries and benefits
Sewa	2.600.309.552	2.062.996.693	Rent
Akomodasi dan transportasi	2.413.702.939	1.688.408.767	Accommodation and transportation
Imbalan kerja (Catatan 25)	2.265.540.533	909.537.951	Employee benefits (Note 25)
Penyusutan dan amortisasi (Catatan 10 dan 12)	2.194.797.015	1.409.854.797	Depreciation and amortisation (Notes 10 and 12)
Jasa profesional			Professional fee
- korporasi	1.733.275.138	6.172.526.182	- corporate
- transaksi investasi	814.770.045	3.167.573.943	- investment transaction
Asuransi	1.406.818.889	746.518.186	Insurance
Pelatihan dan seminar	784.869.489	176.388.457	Training and seminars
Perlengkapan kantor	705.299.644	500.578.164	Office supplies
Promosi dan komunikasi	559.557.045	1.365.996.854	Promotion and communication
Representasi	204.603.536	263.427.818	Representation
Lain-lain	32.385.640	1.221.618.599	Others
Jumlah	<u>66.837.805.830</u>	<u>49.770.498.248</u>	Total

**23. BEBAN BUNGA**

Beban bunga untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 merupakan bunga yang berkaitan dengan pinjaman subordinasi dari Asian Development Bank dan World Bank (Catatan 16).

**23. INTEREST EXPENSE**

Interest expense for the years ended December 31, 2013 and 2012 represents interest in relation to subordinated loans from Asian Development Bank and World Bank (Note 16).

**24. PAJAK PENGHASILAN**

a. Pajak dibayar dimuka

Pajak dibayar dimuka merupakan nilai bersih pajak pertambahan nilai (PPN).

**24. INCOME TAX**

a. Prepaid taxes

Prepaid tax represents Value Added Tax (VAT)-net.

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012	
	Rp	Rp	
Pajak penghasilan			Income taxes
Pasal 21	570.024.317	492.157.955	Article 21
Pasal 23	12.848.480	10.588.037	Article 23
Pasal 26	45.000.000	-	Article 26
Pasal 4 ayat 2	7.118.572	3.377.903	Article 4.2
Jumlah	<u>634.991.369</u>	<u>506.123.895</u>	Total

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
 31 DESEMBER 2013 - Lanjutan

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
 FOR THE YEAR ENDED  
 DECEMBER 31, 2013 - Continued

c. Pajak penghasilan

Pajak kini

Estimasi pajak penghasilan Perusahaan pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 terdiri dari manfaat pajak tangguhan dan pajak final sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp	
Pajak final	(18.087.609.094)	(12.792.149.970)	Final tax
Manfaat pajak tangguhan	12.280.946.007	11.862.443.269	Deferred tax benefit
Jumlah	<u>(5.806.663.087)</u>	<u>(929.706.701)</u>	Total

Perhitungan rugi fiskal Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2013 Rp	2012 Rp	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif	33.343.215.545	15.256.069.371	Income before tax per statements of comprehensive income
Perbedaan temporer:			Temporary differences:
Akrual bonus dan tunjangan	5.917.990.211	6.638.648.383	Accrued bonus and allowances
Penyisihan imbalan kerja karyawan	2.265.540.533	909.537.951	Provision for employee benefits
Penurunan/(kenaikan) yang belum direalisasi atas nilai wajar surat berharga yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi	710.334.876	(801.045.250)	Unrealized decrease/(increase) in fair value of securities categorised as fair value through profit or loss
Jumlah	<u>8.893.865.620</u>	<u>6.747.141.084</u>	Total
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			Non-deductible expenses (non-taxable income):
Pendapatan bunga	(101.665.280.820)	(64.576.424.893)	Interest income
Beban bunga	15.628.534.105	741.570.160	Interest expense
Lain-lain	3.569.747.140	1.930.057.536	Others
Jumlah	<u>(82.466.999.575)</u>	<u>(61.904.797.197)</u>	Total
Rugi fiskal tahun berjalan	(40.229.918.410)	(39.901.586.742)	Current year fiscal loss
Rugi fiskal tahun-tahun sebelumnya	(70.078.736.970)	(30.177.150.228)	Prior years' fiscal loss carryforward
Akumulasi rugi fiskal	<u>(110.308.655.380)</u>	<u>(70.078.736.970)</u>	Accumulated fiscal loss carryforward

c. Income tax

Current tax

The Company's estimated income tax for the years ended December 31, 2013 and 2012 represents deferred tax benefit and final tax as follows:

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
 31 DESEMBER 2013 - Lanjutan

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
 FOR THE YEAR ENDED  
 DECEMBER 31, 2013 - Continued

Pajak penghasilan yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain	Income tax recognized in other comprehensive income	
	2013	2012
	Rp	Rp
Manfaat (beban) yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain:		
Kenaikan nilai wajar surat berharga tersedia untuk dijual	(1.041.075.000)	-
Keuntungan (kerugian) aktuarial	(228.459.807)	28.226.222
Jumlah pajak penghasilan yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain	<u>(1.269.534.807)</u>	<u>28.226.222</u>
		Total income tax recognized in other comprehensive income

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 terdiri dari:

Deferred tax assets

Deferred tax assets as of December 31, 2013 and 2012 consists of the following:

	31 Desember/December 31, 2013			
	31 Desember/ December 31, 2012	Dikreditkan ke laporan laba rugi komprehensif/ Credited to statements of comprehensive income for the year	Dikreditkan ke laporan ekuitas/ Credited to equity for the year	31 Desember/ December 31, 2013
		Rp	Rp	Rp
Penyisihan bonus dan tunjangan	1.659.662.096	1.479.497.553	-	3.139.159.649
Kenaikan nilai wajar surat berharga tersedia untuk dijual	-	-	(1.041.075.000)	(1.041.075.000)
Penurunan nilai wajar surat berharga FVTPL	-	177.583.719	-	177.583.719
Penyisihan imbalan kerja	255.610.709	566.385.135	(228.459.807)	593.536.037
Rugi fiskal	<u>17.519.684.243</u>	<u>10.057.479.602</u>	-	<u>27.577.163.845</u>
Aset pajak tangguhan - bersih	<u>19.434.957.048</u>	<u>12.280.946.009</u>	<u>(1.269.534.807)</u>	<u>30.446.368.250</u>

Bonus and allowance provision

Increase in fair value of available for sale securities

Decrease in fair value of FVTPL securities

Employee benefits obligation

Fiscal loss

Deferred tax asset - net

	31 Desember/December 31, 2012			
	31 Desember/ December 31, 2011	Dikreditkan ke laporan laba rugi komprehensif/ Credited to statements of comprehensive income for the year	Dikreditkan ke laporan ekuitas/ Credited to equity for the year	31 Desember/ December 31, 2012
		Rp	Rp	Rp
Penyisihan bonus dan tunjangan	-	1.659.662.096	-	1.659.662.096
Penyisihan imbalan kerja	-	227.384.487	28.226.222	255.610.709
Rugi fiskal	<u>7.544.287.557</u>	<u>9.975.396.686</u>	-	<u>17.519.684.243</u>
Aset pajak tangguhan - bersih	<u>7.544.287.557</u>	<u>11.862.443.269</u>	<u>28.226.222</u>	<u>19.434.957.048</u>

Provision for bonus and allowance

Employee benefits obligation

Fiscal loss

Deferred tax asset - net

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
 31 DESEMBER 2013 - Lanjutan

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
 FOR THE YEAR ENDED  
 DECEMBER 31, 2013 - Continued

Pada tanggal 31 Desember 2013 manajemen berkeyakinan bahwa pendapatan kena pajak di masa depan akan dapat dikompensasikan terhadap akumulasi rugi fiskal sebesar Rp 110.308.655.380 yang terdiri dari:

As of December 31, 2013, management believes that probable future taxable profits will be available to utilize accumulated fiscal losses amounting to Rp 110,308,655,380 which consists of:

	Jumlah/Amount		Kadaluarsa/Expiry
	Rp		Tahun/Year
Tahun 2010	7.345.437.473	2015	Year 2010
Tahun 2011	22.831.712.755	2016	Year 2011
Tahun 2012	39.901.586.742	2017	Year 2012
Tahun 2013	<u>40.229.918.410</u>	2018	Year 2013
Jumlah	<u>110.308.655.380</u>		Total

Rekonsiliasi antara manfaat (beban) pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax benefit (expense) and the amounts computed by applying the effective tax rates to income before tax is as follows:

	2013	2012	
	Rp	Rp	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif	<u>33.343.215.545</u>	<u>15.256.069.371</u>	Income before tax per statements of comprehensive income
Pajak penghasilan dengan tarif pajak efektif	<u>(8.335.803.886)</u>	<u>(3.814.017.343)</u>	Income tax at effective tax rate
Pengaruh pajak atas (beban) manfaat yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			Tax effect of nontaxable income (non-deductible expenses):
Pendapatan bunga	25.416.320.205	16.144.106.223	Interest income
Beban bunga	(3.907.133.526)	(185.392.540)	Interest expense
Lain-lain	<u>(892.436.785)</u>	<u>(282.253.072)</u>	Others
Jumlah	<u>20.616.749.894</u>	<u>15.676.460.611</u>	Total
Jumlah Manfaat Pajak	<u>12.280.946.007</u>	<u>11.862.443.269</u>	Total Tax Benefit

## 25. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Perusahaan memiliki dua imbalan kerja karyawan yaitu imbalan pasca kerja dan imbalan cuti besar.

### Liabilitas imbalan pasca kerja

Perusahaan mengakui liabilitas imbalan pasca kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Pada tahun 2013 dan 2012, Perusahaan memiliki jumlah karyawan tetap masing-masing sebanyak 25 orang dan 19 orang, yang berhak atas manfaat ini.

## 25. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION

The Company has two employee benefit plans which are post-employment benefits and long service leave allowance.

### Post-employment benefits obligation

The Company recognizes post-employment benefits obligation based on Labor Law No. 13/2003. In 2013 and 2012, the Company had a total 25 and 19 permanent employees, respectively, who are qualified to this plan.

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
 31 DESEMBER 2013 - Lanjutan

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
 FOR THE YEAR ENDED  
 DECEMBER 31, 2013 - Continued

Beban liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui di laporan laba rugi pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2013	2012
	Rp	Rp
Beban jasa kini	1.774.656.007	898.462.991
Beban bunga	67.029.242	11.074.960
Beban jasa lalu	53.220.519	-
Jumlah	<u>1.894.905.768</u>	<u>909.537.951</u>

Amounts recognized in the profit and loss account in respect of the post-employment benefits are as follows:

Jumlah liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The amounts included in the statements of financial position arising from the Company's obligation in respect of this post-employment benefit are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
	Rp	Rp
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai	2.003.509.382	1.022.442.839
Liabilitas bersih	<u>2.003.509.382</u>	<u>1.022.442.839</u>

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

Movements in the present value obligation are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
	Rp	Rp
Saldo awal	1.022.442.839	-
Beban jasa kini	1.774.656.007	898.462.991
Beban bunga	67.029.242	11.074.960
Beban jasa lalu	53.220.519	-
(Keuntungan) kerugian aktuarial	(913.839.225)	112.904.888
Saldo akhir	<u>2.003.509.382</u>	<u>1.022.442.839</u>

Historis penyesuaian yang terjadi adalah sebagai berikut:

The history of experience adjustments is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
	Rp	Rp
Nilai kini liabilitas tidak didanai	30.223.309	41.866.643
Persentase penyesuaian	2,96%	2,09%

Present value of unfunded obligations  
 Percentage of experience

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
 31 DESEMBER 2013 - Lanjutan

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
 FOR THE YEAR ENDED  
 DECEMBER 31, 2013 - Continued

Imbalan cuti besar

Sejak 1 Januari 2013, Perusahaan memberikan cuti besar sebanyak 30 hari kerja kepada karyawan yang telah memiliki masa kerja 5 (lima) tahun dan setiap kelipatan 5 (lima) tahun. Cuti besar ini dapat diambil pada tahun ke enam. Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah karyawan yang berhak mendapatkan program ini adalah 25 orang.

	2013
	Rp
Beban jasa servis	257.088.418
Beban bunga	9.240.226
Beban jasa lalu	154.003.768
Keuntungan aktuarial	<u>(49.697.647)</u>
Jumlah	<u><u>370.634.765</u></u>

Jumlah liabilitas imbalan cuti besar yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2013
	Rp
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai	370.634.765
Liabilitas bersih	<u><u>370.634.765</u></u>

Beban liabilitas imbalan pasca kerja dan cuti besar di atas dihitung oleh aktuaria independen PT Padma Radya Aktuaria. Perhitungan aktuaria dilakukan dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	2013	2012	
Tingkat diskonto	9,00%	6,00%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	6,00%	6,00%	Salary increase rate
Tingkat kematian	100% TM12	100% TM12	Mortality rate
Tingkat Cacat	5% TM13	5% TM13	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	1% per tahun hingga usia 35 tahun dan menurun secara linier sampai dengan 0% pada usia 55/ 1% per annum until age 35 years old and decreased linearly to 0% at age 55	1% per tahun hingga usia 35 tahun dan menurun secara linier sampai dengan 0% pada usia 55/ 1% per annum until age 35 years old and decreased linearly to 0% at age 55	Resignation rate
Tingkat pensiun normal	100% pada usia pensiun normal/ 100% at normal retirement age	100% pada usia pensiun normal/ 100% at normal retirement age	Normal retirement rate
Umur pensiun dini	N/A	N/A	Early retirement age
Umur pensiun normal	55 tahun/ years old	55 tahun/ years old	Normal retirement age

Long service leave allowance

Since January 1, 2013, the Company provides long service leave program (30 working days) for employees who have reached 5 (five) consecutive years of service and further for every 5 (five) years of service period. This program can be taken on the sixth year. On December 31, 2013, the Company had total 25 permanent employees who are entitled to this program.

The amounts included in the statements of financial position arising from the Company's obligation in respect of long service leave allowance are as follows:

The cost of providing post employment benefit and long service leave allowance is calculated by independent actuary, PT Padma Radya Aktuaria. The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

26. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Berelasi

Pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) adalah pemegang saham terbesar yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- DEG - Deutsche Investition – Und Entwick Lungsgesellschaft mbH (DEG).
- Asian Development Bank (ADB).
- International Financial Corporation (IFC).
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).

Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia merupakan pihak berelasi.

Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

Tahun 2013:

- a. Pada bulan Desember 2013, Perusahaan mendapatkan tambahan modal baru dari SMI, ADB, IFC dan SMBC sejumlah Rp 595.868.000.000 (Catatan 18).
- b. Perusahaan melakukan penarikan pinjaman subordinasi dari SMI sejumlah USD 85.470.840 yang berasal dari penerusan pinjaman dari WB dan ADB masing-masing sebesar USD 62.000.000 dan USD 23.470.840 (Catatan 16).
- c. Perusahaan mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran beban komitmen dan bunga pinjaman subordinasi kepada SMI (Catatan 23).
- d. Perusahaan menempatkan deposito berjangka di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk dan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (Catatan 5).
- e. Perusahaan melakukan penempatan pada reksadana di PT Mandiri Manajemen Investasi, bagian dari grup PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan obligasi di PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Catatan 6).

26. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Nature of Relationship

The Company's shareholders are:

- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) is the Company's largest shareholder which is owned by the Government of the Republic Indonesia.
- DEG - Deutsche Investition – Und Entwick Lungsgesellschaft mbH (DEG).
- Asian Development Bank (ADB).
- International Financial Corporation (IFC).
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).

All entities owned or controlled by the Government of the Republic Indonesia are considered as related parties.

Transactions with Related Parties

The Company entered into certain transactions with related parties as follows:

Year 2013:

- a. In December 2013, the Company has received additional capital from SMI, ADB, IFC and SMBC totaling Rp 595,868,000,000 (Note 18).
- b. The Company has drawn subordinated loan from SMI totaling USD 85,470,840 which came from the step loan from WB and ADB of USD 62,000,000 and USD 23,470,840, respectively (Note 16).
- c. The Company has liability to pay commitment fee and interest on subordinated loans to SMI (Note 23).
- d. The Company placed time deposit with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk and PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (Note 5).
- e. The Company placed its funds in mutual funds of PT Mandiri Manajemen Investasi, which is part of group of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, and in corporate bond of PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Note 6).

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2013 - Lanjutan

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2013 - Continued

- f. Perusahaan memberikan pinjaman kepada PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia, grup PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sebesar US\$ 5.000.000 dengan suku bunga LIBOR+3,5% per tahun yang jatuh tempo pada Desember 2014 (Catatan 7).
- g. Perusahaan memiliki saldo utang dengan pihak berelasi sebagaimana disajikan dalam Catatan 13.

Tahun 2012:

- a. Transaksi peningkatan modal disetor yang dilakukan oleh SMBC (Catatan 17).
- b. Pada tanggal 28 November 2012 dan 14 Desember 2012, Perusahaan dan SMI menandatangani Perjanjian Perubahan terhadap masing-masing Perjanjian Pinjaman Subordinasi ADB dan World Bank tertanggal 20 April 2011 (Catatan 28).
- c. Pada bulan Desember 2012, Perusahaan melakukan penarikan pinjaman subordinasi dari SMI sejumlah USD 81.134.021 yang berasal dari penerusan pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) dan World Bank (WB) masing-masing sebesar USD 71.134.021 dan USD 10.000.000 (Catatan 16).
- d. Perusahaan mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran beban komitmen dan bunga pinjaman subordinasi kepada SMI.
- e. Perusahaan menempatkan deposito berjangka di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk dan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia.
- f. Perusahaan melakukan penempatan pada reksadana di PT Mandiri Manajemen Investasi, bagian dari grup PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, (Catatan 6).
- g. Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana disajikan dalam Catatan 13.

- f. The Company provided a loan to PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia, group of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, amounting to US\$ 5,000,000 with interest rate of LIBOR+3.5% per annum. The loan will become due for repayment in December 2014 (Note 7).
- g. The Company has an outstanding liability with related party as disclosed in Note 13.

Year 2012:

- a. Additional paid up capital which was paid by SMBC (Note 17).
- b. On November 28, 2012 and December 14, 2012, the Company and SMI had signed the Amendment Agreement to Subordinated Loan Agreement – ADB and World Bank dated April 20, 2011, respectively (Note 28).
- c. In December 2012, the Company has drawn subordinated loan from SMI totaling USD 81,134,021 which came from the step loans from Asian Development Bank (ADB) and World Bank (WB) amounting to USD 71,134,021 and USD 10,000,000, respectively (Note 16).
- d. The Company has liability to pay commitment fee and interest on subordinated loans to SMI.
- e. The Company placed time deposit in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk and PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia.
- f. The Company placed its funds in mutual funds of PT Mandiri Manajemen Investasi, part of group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Note 6.
- g. The Company conducted transaction with related party as disclosed in Note 13.

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
 31 DESEMBER 2013 - Lanjutan

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
 FOR THE YEAR ENDED  
 DECEMBER 31, 2013 - Continued

**27. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING**

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

	31 Desember/December 31, 2013	
	Dolar Amerika Serikat (jumlah penuh)/ U.S. Dollar (full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah Equivalent
Aset moneter		
Kas dan setara kas	103.084.851	1.256.501.251.400
Surat berharga	5.000.000	60.945.000.000
Pinjaman diberikan	60.725.747	740.186.134.483
Plutang bunga	77.644	946.404.301
Aset lain-lain	32.146	391.827.594
Jumlah aset moneter	<u>168.920.388</u>	<u>2.058.970.617.778</u>
Liabilitas moneter		
Beban masih harus dibayar	197.669	2.409.390.366
Pinjaman subordinasi	166.696.532	2.031.864.023.367
Utang lain-lain	1.994	24.310.924
Jumlah liabilitas moneter	<u>166.896.194</u>	<u>2.034.297.724.657</u>
Aset moneter bersih	<u>2.024.194</u>	<u>24.672.893.121</u>
	31 Desember/December 31, 2012	
	Dolar Amerika Serikat (jumlah penuh)/ U.S. Dollar (full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah Equivalent
Aset moneter		
Kas dan setara kas	81.209.634	785.297.165.423
Plutang usaha	22.000	212.740.000
Jumlah aset moneter	<u>81.231.634</u>	<u>785.509.905.423</u>
Liabilitas moneter		
Beban masih harus dibayar	304.260	2.942.197.945
Pinjaman subordinasi	80.491.186	778.349.766.043
Utang lain-lain	68	657.560
Jumlah liabilitas moneter	<u>80.795.514</u>	<u>781.292.621.548</u>
Liabilitas moneter bersih	<u>436.120</u>	<u>4.217.283.875</u>

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, kurs konversi 1 Dolar Amerika Serikat yang digunakan Perusahaan masing-masing adalah sebesar Rp 12.189 dan Rp 9.670.

**27. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES**

As of December 31, 2013 and 2012, monetary assets and liabilities in foreign currencies are as follows:

	31 Desember/December 31, 2013	
	Dolar Amerika Serikat (jumlah penuh)/ U.S. Dollar (full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah Equivalent
Aset moneter		
Cash and cash equivalents	103.084.851	1.256.501.251.400
Marketable securities	5.000.000	60.945.000.000
Loans	60.725.747	740.186.134.483
Accrued interest receivable	77.644	946.404.301
Other assets	32.146	391.827.594
Total monetary assets	<u>168.920.388</u>	<u>2.058.970.617.778</u>
Liabilitas moneter		
Accrued expenses	197.669	2.409.390.366
Subordinated loans	166.696.532	2.031.864.023.367
Other payables	1.994	24.310.924
Total monetary liabilities	<u>166.896.194</u>	<u>2.034.297.724.657</u>
Net monetary assets	<u>2.024.194</u>	<u>24.672.893.121</u>
	31 Desember/December 31, 2012	
	Dolar Amerika Serikat (jumlah penuh)/ U.S. Dollar (full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah Equivalent
Aset moneter		
Cash and cash equivalents	81.209.634	785.297.165.423
Accounts receivable	22.000	212.740.000
Total Monetary Assets	<u>81.231.634</u>	<u>785.509.905.423</u>
Liabilitas moneter		
Accrued expenses	304.260	2.942.197.945
Subordinated loans	80.491.186	778.349.766.043
Other payables	68	657.560
Total monetary liabilities	<u>80.795.514</u>	<u>781.292.621.548</u>
Net monetary liabilities	<u>436.120</u>	<u>4.217.283.875</u>

The conversion rate per 1 US Dollar used by the Company on December 31, 2013 and 2012 are Rp 12,189 and Rp 9,670, respectively.

**28. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN**

Perjanjian Pinjaman Subordinasi - Bank Dunia

Pada tanggal 20 April 2011, Perusahaan dan PT SMI telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Subordinasi Bank Dunia dan selanjutnya, pada 25 April 2011 Bank Dunia telah mengeluarkan surat No. CD-185/IIF/IV/2011 yang menyatakan pemenuhan kondisi preseden berlakunya Perjanjian Pinjaman tanggal 15 Januari 2010 antara Republik Indonesia dan Bank Dunia sebesar USD 100.000.000. Selain itu, Bank Dunia menyatakan perjanjian pinjaman menjadi efektif 25 April 2011.

Pada tanggal 29 Maret 2012, Perusahaan menyampaikan surat kepada SMI perihal penyesuaian mata uang dan struktur bunga dalam penerusan pinjaman dari WB.

Pada tanggal 3 Oktober 2012, Menteri Keuangan melalui surat No. S-729/MK.05/2012 yang ditujukan kepada SMI telah menyampaikan persetujuan perihal perubahan mata uang dan struktur suku bunga.

Pada tanggal 14 Desember 2012, Perusahaan dan PT SMI menandatangani Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Pinjaman Subordinasi tertanggal 20 April 2011, yang mengubah beberapa pasal dalam perjanjian sebelumnya di antaranya perubahan suku bunga pinjaman, perubahan tanggal pembayaran pokok dan bunga dan ketentuan Current Ratio sebesar 1,2 dan persyaratan kecukupan modal (*capital adequacy requirement*) sebesar 12%.

Berkaitan dengan perjanjian ini, Perusahaan mengikatkan diri dalam Perjanjian Proyek dengan International Bank For Reconstruction And Development (Grup WB) dan SMI. Dalam Perjanjian Proyek, Perusahaan diwajibkan untuk melakukan kegiatan pembiayaannya dan menyebabkan perusahaan yang dibiayai melaksanakan operasionalnya sesuai dengan Manual Operasi.

Berdasarkan surat No. S-760/PU/2013 tertanggal 30 Oktober 2013 dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Perusahaan memperoleh persetujuan dari WB berkaitan dengan perpanjangan *closing date* pinjaman WB dari semula tanggal 31 Desember 2013 menjadi tanggal 30 Nopember 2015.

**28. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS**

Subordinated Loan Agreement - The World Bank

On April 20, 2011, the Company and PT SMI had signed The World Bank - Subordinated Loan Agreement and subsequently, on April 25, 2011 World Bank has issued letter No. CD-185/IIF/IV/2011 confirming the fulfillment of the conditions precedent to effectiveness of the Loan Agreement dated January 15, 2010 between the Republic of Indonesia and the World Bank in the amount of USD 100,000,000. Furthermore, World Bank declared the Loan Agreement to become effective as of April 25, 2011.

On March 29, 2012, the Company has submitted a letter to SMI regarding adjustment on currency and interest structure for on-lending from WB.

On October 3, 2012, the Minister of Finance through his Letter No. S-729/MK.05/2012 to SMI has approved the adjustment on currency and interest structure.

On 14 December 2012, the Company and PT SMI had signed the Amendment Agreement to Subordinated Loan Agreement dated 20 April 2011, which revised several articles in the previous agreement, amongst others, the change in the interest rate of the loan, changes in the date of principal and interest payments, and requirements of Current Ratio of 1.2 and capital adequacy ratio of 12%.

In relation to this agreement, the Company had entered into Project Agreement with International Bank For Reconstruction And Development (WB Company) and SMI. In the Project Agreement, the Company shall carry out its financing activities and the companies financed to carry out its operation in accordance with the Operation Manual.

Based on letter No. S-760/PU/2014 dated October 30, 2013 from Directorate General Loan Management of Ministry of Finance, the Company has obtained approval from WB regarding the extension of closing date of WB subordinated loan from December 31, 2013 to November 30, 2015.

Perjanjian Pinjaman Subordinasi – ADB

Pada tanggal 20 April 2011 Perusahaan dan SMI telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Subordinasi – ADB dan kemudian pada tanggal 25 April 2011, ADB telah mengeluarkan surat yang menyatakan pemenuhan persyaratan berlakunya perjanjian pinjaman tanggal 20 Januari 2010 antara Republik Indonesia dan ADB sebesar USD 100.000.000. Selain itu, ADB menyatakan bahwa semua kondisi untuk efektivitas pinjaman telah dipenuhi dan menyatakan pinjaman efektif pada tanggal 25 April 2011.

Pada tanggal 29 Maret 2012, Perusahaan menyampaikan surat kepada SMI perihal penyesuaian mata uang dan struktur bunga dalam penerusan pinjaman dari ADB.

Pada tanggal 3 Oktober 2012, Menteri Keuangan melalui surat No. S-729/MK.05/2012 yang ditujukan kepada SMI telah menyampaikan persetujuan perihal perubahan mata uang dan struktur suku bunga.

Pada tanggal 28 November 2012, Perusahaan dan SMI menandatangani Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Pinjaman Subordinasi tertanggal 20 April 2011, yang mengubah beberapa pasal dalam perjanjian sebelumnya di antaranya perubahan suku bunga pinjaman dan ketentuan *Current Ratio* sebesar 1,2 dan persyaratan kecukupan modal (*capital adequacy requirement*) sebesar 12%.

Berkaitan dengan perjanjian ini, Perusahaan mengikatkan diri dalam Perjanjian Proyek dengan ADB dan SMI.

Dalam Perjanjian Proyek, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan berikut, di antaranya:

1. Untuk menjalankan aktivitas pembiayaannya dengan *due diligence* dan efisien serta melakukan praktik administrasi, keuangan, teknik dan lingkungan yang baik.
2. Praktek pengadaan yang sesuai dengan Penuntun Pengadaan ADB.
3. Rencana, spesifikasi, jadwal, metode konstruksi yang sesuai dengan praktik terbaik internasional.
4. Meyakinkan bahwa tujuan dari pinjaman akan tercapai.

Berdasarkan Akta No. 7 tanggal 13 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI, Mkn, Notaris di Jakarta, para pemegang saham secara bulat menyetujui Perusahaan untuk menandatangani bersama SMI, Perjanjian Perubahan terhadap masing-masing Perjanjian Pinjaman Subordinasi dengan ADB dan WB yang berlaku efektif tanggal 30 Nopember 2012.

Subordinated Loan Agreement - ADB

On April 20, 2011, the Company and SMI had signed ADB - Subordinated Loan Agreement and subsequently on April 25, 2011, ADB had issued letter confirming the fulfillment of the conditions precedent to effectiveness of the Loan Agreement dated January 20, 2010 between the Republic of Indonesia and ADB in the amount of USD 100,000,000. Furthermore, ADB declared that all conditions to the effectiveness of the loan had been met and declare that the loan was effective as of April 25, 2011.

On March 29, 2012, the Company has submitted a letter to SMI regarding adjustment on currency and interest structure for on-lending from ADB.

On October 3, 2012, the Minister of Finance through his Letter No. S-729/MK.05/2012 to SMI has approved the adjustment on currency and interest structure.

On November 28, 2012, the Company and SMI had signed the Amendment Agreement to Subordinated Loan Agreement dated April 20, 2011, which revised several articles in the previous agreement, amongst others, the change in the interest rate of the loan and requirements of Current Ratio of 1.2 and capital adequacy ratio of 12%.

In relation to this agreement, the Company has entered into Project Agreement with ADB and SMI.

In the Project Agreement, the Company must fulfill the following requirements, amongst others:

1. Carry out its financing activities with due diligence and efficiency, in accordance with sound administrative, financial, engineering and environmental practices.
2. The procurement is in accordance with ADB's Procurement Guidelines.
3. In accordance with plans, specifications, work schedules and construction methods that meet international best practice.
4. Ensure that the purposes of the loan will be accomplished.

Based on Deed No. 7 dated December 13, 2012, drawn up before Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI, Mkn, notary in Jakarta, the shareholders unanimously approved the Company together with SMI to execute the Amendment of each ADB and WB Subordinated Loan Agreements, respectively, effective on November 30, 2012.

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2013 - Lanjutan

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2013 - Continued

Berdasarkan surat No. S-13/PU/2014 tertanggal 7 Januari 2014 dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Perusahaan memperoleh persetujuan dari ADB berkaitan dengan perpanjangan *closing date* pinjaman ADB dari semula tanggal 31 Desember 2013 menjadi tanggal 31 Desember 2014.

Polis Asuransi

Perusahaan telah memperoleh polis asuransi jenis Bankers Blanket Bond, Comprehensive General Liability, Property All Risk termasuk Gempa Bumi dan Directors and Officers Liability yang mencakup periode sampai 31 Mei 2014 dan dapat diperpanjang kembali.

Perjanjian Para Pendiri

Pada tanggal 30 Juni 2009, seluruh pemegang saham pendiri Perusahaan melakukan perjanjian mengenai pendirian Perusahaan.

- a. Para pemegang saham pendiri bermaksud untuk menjadikan Perusahaan sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur berbadan hukum perseroan terbatas yang sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia.
- b. Para pemegang saham pendiri bermaksud supaya Perusahaan mempunyai modal dasar sebesar Rp 400.000.000.000 dengan modal awal yang ditempatkan sebesar Rp 100.000.000.000 dengan para pemegang saham yang disebut penyerahan awal.

Perjanjian Para Pemegang Saham Awal

Perusahaan bersama-sama dengan para pemegang saham pendiri melakukan perjanjian ini pada 15 Januari 2010.

Para Pemegang Saham Pendiri bermaksud bahwa:

- a. SMI melakukan investasi dalam Perusahaan untuk sejumlah Rp 600.000.000.000 (jumlah mana termasuk penyetoran bagian awal SMI). Sebagai bagian dari komitmen SMI di atas, pada tanggal pengambilan bagian, SMI akan memberikan suatu pinjaman subordinasi yang dapat dikonversi kepada Perusahaan dalam jumlah Rp 559.700.000.000.

Based on letter No. S-13/PU/2014 dated January 7, 2014 from Directorate General Loan Management of Ministry of Finance, the Company has obtained approval from ADB regarding the extension of closing date of ADB subordinated loan from December 31, 2013 to December 31, 2014.

Insurance Policy

The Company has acquired insurance policy for Bankers Blanket Bond, Comprehensive General Liability, Property All Risk including Earthquake and Director and Officer Liability covering the period until May 31, 2014 which can be extended.

The Founders Agreement

On June 30, 2009, all of the Company's founding shareholders entered into an agreement related to the Company's establishment.

- a. The founding shareholders wished to establish the Company as an infrastructure finance company in the form of a limited liability company under the laws of the Republic of Indonesia.
- b. It is the founding shareholders' intention that the Company shall have an authorized share capital of Rp 400,000,000,000, and an initial issued share capital of Rp 100,000,000,000 with the shareholders, known as initial subscription.

The Original Shareholders Agreement

The Company, together with the founding shareholders, entered into this agreement on January 15, 2010.

The Founding Shareholders' intention is that:

- a. SMI made an investment in the Company of Rp 600,000,000,000 (such amount include SMI's initial subscription). As part of the above SMI commitment, SMI will, on the Subscription Date, extend a convertible subordinate loan to the Company in an amount of Rp 559,700,000,000 pursuant to the SMI Convertible Subordinated Loan Agreement.

- b. Setelah pengambilan bagian awal, (i) ADB dan IFC berkomitmen untuk melakukan pengambilan bagian tambahan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam *Founders Agreement* dan perjanjian ini, yang jumlahnya bersama dengan pengambilan bagian awal mereka masing-masing akan berjumlah, dalam hal IFC sampai dengan US\$ 40.000.000 dan dalam hal ADB, sampai dengan US\$ 40.000.000 dan (ii) DEG bermaksud untuk melakukan pengambilan bagian tambahan sesuai dengan syarat dan ketentuan dari *Founders Agreement* dan perjanjian ini, yang jumlahnya bersama dengan pengambilan bagian awalnya, akan berjumlah sampai dengan US\$ 20.000.000.

Para pemegang saham pendiri bermaksud agar para investor swasta dapat mengambil bagian dan/atau membeli saham antara tanggal perjanjian ini dan ulang tahun kelima perjanjian ini sampai dengan batas empat puluh lima persen (45%) dari jumlah seluruh modal saham yang dikeluarkan Perusahaan, dengan ketentuan bahwa batas tersebut tidak berlaku setelah Penawaran Saham Perdana.

Para Pemegang Saham mengetahui bahwa Pasal 11 Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009 Tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ("Peraturan Menkeu") mensyaratkan sehubungan dengan Perusahaan yang akan didirikan berdasarkan Peraturan Menkeu tersebut ("Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur"), (i) modal disetor untuk pendirian Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sedikitnya Rp 100.000.000.000 dan (ii) perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib meningkatkan modal disetornya sedikitnya Rp 2.000.000.000.000 dalam waktu 5 tahun sejak dikeluarkannya surat ijin usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tersebut, kecuali jika peningkatan tersebut tidak dapat dipenuhi karena kondisi pasar dan karenanya perusahaan pembiayaan infrastruktur tersebut harus mengubah rencana peningkatan modal disetor dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Untuk memperjelas pada Perjanjian Para Pendiri atau Perjanjian ini:

1. DEG tidak memiliki janji atau komitmen untuk mengambil bagian atau membayar lebih dari harga pengambilan bagian awalnya (sebagaimana didefinisikan dalam *Founders Agreement*) (mengacu pada Perubahan Perjanjian Pemegang Saham Kedua); dan
2. Setiap investor supranasional memiliki hak dengan pertimbangannya sendiri untuk memberikan suara setuju atau tidak setuju atas setiap pengeluaran efek baru pada setiap rapat umum sehubungan dengan pengeluaran efek baru tersebut.

- b. Subsequent to the initial subscription, (i) ADB and IFC committed to make additional subscription in accordance with the terms and conditions of the founders' agreement and this agreement, which together with their respective initial subscriptions would amount, in the case of IFC, to up to US\$ 40,000,000 and in the case of ADB, to up to US\$ 40,000,000 and (ii) DEG intends to make additional subscriptions in accordance with the term and conditions of the Founders Agreement and this agreement, which together with this initial subscription, would amount to up to US\$ 20,000,000.

It is the founding shareholders' intention that private sector investors may subscribe for and/or acquire shares between the date of this agreement and the fifth anniversary of this agreement up to a limit of forty-five percent (45%) of the total issued share capital of the Company, provided that such limits shall not apply following an Initial Public Offering.

The Shareholders acknowledge that article 11 of Minister of Finance Regulation No. 100/PMK.010/2009 Regarding Infrastructure Finance Company (the "MOF regulation") requires, with respect to a company to be established thereunder (an "Infrastructure Finance Company"), (i) the paid-up capital for the establishment of such Infrastructure Finance Company to be at least Rp 100,000,000,000 and (ii) the Infrastructure Finance Company to increase its paid-up capital to become at least Rp 2,000,000,000,000 within 5 years as of the issuance of its business license, unless such increase cannot be complied due to market condition, in which case the infrastructure finance company should revise its plan for the increase of paid-up capital with the approval of the Minister of Finance.

For the avoidance of doubt, notwithstanding any other provisions of the Founders' Agreement or this agreement:

1. DEG does not have any undertaking or commitment to subscribe and pay more than its initial subscription price (as defined in the Founders Agreement) (refer to Second Amendment of The Shareholders Agreement); and
2. Each supranational investor has the right in its sole discretion to vote in favour of, or against, any issuance of new securities at any general meeting in connection with such issuance of new securities.

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2013 - Lanjutan

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2013 - Continued

Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pemegang Saham

Pada tanggal 20 April 2011, Pemegang Saham Perusahaan menandatangani Keputusan Sirkuler Pemegang Saham ("CROS") tentang Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pemegang Saham tanggal 15 Januari 2010. Selanjutnya pada tanggal yang sama, Perusahaan telah menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pemegang Saham.

Perubahan dan Pernyataan Kembali mengakibatkan dihilangkannya sebuah artikel tentang CSL. Perusahaan telah mengembalikan seluruh dana yang terkait dengan CSL yang sejumlah Rp 559.700.000.000 dalam periode 25 April 2011 sampai 26 April 2011.

Perubahan dan Pernyataan Kembali juga mengakibatkan pengesampingan permanen terhadap Opsi Put. Perubahan dan Pernyataan Kembali menyatakan bahwa dengan efek dari awal dalam waktu satu (1) tahun setelah Tanggal Efektif Amandemen Pertama dan tanggal dimana Investor Supranasional menjadi pemegang saham Perusahaan, Investor Supranasional akan melepaskan hak-hak mereka secara permanen untuk selama Perjanjian ini berlaku untuk melaksanakan Opsi Put berdasarkan Perjanjian ini. Sehingga tidak akan ada hak lebih untuk Put dipertahankan oleh Investor Supranasional satu tahun setelah tanggal 20 April 2011.

Perubahan Perjanjian Pemegang Saham Kedua

Pada tanggal 16 November 2011, para Pemegang Saham Perusahaan menandatangani Perubahan Perjanjian Pemegang Saham Kedua. Selanjutnya pada tanggal yang sama, Perusahaan telah menandatangani Perubahan Perjanjian Pemegang Saham Kedua.

Perubahan Perjanjian Pemegang Saham Kedua mengakibatkan DEG untuk berkomitmen untuk melakukan pengambilan bagian dalam saham Perusahaan yang bersama-sama dengan modal awal yang disetor menjadi sebesar Rp 200.000.000.000.

Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pemegang Saham Ketiga

Pada tanggal 19 Maret 2012, Pemegang Saham Pendiri Perusahaan menandatangani Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Ketiga ("Perjanjian Perubahan Ketiga") terhadap Perjanjian Pemegang Saham Awal tanggal 15 Januari 2010, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 25 April 2011 dan sebagaimana diubah pada tanggal 16 Nopember 2011.

Amendment and Restatement of The Shareholders Agreement

On April 20, 2011, the Shareholders of the Company signed the Circular Resolutions of Shareholders ("CROS") regarding the Amendment and Restatement of the Shareholders Agreement dated January 15, 2010. Subsequently, on the same date, the Company has signed the Amended and Restated Shareholders Agreement.

The amendment and restatement resulted to the omission of an article regarding CSL. The Company has returned to SMI the entire amount related to CSL totaling Rp 559,700,000,000 during the period of April 25, 2011 to April 26, 2011.

The amendment and restatement also resulted in Permanent Waiver of the Put Option. The amendment and restatement stated that with effect from the earlier of the date falling one (1) year after the First Amendment Effective Date and the date on which a Private Sector Investor becomes a shareholder of the Company, the Supranational Investors shall waive their rights, on a permanent basis for so long as this Agreement is in effect, to exercise the Put Option under this Agreement. So that there will be no more right for Put retained by the Supranational Investor one year after April 20, 2011.

Second Amendment of The Shareholders Agreement

On November 16, 2011, the Shareholders of the Company signed the Second Amendment of The Shareholders Agreement. Subsequently, on the same date, the Company has signed the Amended Shareholders Agreement.

The Second Amendment of The Shareholders Agreement resulted to the commitment of DEG to make additional subscription of the Company's share, which together with its initial subscription, would amount to Rp 200,000,000,000.

Third Amendment and Restatement of The Shareholders Agreement

On March 19, 2012, the Founding Shareholders of the Company signed the Third Amendment and Restatement of the Shareholders Agreement (the "Third Amendment Agreement") to the Original Shareholders Agreement dated January 15, 2010, as amended and restated on April 25, 2011 and November 16, 2011.

Perjanjian Ketiga ini memutuskan hal-hal berikut:

- mengubah dan menyatakan kembali Perjanjian Pemegang Saham Awal,
- menyatakan bahwa Perjanjian Para Pendiri diakhiri.

#### Perjanjian Pemesanan Saham

Pada tanggal 19 Maret 2012, Perusahaan dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) menandatangani Perjanjian Pemesanan Saham dimana SMBC sebagai pemesan saham telah setuju untuk mengambil bagian sebanyak 175.000 lembar atau mewakili 14,89% dari saham Perusahaan, mewakili dengan harga sebesar Rp 192.500.000.000 termasuk agio saham sebesar Rp 17.500.000.000. SMBC telah menyetorkan pemesanan saham tersebut pada tanggal 26 Maret 2012.

#### Akte Penundukkan

Pada tanggal 26 Maret 2012, Perusahaan dan SMBC menandatangani Akte Penundukkan dimana SMBC sebagai pemegang saham yang baru berjanji kepada Perusahaan sebagai trustee untuk pihak-pihak lain yang pada saat ini atau yang setelah ini menjadi terikat pada Perjanjian Pemegang Saham dan kepada Perusahaan sendiri untuk menundukkan diri dan terikat terhadap semua tugas, beban dan kewajiban para Pemegang Saham berdasarkan ketentuan Perjanjian Pemegang Saham.

#### 29. REKONSILIASI INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD (IFRS)

Perusahaan melakukan rekonsiliasi laporan keuangan Perusahaan per 31 Desember 2013 dan 2012 dari Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ke IFRS. Tidak terdapat perbedaan antara laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan IFRS.

The Third Amendment Agreement resulted the following decisions:

- amended and restated the Original Shareholders Agreement,
- stated that the Founders Agreement shall be terminated.

#### Share Subscription Agreement

On March 19, 2012, the Company and Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) signed a Share Subscription Agreement wherein SMBC as the share subscriber has agreed to subscribe 175,000 shares, representing 14.89% of the total issued shares of the Company at the price of Rp 192,500,000,000 which included an additional paid-up capital premium of Rp 17,500,000,000. SMBC has fully paid the shares subscription on March 26, 2012.

#### Deed of Adherence

On March 26, 2012, the Company and SMBC signed Deed of Adherence where SMBC as the new shareholder covenants to the Company as trustee for all other persons who are at present or who may hereafter become bound by the Shareholders Agreement, and to the Company itself to adhere to and be bound by all the duties, burdens and obligations of a Shareholder imposed pursuant to the provisions of the Shareholders Agreement.

#### 29. INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD (IFRS) RECONCILIATION

The Company reconciled the financial statements as of December 31, 2013 and 2012 from Indonesian Financial Accounting Standard to IFRS. There is no difference between financial statements prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standard and IFRS.

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
 31 DESEMBER 2013 - Lanjutan

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
 FOR THE YEAR ENDED  
 DECEMBER 31, 2013 - Continued

**30. KATEGORI DAN KELAS INSTRUMEN KEUANGAN**

**30. CATEGORIES AND CLASSES OF FINANCIAL INSTRUMENTS**

31 Desember/ December 31, 2013					
	Aset dimiliki hingga jatuh tempo/ Assets held to maturity	Aset pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ Assets at fair value through profit and loss	Aset tersedia untuk dijual/ Assets available-for-sale	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ Liabilities at amortized costs	Jumlah/ Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
<b>Aset keuangan</b>					<b>Financial assets</b>
Kas dan setara kas	2.461.932.586.423	-	-	-	Cash and cash equivalents
Surat berharga	-	60.945.000.000	250.896.540.124	54.490.000.000	Marketable securities
Pinjaman diberikan	990.304.285.244	-	-	-	Loans
Piutang bunga	4.105.090.429	-	-	-	Accrued interest receivable
Piutang lain-lain	32.795.386	-	-	-	Other receivables
Aset lain-lain	703.099.272	-	-	-	Other assets
<b>Jumlah</b>	<b>3.457.077.856.754</b>	<b>60.945.000.000</b>	<b>250.896.540.124</b>	<b>54.490.000.000</b>	<b>1.772.035.035.976</b>
					Total
<b>Liabilitas keuangan</b>					<b>Financial liabilities</b>
Utang lain-lain	-	-	-	(1.733.502.210)	Other payables
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	-	-	-	(17.776.835.325)	Accrued expenses and other liabilities
Pinjaman subordinasi	-	-	-	(2.031.864.023.367)	Subordinated loan
<b>Jumlah</b>	<b>3.457.077.856.754</b>	<b>60.945.000.000</b>	<b>250.896.540.124</b>	<b>(2.051.374.360.902)</b>	<b>1.772.035.035.976</b>
					Total

31 Desember/ December 31, 2012				
	Aset pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ Assets at fair value through profit and loss		Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ Liabilities at amortized costs	Jumlah/ Total
	Rp	Rp	Rp	Rp
<b>Aset keuangan</b>				<b>Financial assets</b>
Kas dan setara kas	1.783.281.186.137	-	-	Cash and cash equivalents
Surat berharga	-	152.486.732.750	-	Marketable securities
Piutang usaha	644.647.850	-	-	Accounts receivable
Piutang bunga	2.311.876.367	-	-	Accrues interest receivable
Piutang lain-lain	76.110.646	-	-	Other receivables
Aset lain-lain	609.195.657	-	-	Other assets
<b>Jumlah</b>	<b>1.786.923.016.657</b>	<b>152.486.732.750</b>	<b>(790.185.078.093)</b>	<b>1.149.224.671.314</b>
				Total
<b>Liabilitas keuangan</b>				<b>Financial liabilities</b>
Utang lain-lain	-	-	(1.672.882.680)	Other payables
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	-	-	(10.162.429.370)	Accrued expenses and other liabilities
Pinjaman subordinasi	-	-	(778.349.766.043)	Subordinated loan
<b>Jumlah</b>	<b>1.786.923.016.657</b>	<b>152.486.732.750</b>	<b>(790.185.078.093)</b>	<b>1.149.224.671.314</b>
				Total

**31. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL**

a. Manajemen Risiko Modal

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup. Struktur modal Perusahaan yang dicatat dalam ekuitas pemegang saham terdiri dari modal ditempatkan dan disetor (Catatan 17), agio saham, laba komprehensif lain dan laba ditahan. Sebagian besar modal Perusahaan saat ini ditempatkan dalam bentuk kas dan setara kas (Catatan 5), surat berharga (Catatan 6) dan pinjaman diberikan (Catatan 7)

Rasio persyaratan kecukupan modal pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012	
	Rp	Rp	
Kas dan setara kas (20%)	492.386.517.285	356.656.237.227	Cash and cash equivalents (20%)
Surat berharga (20%)	73.266.308.025	30.497.346.550	Marketable securities (20%)
Pinjaman diberikan (100%)	1.000.372.973.865	-	Loans (100%)
Aset lainnya dikurangi aset pajak tangguhan (100%)	16.447.840.501	15.357.869.194	Other assets except deferred tax assets (100%)
Aset tertimbang menurut risiko	1.582.473.639.676	402.511.452.971	Risk weighted assets
Aset tertimbang menurut risiko untuk kredit (1,25%)	19.780.920.496	5.031.393.162	Risk weighted assets for credit risk (1.25%)
Jumlah aset tertimbang menurut risiko	<u>1.602.254.560.172</u>	<u>407.542.846.133</u>	Total risk weighted assets
 Tier 1 Modal	1.192.500.000.000	1.192.500.000.000	Tier 1 Capital
Tier 2 Modal (50%)	596.250.000.000	596.250.000.000	Tier 2 Capital (50%)
Rugi tahun sebelumnya	(18.837.354.088)	(33.163.716.758)	Previous year's loss
Laba tahun berjalan (50%)	13.768.276.229	816.535.619	Current year profit (50%)
Jumlah modal	<u>1.783.680.922.141</u>	<u>1.756.402.818.861</u>	Total capital
 Rasio Persyaratan Kecukupan Modal	<u>111,32%</u>	<u>430,97%</u>	Capital Adequacy Ratio

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko mata uang asing, tingkat bunga, kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.

**31. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT**

a. Capital Risk Management

The Company manages capital risk to ensure that it will be able to continue as going concern. The Company's capital structure recorded as shareholders' equity consists of capital stock (Note 17), additional paid-in capital, other comprehensive income and retained earnings. The capital of the Company is mainly placed in form of cash and cash equivalents (Note 5), marketable securities (Note 6) and loans (Note 7).

The capital adequacy ratio as of December 31, 2013 and 2012 are as follows:

b. Financial risk management objectives and policies

The Company's overall financial risk management and policies seek to ensure that adequate financial resources are available for operation and development of its business, while managing its exposure to foreign exchange risk, interest rate risk, credit and liquidity risks. The Company operates within defined guidelines that are approved by the Board of Commissioners.

**i. Manajemen risiko mata uang asing**

Perusahaan terekspos terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing terutama dikarenakan pinjaman subordinasi dalam denominasi USD dan dalam hal yang lebih kecil terkait dengan beberapa transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing atas pendapatan dan beban usaha.

Perusahaan mengelola eksposur terhadap mata uang asing dengan menjaga, se bisa mungkin, keseimbangan komposisi aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing. Posisi mata uang asing bersih dikelola pada tingkat yang rendah bila dibandingkan dengan struktur permodalan Perusahaan. Jumlah eksposur mata uang asing bersih Perusahaan pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 27.

Analisis sensitivitas mata uang asing

Perusahaan terutama terekspos terhadap Dolar Amerika Serikat.

Tabel berikut merinci sensitivitas Perusahaan terhadap peningkatan dan penurunan 10% dalam Rp terhadap mata uang asing yang relevan. 10% adalah tingkat sensitivitas yang digunakan ketika melaporkan secara internal risiko mata uang asing kepada para karyawan kunci, dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar valuta asing. Analisis sensitivitas hanya mencakup item mata uang asing moneter yang ada dan menyesuaikan translasinya pada akhir periode untuk perubahan 10% dalam nilai tukar mata uang asing. Analisis sensitivitas meliputi pinjaman diberikan Perusahaan kepada nasabah serta pinjaman eksternal yang didapatkan oleh Perusahaan dimana denominasi pinjaman adalah dalam mata uang selain mata uang fungsional dari pemberi pinjaman atau peminjam. Jumlah positif di bawah ini menunjukkan peningkatan laba atau ekuitas dimana Rp menguat 10% terhadap mata uang yang relevan. Untuk pelemahan 10% dari Rp terhadap mata uang yang relevan, akan ada dampak yang dapat dibandingkan pada laba atau ekuitas, dan saldo di bawah ini akan menjadi negatif.

**i. Foreign currency risk management**

The Company is exposed to the effect of foreign currency exchange rate fluctuation mainly from subordinated loan denominated in USD and to a smaller extent on some of its foreign currency denominated transactions in its revenues and operating expenses.

The Company manages the foreign currency exposure by maintaining, as far as possible, balance composition between financial assets and liabilities in foreign currency. The net open foreign currency position is managed at a low level compared to the Company's capital. The Company's net open foreign currency exposure as of reporting date is disclosed in Note 27.

Foreign currency sensitivity analysis

The Company is mainly exposed to the U.S. Dollar.

The following table details the Company's sensitivity to a 10% increase and decrease in the Rp against the relevant foreign currencies. 10% is the sensitivity rate used when reporting foreign currency risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items and adjusts their translation at the period end for a 10% change in foreign currency rates. The sensitivity analysis includes loans disbursed by the Company to customers and external borrowings obtained by the Company where the denomination of the loan is in a currency other than the functional currency of the lender or the borrower. A positive number below indicates an increase in profit or equity where the Rp strengthens 10% against the relevant currency. For a 10% weakening of the Rp against the relevant currency, there would be a comparable impact on the profit or equity, and the balances below would be negative.

2013	US\$ dampak/ <i>impact</i> Rp	2013
Laba rugi	2.467.290.067 (i)	Profit or loss
Ekuitas	2.467.290.067 (i)	Equity
2012	US\$ dampak/ <i>impact</i> Rp	2012
Laba rugi	(273.246.157) (i)	Profit or loss
Ekuitas	(273.246.157) (i)	Equity
(i) Hal ini terutama disebabkan oleh eksposur terhadap saldo piutang dan utang Perusahaan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat pada akhir periode pelaporan.		(i) This is mainly attributable to the exposure outstanding on U.S. Dollar denominated receivables and payables in the Company at the end of the reporting period.
Sensitivitas Perusahaan terhadap mata uang asing telah meningkat selama tahun berjalan terutama disebabkan oleh penambahan pinjaman subordinasi dalam Dolar Amerika Serikat dan peningkatan aset keuangan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat yang menghasilkan piutang dan utang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat yang lebih tinggi.		The Company's sensitivity to foreign currency has increased during the current year mainly due to subordinated loan denominated in U.S. Dollar and the increase in financial assets in U.S. Dollar which has resulted in higher U.S. Dollar denominated receivables and payables.
Menurut pendapat manajemen, analisis sensitivitas tidak representatif dari risiko valuta asing melekat karena eksposur pada akhir periode pelaporan tidak mencerminkan eksposur selama tahun berjalan.		In management's opinion, the sensitivity analysis is unrepresentative of the inherent foreign exchange risk because the exposure at the end of the reporting period does not reflect the exposure during the year.
<b>ii. Risiko harga lain</b>		<b>ii. Other price risks</b>
Perusahaan terekspos terhadap risiko fluktuasi harga pasar surat berharga yang diklasifikasi pada nilai wajar melalui laba rugi dan tersedia untuk dijual.		The Company is exposed to risk of fluctuation in quoted price of marketable securities classified at fair value through profit or loss (FVTPL) and available for sale (AFS).
<u>Analisis sensitivitas harga surat berharga</u>		<u>Marketable securities price sensitivity analysis</u>
Analisis sensitivitas berikut ditentukan berdasarkan eksposur terhadap risiko harga surat berharga pada akhir periode pelaporan.		The sensitivity analyses below have been determined based on the exposure to marketable securities price risks at the end of the reporting period.
Jika harga surat berharga naik/turun 2%:		If marketable securities prices had been 2% higher/lower:
- Laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 akan meningkat/menurun sebesar Rp 4.986.160.000 yang berasal dari perubahan nilai wajar investasi yang diklasifikasikan FVTPL ; dan		- Net profit for the year ended December 31, 2013 would increase/decrease by Rp 4,986,160,000 as a result of the changes in fair value of FVTPL securities; and

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2013 - Lanjutan

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2013 - Continued

- Pendapatan (rugi) komprehensif lain akan meningkat/menurun sebesar Rp 1.089.800.000 yang berasal dari perubahan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual.

Sensitivitas Perusahaan terhadap harga surat berharga tidak berubah signifikan dari tahun sebelumnya.

### iii. Manajemen risiko tingkat bunga

Perusahaan terekspos terhadap dampak perubahan tingkat bunga terutama karena adanya dampak perubahan terhadap pinjaman yang mempunyai tingkat bunga mengambang, serta pinjaman yang diberikan maupun aktivitas investasi atas kelebihan dana (*idle funds*) yang tersedia akibat perubahan bunga di pasar.

Sedapat mungkin Perusahaan menyesuaikan bunga yang diberikan untuk pinjaman (baik tetap ataupun mengambang) dengan bunga sumber pembiayaannya. Sedangkan untuk investasi atas kelebihan dana (*idle funds*) yang tersedia, risiko tingkat suku bunga dikelola melalui pemantauan terhadap limit durasi secara portfolio yang dilakukan berkala.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Perusahaan terhadap risiko tingkat bunga.

- Other comprehensive income (loss) would increase/decrease by Rp 1,089,800,000 as a result of the changes in fair value of available for sale shares.

The Company's sensitivity to marketable securities prices has not changed significantly from the previous year.

### iii. Interest rate risk management

The Company is exposed to changes in interest rates mainly due to the impact such changes may have on borrowings that carry floating interest rate, and loans as well as investment activity on excess idle funds, as a result of changes in market interest rate.

As much as practicable, the Company matches the interest rate for loans it extended (whether floating or fixed) with that of the funding source. Whereas for idle funds investment, the interest rate risk is managed through periodical monitoring against the duration limit on portfolio basis.

The table below summarises the Company's exposures to interest rate risk.

31 Desember/December 31, 2013						
	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ Tidak lebih dari 3 bulan/ Not more than 3 months	More than 3 months but less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Total/ Total
	Suku bunga mengambang/floating interest rate					
<b>Aset keuangan</b>						
Kas dan setara kas	2.461.932.586.423	-	-	-	-	2.461.932.586.423
Surat berharga	-	-	-	366.331.540.124	-	366.331.540.124
Pinjaman diberikan - bersih	-	-	990.304.285.244	-	-	990.304.285.244
Piutang bunga	-	-	-	-	4.105.090.429	4.105.090.429
Piutang lain-lain	-	-	-	-	32.795.386	32.795.386
Aset lain-lain	-	-	-	-	703.099.272	703.099.272
<b>Total aset keuangan</b>	<b>2.461.932.586.423</b>		<b>990.304.285.244</b>	<b>366.331.540.124</b>	<b>4.840.985.087</b>	<b>3.823.409.396.878</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>						
Utang lain-lain	-	-	-	-	1.733.502.210	1.733.502.210
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	-	-	-	-	17.776.835.325	17.776.835.325
Pinjaman subordinasi	-	-	2.031.864.023.367	-	-	2.031.864.023.367
<b>Total liabilitas keuangan</b>	<b>-</b>		<b>2.031.864.023.367</b>		<b>19.510.337.535</b>	<b>2.051.374.360.902</b>
Gap repricing suku bunga - neto	<b>2.461.932.586.423</b>		<b>(1.041.559.738.123)</b>	<b>366.331.540.124</b>	<b>(14.669.352.448)</b>	<b>1.772.035.035.976</b>
						Net interest repricing gap

Analisis sensitivitas suku bunga

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga untuk instrumen non-derivatif pada akhir periode pelaporan. Untuk liabilitas tingkat bunga mengambang, analisis tersebut disusun dengan asumsi jumlah liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan itu terutang sepanjang tahun. Kenaikan atau penurunan 50 basis poin digunakan ketika melaporkan risiko suku bunga secara internal kepada karyawan kunci dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga.

Jika suku bunga lebih tinggi/rendah 50 basis poin dan semua variabel lainnya tetap konstan, Perusahaan:

- laba untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 akan turun/naik masing-masing sebesar Rp 7.542.298.514 dan Rp 187.338.651. Hal ini terutama disebabkan oleh eksposur Perusahaan terhadap suku bunga atas pinjaman diberikan dan pinjaman subordinasi dengan suku bunga variabel; dan
- pendapatan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 akan turun/naik sebesar Rp 3.061.235.955, terutama sebagai akibat dari perubahan nilai wajar atas instrumen efek tersedia untuk dijual dengan tingkat bunga tetap.

**iv. Manajemen risiko kredit**

Risiko kredit Perusahaan terutama melekat pada rekening bank, penempatan pada surat berharga serta pinjaman yang diberikan kepada debitur/perusahaan proyek.

Risiko kredit mengacu pada risiko pihak rekanan yang gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan.

Dalam mengelola dan memperkecil risiko kredit pada penempatan dana di rekening bank, Perusahaan hanya menempatkan dananya pada institusi keuangan yang memiliki peringkat yang layak dan terpercaya.

Interest rate sensitivity analysis

The sensitivity analyses below have been determined based on the exposure to interest rates for non-derivative instruments at the end of the reporting period. For floating rate liabilities, the analysis is prepared assuming the amount of the liability outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the whole year. A 50 basis point increase or decrease is used when reporting interest rate risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in interest rates.

If interest rates had been 50 basis points higher/lower and all other variables were held constant, the Group:

- profit for the year ended December 31, 2013 and 2012 would decrease/increase by Rp 7,542,298,514 and Rp 187,338,651, respectively. This is mainly attributable to the Company's exposure to interest rates on its variable rate loans and subordinated loan; and
- other comprehensive income for the year ended December 31, 2013 would decrease/increase by Rp 3,061,235,955, mainly as a result of the changes in the fair value of available-for-sale fixed rate instruments.

**iv. Credit risk management**

The Company's credit risk is primarily attributed to its cash in banks, placement in marketable securities and loans to debtors/project companies.

Credit risk refers to the risk that counterparty will default on its contractual obligation resulting in a loss to the Company.

In order to manage and minimize credit risk on funds placement at bank accounts, the Company only places its funds with credit worthy financial institutions that have sufficient credit rating.

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
 31 DESEMBER 2013 - Lanjutan

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
 FOR THE YEAR ENDED  
 DECEMBER 31, 2013 - Continued

Berkaitan dengan pinjaman diberikan, keputusan untuk memberikan kredit kepada debitur/perusahaan proyek dilakukan melalui proses kredit yang ekstensif yang membutuhkan penilaian, evaluasi, dan persetujuan dari komite investasi dari Direksi maupun Dewan Komisaris.

Untuk aktivitas investasi atas kelebihan dana (*idle funds*) yang tersedia, Perusahaan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan konservatif dimana Perusahaan hanya melakukan penempatan pada surat berharga dengan *underlying investment* yang mendapatkan rating kredit yang layak yaitu minimal dengan peringkat lokal AA atau yang setara.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian penurunan nilai mencerminkan eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit.

In relation to loans, a decision to provide loans to debtors/project companies is made after going through extensive credit process requiring rigorous assessment, evaluation, and approval process from investment committees of Board of Directors and Board of Commissioners.

For its investment activity on excess idle funds, the Company always implements prudent and conservative principles where the Company only invests its funds on assets with underlying investment that has sufficient credit rating of minimal AA local rating or equivalent.

The carrying amount of financial assets recorded in the financial statements, net of any allowance for impairment losses represents the Company's exposure to credit risk.

	31 Desember/ December 31, 2013	Rp
Kas dan setara kas	2.461.932.586.423	Cash and cash equivalents
Surat berharga	366.331.540.124	Marketable securities
Pinjaman diberikan	990.304.285.244	Loans
Piutang bunga	4.105.090.429	Accrued interest receivable
Piutang lain-lain	32.795.386	Other receivables
Aset lain-lain	<u>703.099.272</u>	Other assets
Jumlah	<u>3.823.409.396.878</u>	Total

Pada tanggal 31 Desember 2013, eksposur maksimal risiko kredit sebelum agunan yang diterima atau perangkat kredit lain adalah ekuivalen dengan jumlah tercatat aset keuangan Perusahaan. Agunan yang diterima dan perangkat kredit lain dijelaskan di Catatan 7.

As of December 31, 2013, the maximum exposure to credit risk before collateral held or other credit enhancements is equivalent to the carrying amounts to the Company's financial assets. The collateral and other credit enhancements are described in Note 7.

#### v. Manajemen risiko likuiditas

Resiko likuiditas terutama dari pendanaan umum operasi Perusahaan. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan simpanan, fasilitas pinjaman dan dengan terus menerus memonitor perkiraan dan arus kas aktual dan mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Perusahaan juga melakukan monitor secara berkala posisi likuiditas terhadap limit maksimal.

Perusahaan memelihara kecukupan dana untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang berkelangsungan.

#### v. Liquidity risk management

Liquidity risk arises from general funding of the Company's operations. The Company manages liquidity risk by maintaining adequate reserves, borrowing facilities and by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities. The Company also monitors the liquidity position against maximum limit.

The Company maintains sufficient funds to finance its ongoing working capital requirements.

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
 31 DESEMBER 2013 - Lanjutan

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
 FOR THE YEAR ENDED  
 DECEMBER 31, 2013 - Continued

Profil jatuh tempo dari aset keuangan (tanpa memperhitungkan penyisihan penurunan nilai) dan liabilitas keuangan per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

The maturities profile of financial assets (without considering the provision for impairment losses) and financial liabilities as of December 31, 2013 is as follows:

	31 Desember/December 31, 2013 (dalam jutaan Rupiah/in million of Rupiah)							
	0-3 bulan/ 0-3 months	>3-6 bulan/ >3-6 months	>6-12 bulan/ >6-12 months	>1-3 tahun/ >1-3 years	>3-5 tahun/ >3-5 years	>5-10 tahun/ >5-10 years	>10 tahun/ > 10 years	Jumlah/ Total
<b>Aset keuangan</b>								
Kas dan setara kas	2.461.933	-	-	-	-	-	-	2.461.933
Surat berharga	-	201.197	49.700	-	-	-	-	250.897
Pinjaman diberikan	8.689	3.831	68.058	196.869	497.355	146.140	72.547	993.489
Piutang bunga	3.699	406	-	-	-	-	-	4.105
Piutang lain-lain	33	-	-	-	-	-	-	33
Aset lain-lain	703	-	-	-	-	-	-	703
	2.475.056	205.434	117.758	196.869	497.355	146.140	72.547	3.711.159
<b>Liabilitas keuangan</b>								
Utang lain-lain	1.734	-	-	-	-	-	-	1.734
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	17.777	-	-	-	-	-	-	17.777
Pinjaman subordinasi	8.136	-	9.513	43.052	71.308	403.651	1.496.205	2.031.864
	27.647	-	9.513	43.052	71.308	403.651	1.496.205	2.051.375
Selisih jatuh tempo	2.447.410	205.434	108.245	153.817	426.047	(257.511)	(1.423.658)	1.659.784
	<b>Financial assets</b>							
	Cash and cash equivalents							
	Marketable securities							
	Loans							
	Accrued interest receivable							
	Other receivables							
	Other assets							
	<b>Financial liabilities</b>							
	Other payables							
	Accrued expenses and other liabilities							
	Subordinated loan							
	<b>Maturity gap</b>							

c. Nilai wajar instrumen keuangan

Manajemen berpendapat bahwa nilai aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya baik yang jatuh tempo dalam jangka pendek atau yang dibawa berdasarkan tingkat suku bunga pasar.

Asumsi signifikan yang digunakan dalam menentukan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan ditetapkan di bawah ini.

Pengukuran nilai wajar diakui dalam laporan posisi keuangan

Tabel berikut ini memberikan analisis dari instrumen keuangan pada tanggal 31 Desember 2013 yang diukur setelah pengakuan awal sebesar nilai wajar, dikelompokkan ke Tingkat 1 sampai 3 didasarkan pada sejauh mana nilai wajar diamati.

- Tingkat 1 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari harga kuotasi (tak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Tingkat 2 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga).

c. Fair value of financial instruments

Management believes that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost in the financial statements, approximate their fair values either because of their short-term maturities or their market rates of interest.

The significant assumptions used in determining the fair value of financial assets and liabilities are set out below.

Fair value measurements recognised in the statements of financial position

The following table provides an analysis of financial instruments as of December 31, 2013 that are measured subsequent to initial recognition at fair value, grouped into Levels 1 to 3 based on the degree to which the fair value is observable.

- Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2013 - Lanjutan

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2013 - Continued

- Tingkat 3 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).
- Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

	31 Desember/December 31, 2013			
	Tingkat 1/ Level 1 Rp	Tingkat 2/ Level 2 Rp	Tingkat 3/ Level 3 Rp	Jumlah/ Total Rp
<u>Aset keuangan tersedia untuk dijual</u>				
Surat berharga	54.490.000.000	-	-	54.490.000.000
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi</u>				
Surat berharga	250.896.540.124	-	-	250.896.540.124
Jumlah	305.386.540.124	-	-	305.386.540.124
				<u>Financial asset at available for sale</u>
				Marketable securities
				<u>Financial asset at FVTPL</u>
				Marketable securities
				Total

Tidak ada transfer antara tingkat 1 dan 2 pada tahun berjalan.

There were no transfers between level 1 and 2 during the year.

32. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS INVESTASI NONKAS

32. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES ON NONCASH INVESTING ACTIVITIES

	2013 Rp	2012 Rp	
Kenaikan (penurunan) surat berharga FVTPL dari perubahan nilai wajar	(710.334.876)	801.045.250	Increase (decrease) of marketable securities FVTPL from changes of fair value
Kenaikan surat berharga tersedia untuk dijual dari perubahan nilai wajar	4.164.300.000	-	Increase of marketable securities available for sale from changes of fair value

33. KEJADIAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

- Pada tanggal 26 Desember 2013 Bapak Kartika Wirjoatmodjo telah mengundurkan diri sebagai Presiden Direktur Perusahaan dan berlaku efektif sejak tanggal 3 Januari 2014.
- Pada tanggal 10 Januari 2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerima perubahan Anggaran Dasar berdasarkan surat No. AH-AHU.01.10-01269 yang memungkinkan Perusahaan mencatat uang muka modal saham dipesan menjadi modal saham.
- Pada tanggal 14 Januari 2014, Bapak Arisudono Soerono telah ditunjuk oleh pemegang saham untuk merangkap sebagai Presiden Direktur sementara hingga pengganti Bapak Kartika Wirjoatmodjo ditentukan. Perubahan ini telah disahkan dalam Akta No. 7 tanggal 20 Januari 2014 yang dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., Mkn., notaris di Jakarta.

33. SUBSEQUENT EVENTS

- On December 26, 2013, Mr. Kartika Wirjoatmodjo has resigned from his position as President Director of the Company effective January 3, 2014.
- On January 10, 2014, the Minister of Law and Human Rights accepted the changes in Articles of Association based on letter No. AH-AHU.01.10-01269 which enables the Company to record advances for capital stock subscription as capital stock.
- On January 14, 2014, Mr. Arisudono Soerono was appointed by the shareholders to concurrently act as President Director of the Company until a suitable replacement of Mr. Kartika Wirjoatmodjo has been done. This change was stipulated under Deed No. 7 dated January 20, 2014, of Utiek R. Abdurachman, SH., MLI, Mkn., notary in Jakarta.

- d. Pada tanggal 25 Pebruari 2014, pemegang saham sepakat untuk mengangkat Bapak Sukatmo Padmosukarso sebagai Presiden Direktur baru Perusahaan yang berlaku efektif sejak tanggal 3 Maret 2014. Pengangkatan ini disetujui melalui keputusan sirkuler para pemegang saham (CRoS) No. 002/IIF/SHR-RES/II/2014 tertanggal 25 Pebruari 2014.

#### 34. REKLASIFIKASI AKUN

Manajemen telah mereklasifikasi beberapa akun dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan untuk tahun berakhir 31 Desember 2013 untuk tujuan perbandingan.

Berikut ini ringkasan akun signifikan dalam laporan keuangan 2012 sebelum dan sesudah reklassifikasi:

- d. On February 25, 2014, the shareholders agreed to appoint Mr. Sukatmo Padmosukarso as new President Director of the Company effective as of March 3, 2014. This appointment was stipulated under Circular Resolution of Shareholders (CRoS) No. 002/IIF/SHR-RES/II/2014 dated February 25, 2014.

#### 34. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Management has reclassified certain accounts in the financial statements for the year ended December 31, 2012 to conform with the year ended December 31, 2013 financial statements presentation for comparability purpose.

Following is summary of significant accounts in the 2012 financial statements before and after the reclassifications:

	2012		
	Sebelum direklasifikasi/ As previously reported	Reklasifikasi/ Reclassification	Setelah direklasifikasi/ As reclassified
<b>LIABILITAS</b>			
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	10.895.953.145	(733.523.775)	10.162.429.370
Pinjaman subordinasi	777.616.242.268	733.523.775	778.349.766.043
<b>EKUITAS</b>			
Rugi komprehensif lain	(84.678.666)	84.678.666	-
Akumulasi kerugian	(18.837.354.088)	(84.678.666)	(18.922.032.754)
<b>LIABILITIES</b>			
Accrued expenses and other liabilities			
Subordinated loan			
<b>EQUITY</b>			
Other comprehensive loss			
Deficit			

#### 35. PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan dari halaman 3 sampai 62 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 28 Pebruari 2014.

#### 35. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the financial statements on pages 3 to 62 were the responsibilities of the management, and were approved by the Directors and authorized for issue on February 28, 2014.

\*\*\*\*\*



### **PT Indonesia Infrastructure Finance**

The Energy Building 15th Floor, Sudirman Central Business District, Lot. 11A  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia  
Phone: 62-21-2991 5060, Fax : 62-21-2991 5061  
Email: [info@iif.co.id](mailto:info@iif.co.id)  
Website: [www.iif.co.id](http://www.iif.co.id)